

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
Volume 13 No 3 September 2014
ISSN 1412 - 6451

Daftar Isi

Editorial

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Evaluasi Program Bedah Kampung
<i>Evaluation on Bedah Kampung Program</i>
(Achmadi Jayaputra) | 225 - 235 |
| 2. | Kuasa Napza Atas Logika
Fenomena Sosial Penyebab Penyalahgunaan Zat Adiktif
<i>The Power of Drugs on Logic</i>
<i>The Couse of Drugs Abuser Phenomena</i>
(Sunit Agus Tri Cahyono) | 236 - 250 |
| 3. | Dampak Asistensi Sosial terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia
<i>The Impact of Social Assistance toward Aged Social Welfare</i>
(Ruaida Murni) | 251 - 262 |
| 4. | Dampak Keberadaan Minimarket terhadap Kesejahteraan Pedagang Kecil
<i>The Impact of Minimarket Existence towards Small Vendors Welfare</i>
(Tyas Eko Raharjo F) | 263 - 278 |
| 5. | Keterlibatan Orangtua dalam Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
<i>Parent Commitment in Children Early Education</i>
(Ikawati) | 279 - 293 |
| 6. | Telaah Kebijakan:
Pemenuhan Kebutuhan Fisik Minimum Penerima Manfaat dalam Panti Sosial
<i>Policy Review:</i>
<i>Phisical Need Minimum of Beneficiaries in Social Institution</i>
(B Mujiyadi dan Nunung Unayah) | 294 - 306 |
| 7. | Model Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendekatan Kredit Berskala Mikro
Studi Kasus Keberdayaan Kube di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten
<i>Community Empowerment Model through Micro Scale Credit</i>
<i>An Empowerment Case Study in Pandeglang Regency Banten Province</i>
(Tri Gutomo dan Suyanto) | 307 - 318 |
| 8. | Kebutuhan Pelayanan Sosial Derita Ganda Korban Pascaerupsi Gunung Merapi
<i>Social Service Needs for Double-Misery Victims of Merapi Mountain Post-eruption</i>
(Siti Wahyu Iryani) | 319 - 330 |

Editorial

Edisi JPKS volume 13 nomor 3 dibuka dengan evaluasi program bedah kampung oleh Achmadi Jayaputra, disusul oleh Sunit Agus Tri Cahyono dengan kuasa napza atas logika. Dampak asistensi sosial terhadap kesejahteraan sosial lanjut usia dikemukakan oleh Ruaida Murni, Tyas Eko Raharjo F. melakukan telaah tentang dampak keberadaan minimarket terhadap kesejahteraan pedagang kecil. Ikawati dari aspek lain membahas tentang keterlibatan orang tua dalam kegiatan pendidikan anak usia dini (PAUD), sementara B Mujiyadi dan Nunung Unayah mengungkapkan telaah kebijakan tentang pemenuhan kebutuhan fisik minimum penerima manfaat dalam panti sosial. Tri Gutomo dan Suyanto menyajikan model pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan kredit berskala mikro, ditutup dengan kajian tentang kebutuhan pelayanan sosial derita ganda korban pascaerupsi Gunung Merapi, oleh Siti Wahyu Iryani.

dari Redaksi

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial

ISSN 1412 - 6451

Vol 13 No 3 September 2014

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa ijin dan biaya
Keywords are extracted from articles. Abstract may be reproduced without permission and cost

Akhmat Achmadi Jayaputra (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial)

Evaluasi Program Bedah Kampung

Evaluation on Bedah Kampung Program

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 13 No 3 September 2014, hal 225 - 235

Bedah Kampung Program is an integrated poverty reduction efforts including behaviour change, improvement of social relations, meeting the needs of the home and the environment, as well as increasing economic status of the poor. The research question is how the policy of the Ministry of Social Affairs in Bedah Kampung Program goes? The research goal is to understand and describe Bedah Kampung Program Policy and factors that affect the implementation. The method used in this research is comparative analysis of social reality between empiric conditions with ideal as guideline by Bedah Kampung Program in 2012. Sources of data obtained from stakeholders or the implementors of the Ministry of Social Affairs Program, local social agents, elements of such a companion, community leaders, and beneficiaries. Research sites in Pandeglang (Banten) and Magelang (Central Java). The results show that Bedah Kampung Program began in 2012. The program actually has been around since the 1970s, the last program was called Social Rehabilitation Program, began in 2006. Home improvement target was 15,000 housing units and environmental facilities. Until 2011 had been repaired 3,043 houses and 25 environmental facilities. In 2012, already covered 24 regencies/municipalities of 2,140 housing units and 50 environmental facilities. So far, the program has been perceived benefits because it is supported with funds from the state budget, local budget, people who care, and the participation of community in the form of mutual aid and cooperation. The local government's commitment then began to appear in to support the Ministry of Social Affairs program, although only a few local governments that expressed willingness. Bedah Kampung Program, in addition, still only touch physical aspects not yet that of the economic aspect. Therefore, it is recommended that next program will be continued with productive economic empowerment, improvement of infrastructure and the environment, as well as integration supported by institutional regulations regencies/municipalities and communities.

Keywords: Bedah Kampung-Community Empowerment-Evaluation

PBK merupakan upaya penanggulangan kemiskinan terpadu, mencakup perubahan sikap, perbaikan hubungan sosial, pemenuhan kebutuhan rumah dan lingkungan, serta peningkatan status ekonomi masyarakat miskin. Pertanyaan penelitian adalah bagaimana

kebijakan Kementerian Sosial RI dalam PBK berjalan? Tujuan penelitian adalah memahami dan mendiskripsikan implementasi kebijakan PBK dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. Metode yang digunakan adalah perbandingan analisis antara realitas sosial kondisi empirik dan kondisi ideal terkait Pedoman Pelaksanaan Bedah Kampung Tahun 2012. Sumber data diperoleh dari pemangku kebijakan atau pelaksana kegiatan dari Kementerian Sosial RI dan aparat sosial daerah, unsur masyarakat seperti pendamping, tokoh masyarakat, dan penerima manfaat. Lokasi penelitian di Kabupaten Pandeglang (Banten) dan Kabupaten Magelang (Jawa Tengah). Hasil penelitian menemukan pelaksanaan PBK dimulai tahun 2012. Sebenarnya program tersebut sudah ada sejak tahun 1970-an, terakhir program disebut dengan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, mulai dilakukan tahun 2006. Target perbaikan rumah sebanyak 15.000 unit rumah dan sarana lingkungan. Sampai tahun 2011, sudah diperbaiki 3.043 unit rumah dan 25 sarana lingkungan. Tahun 2012 sudah mencakup 24 kabupaten/kota dengan sasaran yang sudah dilaksanakan 2.140 unit rumah dan 50 sarana lingkungan. Selama ini program telah dirasakan manfaatnya karena didukung dengan dana yang berasal dari APBN, APBD, dan orang peduli, dan partisipasi masyarakat dalam bentuk gotong royong dan kerjasama. Komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program Kementerian Sosial RI, mulai tampak walaupun hanya beberapa pemerintah daerah yang menyatakan kesediaannya. PBK pada kenyataannya baru menyentuh aspek fisik, sedang aspek ekonomi belum tersentuh. Oleh karena itu, direkomendasikan PBK perlu dilanjutkan dengan pemberdayaan ekonomi-produktif, perbaikan sarana dan lingkungan, serta keterpaduan dukungan regulasi kelembagaan kabupaten/kota dan masyarakat.

Kata Kunci: Bedah Kampung-Pemberdayaan-Evaluasi

Sunit Agus Tri Cahyono (B2P3KS Yogyakarta)

Kuasa Napza Atas Logika

Fenomena Sosial Penyebab Penyalahguna Zat Adiktif

The Power of Drugs on Logic

The Cause of Drugs Abuser Phenomena

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 13 No 3 September 2014, hal 236 - 250

Drug abuse is an indication of someone with weak logic so that they are influenced by addictive substance and not aware its impact so far. If it is analogicalized, drug abuses are like ice berg phenomenon, quantitatively seen small form the top but many unseen at the bottom. Drug abuses qualitatively spikes, abused by all levels in society no matter its status. Men and women from childhood, youth, come of age, and aged. From the haves and haves-not, form rural till urban, from formal figures to labours. This research is to identify the main reason of abusing drugs, the kind of drug and its frequency they use in a month, and its places where they do it. The method used in this research is descriptive-qualitative with 15 people as respondents, ex-abusers. The result shows that the ex-abusers abusing drugs because of external factors, friends influence, to be acknowledged by their group (Peer Group), and are not able to ward off group persuasion to use drugs as manifestation of conformity and solidarity. The consume mostly mariyuana, extacy, and heroin. They get firstly and mostly from friends (Peer Group) for free, then buy from friends, and through mediation. They mostly use with hypodermic needle (IDU), in boarding room, amusement centers sort of cafe, night club, and karaoke as balmy and

peaceful places to consume drugs. It is recommended that drug abuse prevention program should be intensified through anticipation, prevention (P4GN), and manifested through socialization, diffusive information, and rehabilitation to regeneration in family, academic environment, education, governmental agency, politician, entrepreneur, private sector, law institution, and social worker to do real step to build community awareness of living healthily and free from drugs.

Keywords: Drugs-Logic-Social Phenomenon

Penyalahgunaan Napza merupakan salah satu wujud lemahnya logika seseorang sehingga dengan mudah dikuasai oleh zat adiktif, tanpa menyadari dampak luas yang ditimbulkan. Jika dianalogikan, pratek penyalahgunaan Napza bagaikan fenomena 'gunung es' (*ice berg*), artinya secara kuantitas di permukaan terlihat kecil tetapi penggunaannya tetap melebar ke bawah. Secara kualitas masalah napza semakin hari semakin meningkat, menghinggapai semua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Pria dan wanita mulai dari kalangan anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga orang tua. Mulai dari yang kaya sampai yang miskin, dari desa sampai kota, dari pejabat sampai buruh. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi alasan utama penyalahgunaan napza, jenis dan frekuensi mengkonsumsi napza setiap bulan, serta lokasi penyalahgunaan napza. Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan melibatkan 15 mantan pecandu napza sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa faktor utama penyebab penyalahgunaan Napza pada responden sebagian besar berasal dari faktor eksternal, di antaranya pengaruh teman, keinginan diakui oleh kelompok, dan tidak mampu menolak bujukan kelompok pergaulan yang menggunakan Napza sebagai bentuk dari konformitas dan solidaritas. Napza yang dikonsumsi sebagian besar adalah ganja, ekstasi, dan heroin. Cara mendapatkan Napza pertama kali sebagian besar diperoleh dari teman (*peer group*) secara gratis, dibeli dari teman, dan melalui perantara. Sebagian besar responden menggunakan melalui media jarum suntik (IDU) dan menggunakan rumah kos, sarana hiburan seperti café, klub malam, dan karaoke sebagai tempat "*balmy and peaceful*" mengkonsumsi napza. Saran yang diajukan adalah perlunya diintensifkan program dan upaya penanggulangan napza melalui strategi pencegahan, penanggulangan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN), diimplementasikan dalam kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan rehabilitasi hingga pengkaderan dari lingkungan keluarga, kalangan akademisi, pendidikan, instansi pemerintah, politisi, pengusaha, swasta, dan lembaga hukum hingga pekerja sosial, untuk mewujudkan langkah nyata membangun kesadaran sosial masyarakat hidup sehat dan merdeka tanpa napza

Kata Kunci: Napza-Logika-Fenomena Sosial

Ruaida Murni (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)
Dampak Asistensi Sosial terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia
The Impact of Social Assistance toward Aged Social Welfare
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 13 No 3 September 2014, hal 251 - 262

This research is to describe social welfare condition of aged after receiving social assistance seen from social, economic, psychic, and physical health. Data are gathered

through interview, focus group discussion, and observation. The main informants are determined purposively, ageds recieved assistance and their family who care. Data are analysed through qualitative-descriptive technique. The result shows that the social assistance for neglected aged (ASLUT) brings positive impact on aged social welfare, even on some aged the assistance enable to enhance their social welfare. Aged physical condition who receive social assistance are better because they take medication routinely, able to access health service, and fulfill their food needs. Aged psychological condition receiving assistance are more comfortable and stabil, not anymore worry about their needs, feel needed, able to help family even a little, such as to give sweets money their grandchlidren. Aged social relation with family environment are more harmony, indicated by the increase of family, son and daughter, and neighbours visits, coincide with the fulfilment of their needs and the reduction of phychological burden of their daughter and son, closed family, and neighbours with aged.

Keywords: Impact-Social Assistance-Aged Social Welfare

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi kesejahteraan sosial lanjut usia setelah menerima asistensi sosial dilihat dari kondisi sosial, ekonomi, psikis, dan kesehatan fisik. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, FGD, dan observasi. Informan utama penelitian ini ditentukan secara purposif, lanjut usia penerima bantuan atau keluarga yang merawat, data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian asistensi sosial lanjut usia terlantar (ASLUT) memberi dampak positif bagi kesejahteraan sosial lanjut usia, bahkan bagi kelompok lanjut usia tertentu mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan sosialnya. Kondisi fisik lanjut usia penerima ASLUT lebih baik karena berobat secara rutin, mampu mengakses layanan kesehatan, serta memenuhi kebutuhan makannya. Kondisi psikologis lanjut usia lebih nyaman dan stabil, tidak lagi khawatir akan kebutuhannya, merasa dibutuhkan, mampu membantu keluarga walaupun kecil, seperti memberi uang jajan cucunya. Hubungan sosial lanjut usia dan lingkungan keluarga lebih harmonis, ditandai dengan meningkatnya frekuensi kunjungan keluarga, anak dan kerabat, serta tetangga seiring dengan teratasinya kebutuhan lanjut usia, karena berkurangnya beban psikologis keluarga dan anak, tetangga, dan kerabat dekat terhadap lanjut usia.

Kata kunci: Dampak-Asistensi Sosial-Kesejahteraan Lanjut Usia

Tyas Eko Raharjo F (B2P3KS Yogyakarta)

Dampak Keberadaan Minimarket terhadap Kesejahteraan Pedagang Kecil

The Impact of Minimarket Existence towards Small Vendors Welfare

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 13 No 3 September 2014, hal 263 - 278

This research is related to the impact of minimarket toward future existence of small vendors, is done to describe small vendors welfare living around minimarket. Respondents in this research are small vendors selling their commodities around minimarkets. Data are gathered through interview, observasion, and documentary analysis, and analysed through qualitatif-descriptive technique. The result shows that small vendors having various degree of welfare, depending on the commodities they sell. .. vendors experience a reduce in their clients since there is minimarket, even they are almost bankkrup for their

low ability to compete with minimarket, but small vendors that sell food and drink nearby minimarket feel profitable. It can be concluded that some small vendors feel negative effect nad some feel positive effect with the existence of minimarket nearby them. It depends on the commodities they sell. .. vendors feel negative because the commodities they sell can be found in minimarket, while food and drink vendors having positive chance bcause the commodites can not be found in minimarket.

Keywords: Small Vendors Welfare-BusinessChance-Minimarket

Penelitian ini berkaitan dengan keberlanjutan pedagang kecil dengan keberadaan toko swalayan atau minimarket. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan kesejahteraan pedagang kecil yang berada di sekitar minimarket. Responden dalam penelitian ini adalah pedagang kecil yang berjualan di sekitar minimarket, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan telaah dokumen, dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang kecil memiliki kesejahteraan yang beragam, tergantung jenis dagangan yang dijual. Pedagang kelontong mengalami kurangnya konsumen sejak keberadaan minimarket, bahkan mengalami kebangkrutan karena ketidakmampuan dalam bersaing dengan minimarket. Namun pedagang kecil makanan dan minuman justru merasa diuntungkan. Dapat disimpulkan, bahwa kesejahteraan pedagang kecil tergantung pada jenis dagangan masing-masing sebagai aktivitas usahanya. Kesejahteraan pedagang kecil sangat ditentukan pada jenis usaha yang ditekuni, dan memungkinkan mendapat pengaruh positif atau negatif dengan keberadaan minimarket. Pedagang kelontong akan mengalami kebangkrutan karena jenis usaha yang ditekuni tersedia di minimarket, pedagang kecil usaha minuman dan makanan mendapat peluang yang menjanjikan dengan keberadaan minimarket.

Kata Kunci: Kesejahteraan Pedagang Kecil–Peluang Usaha–Minimarket

**Ikawati (B2P3KS Yogyakarta)
Keterlibatan Orangtua dalam Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Parent Commitment in Children Early Education
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 13 No 3 September 2014, hal 279 - 293**

This research is meant to know the influence of parent role in children early education (CEE) for children development. The resarch is correlational study. The research subjects are 100 parents having child under five and participating in children early education (PAUD) in Yogyakarta Special Territory. Data are gathered through sended questionnaires, interview, and observation. Data are analyzed through quantitive-descriptive and intepretative mixed method. The result finds that there is an influence CEE activities on children development, tahat can be seen from the effectiveness contribution of the variable (Parents in CEE) on variable (Children Development), as big as 11,945 per cent, that means there are still other variables (88,055 per cent) enfluence children development. The influence can be seen from relative contribution of each variable, namely the parent commitment to give children early education (84,460 per cent), parents perception on children activities in CEE (10,035 per cent) and parents perception on CEE educators and guidance

(5,506 per cent). Refer to the result above, it is recommended that the Ministry of Social Affairs through Children Welfare Directory, should hold some program that invite children underfive and parent as family (like parenting), so children are away from any handycap and develop optimally.

Keywords: Parents Role-Children Early Education-Children Development

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peran orangtua dalam pemberian kegiatan PAUD terhadap perkembangan anak. Jenis penelitian adalah korelasional studi. Subjek penelitian adalah orangtua yang mempunyai anak balita dan ikut dalam kegiatan PAUD di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data secara *mix method* dengan menggunakan deskriptif kualitatif-kuantitatif dan interpretative. Hasil penelitian ditemukan bahwa ada pengaruh kegiatan PAUD terhadap perkembangan anak. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari besar sumbangan efektif variabel peran orangtua dalam kegiatan PAUD terhadap variabel perkembangan anak sebesar 11,945 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih ada 88,055 persen faktor lain yang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Pengaruh lain tersebut dapat dilihat dari besar sumbangan relatif untuk masing-masing variabel, yaitu variabel keterlibatan orangtua dalam memberikan PAUD (84,460 persen), variabel persepsi orangtua tentang keaktifan anak mengikuti PAUD (10,035 persen) dan variabel persepsi orangtua tentang peran petugas PAUD dalam mendampingi anak (5,506 persen). Berdasarkan temuan di atas, direkomendasikan kepada Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, agar dalam menentukan kebijakan, ada program-program kegiatan yang melibatkan anak balita beserta orangtuanya (keluarga) seperti parenting dengan tujuan anak dapat tercegah terjadinya hambatan dalam perkembangan dan pada akhirnya anak dapat berkembang secara optimal.

Kata kunci: Peran Orangtua-PAUD-Perkembangan Anak

B Mujiyadi dan Nunung Unayah (Puslitbang Kesejahteraan Sosial, Badiklit Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)

Telaah Kebijakan:

Pemenuhan Kebutuhan Fisik Minimum Penerima Manfaat dalam Panti Sosial

Policy Review:

Phisical Need Minimum of Beneficiaries in Social Institution

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 13 No 3 September 2014, hal 294 - 306

On behalf of healthy life, every human being should fulfill their basic need. One among basic needs is food in order to gain energy to do daily activities, which based on sufficient nutrition standard. Every one needs at least 2.150 kilo calory per day. Beneficiaries in Social Home Services are also need energy, so the management of those Social Home Services should have compulsary to fulfill the beneficiaries need. Meanwhile, the govermnet have decided a certain policy in terms of oil price. The decision impacted on market rate of food price. Ministry of Social Affairs as top manager of social services should reponsibile to secure the beneficiaries of social home services. Hence, the Ministry

should decide a new policy in terms of securing social services. It will take in to account of main indicator of social services for the beneficiaries in social institutions.

Key Words: Basic Needs-Social Rehabilitation Services-Price Index

Demi mempertahankan hidup sehat, setiap orang memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar. Salah satu penunjang kebutuhan dasar dimaksud adalah tercukupinya gizi dan vitamin untuk energi dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Setiap orang memerlukan minimum 2.150 kilokalori setiap hari. Gizi dan energi dihasilkan dari makan yang dikonsumsi dalam standar gizi berimbang sesuai 'empat sehat lima sempurna'. Penerima manfaat yang berada dalam panti sosial adalah salah satu pihak yang juga memerlukan gizi dan energi sebagai penunjang hidupnya. Penyelenggara panti sosial menjadi pihak yang harus bertanggung jawab mencukupi kebutuhan penerima manfaat. Pemerintah telah menetapkan kebijakan penyesuaian harga BBM dan pengurangan subsidi. Dampak langsung dari penyesuaian harga adalah naiknya harga kebutuhan pokok di pasar. Kementerian Sosial sebagai penanggung jawab penyelenggaraan panti sosial, menyediakan jaminan hidup bagi penerima manfaat yang berada pada panti sosial, terutama panti sosial yang berada dalam ranah kerjanya, sebagai unit pelaksana teknis dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial. Sebagai manifestasi dari tanggung jawab, Kementerian Sosial perlu memperhitungkan kebutuhan minimum bagi tercukupinya kebutuhan dasar penerima manfaat. Hal ini sangat penting dalam rangka tercapainya indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penerima manfaat di panti sosial.

Kata Kunci: Kebutuhan Dasar-Pelayanan Rehabilitasi-Index Harga

Tri Gutomo (B2P3KS) dan Suyanto (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbangkesos))

**Model Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendekatan Kredit Berskala Mikro
Studi Kasus Keberdayaan Kube di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten
Community Empowerment Model through Micro Scale Credit**

An Empowerment Case Study in Pandeglang Regency Banten Province

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 13 No 3 September 2014, hal 307 - 318

This research is done to know community empowerment process, supporting and handicap factors, a micro scale credit on enhancing community welfare, done by Micro Finance Institution (LKM) Baitul Mal Wa'tamil. The research location is determined purposively, in Sukajaya Village, Cadasari Underdistrict, Pandeglang Regency. The research type is qualitative-descriptive with participative approach. Research subjects are LKM care takers and beneficiaries, an escort, four advisors from related institution, and group coordinator. Data are gathered through interview, observation, focus group discussion, and documentary analysis techniques, and analyzed through qualitative-descriptive technique. The research finding shows that community empowerment is implemented on the right target, through preparation and implementation as agreed. Community empowerment of the beneficiaries seen in the increment of income through business group (Kube) and productive-economy activities (UEP). The supporting factor are the spirit,

dicipline, and motivation of the beneficiaries to enhance family economy. The handicap factor is there has not been yet a venture with finance institution, sort of banking in capitalization. It is recommended that the Ministry of Social Affairs, through General Directory of Social Assistance, implement empowerment program for micro scale business and revitalize local non-government organization (LSM) as an escort and a spear tip of poverty solution.

Keywords: Community Empowerment-Micro Scale Credit

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat, faktor pendukung dan penghambat kredit berskala mikro dalam menyejahterakan masyarakat yang dilakukan Lembaga Keuangan Mikro (Lkilorometer) Baitul Mal Wa'tamil (BMT). Tipe Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan partisipatif. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif, di Desa Sukajaya, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Subjek yang diteliti adalah pengurus Lkilorometer dan penerima manfaat, pendamping satu orang, pembina dari instansi terkait empat orang dan koordinator kelompok. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, Focus Group Discussion (FGD) dan telaah dokumen, sedangkan teknik analisis data digunakan deskriptif-kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat berlangsung tepat sasaran, melalui tahap persiapan dan pelaksanaan pemberdayaan yang telah disepakati. Keberdayaan masyarakat penerima manfaat program terlihat dari adanya peningkatan penghasilan melalui kegiatan usaha bersama [Kube] dan kegiatan usaha ekonomi produktif [UEP]. Faktor pendukung adanya semangat disiplin dan motivasi penerima manfaat untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Faktor penghambat belum ada kerja sama dengan lembaga keuangan, seperti perbankan tentang sosialisasi masalah permodalan. Direkomendasikan kepada Kementerian Sosial RI melalui Direktur Jenderal Bantuan sosial agar mengimplementasi program pemberdayaan pada kelompok usaha berskala mikro dan memanfaatkan LSM yang ada di daerah sebagai pendamping sekaligus menjadi ujung tombak pengentasan kemiskinan.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat–Kredit Skala Mikro

Siti Wahyu Iryani (B2P3KS)

Kebutuhan Pelayanan Sosial Derita Ganda Korban Pascaerupsi Gunung Merapi
Social Service Needs for Double-Misery Victims of Merapi Mountain Post-eruption

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 13 No 3 September 2014, hal 319 - 330

As natural process which its intensity is more than normal, Merapi eruption disaster in Magelang Regency brings human victims, injuries, loss properties, social infrastructure, societal economic hinges, and refugees eruption impact. This research is done to describe double miseries and its social service needs of Merapi post eruption victims. This research uses survey method and implemented through qualitative-descriptive technique. The result shows that total human victims caused by Merapi post-eruption are 5006 people (1.891 family unit). They flee to five under districts and stay at emergency shelters. The disaster

ruins 442 houses and 20.712 hectares of land. The victims suffer double miseries, from the eruption and post eruption impacts. The need for victims social services are medicines, health service, rehabilitation devices for buildings, irrigation, forestry, communication, transportation, and land ownership management. It is recommended that local government, including lower level governmental management (desa, RW, RT) enable to mediate the distribution of aid and assistance because those institutions are the ones who know the local problem, condition, and needs of its environment.

Keywords: Double Miseries-Merapi Pos-eruption Victims-Social Services

Sebagai proses alam yang intensitasnya melebihi normal, bencana alam erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Magelang menimbulkan dampak korban jiwa, korban luka, kehilangan harta benda, kerusakan infrastruktur sosial, dan sendi-sendi perekonomian masyarakat, serta pengungsian terdampak erupsi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan derita ganda dan kebutuhan pelayanan sosial korban erupsi dan pascaerupsi Gunung Merapi. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa jumlah korban keseluruhan akibat bencana alam pasca erupsi yang mengungsi di sejumlah tempat penampungan sementara (Huntara) sebanyak 5006 orang (1.891KK) yang tersebar di lima kecamatan. Kerusakan rumah dan lahan pertanian mencapai 442 buah dan 20.712 hektar. Sebagai pengungsi, korban pasca erupsi Gunung Merapi mengalami derita ganda, selain terpukul akibat erupsi, masih harus terpukul lagi akibat post-erupsi. Kebutuhan pelayanan sosial pelayanan sosial korban erupsi merapi yang dilakukan oleh pemerintah antara lain obat-obatan dan pelayanan medis; bahan-peralatan rehabilitasi bangunan, perkebunan, irigasi dan perhubungan; perlindungan dan pengembalian kepemilikan. Rekomendasi yang diajukan adalah perlunya pemerintah setempat melibatkan pemerintah desa/dusun/RW/RT. Sebagai ujung tombak dalam melakukan mediasi pelayanan sosial, fungsi kepala dusun, rukun warga, dan rukun tangga perlu dimaksimalkan, karena aparat pemerintah yang paling bawah tersebut yang paling mengetahui kondisi dan kebutuhan warga di lingkungannya.

Kata Kunci: Kebutuhan Pelayanan Sosial-Derita Ganda-Korban Erupsi

Evaluasi Program Bedah Kampung *Evaluation on Bedah Kampung Program*

Achmadi Jayaputra

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Jl. Dewi Satika No 200, Jakarta Timur

e-mail: <jachmadi@yahoo.co.id>. HP 628128518190.

Diterima 7 Mei 2014, direvisi 28 Mei 2014, disetujui 9 Juni 2014.

Abstract

Bedah Kampung Program is an integrated poverty reduction efforts including behaviour change, improvement of social relations, meeting the needs of the home and the environment, as well as increasing economic status of the poor. The research question is how the policy of the Ministry of Social Affairs in Bedah Kampung Program goes? The research goal is to understand and describe Bedah Kampung Program Policy and factors that affect the implementation. The method used in this research is comparative analysis of social reality between empiric conditions with ideal as guideline by Bedah Kampung Program in 2012. Sources of data obtained from stakeholders or the implementors of the Ministry of Social Affairs Program, local social agents, elements of such a companion, community leaders, and beneficiaries. Research sites in Pandeglang (Banten) and Magelang (Central Java). The results show that Bedah Kampung Program began in 2012. The program actually has been around since the 1970s, the last program was called Social Rehabilitation Program, began in 2006. Home improvement target was 15,000 housing units and environmental facilities. Until 2011 had been repaired 3,043 houses and 25 environmental facilities. In 2012, already covered 24 regencies/municipalities of 2,140 housing units and 50 environmental facilities. So far, the program has been perceived benefits because it is supported with funds from the state budget, local budget, people who care, and the participation of community in the form of mutual aid and cooperation. The local government's commitment then began to appear in to support the Ministry of Social Affairs program, although only a few local governments that expressed willingness. Bedah Kampung Program, in addition, still only touch physical aspects not yet that of the economic aspect. Therefore, it is recommended that next program will be continued with productive economic empowerment, improvement of infrastructure and the environment, as well as integration supported by institutional regulations regencies/municipalities and communities.

Keywords:

Bedah Kampung-Community Empowerment-Evaluation

Abstrak

PBK merupakan upaya penanggulangan kemiskinan terpadu, mencakup perubahan sikap, perbaikan hubungan sosial, pemenuhan kebutuhan rumah dan lingkungan, serta peningkatan status ekonomi masyarakat miskin. Pertanyaan penelitian adalah bagaimana kebijakan Kementerian Sosial RI dalam PBK berjalan? Tujuan penelitian adalah memahami dan mendeskripsikan implementasi kebijakan PBK dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. Metode yang digunakan adalah perbandingan analisis antara realitas sosial kondisi empirik dan kondisi ideal terkait Pedoman Pelaksanaan Bedah Kampung Tahun 2012. Sumber data diperoleh dari pemangku kebijakan atau pelaksana kegiatan dari Kementerian Sosial RI dan aparat sosial daerah, unsur masyarakat seperti pendamping, tokoh masyarakat, dan penerima manfaat. Lokasi penelitian di Kabupaten Pandeglang (Banten) dan Kabupaten Magelang (Jawa Tengah). Hasil penelitian menemukan pelaksanaan PBK dimulai tahun 2012. Sebenarnya program tersebut sudah ada sejak tahun 1970-an, terakhir program disebut dengan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, mulai dilakukan tahun 2006. Target perbaikan rumah sebanyak 15.000 unit rumah dan sarana lingkungan. Sampai tahun 2011, sudah diperbaiki 3.043 unit rumah dan 25 sarana lingkungan. Tahun 2012 sudah mencakup 24 kabupaten/kota dengan sasaran yang sudah dilaksanakan 2.140 unit rumah dan 50 sarana lingkungan. Selama ini program telah dirasakan manfaatnya karena didukung dengan dana yang berasal dari APBN, APBD, dan orang peduli, dan partisipasi masyarakat dalam bentuk gotong royong dan kerjasama. Komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program Kementerian Sosial RI, mulai tampak walaupun hanya beberapa pemerintah daerah yang menyatakan kesediaannya. PBK pada kenyataannya baru menyentuh aspek fisik, sedang aspek ekonomi belum tersentuh. Oleh karena itu, direkomendasikan PBK perlu dilanjutkan dengan pemberdayaan ekonomi-produktif, perbaikan sarana dan lingkungan, serta keterpaduan dukungan regulasi kelembagaan kabupaten/kota dan masyarakat.

Kata Kunci:

Bedah Kampung-Pemberdayaan-Evaluasi

A. Latar Belakang

Kementerian Sosial RI secara eksplisit termaktub dalam Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Termasuk sinergitas dan keterpaduan program pemberdayaan fakir miskin. Namun demikian, penanganan yang dilaksanakan di Kementerian Sosial RI masih secara makro, baik penanganan masalah kemiskinan pada umumnya maupun yang secara khusus penanganan terhadap fakir miskin. Di antaranya penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan Bedah Kampung yang disentuh melalui pemberdayaan sosial, ekonomi dan kelembagaan. Atas dasar itu, diupayakan untuk menemukan alternatif penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan yang sinergis dan berdaya guna. Tahun 2006 Kementerian Sosial RI mengesahkan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) dengan target memperbaiki rumah sebanyak 15.000 unit di berbagai titik kemiskinan. Secara berurutan pelaksanaannya terlihat, 2011 memperbaiki 3.043 unit rumah dan 25 unit sarana lingkungan, tahun 2012 sudah memperbaiki 2.140 unit dan 50 unit sarana lingkungan (Anonim; 2012d).

Mulai pertengahan tahun 2012 program diganti dengan sebutan, Program Bedah Kampung (PBK), yang merupakan upaya penanggulangan kemiskinan terpadu, menyentuh akar kemiskinan yang mencakup perubahan sikap, perbaikan hubungan sosial, pemenuhan kebutuhan perumahan dan lingkungan yang layak dan sehat, serta peningkatan status ekonomi masyarakat miskin. Kegiatan ini mengikutsertakan berbagai unsur antara lain; Kementerian Sosial RI dan pemerintah daerah, masyarakat, dan unsur relawan sosial. Pelaksanaan dilakukan mengutamakan kearifan lokal setempat yang memuat nilai-nilai kesetiakawanan dan kegotong-royongan. Unsur relawan sosial antara lain taruna siaga bencana (Tagana), pekerja sosial masyarakat (PSM), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK); unsur organisasi sosial antara lain, karang taruna, dunia usaha, dan TNI/Polri (Anonim; 2012a: 1–3).

Secara eksplisit tujuan PBK meliputi, tersedianya pelayanan perumahan yang layak huni bagi keluarga fakir miskin, meningkatnya ke-

mampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan keluarga, meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan permukiman keluarga fakir miskin, meningkatnya kualitas hidup masyarakat, berkembangnya kegotong-royongan dan kesetiakawanan sosial, meningkatnya kondisi perekonomian keluarga fakir miskin, terentasnya masalah kemiskinan. Melalui PBK diharapkan keluarga miskin akan memenuhi satu di antara sekian kebutuhan dasarnya, sehingga dapat mengatasi permasalahannya sendiri. Selain itu pemenuhan ekonomi keluarga sangat diperlukan, terutama adanya perhatian atau peran serta dari pihak lain yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, tahun 2013 Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial melakukan penelitian kebijakan (*Policy research*) yang berkaitan dengan pelaksanaan PBK.

Peran Kementerian Sosial RI dalam Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Secara eksplisit, bahwa penanganan fakir miskin difahami harus ada sinergitas dan keterpaduan program pemberdayaan fakir miskin. Namun demikian, penanganan yang dilaksanakan di Kementerian Sosial RI masih secara makro, baik penanganan masalah kemiskinan pada umumnya maupun secara khusus penanganan terhadap fakir miskin. Secara khusus kebijakan PBK diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup keluarga fakir miskin dan mengembangkan nilai-nilai kesetiakawanan sosial dalam masyarakat setempat. Pelaksanaan kegiatan ini mengikutsertakan tiga unsur, yaitu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Pendekatan PBK terhadap keluarga miskin disentuh melalui pemberdayaan sosial, ekonomi serta kelembagaan. Atas dasar itu diupayakan untuk menemukan alternatif penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan yang sinergis dan berdaya guna. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana pelaksanaan PBK dan seberapa jauh tingkat efektivitas dan efisiensi dari program ini?

Tujuan penelitian untuk mengevaluasi kebijakan tentang peran Kementerian Sosial RI dalam PBK, termasuk evaluasi terhadap tugas

dan fungsinya, menyusun rekomendasi alternatif kebijakan bagi pimpinan Kementerian Sosial RI dalam rangka proses pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan dalam implementasi penanggulangan kemiskinan. Manfaat penelitian sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi unit operasional Kementerian Sosial RI dalam melaksanakan kebijakan terkait dengan PBK dan sebagai bahan studi atau penelitian lebih lanjut.

B. Kajian Teori

Beberapa pengertian yang terkait dengan penelitian yaitu desa, kelurahan, evaluasi, kampung, kebijakan, kemiskinan, dan pemberdayaan. Desa, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Khususnya pasal 1, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelurahan, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Khususnya Pasal 1; Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat. PBK sasaran lokasinya di kelurahan/desa kumuh dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Masyarakat Indonesia memiliki beragam istilah yang sama dengan komunitas antara lain di; Aceh (*gampong*), Ambon (*negeri*), Bali (*banjar*), Batak (*huta*), Dayak (*kampung*), Gayo (*kampung*), Jawa (*dusun*), Minangkabau (*nagari*), Tidore (*soa*), dan Ternate (*gam*). Di beberapa daerah istilah menjadi kumpulan yang lebih besar dan berubah menjadi nama desa. Misalnya di Jawa kumpulan dusun menjadi satu desa, di Gayo menjadi satu nama desa, dan di Minangkabau istilah nagari tetap sama dengan desa di Jawa.

Evaluasi, suatu metode untuk menilai proses dan pelaksanaan suatu kegiatan. Riset evaluasi merupakan aplikasi sistematis dari prosedur riset sosial untuk menaksir atau menilai konseptualisasi dan desain, implementasi, serta utilitas program intervensi sosial. Penggunaan metode riset sosial untuk memberikan putusan atau penilaian dan untuk meningkatkan perencanaan, pemantauan, efektivitas, dan efisiensi suatu program sosial (Samsul Hadi, 2011: 13–14). Kebijakan (*policy*) atau haluan merupakan ketetapan pemerintah yang memuat tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan cara-cara bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. diikuti oleh organisasi atau individu. Kebijakan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut kebijakan sosial meruakan bagian dari kebijakan publik (*Public policy*) suatu ketetapan pemerintah yang memberi arah atau petunjuk cara-cara bertindak, diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas hidup atau keberfungsian sosial warga negara. Kebijakan sosial (Marshall, 1965) adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan (Edy Suharto; 2005; 10).

Kemiskinan, adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Kemiskinan sangat terkait dengan berbagai latar belakang baik yang ada dari dalam diri masyarakat maupun lingkungannya yang meliputi aspek sosial budaya, sumber daya, kondisi alam dan lain-lain. Kemiskinan di Indonesia setidaknya mempunyai empat dimensi pokok, yakni kurang kesempatan; rendah kemampuan; kurang jaminan; dan ketidakberdayaan. Dilihat dari empat dimensi dimaksud, para penyandang rumah tangga sangat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan sosialnya serta kebutuhan akan aktualisasi diri secara layak.

Kemiskinan sangat terkait dengan berbagai latar belakang baik yang ada dari dalam diri masyarakat maupun lingkungannya yang meliputi aspek sosial budaya, sumber daya, kondisi

alam dan lain-lain. Kemiskinan di Indonesia setidaknya mempunyai empat dimensi pokok, yakni kurang kesempatan; rendah kemampuan; kurang jaminan; dan ketidakberdayaan. Dilihat dari empat dimensi dimaksud, penyandang rumah tangga sangat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan sosial, serta kebutuhan aktualisasi diri secara layak. Indikator dari masing-masing kebutuhan dapat dilihat sebagai berikut.

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak dengan indikator: Penghasilan rendah yang diukur dari tingkat pengeluaran per orang per bulan; Ketergantungan pada bantuan orang lain; Keterbatasan kepemilikan pakaian yang cukup setiap anggota keluarga; Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota keluarga yang sakit; Tidak mampu membiayai pendidikan dasar sembilan tahun bagi anggota keluarganya.
2. Kebutuhan sosial dengan indikator: kurangnya hubungan saling percaya, kerukunan dan kebersamaan antar anggota; Kurangnya hubungan saling pengertian dan kebersamaan dengan warga sekitar; Kurangnya hubungan saling percaya dengan aparat pemerintahan; Kurangnya hubungan saling menguntungkan dengan mitra usaha;
3. Kebutuhan akan aktualisasi diri dengan indikator: Tidak mampu lagi bekerja; Tidak mampu lagi berkarya, karena kesulitan dana, fasilitas atau mengakses sistem sumber; Tidak dapat lagi mengembangkan usahanya, karena isolasi geografis, kurangnya sarana dan prasarana penunjang.

Cara lain untuk menetapkan garis kemiskinan melalui perhitungan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, implementasinya dengan menghitung garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan makanan dan bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata rata pengeluaran/pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin.

Partisipasi, secara konseptual partisipasi (*participation*) atau peran serta atau keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat diartikan keikutsertaan individu atau kelompok dalam kehidupan bermasyarakat pada setiap kegiatan yang positif. Partisipasi hampir sama dengan rencana aksi yang dapat dijadikan gerakan sosial jika didukung banyak orang atau sebagian besar masyarakat. Sebagai gerakan sosial tampak lebih menonjol tujuan dan misi yang mengikat pelakunya. Kesukarelaan merupakan ciri khas dan penting, sehingga suatu aksi sosial disusun berdasarkan prinsip sukarela atau gerakan sukarela.

Menurut Darjono (Santoso Sastroepoetro; 1988: 19-21) partisipasi dalam pembangunan desa menunjukkan bahwa masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, memerlukan kebutuhan, menunjukkan tujuan dan prioritas. Partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya gotong royong merupakan modal utama dan potensi yang esensial dalam pelaksanaan pembangunan desa yang tumbuh dan berkembang menjadi dasar bagi pembangunan nasional. Swadaya adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang yang dirasakan masyarakat. Partisipasi aktif (Isbandi Rukminto Adi, 2001: 206–207) masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan memerlukan kesadaran warga masyarakat akan minat dan kepentingan yang sama. Strategi yang biasa diterapkan adalah melalui penyadaran dari aspek kognitif, praktis dan emosional. Peranan pemerintah adalah merencanakan dan mengorganisir program tingkat nasional sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Partisipasi adalah keikutsertaan warga dalam usaha kesejahteraan sosial dalam organisasi sosial lokal dan terpelihara peran dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi adalah kesediaan membantu suatu program sesuai dengan kemampuan tanpa mengorbankan kepentingan sendiri, bisa dilakukan melalui pemberdayaan. Menurut Lowe pemberdayaan sebagai proses akibat dari mana individu memiliki otonomi, motivasi dan

keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan mereka dalam suatu cara yang memberikan mereka rasa kepemilikan dan ketepenuhan dalam mencapai tujuan bersama organisasi. Budaya penting bagi pemberdayaan individu, karena proses pemberdayaan sering menuntut suatu keputusan dari tradisi dan suatu perubahan dalam budaya. Proses pemberdayaan menuntut adanya perubahan budaya (I Nyoman Sumaryadi, 2005: 99-104).

Program Bedah Kampung. Program PBK adalah suatu upaya penanggulangan kemiskinan yang terpadu yang menyentuh akar kemiskinan yaitu mencakup; perubahan sikap, perbaikan hubungan sosial, pemenuhan kebutuhan perumahan dan lingkungan yang layak dan sehat, serta peningkatan status ekonomi masyarakat miskin. Program ini mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan dan program lainnya pada lingkup Kementerian Sosial RI (Anonim; 2012: 1, 9). Tujuan PBK (Anonim; 2012) meliputi: Tersedianya pelayanan perumahan yang layak huni bagi keluarga fakir miskin. Meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan keluarga. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan permukiman keluarga fakir miskin. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berkembangnya kegotong-royongan dan kesetiakawanan sosial. Meningkatkan kondisi perekonomian keluarga fakir miskin. Terentaskannya masalah kemiskinan.

Dari sisi tujuan program yang meliputi tujuh butir, dalam operasionalisasi Bedah Kampung di lapangan baru dapat disentuh lima bagian awal. Tujuan keenam dan ketujuh dan belum terjangkau oleh program, kemungkinan disebabkan oleh kondisi RTSM penerima manfaat yang parah, atau karena memang nominal bantuan stimulasi sosial ekonomis yang kurang memenuhi kelayakan. Dilihat dari sisi sasaran penerima program, dalam Pedoman Bedah Kampung disebutkan, bahwa sasarannya meliputi tiga kategori yakni RSRTLH, rehabilitasi sarana dan lingkungan, serta pemberdayaan sosial ekonomi produktif. Sasaran ini ditetapkan dengan kriteria masing-masing.

Penerima RSRTLH, sasaran penerima manfaat adalah keluarga miskin/fakir miskin, memiliki KTP/identitas diri yang berlaku, rumah yang dimiliki dan ditempati adalah rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial, dengan kondisi: Tidak permanen atau rusak; Dinding dan atap dibuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk seperti: papan, ilalang, bambu yang dianyam (*ged-heg*); Dinding dan atap sudah rusak sehingga membahayakan, mengganggu keselamatan penghuninya; Lantai tanah/semen dalam kondisi rusak; Diutamakan rumah tidak memiliki fasilitas mandi, cuci dan kakus.

Sasaran rehabilitasi sarana dan lingkungan adalah terletak pada lokasi sasaran; Merupakan fasilitas umum yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat terutama warga miskin; Menjadi kebutuhan dan diusulkan oleh masyarakat; Legal dan tidak berpotensi menimbulkan konflik sosial; Masyarakat setempat bersedia untuk mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki seperti: lahan, tenaga, dan material.

Sasaran pemberdayaan sosial ekonomi produktif dapat pula disinergikan dengan kegiatan penumbuhan KUBE, sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Persyaratan penerima bantuan UEP KUBE adalah keluarga fakir miskin; Kepala Keluarga dan/atau pencari nafkah utama dalam keluarga yang masuk kategori miskin atau sangat miskin; Berdomisili tetap; Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 60 tahun; Menyatakan kesediaan bergabung dalam kelompok; Memiliki potensi dan keterampilan di bidang usaha ekonomi tertentu.

Kegiatan Bedah Kampung, dilakukan di beberapa provinsi dan kabupaten sebagaimana keterangan dan kunjungan yang dilakukan Program Bedah kampung (Anonim; 2012, 2013). Peresmian tanggal 16 Juli 2012 dengan kegiatan awal di Desa Mulya Mekar, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Menteri Sosial RI meresmikan dengan pemberian bantuan berupa: Pencanaan rehabilitasi rumah sebanyak 100 unit dengan biaya sebesar Rp 1.000.000.000,-; Perbaikan sarana lingkungan Rp 45.000.000,-; Pemberian sembilan bahan pokok (sembako) sebanyak 300

paket dengan nilai Rp 60.000.000,-; Penyerahan 10 kursi roda terhadap 10 orang penyandang cacat.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta akan melanjutkan program tersebut selama lima tahun ke depan untuk 47.000 KK. Tahun 2013 akan direalisasikan dengan anggaran sebesar Rp 20.000.000,- per unit. (1) Kampung Babakan, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Masih menggunakan istilah RSLTH. Tanggal 17 Juli 2012 acara penyerahan bantuan untuk 84 KK dengan dana sebesar Rp 840.000.000,-. (2) Desa Wangunharja, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Sebanyak 50 unit rumah dibedah dengan bantuan dermawan dari Kuwait sebesar Rp 500.000.000,-. Di Kecamatan Lembang terdapat 29.600 unit Rutilahu dan baru 7.500 unit yang dibantu. (3) Desa Sidareja, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Penyerahan bantuan terhadap 65 KK untuk 65 unit rumah. Selain itu terdapat bantuan dari 67 orang donatur masyarakat Kuwait melalui lembaga Jami'atur Rahmah dan rencananya akan membantu sampai 1.000 unit. (4) Desa Juanga, Kecamatan Morotai, Kabupaten Morotai, Provinsi Maluku Utara.

Kegiatan yang dilakukan tanggal 12 September 2012 yaitu memberikan bantuan terhadap 50 KK atau 50 unit rumah dan peresmian Kampung Siaga Bencana. (1) Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Acara puncak tanggal 4 Nopember 2012. Kegiatan yaitu bantuan perumahan terhadap tiga desa yaitu; Desa Ciinjuk 50 unit, Desa Idaman 65 unit, dan Desa Tapos 50 unit; Bantuan KUBE sebesar Rp 1.000.000.000,- untuk 50 Kelompok Usaha atau 500 KK yang diterima Rp 20.000.000,- per KK.

Di Kabupaten Pandeglang terdapat 30.000 unit rumah tidak layak huni. Tahun 2012 siap membantu Rp 5.000.000.000,- untuk memperbaiki 99 unit rumah. Kementerian Perumahan Rakyat RI menyiapkan dana untuk 1.026 unit rumah yang tersebar dalam 35 kecamatan. Diantaranya akan dilanjutkan di Kabupaten Lebak untuk 14.892 unit yang berada dalam 28 kecamatan. Bantuan biaya sebesar Rp 6.000.000,- per unit.

Kelurahan Kriwen, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Dimulai tanggal 17 Januari 2013 dengan kegiatan yaitu menyampaikan sumbangan dari sebesar Rp 1.300.000.000.000,- kepada 130 KK untuk memperbaiki 130 unit rumah tidak layak huni; Bantuan untuk wilayah perdesaan untuk rumah sehat 100 KK/unit rumah tidak layak huni dengan jumlahnya Rp 1.000.000.000,-; Sarana lingkungan dua unit, masing-masing Rp 50.000.000,-; Bantuan UEP 10 KUBE masing-masing Rp 10.000.000,-; Bantuan Bantuan untuk 13 KUBE masing-masing Rp 20.000.000,-. Satu KUBE terdiri dari 20 orang, sehingga jumlahnya Rp 280.000.000,-.

C. Penggunaan Metode Penelitian

Sistem kesejahteraan sosial terdiri atas upaya yang terorganisir dan tersusun lebih dahulu untuk menyediakan kesejahteraan masyarakat. Segal dan Brzuzy (1998: 22) menyatakan, bahwa sistem kesejahteraan sosial dapat dikonseptualisasikan dalam empat bagian yang saling berhubungan: (1) Isu-isu atau masalah sosial; (2) Tujuan-tujuan kebijakan; (3) Legislasi/regulasi, dan (4) Program kesejahteraan sosial. Model analisis berdasarkan waktu dengan analisis restrospektif yaitu mengkaji kebijakan sosial setelah suatu kebijakan diimplementasikan. Model ini biasanya disebut model evaluatif karena banyak melibatkan pendekatan evaluasi terhadap dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan (Harry Hikmat; 2006: 20; Fredian Tony Nasdian; 2013: 13).

Penentuan Informan. Unit analisis penelitian sebagai informan dipilih secara *purposive*, karena individu yang akan ditanyai berkaitan dengan PBK. Mereka dipilih berdasarkan bidang tugasnya, yaitu Kementerian Sosial RI dari unit kerja Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan, dinas sosial provinsi dan kabupaten dari bidang pemberdayaan sosial, termasuk pendamping lapangan dan penerima bantuan sosial. Informan diperlukan untuk lebih menggali dan memahami pelaksanaan kegiatan bedah kampung, jumlahnya tidak terbatas karena tergantung keterangan yang diperlukan, sehingga akan dilihat dari kepentingan atau keperluan data dan informasi lapangan.

Lokasi penelitian, ditetapkan secara *pupose* dengan alasan lokasi yang terpilih memperoleh PBK sudah berlangsung dalam tahun anggaran 2012. Dua lokasi terpilih sebagai unit analisis dan dikunjungi peneliti adalah Desa Ciinjuk dan Desa Tapos, Kecamatan Tapos, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dan Desa Sidorejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi lain sebagai menjadi pembanding diperoleh dari sumber tertentu, seperti tulisan dan unduhan dari internet.

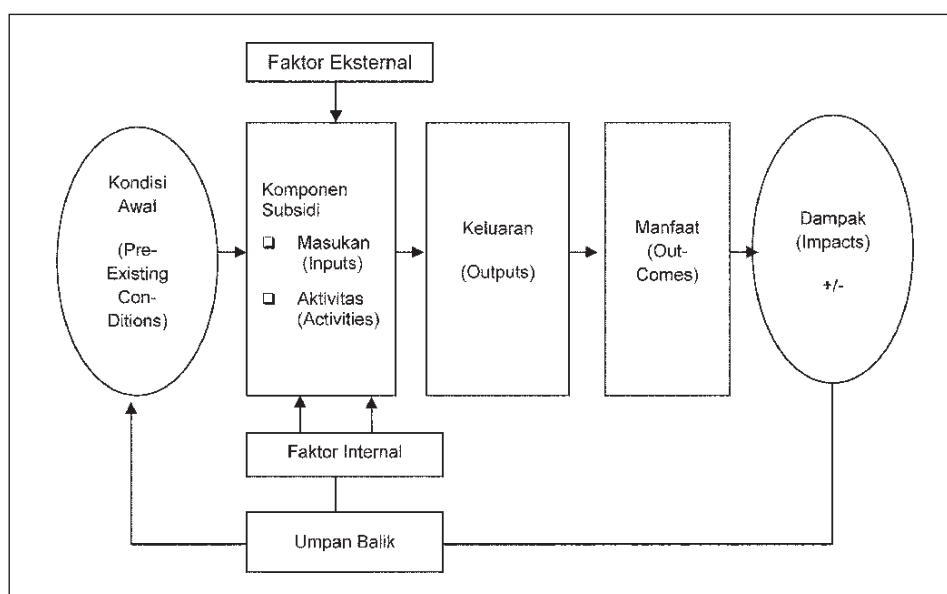
Teknik Pengumpulan Data, digunakan empat teknik, yaitu analisis dokumentasi yang berkaitan dengan perundang-undangan, laporan kegiatan dan hasil penelitian; pengamatan, dengan melakukan pengamatan lapangan di lokasi pelaksanaan bedah kampung; wawancara dilakukan terhadap individu pelaksana program, pendamping sosial, keluarga, dan tokoh masyarakat; diskusi dilakukan dalam upaya untuk menyamakan pendapat dalam pelaksanaan kegiatan.

Tiga pokok kegiatan. Pertama, persiapan dengan kegiatan telaah dokumentasi, penyusunan rancangan, diskusi, dan perizinan. Melalui telaah dokumen yang diperoleh telah dipelajari berbagai laporan perencanaan dan pelaksanaan PBK di beberapa lokasi. Kedua, kegiatan peninjauan lokasi pelaksanaan PBK

di Kabupaten Purwakarta dan Bekasi. Sebagai unit yang diamati dilakukan kunjungan ke Kabupaten Magelang dan Kabupaten Pendeglang. Ketiga, penyusunan laporan dengan kegiatan dimulai pengolahan data, diskusi kelompok, dan seminar.

Telaah permasalahan penelitian digunakan *Logical Framework Analysis* (Shortell dan Richardson, 1978). Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan *system & model for delineating program elements in the evaluation process* yang meliputi: kondisi awal, masukan (*inputs*), proses (*process*), keluaran (*outputs*), manfaat (*outcomes*) dan dampak (*impacts*). Hasil identifikasi aspek-aspek studi dikembangkan dalam bentuk tabel *Logical Framework Analysis*. Analisis penelitian berupaya melakukan perbandingan realita sosial dengan kondisi ideal (*comparison with an ideal*) (Hill, 1996:11). Analisis konsistensi dan kesenjangan antara dokumen kebijakan dan pedoman dengan implementasi melalui telaah dokumen hukum atau kebijakan, wawancara, dan diskusi kelompok.

Lokasi. penelitian dipilih secara sengaja (*Pupose*) di dua kabupaten dengan alasan antara lain; memperoleh bantuan PBK dari Kementerian Sosial RI, dan adanya bantuan dari pihak lain. Terpilihlah Kabupaten Magelang dan Kabupaten Pandeglang sebagai unit analisis yang memperoleh bantuan.



Skema 1. Kerangka Pikir Studi

D. Hasil Penelitian: Evaluasi PBK di Pandeglang dan Magelang

Bedah Kampung merupakan program yang dilakukan dalam rangka perbaikan rumah dengan sasaran daerah perdesaan. Istilah tersebut sebagai pengganti dari RSRTLH yang telah dilakukan sejak tahun 2006 (Anonim; 2012a; 2013). Istilah Bedah Kampung diresmikan oleh Menteri Sosial RI tanggal 16 Juli 2012 dengan kegiatan awal di Desa Mulya Mekar, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.

Kondisi Awal. Pemilihan lokasi pelaksanaan Bedah Kampung sesuai dengan pedoman. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang menetapkan lima desa kategori sangat miskin. Didukung dengan terbitnya Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 140/Kep.279-HUK/2011 Tentang Penetapan 20 (Dua puluh) Desa Tertinggal Prioritas Program Pembangunan Tahun 2012. yang menetapkan adanya 20 desa tertinggal menjadi prioritas pembangunan. Intinya pembangunan desa tertinggal sumber dana dari APBD Kabupaten Pandeglang, APBD Provinsi, APBN, dan sumber lainnya. Mengikut sertakan 32 satuan kerja dan 19 kecamatan diikutsertakan dalam penanggulangan kemiskinan ini.

Sebagai masukan (*input*) di Kabupaten Pandeglang secara teknis pendampingan dilakukan tiga pihak; LSM Hijau Persada (Kecamatan Tapos), PMII (Kecamatan Patia), dan Karang Taruna (Kecamatan Ciinjuk). Mereka lebih dahulu memperoleh pelatihan teknis dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang tentang bimbingan manajemen dalam pengelolaan bedah kampung, pengadaan bahan bangunan, dan pelaksanaan rehabilitasi secara gotong royong. Rancang bangun dari Hijau Persada dengan sebutan "rumah tumbuh". Kegiatan yang dilakukan secara bertahap yaitu; penyuluhan, penyiapan, dan pelaksanaan. Model rumah semi permanen berupa; dinding bata setengah, dan bagian atas bilik bambu. Tata ruang terdiri dari satu ruang utama keluarga dan dua kamar tidur.

Di Kabupaten Magelang masih terdapat 9.780 KK dari keluarga miskin yang menempati rumah tidak layak. Pencanaan kegiatan dimu-

lai di Desa Sidorejo (Kecamatan Bandongan). Kementerian Sosial RI menyalurkan dana dari Yayasan Jamiyyah Ar Rahmah (Kuwait) sebesar Rp 650.000.000,- untuk merehabilitasi 65 unit rumah di tiga desa yaitu; Sidorejo 50 unit; Gandusari tujuh unit, dan Rejosari delapan unit. Sedangkan dana APBN sebanyak 63 unit rumah di empat desa yaitu: Kemalan (Kecamatan Borobudur) 15 unit, Prajeksari (Kecamatan Tempuran) 35 unit, Tampil Wetan delapan unit dan Bateh lima unit. Pemerintah Kabupaten Magelang membantu biaya Rp 5.000.000,- per rumah. Dana pendampingan dari APBD Kabupaten Magelang tahun 2012. Kegiatan dimulai bulan September mengikutsertakan tujuh unsur yaitu; Taruna Siaga Bencana, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pramuka, TNI dan POLRI. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mendirikan dapur umum dengan menyediakan bahan makanannya.

Kegiatan dimulai menyusun proposal, menyiapkan gambar, menyediakan material, pencairan dana sampai selesainya 65 unit rumah. Sebelum dana cair, panitia memenuhi permintaan bahan bangunan yang diperlukan penerima manfaat. Di lokasi dibangun tempat mandi, cuci, dan kakus (MCK) umum. Tujuannya agar dimanfaatkan bersama-sama, terutama bagi yang tidak memiliki MCK di rumahnya. Dengan demikian masyarakat tidak sembarang buang hajat di kali atau ditempat yang tidak semestinya. Rumah bukan hanya sekedar diperbaiki, tetapi ada rumah yang dibangun kembali menjadi lebih baik. Sebenarnya dana yang disalurkan belum mencukupi yang seharusnya Rp 25.000.000,- atau lebih. Kekurangan dipenuhi sendiri secara gotong royong, sehingga dari dana yang tersedia menghasilkan bangunan yang permanen.

Pelaksanaan (*output*) dan manfaat (*outcome*). Kegiatan terpenuhi sesuai jadwal yang disusun warga. Rencana semula sekitar satu bulan, namun agak meleset pengerjaan sampai dengan satu setengah bulan. Tidak terlalu berpengaruh pada tingkat pencapaian hasil. Target bedah kampung yang ditetapkan sebanyak 167 KK, terlaksana dengan baik. Masyarakat semakin memiliki kemampuan untuk: mengelola

PBK, meningkatkan akses terhadap sumber dalam membangun sarana lingkungan berupa pipanisasi, sehingga lebih mudah dalam mendapatkan air bersih, dan meningkatkan tanggung jawab anggota masyarakat terhadap lingkungan.

Dana yang berjumlah Rp 10.000.000,- atau Rp 15.000.000,- sebagai dana “pancingan” atau stimulan dalam mewujudkan rumah layak huni. Hanya cukup membeli sebagian bahan bangunan, sehingga dianggap belum memadai. Namun demikian, segala kekurangan dapat ditanggulangi sesuai dengan cara warga setempat. Ada yang menyumbang tenaga sebagai tukang dan tidak perlu dibayar, pemilik rumah hanya menyiapkan makanan dan minuman. Ini menunjukkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap sesama warga dan lingkungannya diwujudkan bentuk sumbangan uang, tenaga, dan pikiran. Keberhasilan ini juga terkait dengan peran aparat desa dan tokoh masyarakat dalam bergotong royong. Sedangkan camat berperan dalam memberi dukungan dalam penyusunan proposal PBK sampai pelaksanaannya.

Dampak (*impact*). Di dua lokasi menunjukkan kondisi rumah semakin tertata. Selain perbaikan rumah digerakkan dalam memanfaatkan sumber air bersih yang letaknya jauh dari desa. Bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan bedah kampung, masyarakat Desa Tapos bergotong royong menyalurkan air bersih sampai di halaman atau rumahnya. Ini didukung dengan anggaran pemerintah daerah yang khusus untuk membeli pipa paralon.

Dua faktor yang berpengaruh. Faktor pendukung yaitu; masih adanya nilai-nilai gotong royong, adanya sumbangan dari pihak lain atau orang peduli, dan peran Kepala Desa Cijuk dalam mengajak warganya bekerja sama. Faktor penghambat; khususnya di Kabupaten Pandeglang sebagian besar instansi pemerintah belum melaksanakan kegiatan secara optimal, dan di Kabupaten Magelang tidak banyak yang menjadi tukang, sehingga perbaikan rumah tidak bisa bersamaan.

Analisis: Penanggulangan kemiskinan melalui Bedah Kampung merupakan salah satu langkah awal untuk memenuhi kebutuhan dasar

manusia. Namun demikian perlu disadari bahwa titik masuk (*entry point*) ini perlu dikelola secara profesional. Menjaga sinergitas ini tidak menghilangkan peran strategis Kementerian Sosial RI, maka tetap dapat menjalankan tugasnya secara wajar. Kementerian Sosial RI masih mendapat tugas Segmen 1 (Perlindungan dan Jaminan Sosial) dan sebagian Segmen 2 (Pemberdayaan). Kementerian Sosial RI mendapat amanat Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Juga telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Ada prospek untuk menetapkan kebijakan baru yang lebih mampu menjawab masalah dan tantangan yang ada, baik bersifat preventif maupun represif.

Tahun 2012 telah dilakukan bedah kampung di 24 kabupaten/kota. Wilayah yang dimaksud berada dalam beberapa provinsi yaitu; Jawa Barat (Sukabumi, Lembang, Bekasi, dan Bogor); Banten (Pandeglang dan Serang); Jawa Tengah (Semarang, Wonosobo, Purworejo, Sukoharjo, dan Banyumas); Jawa Timur (Pacitan dan Tulung Agung); Sumatera Barat (Payakumbuh dan Padang); Maluku (Tulehu, dan Ambon); Provinsi Maluku Utara (Morotai); Gorontalo (Bone Bolango); Sulawesi Utara (Sangihe, Tomohon, dan Marampit); Sulawesi Tenggara (Kendari); dan Sulawesi Tengah (Palu). Hanya saja sampai saat ini belum pernah dilakukan evaluasi berdasarkan kewilayahan. Bantuan yang diberikan sama rata Rp 10.000.000,- per unit. Hal ini perlu dilakukan berdasarkan perbedaan tersebut berpengaruh terhadap biaya yang diperlukan.

Aspek perubahan berdasarkan kajian. Pertama, sisi perubahan sikap bagi masyarakat di perdesaan pada umumnya masih bercorak “paguyuban” yang tentunya sangat berbeda dengan masyarakat kota yang bersifat “patembayan”. Dengan demikian jiwa kebersamaan dan kegotong royongan masih amat kental. Perubahan sikap yang tampak lebih kepada “rasa memiliki” dari para penerima manfaat. Kedua, sisi perbaikan bedah kampung jelas merupakan upaya mencapai perbaikan bagi keluarga miskin. Melalui perbaikan rumah tidak layak huni dan sarana lingkungan, maka sudah membawa rumah tangga sangat miskin menerima

manfaatnya atau sama dengan perbaikan kesejahteraan. Ketiga, sisi pemenuhan kebutuhan perumahan dan lingkungan. Pemenuhan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, adanya rumah yang memenuhi syarat kesehatan seperti kondisi rumah yang kokoh, lantai yang bersih, tata ruang yang baik dari sisi fungsi keluarga, ventilasi yang cukup dan kondisi yang bersih.

Alternatif kebijakan: Kebijakan yang telah disusun merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pemerintah dan pemerintah daerah. Perbaikan kebijakan diusulkan tiga alternatif. Pertama, melanjutkan pemberdayaan dengan penguatan sosial ekonomi produktif. Masyarakat miskin penerima manfaat sudah memenuhi satu kebutuhan pokok hidupnya. Secara fisik mendapat rumah yang layak dan memenuhi syarat kesehatan. Masih diperlukan kebutuhan rumah lainnya seperti pendidikan anak, kesehatan, sosialisasi secara wajar serta pemenuhan kebutuhan spiritual. Terkait dengan “*income generating*” dari rumah tangga penerima manfaat, maka sentuhan pemberdayaan melalui pendekatan sosial ekonomis produktif perlu diberikan kepada mereka. Kedua, penguatan pendampingan. Pendampingan dilaksanakan oleh pihak yang berbeda. Pengalaman kerja yang ditunjukkan mampu menggerakkan, mengkoordinir dan mendorong masyarakat. Terutama penerima manfaat untuk menyadari bahwa kegiatan yang dilakukan di situ adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu peningkatan kemampuan bagi pendamping dalam pelaksanaan bedah kampung.

E. Penutup

Kesimpulan: Kebijakan PBK hanya terkait sebagai titik masuk dalam pemberdayaan keluarga fakir miskin. Walaupun demikian, pelaksanaan di lapangan telah melaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang perlu dilakukan. Partisipasi masyarakat dalam wujud gotong royong untuk membantu memperbaiki rumah yang merupakan keikutsertaan dari *significant others*. Dilihat aspek pendanaan, pelaksanaan PBK masih bertumpu APBN Kementerian Sosial RI. Hanya sebagian Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mulai menerbitkan keputusan atau peraturan dalam mendukung PBK.

Rekomendasi: Pemberdayaan Ekonomis Produktif melalui Pendekatan KUBE. Setiap warga miskin penerima manfaat perlu diperkuat dengan pemberdayaan sosial ekonomi agar setiap warga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya yang meliputi kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spiritualnya. Pendekatan KUBE dipandang sebagai alternatif. Keterpaduan. Menggalang keterpaduan perlu didukung dengan: regulasi, rencana induk, penyiapan kelembagaan kabupaten dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Achmadi Jayaputra, (1999). *Pemanfaatan Bantuan Modal Usaha di Daerah Kumuh, Kotamadya Sawahlunto*. Jakarta; Puslitbangkesos.
- Anonim, (2011). *Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi RSRTLH dan Sarling 2010*. Jakarta; Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan.
-, (2012a). *Pedoman Pelaksanaan Bedah Kampung*. Jakarta; Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan.
-, (2012b). *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni*. Jakarta; Puslitbangkesos.
-, (2012d). *Rundown Acara Penyuluhan untuk Bedah Kampung* (Catatan; Launching Program 16 Juli 2012).
- Burhan Bungin, (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Nugroho, 2013. “Mengaktualisasi Kembali KUBE” dalam *Informasi*, Vol 18, No 1, April, hal 32.
- Edi Suharto, (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung; Alfabeta.
-, (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung; Alfabeta.
- Fredian Tonny Nasdian, (2013). *Penelitian Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial* (Makalah Diskusi di Puslitbangkesos, 28 Maret 2013).
- Harry Hikmat, dkk, (2006). *Pedoman Analisis Kebijakan Sosial*. Jakarta; UI & Kemensos RI.
- Hill, Michael (1996), *Social Policy : Comparative Analysis*, London : Prentice-Hall Wheat Sheaft.
- Isbandi Rukminto Adi, 2001. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: LP FEUI

- Koentjaraningrat, (1999). *Pengantar Antropologi* (Jilid 1). Jakarta; Rineka Cipta.
- Samsul Hadi, dkk, (2011). *Metode Riset Evaluasi*. Jogjakarta; Lakbang Grafika.
- Santoso Sastropetro, (1988). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung; Alumni.
- Segal, Elizabeth E, and Brzuzy Stephanie (1998), *Social Welfare Policy, Programs, and Practice*. Itaca, Illinois : F.E Peacock Publishers, Inc.
- Shortel and Richardson (1978), *The Evaluation Process, in Health Program Evaluation*. St Louis: CV Mosby Company.
- Soerjono Soekanto, (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta; Rajawali Press.
- Sumaryadi, I Nyoman, (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta; Citra Utama.

Kuasa Napza Atas Logika Fenomena Sosial Penyebab Penyalahgunaan Zat Adiktif

The Power of Drugs on Logic The Cause of Drugs Abuser Phenomena

Sunit Agus Tri Cahyono

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial RI.
Yogyakarta. Jalan Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu, Yogyakarta. e-mail: sunit_atc62@yahoo.com.
Diterima 19 Maret 2014, direvisi 3 April 2014, disetujui 3 Juli 2014.

Abstract

Drug abuse is an indication of someone with weak logic so that they are influenced by addictive substance and not aware its impact so far. If it is analogized, drug abuses are like ice berg phenomenon, quantitatively seen small from the top but many unseen at the bottom. Drug abuses qualitatively spikes, abused by all levels in society no matter its status. Men and women from childhood, youth, come of age, and aged. From the haves and have-nots, from rural till urban, from formal figures to labours. This research is to identify the main reason of abusing drugs, the kind of drug and its frequency they use in a month, and its places where they do it. The method used in this research is descriptive-qualitative with 15 people as respondents, ex-abusers. The result shows that the ex-abusers abusing drugs because of external factors, friends influence, to be acknowledged by their group (Peer Group), and are not able to ward off group persuasion to use drugs as manifestation of conformity and solidarity. They consume mostly marijuana, ecstasy, and heroin. They get firstly and mostly from friends (Peer Group) for free, then buy from friends, and through mediation. They mostly use with hypodermic needle (IDU), in boarding room, amusement centers sort of cafe, night club, and karaoke as balmy and peaceful places to consume drugs. It is recommended that drug abuse prevention program should be intensified through anticipation, prevention (P4GN), and manifested through socialization, diffusive information, and rehabilitation to regeneration in family, academic environment, education, governmental agency, politician, entrepreneur, private sector, law institution, and social worker to do real step to build community awareness of living healthily and free from drugs.

Keywords:

Drugs-Logic-Social Phenomenon

Abstrak

Penyalahgunaan Napza merupakan salah satu wujud lemahnya logika seseorang sehingga dengan mudah dikuasai oleh zat adiktif, tanpa menyadari dampak luas yang ditimbulkan. Jika dianalogikan, praktek penyalahgunaan Napza bagaikan fenomena 'gunung es' (*ice berg*), artinya secara kuantitas di permukaan terlihat kecil tetapi penggunaannya tetap melebar ke bawah. Secara kualitas masalah napza semakin hari semakin meningkat, menghinngapi semua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Pria dan wanita mulai dari kalangan anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga orang tua. Mulai dari yang kaya sampai yang miskin, dari desa sampai kota, dari pejabat sampai buruh. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi alasan utama penyalahgunaan napza, jenis dan frekuensi mengkonsumsi napza setiap bulan, serta lokasi penyalahgunaan napza. Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan melibatkan 15 mantan pecandu napza sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa faktor utama penyebab penyalahgunaan Napza pada responden sebagian besar berasal dari faktor eksternal, di antaranya pengaruh teman, keinginan diakui oleh kelompok, dan tidak mampu menolak bujukan kelompok pergaulan yang menggunakan Napza sebagai bentuk dari konformitas dan solidaritas. Napza yang dikonsumsi sebagian besar adalah ganja, ekstasi, dan heroin. Cara mendapatkan Napza pertama kali sebagian besar diperoleh dari teman (*peer group*) secara gratis, dibeli dari teman, dan melalui perantara. Sebagian besar responden menggunakan melalui media jarum suntik (IDU) dan menggunakan rumah kos, sarana hiburan seperti café, klub malam, dan karaoke sebagai tempat "*balmy and peaceful*" mengkonsumsi napza. Saran yang diajukan adalah perlunya diintensifkan program dan upaya penanggulangan napza melalui strategi pencegahan, penanggulangan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN), diimplementasikan dalam kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan rehabilitasi hingga pengkaderan dari lingkungan keluarga, kalangan akademisi, pendidikan, instansi pemerintah, politisi, pengusaha, swasta, dan lembaga hukum hingga pekerja sosial, untuk mewujudkan langkah nyata membangun kesadaran sosial masyarakat hidup sehat dan merdeka tanpa napza

Kata Kunci:

Napza-Logika-Fenomena Sosial

A. Pendahuluan

Pada lingkup nasional fenomena penyalahgunaan napza (Narkotika Psikotropika dan Zat adiktif) dengan berbagai dampak negatifnya di Indonesia terus mengalami peningkatan kualitas dan kuantitas yang signifikan dari tahun ke tahun, pada kenyataannya kasus yang tampak lebih sedikit dibandingkan dengan kasus yang tidak, lebih dikenal dengan istilah fenomena gunung es (*ice berg*). Lebih menyedihkan lagi, Indonesia telah dijadikan sebagai salah satu negara peredaran, transit, dan tujuan pemasaran gelap dan produsen napza dengan sasaran utama generasi muda. Peredaran napza secara gelap menimbulkan dampak sangat merugikan baik perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, dapat menimbulkan bahaya lebih besar bagi kehidupan dan nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional. Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan pada tahun 2011 jumlah pengguna napza di Indonesia sekitar 3,8 juta atau sekitar 1,5 persen dari jumlah total penduduk. Dari jumlah tersebut, sebagian besar menggunakan jarum suntik, mayoritas usia produktif, 60 persennya terjangkit virus HIV-AIDS, dan sekitar 15.000 orang meninggal sia-sia setiap tahun, atau 40 orang setiap hari. Jumlah kerugian biaya ekonomi akibat penyalahgunaan napza berdasar hasil penelitian BNN tahun 2011 diperkirakan 48,2 trilyun setiap tahun (BNN. 2013: 26). Satu tahun kemudian (2012), angka tersebut sudah mencapai 4,58 juta penduduk (Kompas.com. 7 Februari 2013: 1). Tren penyalahgunaan napza didominasi obat-obatan daftar G.

Sepanjang tahun 2012, BNN sudah 12 kali memusnahkan napza. Total yang telah dimusnahkan sebanyak 28.062 gram sabu-sabu, 44.389 gram ganja, 10.116 gram heroin, dan 3.103 butir ekstasi. Sebagian besar penyalahgunaan napza adalah remaja berpendidikan tinggi. Pecandu heroin dan morfin yang menggunakan jarum suntik berpotensi besar terkena penyakit hepatitis B dan hepatitis C, bahkan tertular virus HIV-AIDS (Lilis Holisah. 2014:1). Sedangkan di

tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada tahun 2013 tercatat ada 69 ribu kasus penyalahgunaan Napza (Kuntadi 2013: 6). Muchlis mencatat, 70 persen dari 4 juta pecandu narkoba tercatat sebagai anak usia 14 hingga 21 tahun, bahkan sudah menyusup ke anak usia SD (Noviarini, dkk., 2013: 117)

Berdasar realitas pada tahun 2011 dan 2012, Badan Narkotika Nasional (BNN) memprediksi pada tahun 2015, jika tidak dilakukan upaya penanggulangan secara komprehensif, akan meningkat menjadi 2,8 persen yang setara dengan 5,1 juta orang atau naik sekitar 34 persen. Dikaitkan dengan fenomena *ice berg*, kasus penyalahgunaan napza yang belum terungkap sebenarnya jauh lebih besar dari kasus yang terungkap (BNN, 20 Desember 2013: 1). Ironisnya, dari 40 persen pengguna napza didominasi oleh mahasiswa dan pelajar atau generasi muda (Aldy Monareh, 2013: 1). Prevalensi¹ penyalahgunaan napza berdasarkan hasil penelitian BNN tahun 2011 sebesar 2,2 persen (atau sekitar 3,8-4,5 juta orang) dan diproyeksikan naik menjadi 2,56 persen pada tahun 2013.

Napza diperlukan oleh manusia untuk pengobatan dan studi ilmiah juga memerlukan napza. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengemukakan, bahwa napza di satu sisi merupakan obat dan bahan yang bermanfaat bagi pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan, keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat secara terus menerus karena sebab emosional.

Penyalahgunaan Napza merupakan salah satu wujud kelemahan logika seseorang sehingga mudah dikuasai napza tanpa menyadari

¹) Seberapa sering suatu penyakit (penyalahgunaan napza) atau kondisi terjadi pada sekelompok orang. Prevalensi dihitung dengan membagi jumlah orang yang memiliki penyakit atau kondisi dengan jumlah total orang dalam kelompok.

dampak yang ditimbulkan. Penyalahgunaan napza membawa dampak yang luas dan kompleks. Dari sekian banyak permasalahan yang ditimbulkan sebagai dampak penyalahgunaan napza dan zat adiktif antara lain tidak hanya secara medis atupun psikis saja, seperti mudahnya terjadi komplikasi medik berupa kelainan paru, gangguan fungsi liver, hepatitis, dan penularan HIV-AIDS karena pemakaian jarum suntik (IDU) secara bergantian. Akan tetapi dapat menimbulkan perubahan perilaku menjadi antisosial, menurunkan produktivitas kerja secara drastis, mempertinggi jumlah kecelakaan lalu lintas, kriminalitas, dan tindak kekerasan. Hal ini lebih diperburuk oleh merembahnya Napza pada lingkungan keluarga, masyarakat, dan pendidikan sehingga dapat mempengaruhi kualitas pendidikan, interaksi sosial keluarga, dan masyarakat. Data hasil penelitian Dadang Hawari juga menunjukkan, bahwa 90 persen korban penyalahgunaan narkotika adalah remaja usia sekolah atau mulai terlibat dengan masalah narkotika pada usia sekolah. Di Provinsi Jawa Tengah, data yang paling mengejutkan adalah hasil penelitian Badan Narkotika Propinsi (BNP) terhadap para siswa sekolah dengan sampel tiga kota. Di Kota Semarang ditemukan angka penyalahgunaan narkotika di kalangan siswa mencapai 3,57 persen, di Surakarta 2,29 persen, dan di Purwokerto mencapai 1,86 persen (Abdul Wahid, 2010: 4).

Napza secara logika berbahaya secara medis, psikis, dan sosial bagi seseorang, keluarga, komunitas, dan masyarakat tetapi tetap saja ada oknum yang selalu mencari, mengkonsumsi, memperjualbelikan bahkan mengedarkan secara gelap. Menurut logika masyarakat umum yang sudah mengerti bahaya, mengapa masih ada individu yang "lengket" dengan barang berbahaya tersebut. Mengapa mereka menyalahgunakan, mengkonsumsi, bahkan pecandu Napza? Apakah perilaku itu dapat diterima oleh logika (akal sehat). Bagaimana logika mereka dapat dikuasai oleh napza? Mengapa mereka terperosok ke jurang Napza? Mengapa mereka menjadi pecandu dan jadi budak napza? Dimana pertama kali mereka memperoleh Napza? Merupakan sederet pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini

Dalam mengkaji penyalahgunaan Napza, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah apakah motif utama, jenis yang dikonsumsi, berapa kali mengkonsumsi setiap bulan, di mana tempat mereka mengkonsumsi? Jawaban permasalahan tersebut untuk menjawab tujuan penelitian ini, yaitu teridentifikasinya motif utama penyalahgunaan napza, diperoleh deskripsi jenis napza yang disalahgunakan dan frekuensi responden mengkonsumsi napza setiap bulan, dan teridentifikasinya tempat penyalahgunaan napza. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu masukan bagi Kementerian Sosial, khususnya Direktorat Rehabilitasi Sosial dan instansi terkait, dalam merumuskan kebijakan penanggulangan penyalahgunaan Napza di Indonesia.

B. Kajian Teori

Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza) yang biasa disebut narkoba merupakan jenis obat yang diperlukan di dalam dunia kesehatan. Akan tetapi apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat menimbulkan ketergantungan dan membahayakan kesehatan dan jiwa pemakainya. Napza adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang menyebabkan perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut Departemen Kesehatan RI, Napza singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Semua istilah ini sebenarnya mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai risiko yang berbahaya, yaitu kecanduan (adiksi). Napza merupakan zat yang apabila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi susunan syaraf pusat otak, sehingga apabila disalahgunakan menyebabkan gangguan jiwa dan fungsi sosial. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan undang-undang untuk penyalahgunaan narkoba, yaitu UU No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Banyak konsep dan definisi operasional penyalahgunaan napza, menurut Ritter dan Anthony (1991), coba pakai (*new initiation*) didefinisikan apabila frekuensi penggunaan

per tahun enam kali atau kurang. Todorov et al. (2006) menetapkan lima kali atau kurang sebagai mencoba, lebih dari lima kali per tahun sebagai lebih dari mencoba, disebut pengguna teratur apabila memakai setiap hari selama minimal dua minggu. Menurut Meyer (1975), penggunaan narkoba lebih dari satu kali sehari dalam periode 10 sampai 14 hari atau lebih termasuk kategori ketergantungan obat. Samhsa (2008), membagi perilaku pakai atas tiga kategori: (1) Penyalahguna seumur hidup (*lifetime use*), minimal sekali pakai narkoba dalam seumur hidup, termasuk penyalahgunaan 30 hari atau 12 bulan lalu (2) Penyalahguna tahun lalu (*past year use*), waktu mengkonsumsi narkoba terakhir kali dalam 12 bulan lalu termasuk 30 hari lalu sebelum wawancara (3) Penyalahguna bulan lalu (*past month use*) (BNN. 2008:11-18).

Jenis Napza atau narkotika yang sering disalahgunakan adalah morfin, heroin (putauw), petidin, termasuk ganja. Jenis psikotropika yang sering disalahgunakan adalah penenang seperti *mogadon*, *rohypno*, *dumolid*, *lexotan*, pil koplo, BK, termasuk LSD, *mushroom*. Golongan psikotropika adalah zat atau obat, baik alami maupun sintesis, tetapi bukan Narkotika yang berkhasiat aktif terhadap kejiwaan (psikoaktif) melalui pengaruhnya pada susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan perubahan tertentu pada aktivitas mental dan perilaku. Zat adiktif lainnya adalah bukan narkotika dan psikotropika, seperti alkohol, etanol atau metanol, tembakau, gas yang dihirup (inhalansia), zat pelarut (*solven*). Sering kali pemakaian rokok dan alkohol terutama pada kelompok remaja (usia 14-20 tahun) harus diwaspadai orangtua, keluarga, dan masyarakat karena umumnya pemakaian kedua zat tersebut cenderung menjadi pintu masuk penyalahgunaan napza lain yang lebih berbahaya (Putauw).

Ketergantungan, penyalahguna atau pecandu napza pada umumnya disebabkan oleh adanya interaksi beberapa faktor termasuk sifat dari zat yang terkandung di dalam napza, faktor yang berasal dari individu (internal) dan lingkungan (eksternal). Banyak kasus yang dialami pecandu napza, seperti merasa malu karena dijauhi, dikucilkan bahkan tidak dianggap ada oleh keluarga karena keluarga merasa malu memiliki

anggota keluarga seorang pecandu narkoba. Orang dengan reaksi malu bercirikan lebih memperhatikan diri sendiri, tidak berdaya dan rendah diri (Gilbert. Pelh & Allan dalam Sarwono. 2005). Pecandu napza seringkali stres dan berpikiran negatif karena tertekan oleh hal yang sedang dihadapinya sehingga sulit untuk mencapai kesembuhan. Berdasarkan hal tersebut, akan lebih baik apabila pada pecandu ditanamkan sikap pantang menyerah dengan keadaan yang dihadapi. Ada banyak alasan atau faktor penyebab seseorang memakai napza. Secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua alasan yang sulit diterima logika, yaitu karena faktor individu dan faktor lingkungan (keluarga, sekolah, pekerjaan, pergaulan, lingkungan).

Dari sudut internal penyalahgunaan napza harus dipahami dari masalah kepribadian dan perilaku yang kompleks. Faktor Individu meliputi: (1) Mencari pengalaman yang menyenangkan atau mencari sensasi. Napza menjadikan suasana hati berubah, mereka ingin rasa nyaman dan gembira, ingin sesuatu yang baru, menggairahkan, dan menyerempet bahaya. Mereka juga didorong oleh rasa ingin tahu, dan dorongan untuk menghilangkan perasaan jenuh dan bosan. (2) Mengatasi *stress*, napza memberi perasaan santai sehingga dapat melupakan masalah yang dihadapi. Mereka memakai napza agar merasa rileks atau tenang dari situasi yang menegangkan. Napza dapat menghindari rasa sedih, tertekan atau marah. Napza juga dijadikan cara untuk meredakan perasaan takut dan tidak percaya diri. (3) Menggunakan napza menjadikan remaja dianggap lebih jantan, dewasa atau keren. Mereka ingin diterima dan diakui oleh kelompok sebayanya. Mereka ingin meniru apa yang dilakukan idola mereka seperti gaya hidup dengan merokok, minum alkohol, dan memakai napza. (4) Dengan merasa tertarik dengan efek yang ditimbulkan oleh suatu zat yang dilarang, seseorang dapat memiliki rasa ingin tahu yang kuat untuk mencoba zat terlarang tersebut. Tanpa disadari oleh pengguna yang awalnya coba-coba itu selanjutnya menjadi ketagihan dan akan melakukannya lagi berulang-ulang yang sulit dihentikan. (5) Menghilangkan rasa sakit. Seseorang yang memiliki suatu penyakit atau kelainan yang dapat menimbulkan rasa

sakit yang tidak tertahankan, dapat membuat seseorang tertarik mencari jalan pintas untuk mengobati sakit yang diderita, yaitu dengan menggunakan obat-obatan dan zat terlarang.

Berkait dengan hal di atas dPrince of Smart menyebutkan, bahwa secara umum faktor utama penyebab individual (internal) menyalahgunakan Napza, antara lain (1) Keingintahuan yang besar untuk mencoba tanpa sadar atau tanpa berpikir panjang mengenai akibatnya (2) Keinginan untuk mencoba-coba karena "penasaran" (3) Keinginan untuk bersenang-senang (*just for fun*) (4) Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya (*fashionable*) (5) Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok (konformitas) (6) Lari dari kebosanan, masalah atau kegetiran hidup (7) Pengetahuan dan pemahaman yang salah, bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan (8) Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan napza (9) Tidak dapat berkata tidak terhadap Napza (dPrince of Smart. www.google.co.id. 4 Januari 2012).

Faktor lingkungan (eksternal) mencakup keluarga, kelompok pergaulan sebaya, kehidupan sekolah, dan masyarakat luas. Faktor ini biasanya bermula dari pergaulan teman sebaya yang mempunyai pengaruh cukup kuat bagi terjerumusnya seseorang ke lembah napza, berawal dari ikut-ikutan teman, terlebih bagi seseorang yang memiliki mental dan kepribadian cukup lemah akan mudah terjerumus, termasuk lemahnya kepedulian masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum. Jumlah pengguna napza meningkat dalam empat tahun terakhir antara lain disebabkan oleh kurang maksimalnya kepedulian masyarakat dan pemerintah dalam mengawasi peredaran napza.

Tanda-tanda seseorang telah menggunakan napza dapat dilihat dari beberapa hal. antara lain (1) Mereka menjadi pemurung dan penyendiri (2) Wajah kelihatan pucat dan kuyu; Matanya berair dan tangan suka gemeteran; Nafas tersengal dan kurang tidur; Badan lesu dan sering kelihatan gelisah; Mudah tersinggung dan mudah marah. Gejala dini pada seseorang yang dikategorikan pengguna Napza: (1) Prestasi sekolah

secara tiba-tiba menurun drastis (2) Pola tidur berubah, pagi susah dibangunkan dan malam hari suka begadang (3) Banyak menghindari pertemuan dengan anggota keluarga lainnya karena takut ketahuan menggunakan zat adiktif (4) Banyak mengurung diri di kamar dan menolak diajak makan malam bersama-sama anggota keluarga (5) Bersikap lebih kasar terhadap anggota keluarga dibanding pada saat sebelum mengkonsumsi Napza (6) Sekali-kali dijumpai dalam keadaan mabuk, bicara tidak jelas (Cadel/pelo), dan jalan sempoyongan.

Secara umum, seseorang yang menyalahgunakan Napza akan menyadari kalau ia tergantung Napza pada saat berhenti mengkonsumsi secara sengaja atau tidak sengaja. Pada tahap ini timbul gejala yang sering disebut gejala putus obat. Ciri-ciri antara lain mata dan hidung berair, sakit perut, mual, dan muntah-muntah hingga seperti sedang terserang influenza. Kondisi ini sangat mengganggu, sehingga membuat mereka tidak tahan lagi, dan akhirnya mempunyai keinginan untuk sembuh. Atau sebaliknya, berusaha dengan segala upaya untuk mendapatkan barang haram itu kembali. Tujuannya agar mereka dapat terlepas dari rasa yang sangat tidak nyaman. Dampak penyalahgunaan Napza meliputi aspek kesejahteraan fisik, psikis, hukum, dan sosial.

Dampak medik berupa komplikasi kesehatan. Apabila Napza dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan cukup lama, pengaruhnya pada: (1) Otak dan susunan saraf pusat seperti gangguan ingatan, perhatian, bertindak rasional, persepsi sehingga menimbulkan halusinasi, gangguan motivasi, sehingga malas sekolah dan bekerja, gangguan pengendalian diri, sehingga sulit membedakan baik dan buruk (2) Gangguan saluran pernapasan, dapat terjadi radang paru-paru (*bronchopneumonia*), dan pembengkakan paru (*Oedema paru*); Gangguan jantung seperti peradangan jantung, penyempitan pembuluh darah jantung (3) Dapat terjadi hepatitis A, B dan C yang menular melalui jarum suntik, dan hubungan seksual (4) Penyakit menular seksual (PMS) dan HIV-AIDS.

Pada aspek perilaku sosial, pengguna Napza dikenal dengan perilaku seks resiko tinggi. Mereka mau melakukan hubungan seksual

demi mendapatkan uang untuk membeli Napza. Penyakit menular yang sering terjadi antara lain kencing nanah (GO), raja singa (syphilis). Pengguna Napza yang menggunakan jarum suntik secara bergantian dan bersama-sama mengakibatkan angka penularan HIV-AIDS semakin meningkat (Dampak Penyalahgunaan Napza. www.google.co.id. 20 Desember 2009). Dampak sosial psikologis secara umum tampak pada emosi yang tidak terkendali, kecenderungan berbohong, tidak memiliki tanggung jawab, hubungan dengan keluarga, guru, dan teman, lingkungan terganggu, cenderung menghindari kontak komunikasi dengan orang lain, merasa dikucilkan atau menarik diri dari lingkungan, tidak peduli dengan nilai atau norma yang ada, dan cenderung melakukan tindak pidana kekerasan (<http://www.bnn.go.id>. diunduh 21 Juli 2013 07:25).

Dampak sosial lain dari penyalahgunaan Napza dapat terjadi di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, pekerjaan dan di lingkungan masyarakat (Napza dan Narkotika. www.google.co.id. 21 Nopember 2009). Di lingkungan keluarga, suasana keluarga yang semula aman, nyaman, dan tenteram menjadi terganggu karena pengguna Napza mudah tersinggung, egois, dan emosional, sehingga sering terjadi pertengkaran. Ia juga suka mencuri dan membuat orangtua menjadi resah karena barang berharga sering hilang. Dampak lainnya adalah berperilaku asosial (menyimpang), suka berbohong pada orang tua, tidak menaati aturan rumah tangga dan hidup bebas. Kondisi ini menjadi aib bagi keluarga. Pelajar atau mahasiswa pengguna Napza berpeluang menjadi putus sekolah, dikeluarkan dari sekolah, atau dikeluarkan dari pekerjaannya, sehingga keluarga mengalami kesulitan keuangan dan akhirnya merusak kehidupan keluarga, lebih parahnya pengeluaran uang keluarga meningkat untuk biaya pengobatan dan rehabilitasi.

Di lingkungan sekolah, pecandu Napza akan merusak disiplin dan motivasi belajar, membolos, meningkatkan tindak kekerasan, dan mudah menyulut tawuran pelajar, dapat mempengaruhi terjadinya peningkatan penyalahgunaan di antara sesama teman sebaya. Di lingkungan masyarakat, adanya sebagian

masyarakat yang mengkonsumsi Napza memberi peluang bagi terciptanya pasar gelap di daerah tersebut, melibatkan pengedar dan bandar yang berusaha mencari pengguna Napza. Pola yang sering terjadi, pengedar atau bandar menggunakan perantara remaja, siswa sekolah, atau mahasiswa yang telah menjadi tergantung. Maraknya penyalahgunaan dan peredaran Napza diindikasikan meningkatkan kejahatan di lingkungan masyarakat, seperti pencurian, tindak kekerasan, perampokan, pembunuhan, bahkan dapat meningkatkan frekuensi kecelakaan di jalan raya dan lingkungan kerja.

Secara umum, masalah menyalahgunakan Napza akan berakibat sangat merugikan bagi individu, keluarga, dan masyarakat, khususnya generasi muda mulai dari di kota besar sampai ke kota kecil. Mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah ke bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Secara spesifik bagi individu, seseorang yang menyalahgunakan Napza merasa dirinya bahagia, senang, nyaman, tenang, dan nyaman, tetapi segala perasaan yang serba enak itu hanya bersifat sementara. Apabila pengaruh Napza habis, pemakai akan merasa tidak nyaman dan sakit. Akibatnya, pemakai merasa perlu menggunakan Napza lagi, apabila terus berulang, pemakai menjadi tergantung. Ketergantungan pada Napza mengakibatkan dampak negatif dan berbahaya bagi kondisi fisik, psikologis, hukum, dan sosial. Dampak fisik yang paling banyak dipengaruhi adalah system syaraf pusat. Pada kenyataannya, banyak kasus kematian akibat pemakaian Napza terutama karena pemakaian berlebihan (over dosis), dan kematian karena HIV-AIDS, akibat pemakaian Napza melalui jarum suntik bersama dengan orang yang positif terinfeksi HIV. Banyak remaja meninggal karena sakit, kecelakaan, dan perkeltahan akibat pengaruh Napza. Gangguan psikis atau kejiwaan yang sering dialami oleh orang yang menyalahgunakan Napza antara lain: cemas, ketakutan, merasa tertekan, ingin bunuh diri, kasar, mudah marah, dan agresif. Gangguan jiwa ini dapat bersifat sementara dan selamanya, sedangkan gangguan psikologis yang paling nyata adalah pengguna Napza tidak bisa mengendalikan diri untuk terus-menerus mengkonsumsi Napza.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan model pendekatan deskriptif,² yang berupaya menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik utama pengguna napza secara apa adanya berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Penentuan responden secara purposif. Artinya, pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu, yaitu seseorang yang berpengalaman langsung terlibat dalam penyalahgunaan penyalahgunaan Napza. Penentuan responden tidak untuk mencari keterwakilan jumlah populasi melainkan pada kriteria kualitas informasi, yaitu kehandalan informasi dari responden yang dapat menjamin keterwakilan permasalahan, sehingga dapat menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Mengacu pada teknik pemilihan responden di atas, penelitian ini mengambil 15 orang mantan penyalahguna Napza dari eks Karesidenan Surakarta (Kota Solo dan Kabupaten Wonogiri).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yang dilakukan dengan menggunakan basis kriteria (*criterion based*), yang didasarkan pada asumsi bahwa responden selaku mantan penyalahguna Napza dianggap sebagai aktor yang memahami dan menguasai masalah sehingga mampu memberikan informasi yang akurat. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi aktual secara rinci tentang: Alasan (faktor penyebab) utama menyalahgunakan Napza, jenis Napza yang pernah dikonsumsi, frekuensi mengonsumsi Napza setiap bulan, dan tempat responden mengonsumsi Napza.

D. Hasil Penelitian: Fenomena Sosial Napza atas Logika

Logika adalah keharusan dalam setiap kehidupan yang digunakan manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dengan logika, manusia seharusnya mampu membedakan secara logik perilaku sehat, baik, dan benar dengan perilaku tidak sehat dan tidak benar atau menyimpang. Seseorang yang menyalahguna-

kan Napza atau terjerumus Narkoba berarti ada aspek logika kehidupan yang tidak digunakan secara baik. Bagi seseorang yang suka merokok mengatakan, bahwa merokok itu enak juga dapat membantu menghilangkan kejenuhan. Padahal kenyataannya, rokok merupakan *salah satu* pintu gerbang strategis Napza. Pintu gerbang adalah jalan atau akses. Mengapa rokok dikatakan merupakan *salah satu* jalan strategis menuju napza? Sebab, ada persamaan yang kuat antara rokok dan napza, yaitu sama-sama menawarkan 'ketenangan pikiran' dan adanya sifat yang mencandu. Begitu juga bagi mereka penikmat PSK. Apabila di logikakan secara medis dan ekonomis perokok dapat terkena penyakit jantung dan penikmat PSK tertular virus HIV, juga menyalahgunakan Napza dapat menimbulkan ketergantungan, membahayakan kesehatan jiwa pemakai, keluarga, masyarakat, negara. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk penyembuhan dampak tersebut?

Secara logika, memakai Napza merupakan perbuatan melanggar hukum. Akibatnya akan mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan apabila pernah dihukum. Dari aspek logika medis dan psikis, menghisap Napza meningkatkan resiko kanker dan kerusakan paru-paru. Napza mengurangi kemampuan seseorang melakukan aktivitas yang membutuhkan koordinasi dan konsentrasi seperti olahraga, menari, latihan drama, dan belajar. Napza dapat mengganggu relasi dengan sekolah, keluarga dan kehidupan sosial. Napza mengganggu cara berfikir, konsentrasi, dan menilai sesuatu. Napza juga mengundang resiko keamanan dan keselamatan seperti kecelakaan dan kekerasan. Menghisap Napza tidak menjadikan seseorang keren (*smart*), justru sebaliknya, penampilan menjadi lusuh. Napza menyebabkan ketergantungan karena seseorang selalu membutuhkan Napza sehingga sulit melepaskan diri darinya. Menghisap Napza bukan menyelesaikan masalah dan tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan masalah akan lebih berat dan bertambah karena seorang pecandu Napza cenderung tidak berusaha mencari penyelesaian. Kenyataannya seseorang

²⁾ Penelitian deskriptif memusatkan perhatiannya pada fenomena yang sedang terjadi. Penelitian ini berusaha membuat deskripsi fenomena yang diselidiki dengan cara melukiskan dan mengklasifikasikan fakta atau karakteristik fenomena tersebut secara faktual dan cermat (Ibu Hajar, 1995: 274)

yang sudah mulai mencoba akan mengulangi lagi pada kesempatan lain, dengan tidak terasa akhirnya menjadi ketergantungan. Semua lapisan masyarakat sebaiknya tidak percaya kepada seseorang yang berkata, bahwa Napza tidak berbahaya atau akan menjadikan hidup lebih baik. Secara logika salah jika seseorang menyatakan, bahwa semua orang memakai Napza. Sebagai bukti di Amerika Serikat, lebih dari 80 persen remaja 12-17 tahun belum pernah memakai Napza karena logika mereka percaya, bahwa Napza tidak menjadikan bahagia, populer atau dewasa (BNN 2013:1). BNN melansir, terdapat bukti persentase penyalahgunaan Napza meningkat setiap tahunnya sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Proyeksi Prevalensi Penyalahgunaan Napza 2008-2015

PROYEKSI PREVALENSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA TAHUN 2008 – 2015								
TAHUN	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah penyalahgunaan	3.362.527	3.590.765	3.826.974	4.071.016	4.323.366	4.583.690	4.851.486	5.126.913
Prevalensi	1,99%	2,10%	2,21%	2,32%	2,44%	2,56%	2,68%	2,80%

Sumber: BNN (2013: 24)

Jumlah pengguna napza di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 2,56 persen dari total penduduk, atau sekitar 4,5 juta orang. Dari jumlah tersebut, 80 persen remaja berusia 14-19 tahun. Penyalahgunaan naza seperti fenomena gunung es, jumlah pengguna napza yang belum terungkap sepuluh kali lipat dari data riil yang ada. Salah satu kunci menekan bahaya adalah kepedulian keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Perhatian dan komunikasi orangtua dengan anak perlu dijaga baik. Di masyarakat, perlu menjaga lingkungan bebas napza. Pemerintah diharapkan mampu menegakkan aturan ketat dan tegas kepada pengedar dan bandar napza, khususnya melalui gerakan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza (P4GN) (BNN: 2014). Sedangkan jumlah kerugian biaya ekonomi Napza berdasarkan hasil penelitian BNN pada tahun 2011 diperkirakan sebesar 48,2 Trilyun (Darwin Butar-Butar, 2013: 26).

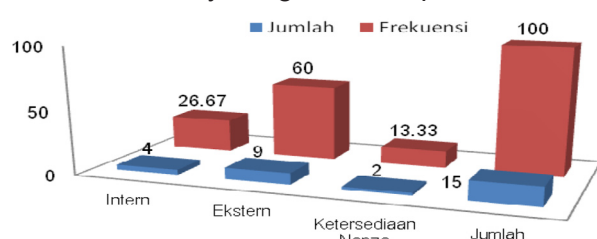
Berkait dengan hal tersebut, perkembangan kasus Napza di Jawa Tengah cukup membahayakan, khusus di Surakarta menembus seluruh lapisan masyarakat, PNS, TNI, Polri, Legislatif, kaum petani, dan buruh karena Surakarta sebagai kota budaya yang tidak pernah tidur selama 24 jam sehingga sangat rawan bahaya Napza. Masyarakat Surakarta sepakat secara bersama-sama mencegah penyalahgunaan Napza, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir kasus napza yang ditangani Polresta Surakarta dan BNP sebanyak 152 kasus (2010), 85 kasus (2011), 78 kasus (2012), bulan Januari sampai Juni tahun 2013 sebanyak 44 kasus. Kota Surakarta juga merupakan kota persinggahan atau tempat yang menjadi pusat pertemuan kota dan kabupaten sekitarnya, sehingga sangat rentan dengan peredaran Napza. Bandara Adi Soemarmo sebagai bandara internasional yang melayani penerbangan internasional juga rentan akan peredaran gelap dan penyalahgunaan Napza. Sebagai upaya pencegahan, pemerintah Kota Surakarta mengajak seluruh warga untuk mengintrospeksi diri dan bekerja sama secara simultan untuk memerangi Napza, sebagai bahaya besar yang mengancam generasi muda dengan cara menumbuhkan gerakan disiplin sebagai cerminan karakter dan budaya masyarakat. Pencegahannya dengan penindakan secara hukum dan represif, apabila ada pecandu Napza yang ingin mehabilitasi diri, Rumah Sakit Umum Daerah Moewardi ditunjuk sebagai RS rujukan bagi pecandu Napza.

Hasil wawancara terhadap 15 responden yang pernah mengkonsumsi Napza (mantan pengguna Napza) di Surakarta, menemukan tiga faktor penyebab penyalahgunaan Napza: internal, eksternal, dan ketersediaan Napza. Sebagian besar dari mereka mengkonsumsi Napza pertama kali pada waktu masih SLTP, SLTA, dan mahasiswa saat berusia antara 12 hingga 25 tahun.

Grafik faktor utama penyebab penyalahgunaan Napza sebagian besar (60 persen) berasal dari faktor eksternal. Terdapat kecenderungan pada waktu itu responden masih pelajar dan mahasiswa karena alasan coba-coba dan penasaran, bujukan atau pengaruh teman, keinginan diakui oleh kelompok, tidak mampu menolak kelompok

pergaulannya yang menggunakan Napza sebagai bentuk dari konformitas dan solidaritas. Sebagian lain (26,67 persen) karena faktor internal seperti kesalahan persepsi sebagai akibat dari kurangnya pemahaman terhadap dampak Napza, sehingga mereka beranggapan dengan mengkonsumsi Napza menambah kekuatan dalam menghadapi masalah, percaya diri, dan berprestasi, meskipun pada kenyataannya mereka justru terpuruk secara ekonomi, fisik kesehatan, psikis, dan sosial.

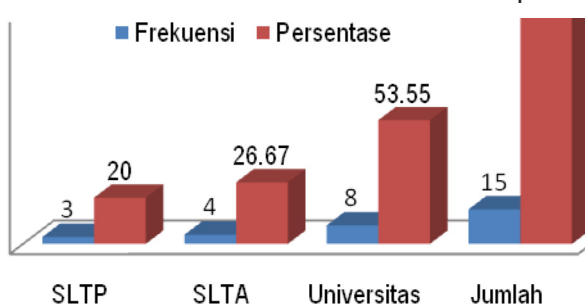
Grafik 1. Faktor Utama Penyebab Penyalahgunaan Napza



Sumber: Hasil Wawancara (2011-2012)

Efek Napza bagi fisik, psikis, dan sosial tergantung pada jenis Napza, jumlah dan frekuensi pemakaian, cara menggunakan, serta digunakan bersamaan dengan obat lain. Faktor psikologis (kepribadian harapan dan perasaan saat memakai), dan faktor biologis (berat badan dan kecenderungan alergi).

Grafik 2. Pemakaian Pertama Kali Napza

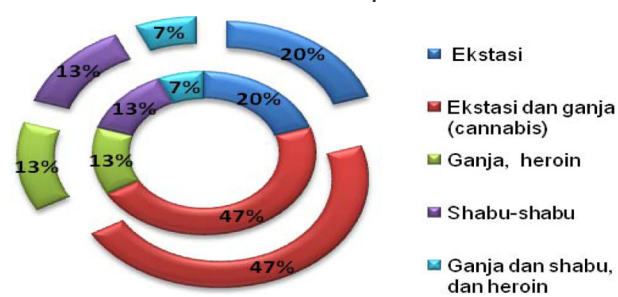


Sumber: Hasil Wawancara (2012)

Pada awal pemakaian Napza, pemahaman sebagian besar responden tentang dampak negatif sangat terbatas, terbukti sekitar 73,33 persen atau 11 orang mengaku, pemakaian Napza tidak membahayakan kesehatan asal tidak dikonsumsi berlebihan. Napza yang mudah

diperoleh secara berturut-turut adalah ekstasi, ganja, heroin, dan shabu (86, 67persen) dan jenis Napza yang dikonsumsi sebagian besar ganja, ekstasi dan heroin. Dilihat dari waktu pertama kali menyalahgunakan napza, sebagian besar responden mengkonsumsi ganja (Cannabis), sebesar 46, 67 persen. Disusul jenis shabu dan heroin (26.67 persen), kemudian ekstasi 20 persen. Cara mendapatkan Napza pertama kali sebagian besar diperoleh dari teman secara gratis atau teman sebaya (*peer group*) (60 persen), dibeli dari teman (26.67 persen), dan melalui perantara (13.33 persen).

Grafik 3. Jenis Napza yang Pernah Dikonsumsi Responden



Sumber: Hasil Wawancara (2012)

Data tersebut menunjukkan, bahwa *peer group* atau tekanan teman sebaya merupakan alasan utama dan awal responden masuk ke dalam lingkaran setan yang bernama Napza. Responden pertama kali mengenal dan mengkonsumsi Napza paling banyak pada usia 18-25 tahun, yaitu sembilan orang (60 persen), yang terdiri atas seorang pelajar SLTA dan delapan orang mahasiswa, bahkan pada usia remaja awal 12 tahun dan berstatus pelajar SLTP, satu orang (6.67 persen). Masa remaja dan masa muda yang masih mempunyai emosional labil dan rasa ingin tahu yang besar merupakan faktor yang memudahkan mereka terjebak mengkonsumsi Napza. Mereka juga mengaku sering merokok dan pernah mengkonsumsi minuman keras, terlibat perjudian, dan pekelahian.

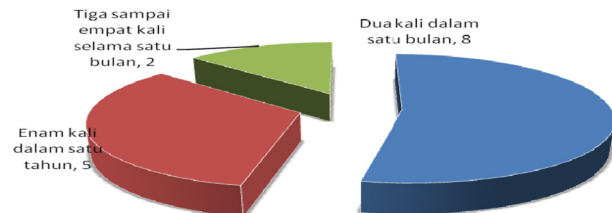
Jika dilihat dari latar belakang pemakaian Napza tersebut, pengguna Napza kurang tepat dikatakan sebagai pelaku kriminal, lebih tepat sebagai korban penyalahgunaan Napza. Pada waktu mengkonsumsi Napza, semua responden masih dalam status pelajar dan mahasiswa

yang masih menjadi tanggung jawab keluarga, sehingga kurang tepat apabila permasalahan penggunaan Napza hanya semata merupakan persoalan hukum, tetapi juga melibatkan persoalan kesehatan, psikologis, keluarga, dan masyarakat. Anggapan yang menyatakan, bahwa pengguna Napza berasal dari keluarga tidak harmonis (*broken home*) ternyata tidak benar sepenuhnya. Penelitian ini menemukan, ternyata 73,33 persen dari responden berasal dari keluarga harmonis, baik keluarga dengan status ekonomi menengah ke atas dan menengah ke bawah. Karakteristik lain, responden mantan pengguna Napza banyak melibatkan laki-laki dibanding perempuan, yaitu 93,33 persen pengguna adalah laki-laki.

Dari responden yang diwawancarai, pada umumnya sebelum mengonsumsi Napza telah terbiasa merokok (tiga orang atau 20 persen) sebagai gaya hidup, sebagian mengonsumsi minuman beralkohol (empat orang atau 26,67 persen), kombinasi merokok dan minum (tujuh orang atau 46,67 persen), serta tidak merokok atau minum minuman keras (6,66 persen). Pendorong utama mereka merokok dan menegak minuman beralkohol adalah adanya persepsi yang salah, bahwa merokok adalah simbol kejantanan laki-laki, menambah gairah hidup, dan keberanian (93,33 persen). Dari kebiasaan merokok, sebagai salah satu pemicu atau jembatan untuk mengenal Napza, mencoba-coba dan menjadi "budak" Napza. Berdasarkan pengakuan responden, frekuensi mengonsumsi Napza bervariasi, mulai dari rata-rata enam kali dalam setahun atau dua bulan sekali (33,33 persen), dua kali dalam satu bulan (53,33 persen), tiga sampai empat kali selama satu bulan (13,34 persen). Mereka mengonsumsi napza tidak dilakukan secara teratur dan terus-menerus selama setengah tahun sampai tiga tahun, sehingga semua seluruh responden tidak mengalami fase ketergantungan napza atau pecandu napza. Merujuk definisi operasional penyalahgunaan napza dari Ritter, Anthony (1991), dan Meyer (1975), responden yang mengonsumsi Napza enam kali dalam setahun atau satu kali dalam dua bulan (33,33 persen) disebut sebagai pengguna coba pakai (*new initiation*), dua kali dalam satu bulan (53,33

persen) dan frekuensi penggunaannya tiga sampai empat kali selama satu bulan (13,34 persen) dikategorikan ketergantungan Napza.

Grafik 4. Frekuensi Mengkonsumsi Napza Setiap Tahun



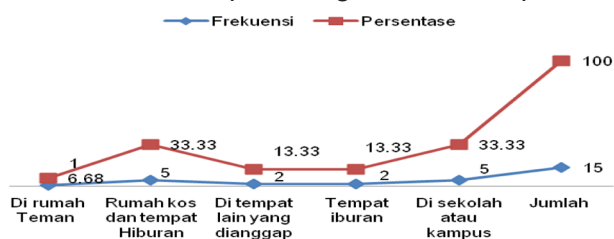
Sumber: Hasil Wawancara (2012)

Gangguan kesehatan pertama kali mereka rasakan setelah mengonsumsi Napza (terutama ekstasi, heroin, shabu, dan ganja) setelah berlangsung tiga sampai enam bulan (80 persen). Gangguan yang dialami antara lain: gangguan pada sistem syaraf (neurologis) seperti kejang-kejang, halusinasi, dan gangguan kesadaran (66,67 persen). Gangguan lain adalah pada kulit (dermatologis) seperti bekas suntikan dan alergi; gangguan pencernaan (gastrointestinal) di antaranya *mencret*, radang lambung, hepatitis; Gangguan pada paru-paru seperti penekanan fungsi pernafasan dan kesukaran bernafas (33,33 persen). Responden pengguna Napza suntik, pada awalnya tidak mengetahui bahwa kebiasaan memakai jarum suntik setelah dipakai orang lain tanpa disterilkan terlebih dahulu sangat rentan terjangkit HIV-AIDS. Apalagi kecanduan Napza diikuti dengan perilaku menyimpang seksual yang memiliki korelasi sangat besar dengan terjangkitnya HIV-AIDS.

Terdapat kecenderungan pengguna Napza yang telah mengonsumsi Napza tidak jarang berlanjut dengan melakukan perbuatan yang tidak dapat dilakukan dalam keadaan biasa, khususnya hubungan seks bebas di antara mereka. Kenyataan ini merupakan sarana penularan HIV-AIDS. Terdapat korelasi yang cukup tinggi antara mengonsumsi Napza, perilaku seksual bebas, dan HIV-AIDS. Kenyataan ini diakui oleh sembilan responden (66,67 persen) yang menyatakan sering melakukan hubungan seks bebas yang diawali dengan pesta minuman keras dan mengonsumsi Napza.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, ketika ketagihan dan kecanduan berbagai cara akan dilakukan untuk mendapatkan barang haram tersebut. Apabila Napza yang telah memikat dan menggoda mereka tidak tersedia, uang tidak punya, perilaku menyimpang pun mereka lakukan. Sebagai pelajar dan mahasiswa yang secara sosial ekonomi masih sangat tergantung pada orang tua dan keluarga, berbagai perilaku tidak terpuji dan bertentangan dengan norma hukum dilakukan demi untuk memperoleh Napza. Mulai dari berbohong dan menyalahgunakan uang kuliah (SPP), menjual barang miliknya, mengambil barang milik keluarga tanpa izin kemudian dijual (46,67 persen), menipu teman, saudara, dan orang tua (33,33 persen), bahkan mencuri barang milik orang lain (20 persen). Tempat memakai Napza sebagian besar dilakukan di rumah teman, di rumah kos, dan tempat liburan (33,33 persen), di sekolah atau di kampus (33,33 persen), dan di tempat lain yang dianggap aman seperti di kamar pada saat anggota keluarga tidak ada di rumah (13,34 persen), sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 4 berikut ini

Grafik 5. Tempat Mengkonsumsi Napza



Sumber: Hasil Wawancara (2011-2012)

Meningkatnya kasus tindak pidana dan penyalahgunaan Napza tidak terlepas dari keleluasaan pengguna Napza menggunakan fasilitas umum pribadi dan fasilitas pendidikan, seperti di rumah kos sekitar kampus, perkantoran, dan tempat hiburan. Mereka dengan sembunyi-sembunyi, bahkan ada yang terang-terangan, mengkonsumsi Napza baik dengan cara dihisap maupun disuntikkan ke pembuluh darah atau dikenal dengan istilah *junkie*, *putaw*, *sakaw*, dan *pedaw*. Grafik 5 mendeskripsikan bahwa rumah, tempat kos, sekolah atau kampus tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi pelajar dan ma-

hasiswa dari ancaman napza. Pengedar Napza justru melebarkan sayap operasinya ke insitusi pendidikan tersebut, sehingga sangat dimungkinkan pengedar napza justru mengintensifkan pangsa pasarnya ke anak-anak sekolah atau mahasiswa, terutama di sekolah atau universitas ternama. Jika anak-anak sekolah kecanduan napza, sampai kuliah bahkan sampai dewasa pun mereka akan tetap menjadi pemakai. Lebih parah lagi, saat ini napza bukan hanya ditujukan pada orang yang berduit saja (kaya), tetapi sudah mempengaruhi semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat miskin atau kurang mampu.

Hal ini merupakan salah satu strategi pengedar napza untuk menjaga keberlangsungan distribusi (*continuity of channeling*) dan pasar napza. Kurangnya pengawasan dari berbagai pihak terkait, khususnya dari keluarga dan aparat di lingkungan sekolah atau kampus, semakin menambah maraknya pengguna napza dan orang yang terjerumus dalam cengkraman napza. Kondisi ini juga dialami oleh responden yang menyatakan memanfaatkan rumah kos dan sarana hiburan seperti di berbagai café, club malam, dan karaoke sebagai tempat "*balmy and peaceful*" mengkonsumsi napza (33,33 persen), di sekolah atau kampus (33,33 persen), di tempat hiburan (13,33 persen), di tempat lain yang dianggap aman (13,33 persen), dan di rumah teman atau di rumah (kamar tidur) pada saat sepi atau orangtua tidak berada di rumah (6,68 persen). Hasil penelitian juga menunjukkan, bahwa sekitar 73,33 persen (11 orang) responden sebagai pengguna napza melalui media jarum suntik (IDU), sisanya melalui sarana menelan pil, menghisap, merokok, dan kombinasi memakai jarum suntik, pil ekstasi, menghisap (26,67 persen). Menurut responden, penyalahgunaan napza melalui jarum suntik merupakan pola baru yang diminati responden. Mereka beralasan, menghisap atau menghirup narkoba sebagai hal yang tidak ekonomis karena sebagian besar narkoba terbuang percuma. Sisanya sering menghirup asap dan menghisap rokok yang sudah dicampuri ganja, meskipun demikian mereka juga tidak menolak apabila kelompoknya menggunakan jarum suntik.

Sebagian besar responden pengguna jarum suntik menyatakan, menggunakan jarum suntik bergantian. Hal ini terjadi karena beberapa keterbatasan peralatan jarum suntik yang tersedia, kurang mengetahui terhadap resiko penggunaan jarum suntik bergantian, sedang menderita gejala putus obat pada saat dalam keadaan mabuk pada saat menyuntik, dan pemakaian jarum suntik bergantian dianggap sebagai bagian dari persahabatan. Salah satu alasan responden terus memakai jarum suntik bergantian karena mereka tidak mengetahui terhadap resiko seputar perilakunya, termasuk pemahaman yang rendah tentang asas menyuntik tidak aman yang dipelajari waku pertama kali memakai napza suntik, ketidakmampuan untuk menyuntik dirinya sendiri yang mengakibatkan ketergantungan pada orang lain untuk menyuntiknya, dan kesalahpahaman tentang sifat virus dan cara virus menular.

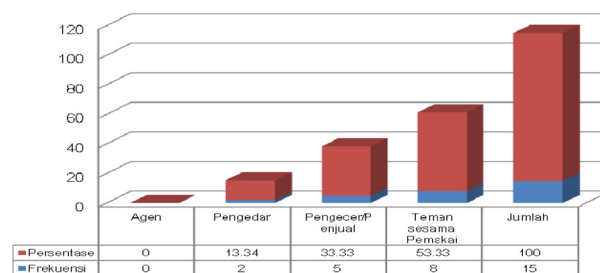
Alasan lain yang responden menggunakan jarum suntik di antaranya: (1) Memakai napza secara bersama-sama (kelompok) dianggap umum, dan peralatan jarum suntik dianggap cara yang paling tepat serta adil untuk membagi napza (2) Peralatan suntik mungkin sengaja dipakai berulang-ulang agar sisa-sisa napza yang masih tertinggal dapai dipakai (3) Kurang mengubris pesan yang diterima untuk menghindari pemakaian jarum, karena menganggap bahwa tidak ada resiko, misalnya tidak satupun teman saya yang terinfeksi HIV (4) Pada waktu ketergantungan napza kemungkinan masih menjalani hukuman di penjara.

Responden mengemukakan, bahwa pengedar biasanya berusaha memasukkan beberapa jenis napza kepada salah satu atau beberapa pelajar lebih dahulu. Pengedar tidak segan-segan memberi sampel napza secara gratis kepada sejumlah pelajar, dengan rayuan manis yang sangat *menggoda* agar pelajar mau mencoba merasakan “nikmatnya” napza. Setelah terjerumus godaan napza, pengedar tinggal menunggu umpannya dimakan mangsa, dan kemudian mangsa-mangsa yang lain akan ikut masuk perangkap. Biasanya seorang pelajar yang sudah terjerat kenikmatan semu napza akan bercerita kepada temannya atau kelompoknya secara sembunyi-sembunyi. Setelah

itu, kelompoknya pun ikut-ikutan mencoba. Akhirnya, mereka menjadi pelanggan karena kecanduan. Apabila mereka kecanduan napza saat masih sekolah di tingkat rendah, kemungkinan besar sampai kuliah bahkan hingga dewasa akan tetap jadi pemakai dan berpotensi besar untuk “dididik” sebagai pengedar. Hal ini berarti pasar yang berkesinambungan bagi sindikat dan pengedar napza.

Responden sebagai mantan pengguna napza dan telah berkeluarga (60 persen) menyatakan, memperoleh napza dari teman sesama pemakai yang kemungkinan besar merangkap sebagai pengedar atau pengecer (53, 33 persen). Indikasi ini tampak pada kesanggupan mereka menyediakan barang haram tersebut setiap responden ingin *fly* atau *pakaw* agar memperoleh *pedaw* (orang yang sedang mengalami kenikmatan napza). Meskipun demikian, seluruh responden (100 persen) menyatakan, tidak mengetahui secara pasti posisi teman penyedia dan penjual napza tersebut merupakan bagian dari sindikat dan pengedar napza dengan *multi level marketing system* (MLM) atau hanya sebagai penjual sekaligus pemakai. MLM napza yang dimaksudkan dari hasil penelitian ini adalah penjualan napza secara gelap tanpa menggunakan jalur distribusi biasa, melainkan melalui agen atau distributor yang merupakan anggota jaringan pemasaran napza tersembunyi dan bertingkat (*multi level*).

Grafik 6. Cara Responden Memperoleh Napza



Sumber: Hasil wawancara (2011-2012)

Pengguna yang bukan anggotanya hanya dapat membeli napza dari anggota (*distributor*). Dari informasi ini dapat ditarik kesimpulan, bahwa responden tidak terlibat dalam jaringan pemasaran napza, mereka hanya sebagai korban penyalahgunaan napza. Informasi lebih lan-

jut menyebutkan, responden tidak pernah ditarik iuran untuk menjadi anggota pengedar napza. Biasanya, seorang anggota pengedar napza ditarik iuran sebagai syarat menjadi anggota dan untuk memperpanjang keanggotaannya. Responden juga tidak pernah merasa diwajibkan untuk memperbanyak anggota apalagi dibina untuk melebarkan jangkauan pemasaran napza.

E. Penutup

Faktor utama penyebab penyalahgunaan Napza pada responden sebagian besar berasal dari faktor eksternal. Terdapat kecenderungan pada waktu pertama kali mengkonsumsi Napza responden masih berstatus pelajar dan mahasiswa karena alasan coba-coba dan penasaran, bujukan atau pengaruh teman, tidak mampu menolak kelompok pergaulannya yang menggunakan Napza sebagai bentuk dari konformitas dan solidaritas. Jenis Napza yang dikonsumsi sebagian besar adalah ganja, ekstasi, dan heroin. Cara mendapatkan Napza pertama kali sebagian besar diperoleh dari teman secara gratis atau teman sebaya (*peer*), dibeli dari teman, dan melalui perantara. Frekuensi mengkonsumsi Napza bervariasi, mulai dari rerata dua kali dalam satu bulan (53,33 persen), enam kali dalam setahun atau dua bulan sekali (33,33 persen), tiga sampai empat kali selama satu bulan (13,34 persen). Mereka mengaku mengkonsumsi napza tidak dilakukan secara teratur dan terus-menerus selama setengah tahun sampai tiga tahun. Merujuk definisi operasional penyalahgunaan napza dari Ritter, Anthony (1991) dan Meyer (1975), responden yang mengkonsumsi Napza enam kali dalam setahun atau satu kali dalam dua bulan (33,33 persen) disebut sebagai pengguna coba pakai (*new initiation*), dua kali dalam satu bulan (53,33 persen) dan frekuensi penggunaannya tiga sampai empat kali selama satu bulan (13,34 persen) dikategorikan ketergantungan Napza.

Responden menggunakan rumah kos dan sarana hiburan seperti di berbagai club malam dan karaoke sebagai tempat "*balmy and peaceful*" mengkonsumsi napza (33,33 persen) di sekolah atau kampus (33,33 persen), di tempat hiburan (13,33 persen), di tempat lain yang

dinggap aman (13,33 persen), dan di rumah teman atau di rumah (kamar tidur) pada saat sepi atau orangtua tidak berada di rumah (6,68 persen). Sekitar 73,33 persen (11 orang) responden sebagai pengguna napza melalui media jarum suntik (IDU), sisanya melalui sarana menelan pil, menghisap, merokok, dan kombinasi memakai jarum menghisap (26,67 persen).

Sebagai upaya mencegah dampak buruk dan semakin banyak serta meluasnya penyalahgunaan napza di kalangan generasi muda, maka perlu diintensifkan program dan upaya penanggulangan napza. Program dan upaya tersebut meliputi program pemberantasan peredaran gelap napza, pengurangan keberadaan napza di Indonesia, dan menekan kebutuhan pengguna napza serta perawatan pengguna napza yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga melibatkan semua komponen masyarakat, termasuk LSM dan dunia usaha. Program diutamakan di daerah yang diindikasikan sebagai pusat transaksi, rawan penyalahgunaan, dan peredaran dengan tanpa mengesampingkan daerah lainnya melalui strategi pencegahan, penanggulangan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Demikian juga upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kepada generasi muda tentang dampak buruk penyalahgunaan napza terhadap kondisi dan masa depan. Implementasi dari kegiatan rehabilitasi hingga pengkaderan di lingkungan keluarga, pemerintah, swasta, dan lembaga hukum hingga di lingkungan pekerja sosial, merupakan langkah nyata meningkatkan kesadaran masyarakat hidup merdeka tanpa napza.

Pustaka Acuan

- Abdul Wahid. (2009). *Waspada Narkoba di Sekolah*. www.google.co.id. Diakses tanggal 7 Januari 2014.
- Aldy Monareh. (2013): *Pengguna Narkoba di Indonesia Didominasi Oleh Generasi Muda*. www.google.co.id. Diakses tanggal 5 Februari 2014.
- Badan Narkotika Nasional. (2009). *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*. Jakarta: BNN RI
- Badan Narkotika Nasional. (2009). *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Apa Yang Bisa Anda Lakukan*. Jakarta: BNN RI

- Costigan G. Crofts N and Reid G. (1999). *The Manual for Reducing Drug-Related Harm in Asia*. Victoria: The Centre for Harm Reduction.
- Dadang Hawari. *Waspada Narkotika di Sekolah*. Koran Sore Wawasan. Desember 2009
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Mencegah Penyalahgunaan Napza melalui Kepercayaan. Kasih Sayang. dan Ketulusan*. Jakarta: Depdiknas.
- Darwin Butar-Butar. (2013). *Perkembangan Ancaman Narkobadi Indonesia Tahun 2008-2012*. Jakarta: Kapusdatin BNN
- Direktorat Narkotika Kepolisian Daerah Jawa Tengah. (2009). *P4GN*. Semarang.
- Gilbert. Pelh & Allan dalam Sarwono. (2005). *Psikologi sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ibnu Hadjar. (1995). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Mulleady G. (1992). *Counselling Drug Users about HIV and AIDS*. Oxford: Blackwell Scientific Publications.
- Idrus (2007). *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: UII Press.
- Porter JD. (1994). *HIV-AIDS and Development on the Shan State Borders*. Cambera: Australian National University.
- Rosenbaun M. (1996). *Policy Statement; Kids. Drugs and Drug Education: A Harm Reduction Approach*. San Francisco: National Council on Crime and Delinquency.
- Subagyo Partodiharjo. (2007). *Narkotika*. Jakarta. Erlangga
- Sudirman. (2000). *Panduan Orangtua dalam Menanggulangi Masalah Napza*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- . (2008). *Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Kompas Com.(2013). *Hampir Empat Ribu Anak SD Terkena Narkotika*. www.google.co.id. Diakses 1 Maret 2014
- Kuntadi. Tribun Yogya. 12 Februari 2013. *Penanganan Kasus Narkotika*.
- Lilis Holisah. (2014). *Tahun Penyelamatan Pengguna Narkotika*. <http://www.dakwatuna.com>. Diakses tanggal 20 Februari 2014
- Noviari. dkk. (2013). *Hubungan Antara Dukungan Sosial dengan Kualitas Hidup Pada Pecandu Narkotika yang Sedang Menjalani Rehabilitasi*. www.google.co.id. Diakses tanggal 10 Februari 2014
- BNN, Kamis, 23 November 2012: *Kepedulian Rendah. Pengguna Napza Meningkat*. www.google.co.id. diakses tanggal 25 Februari 2014
- . (2009). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*. www.google.co.id.
- . (2001). *Dasar Pemikiran Pengurangan Dampak Buruk Narkotika*. Jakarta: Indonesia HIV-AIDS & STD Prevention & Care Project (AUSAID)
- . Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 567/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan *Harm Reduction* (Dampak buruk Napza).
- . *Lautan Napza dan HIV-AIDS Mengancam Indonesia*. www.google.co.id. Diakses tanggal 4 Desember 2012.
- . *Napza Telah Merasuk di Kalangan Pelajar*. www.google.co.id. Diakses tanggal 20 Desember 2012.
- . *Pemeriksaan HIV di Kalangan Pengguna Napza di Indonesia*. www.google.co.id. Diakses tanggal 5 Desember 2013.
- . Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*. www.google.co.id. Diakses tanggal 9 Februari 2014
- . Undang-undang Nomo .22 tahun 1997 tentang *Narkotika*. www.google.co.id. Diakses tanggal 9 Februari 2014
- . Hari Anti Madat Sedunia. *Perangi Napza-nya Bukan Korbannya*. www.Google.co.id. diakses tanggal 27 November 2012.
- . *Mengenai jenis dan Penyalahgunaan Napza*. www.google.co.id. 19 Desember 2009
- . *Napza*. www.google.co.id. diakses tanggal 7 Maret 2012.
- . Badan Narkotika Propinsi (BNP) Jawa Tengah. www.google.co.id. Diakses tanggal 4 Februari 2014

Susylo Asmalyah. (2012). *Catatan Akhir Tahun Peredaran Gelap Narkoba Masih Mengintai Indonesia*. Sabtu. 29 Desember 2012. www.google.co.id. Diakses 1 Maret 2014

Tempo.CO – Min.(2013). *BNN Akan Dirikan Tempat Rehabilitasi Narkoba di Jateng*. 8 Desember 2013. www.google.co.id. Diakses tanggal 7 Februari 2014.

..... (2013). *Gejala Dini Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja*. <http://www.bnn.go.id/>. Diakses tanggal 21 July 2013.

..... (2014). *Surakarta Rentan Pengedaran Narkoba*. <http://surakarta.go.id/konten/Surakarta-rentan-pengedaran-Napza>. Diakses tanggal 27 February 2014.

Dampak Asistensi Sosial terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia *The Impact of Social Assistance toward Aged Social Welfare*

Ruaida Murni

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur, Telp. 021-8017146, Fax. 021-8017126
e-mail : ruaidamurni@yahoo.co.id. Diterima 26 Maret 2014, direvisi 20 Mei 2014, disetujui 1 Juni 2014

Abstract

This research is to describe social welfare condition of aged after receiving social assistance seen from social, economic, psychic, and physical health. Data are gathered through interview, focus group discussion, and observation. The main informants are determined purposively, aged received assistance and their family who care. Data are analysed through qualitative-descriptive technique. The result shows that the social assistance for neglected aged (ASLUT) brings positive impact on aged social welfare, even on some aged the assistance enable to enhance their social welfare. Aged physical condition who receive social assistance are better because they take medication routinely, able to access health service, and fulfill their food needs. Aged psychological condition receiving assistance are more comfortable and stable, not anymore worry about their needs, feel needed, able to help family even a little, such as to give sweets money their grandchildren. Aged social relation with family environment are more harmony, indicated by the increase of family, son and daughter, and neighbours visits, coincide with the fulfilment of their needs and the reduction of psychological burden of their daughter and son, closed family, and neighbours with aged.

Keywords:

Impact-Social Assistance-Aged Social Welfare

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi kesejahteraan sosial lanjut usia setelah menerima asistensi sosial dilihat dari kondisi sosial, ekonomi, psikis, dan kesehatan fisik. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, FGD, dan observasi. Informan utama penelitian ini ditentukan secara purposif, lanjut usia penerima bantuan atau keluarga yang merawat, data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian asistensi sosial lanjut usia terlantar (ASLUT) memberi dampak positif bagi kesejahteraan sosial lanjut usia, bahkan bagi kelompok lanjut usia tertentu mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan sosialnya. Kondisi fisik lanjut usia penerima ASLUT lebih baik karena berobat secara rutin, mampu mengakses layanan kesehatan, serta memenuhi kebutuhan makannya. Kondisi psikologis lanjut usia lebih nyaman dan stabil, tidak lagi khawatir akan kebutuhannya, merasa dibutuhkan, mampu membantu keluarga walaupun kecil, seperti memberi uang jajan cucunya. Hubungan sosial lanjut usia dan lingkungan keluarga lebih harmonis, ditandai dengan meningkatnya frekuensi kunjungan keluarga, anak dan kerabat, serta tetangga seiring dengan teratasinya kebutuhan lanjut usia, karena berkurangnya beban psikologis keluarga dan anak, tetangga, dan kerabat dekat terhadap lanjut usia.

Kata kunci:

Dampak-Asistensi Sosial-Kesejahteraan Lanjut Usia

A. Pendahuluan

Sejalan dengan meningkatnya usia harapan hidup, jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia terus bertambah. Berdasarkan data statistik pada tahun 2000 jumlah lanjut usia 14.396.745 jiwa dan tahun 2010 berjumlah 18.043.712 jiwa (Hasil Sensus Penduduk 2010 BPS). Hal ini disebabkan berbagai faktor, seperti keterbatasan ekonomi keluarga dan jarak dengan keluarga yang berjauhan, sehingga menimbulkan masalah bagi eksistensi kehidupan lanjut

usia hingga terjadi keterlantaran. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI mencatat 2.851.606 lanjut usia mengalami ketelantaran dan tahun 2011 jumlah tersebut meningkat menjadi 2.994.330. Saat yang bersamaan, realitas menunjukkan tidak semua lanjut usia berada dalam lingkungan keluarga yang mampu melindungi, melayani dan memenuhi kebutuhannya secara layak.

Sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat, lanjut usia mempunyai sejumlah hak

dan kewajiban. Lanjut usia mempunyai hak kemandirian, keikutsertaan, perawatan, kepuasan diri dan harga diri. *United Nation Principles for Elder Persons* (dalam Direktorat Pelayanan Lanjut Usia 2004) menjelaskan, bahwa lanjut usia berkewajiban memberi nasehat agar keluarga bermartabat, mengamalkan dan mentransformasikan ilmu, keterampilan dan kemampuannya kepada generasi muda, serta memberi teladan dalam segala aspek kehidupan. Beberapa kewajiban dimaksud tidak lagi dapat dilaksanakan, baik kewajiban terhadap dirinya sendiri maupun kewajiban terhadap masyarakat dan negara. Dalam kondisi demikian, sudah selayaknya negara mengambil peran untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia.

Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 28 H yang menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Lebih jauh ditegaskan dalam UU No 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang menetapkan, bahwa pemerintah berkewajiban memberi pelayanan dan perlindungan terhadap lanjut usia sehingga dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan dasarnya, serta dapat menikmati hidup secara layak. Untuk melaksanakan amanat tersebut, sejak tahun 2006, pemerintah melalui Kementerian Sosial melaksanakan Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU), yang saat ini disebut dengan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT). Program ASLUT merupakan pengembangan program JSLU yang telah diujicobakan selama lima tahun. Sesuai dengan hasil evaluasi, program mengalami penyempurnaan setiap tahun sehingga terjadi peningkatan dalam aspek kualitatif dan kuantitatif, baik ketepatan penerima, penambahan jumlah lanjut usia penerima dana bantuan maupun lokasi sasaran.

Program ini memberikan bantuan sosial berupa uang tunai yang dikirim langsung melalui PT Pos ke alamat lanjut usia yang memenuhi kriteria, pada tahap uji coba selama lima tahun nilai nominal yang diberikan sebesar Rp 300.000,- per bulan. Program ASLUT bertujuan untuk membantu pemenuhan sebagian kebutuhan dasar hidup lanjut usia sehingga dapat mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.

Sasaran program baru mencapai 0,88 persen dari jumlah lanjut usia terlantar, disebabkan terbatasnya anggaran yang dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh lanjut usia terlantar. Untuk memperluas target sasaran, maka jumlah bantuan yang diberikan kemudian mengalami penurunan menjadi Rp 200.000,- per bulan, sehingga jangkauan lokasi dan target sasaran lanjut usia menjadi lebih besar.

Hingga tahun 2013 Program ASLUT telah dilaksanakan di 33 provinsi, 356 kabupaten dan kota dan 3.039 desa dan kelurahan, dengan jumlah sasaran 26.500 orang. Untuk pertama kali wilayah Provinsi Gorontalo menerima asistensi sosial bagi lanjut usia terlantar (ASLUT), diberikan pada tahun 2010 di Kabupaten Gorontalo Utara (Gorontalo Utara) untuk 100 orang yang tersebar di dua kecamatan, Kecamatan Kwandang dan Kecamatan Anggrek. Permasalahannya adalah dengan diberikannya asistensi sosial sebesar Rp 200.000,- per bulan, apakah dapat membantu mengurangi beban lanjut usia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya serta mempertahankan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia penerima? Sejauhmana asistensi sosial yang diberikan tersebut dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar, sehingga dapat mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia dan dapat menikmati hidupnya secara wajar.

Sejalan dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi kesejahteraan sosial lanjut usia setelah menerima asistensi sosial, dilihat dari kondisi sosial, ekonomi, psikis dan kesehatan fisik. Informan ditentukan secara purposive, lanjut usia penerima bantuan atau keluarga yang merawatnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada unit pelaksana dan pembuat kebijakan ASLUT untuk mengoptimalkan pelayanan sosial terhadap lanjut usia.

B. Kajian Teori

Lanjut usia merupakan istilah untuk menunjukkan tahapan akhir dalam masa perkembangan manusia. Masa ini datang dengan sendirinya secara alami dengan segala konsekuensinya,

baik pada aspek fisik, mental maupun sosial. Banyak pengertian atau definisi yang dikemukakan ahli tentang lanjut usia, pengertian tersebut dikemukakan sesuai dengan kebutuhan dan sudut pandang masing-masing. Berdasarkan UU No 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, pada Bab I disebutkan, 1) lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas; 2) Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa; 3) lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Romanus Beni (2001) pada laporan utama Warta Demografi, bahwa secara individu seseorang disebut sebagai lanjut usia jika telah berumur 60 tahun ke atas untuk negara berkembang, atau 65 tahun ke atas untuk negara maju. Di antara lanjut usia yang berumur 60 tahun ke atas, dikelompokkan lagi menjadi *young old* (60-69 th), *old* (70-79 th) dan *old-old* (80 th ke atas). Dari aspek kesehatan seseorang disebut sebagai lanjut usia (*elderly*) jika berusia 60 tahun ke atas. Penduduk yang berusia antara 49-59 tahun disebut *praseenile* atau *pralansia*, dan lanjut usia berumur 70 tahun ke atas disebut sebagai lanjut usia beresiko. Dari aspek ekonomi, lanjut usia (60 th ke atas) dikelompokkan menjadi: Pertama lanjut usia yang produktif yaitu lanjut usia yang sehat baik dari aspek fisik, mental maupun sosial; dan kedua lanjut usia yang tidak produktif yaitu lanjut usia yang sehat secara fisik, tetapi tidak sehat secara mental dan sosial, atau sehat secara mental tetapi tidak sehat dari aspek fisik dan sosial, atau lanjut usia yang tidak sehat dari aspek fisik, mental dan sosial.

Karakteristik lanjut usia menurut Marry Buckley yaitu usia kematian, intensifikasi, penyakitan dan kesepian (Argyo demartono; 2006). Orang dengan usia yang sudah lanjut sering dikatakan sudah dekat dengan alam selanjutnya, apalagi dengan kondisi fisik yang sudah lemah bahkan ada yang sakit-sakitan. Kondisi lanjut usia yang sakit-sakitan, akan bertambah parah ketika sanak saudara tidak lagi bersamanya atau tidak mempedulikannya. Kondisi lanjut usia yang seperti ini yang sangat butuh perhatian baik dari

pemerintah maupun masyarakat. Dua persoalan utama yang sering dihadapi lanjut usia, yaitu persoalan kesehatan dan kemiskinan. Namun demikian dalam usia yang sudah tua diikuti oleh kondisi fisik, psikis dan sosial yang lemah, membutuhkan perhatian yang cukup, baik dari keluarga, masyarakat maupun pemerintah, baik perhatian terhadap kelemahan fisik, kesehatan maupun ekonominya demi pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Rencana Aksi Nasional Kesejahteraan Lanjut Usia (RAN LU) tahun 2005 secara langsung telah mencanangkan lima program pokok penduduk lanjut usia, yaitu kesejahteraan sosial dan asistensi sosial; Sistem pelayanan kesehatan; Dukungan keluarga dan masyarakat; Kualitas hidup; Sarana dan fasilitas khusus bagi lanjut usia. Romanus Beni (2001) mengemukakan bahwa secara khusus kebijakan tentang penduduk lanjut usia di Indonesia bertujuan untuk: Terciptanya sistem asistensi sosial yang dapat mendorong kehidupan penduduk lanjut usia; Terwujudnya sistem pelayanan kesehatan yang dapat mendorong penduduk lanjut usia berperilaku hidup sehat; Terciptanya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap keberadaan penduduk lanjut usia, dengan memperkuat nilai-nilai budaya yang menghargai, menghormati dan memberi perhatian serta perlindungan kepada lanjut usia; meningkatkan hubungan antargenerasi yang selaras dan serasi di lingkungan keluarga serta di kehidupan masyarakat dan bangsa; Terwujudnya iklim yang memungkinkan tercapainya kesejahteraan sosial bagi penduduk lanjut usia yang antara lain dengan meningkatkan peran serta lanjut usia dalam membina kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Terciptanya iklim yang memungkinkan lanjut usia dapat mengaktualisasikan diri melalui karya dan kerja nyata dalam hal melakukan kegiatan ekonomi produktif; Meningkatkan penyediaan dan mutu sarana dan prasarana sosial yang dapat memudahkan lanjut usia melakukan aktivitas dan memenuhi kebutuhan sehari-hari; Terwujudnya iklim kehidupan yang memungkinkan lanjut usia dapat melakukan kegiatan sosial keagamaan dan kerohanian secara khusus; Terciptanya kesetaraan gender lanjut usia dalam setiap hak

dan kewajiban baik dalam tatanan kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berkaitan dengan hal tersebut asistensi sosial bagi lanjut usia sangat berperan untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia secara utuh atau memenuhi kebutuhan hidupnya yang berada dalam keluarga tidak mampu. Kriteria yang mendapatkan asistensi sosial tercantum dalam buku Pedoman Pelaksanaan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT, 2013) meliputi:

1. Kriteria Penerima diutamakan bagi lanjut usia yang berusia 60 tahun ke atas, sakit menahun, dan hidupnya sangat tergantung pada bantuan orang lain, atau hidupnya hanya bisa berbaring di tempat tidur (*bed-ridden*) sehingga tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari, tidak memiliki sumber penghasilan, miskin dan terlantar. Lanjut usia yang telah berusia 70 tahun ke atas yang tidak potensial, tidak memiliki sumber penghasilan, miskin dan terlantar.
2. Persyaratan penerima: Terdata dan ditetapkan sebagai penerima program asistensi sosial lanjut usia telantar berdasarkan usulan secara berjenjang. Memiliki KTP/surat keterangan domisili/Kartu Keluarga dan surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah setempat. Melampirkan foto diri terakhir seluruh tubuh yang menggambarkan kondisi kemiskinan, keterlantaran dan ketidakberdayaannya ukuran *postcard*.

Asistensi sosial untuk lanjut usia yang pada awalnya disebut sebagai jaminan sosial lanjut usia yang pengertiannya seperti yang diutarakan oleh Bogisubasti bahwa jaminan sosial merupakan suatu program yang didanai atau yang diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar orang tanpa sumber daya. Pada umumnya diarahkan pada mereka yang hidup dalam kemiskinan, penyandang cacat, keluarga kurang mampu. (<http://shvoong.com/social-sciences/sociologi>). Edi Suharto mengutip dari teori pekerjaan sosial (*social work*), jaminan sosial (*social security*) merupakan salah satu jenis kebijakan sosial untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dalam masyarakat. Jaminan

sosial (*social security*) dapat didefinisikan sebagai sistem pemberian uang dan atau pelayanan sosial guna melindungi seseorang dari resiko tidak memiliki atau kehilangan pendapatan akibat kecelakaan, kecacatan, sakit, menganggur, kehamilan, masa tua dan kematian <http://www.policy.hu/suharto/modula/makindo>.

Asistensi sosial (*social assistance*) disebut juga sebagai bantuan sosial merupakan jaminan sosial umumnya diberikan kepada kelompok lemah dalam masyarakat, yang meskipun tidak membayar premi tetapi dapat memperoleh tunjangan pendapatan atau pelayanan sosial (Anonim; 1999). Menurut Bank Dunia dan ILO (Raper, 2008), *Social Assistance* (bantuan sosial) berfungsi sebagai jaring pengaman (*safety net*) untuk semua warga negara. Bantuan sosial murni berasal dari pengelolaan pendapatan negara atau penerimaan pajak, diatur oleh negara utamanya berbetuk skema bantuan penghasilan, terutama untuk lapisan masyarakat yang paling membutuhkan. Vladimir Rys (2011) mengemukakan, *social assistance* (bantuan sosial) merupakan salah satu komponen dari perlindungan sosial yang sasaran utamanya adalah masyarakat miskin, dan biasanya tersegmentasi, artinya hanya orang-orang tertentu saja yang berhak mendapatkan. Pengertian tersebut, baik dengan nomenklatur jaminan maupun asistensi sosial lanjut usia, merupakan pemberian bantuan terhadap lanjut usia terlantar yang diharapkan dapat membantu mengurangi beban lanjut usia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta mempertahankan atau meningkatkan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia penerima, sehingga dapat menikmati hidupnya secara wajar. Pengertian asistensi sosial lanjut usia terlantar (ASLUT) adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk membantu lanjut usia terlantar agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (Direktorat Pelayanan Lanjut Usia, 2013)

Semua kebijakan program terhadap lanjut usia pada dasarnya bertujuan terciptanya sistem jaminan sosial (RAN Kesos, 2000). ASLUT adalah program perlindungan sosial ditujukan kepada lanjut usia terlantar yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga membutuhkan bantuan orang lain (Direktorat

Pelayanan Lanjut Usia, 2013). ASLUT tidak hanya diarahkan untuk mampu menjamin kehidupan lanjut usia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga ditujukan untuk mampu meningkatkan kualitas hidup lanjut usia sehingga tidak membebani orang lain dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. ASLUT dimaksudkan untuk mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia.

Berdasarkan UU No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Firmansyah (2013) menjelaskan, bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan, kegiatan dan gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan standar dan taraf hidup, memecahkan masalah sosial, memperkuat struktur sosial masyarakat, memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga ketenteraman masyarakat, serta untuk memungkinkan setiap warga negara mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi dirinya, keluarga dan masyarakat (<http://kesejahteraansosial.blogspot.com/2013/02/pengertian-kesejahteraan-sosial.html>).

C. Hasil Penelitian: Dampak ASLUT di Provinsi Gorontalo

Gambaran Umum: Populasi lanjut usia di Provinsi Gorontalo mencapai 11.576 jiwa yang terdiri dari 8.030 lanjut usia produktif dan 3.546 tidak produktif, tersebar di 6 kabupaten. Kabupaten Gorontalo Utara, populasi lanjut usia mencapai 1922 jiwa, terdiri dari 1.380 lanjut usia potensial dan 542 jiwa lanjut usia tidak potensial (Dinas Sosial Provinsi Gorontalo). Berbagai program pelayanan sosial lanjut usia telah dilaksanakan, baik yang didanai oleh APBN maupun APBD, seperti program ASLUT, Usaha Ekonomi Produktif (UEP) KUBE, *Day Care Services* melalui PSTW Ilomata dan Beringin, *Home Care* melalui LSM Putra Mandiri dan Asistensi Sosial LKS Lanjut usia melalui Pantii. Kenyataan menunjukkan, di lapangan masih banyak lanjut usia terlantar. Bentuk keterlantaran itu antara

lain terlihat dari adanya lanjut usia menjadi pengemis di jalan raya, bahkan dalam kasus tertentu lanjut usia dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mencari keuntungan dengan cara mengorganisir mereka ketika mengemis di pusat-pusat keramaian. Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, memperluas jangkauan wilayah Program ASLUT hingga ke Provinsi Gorontalo pada tahun 2010, yang saat itu masih dinamakan Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU). Pada tahap awal program dilaksanakan di Gorontalo Utara dengan jumlah peserta 100, sampai tahun 2013 program berkembang di enam kabupaten dengan jumlah penerima 600 lanjut usia.

Gambaran Umum Informan Keluarga Lanjut Usia

Informan utama penelitian ini berasal dari keluarga yang menjadi pengasuh lanjut usia penerima asistensi sosial lanjut usia yang terdiri dari 30 orang. Usia informan berkisar 25 tahun sampai 56 tahun. Hubungan antara informan dengan lanjut usia adalah anak, saudara kandung dan cucu. Tingkat pendidikan informan adalah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (8 orang), tamat SD (8 orang), tidak tamat SD (9 orang), tidak tamat SMP, tidak tamat SMA, paket B dan SR serta tidak pernah sekolah masing-masing satu orang.

Tabel 1. Jumlah penghasilan informan keluarga peserta ASLUT

No.	Jumlah Penghasilan/ bulan (Rp)	Frekwensi	persen	Keterangan
1	100.000 - 299.000	1	3,33	
2	300.000 - 499.000	10	33,33	
3	500.000 - 699.000	17	56,67	
4	700.000	1	3,33	
5	Tdk ada penghasilan	1	3,33	Tidak bekerja
Jumlah		30	100	

Sumber: Jawaban Informan (2013)

Tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah menyebabkan pekerjaan yang dimiliki informan tidak mendukung untuk memperoleh penghasilan yang memadai. Hal ini terlihat dari jenis pekerjaan informan yang sebagian besar adalah petani (83,35 persen), baik petani

pemilik, petani penggarap, maupun buruh tani, tukang becak, penjaga konter HP, nelayan, supir truk, dan tidak bekerja masing-masing 3,33 persen. Dari pekerjaan yang ditekuni, informan mengaku memperoleh penghasilan berkisar antara Rp 100.000–Rp 700.000 per bulan.

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa penghasilan keluarga yang menjadi pengasuh lanjut usia sangat kecil, bahkan satu orang di antaranya tidak mempunyai penghasilan karena tidak bekerja. Dengan demikian keluarga pengasuh lanjut usia termasuk keluarga miskin sehingga memiliki keterbatasan untuk memberikan pelayanan kepada lanjut usia, terutama dari sisi pemenuhan kebutuhan dasar hidup lanjut usia.

Kondisi Lanjut Usia Penerima Asistensi Sosial Pra-asistensi Sosial: berdasarkan informasi dari informan (keluarga lanjut usia), pendamping, kepala dusun dan dinas sosial. Informasi ini dibutuhkan terutama untuk melihat kesesuaian dengan kriteria peserta program yang ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program Asistensi Sosial Lanjut Usia (2013). Berdasarkan informasi dari dinas sosial setempat dan pendamping ASLUT, sebagian besar peserta ASLUT sudah tidak mampu melaksanakan aktivitas sehari-hari, bahkan untuk mengurus dirinya sendiri sudah tidak mampu. Mereka hanya terbaring di tempat tidur (*bed ridden*) sehingga sepenuhnya tergantung dan menunggu layanan dari keluarga.

Sebagian besar lanjut usia peserta ASLUT tinggal bersama keluarga seperti anak dan cucu. Mereka menempati rumah sempit yang sebagian besar dindingnya terbuat dari anyaman bambu, lantai tanah, dan atap daun rumbia. Dalam kondisi demikian tata ruang rumah terkesan seadanya, tidur tanpa kasur dalam ruangan yang tidak tertata, bahkan aktivitas lanjut usia cenderung terpusat di kamar, mulai dari makan, mandi dan cuci. Sebagian kecil di antaranya mendapat rumah bantuan dari dinas sosial berupa program bantuan perbaikan rumah fakir miskin sehingga kondisinya relatif lebih baik. Ketidakmampuan keluarga pengasuh mempengaruhi kesehatan lanjut usia sehingga sering sakit, walau pemerintah daerah menyediakan fasilitas pengobatan gratis, tetapi lanjut usia

dan keluarganya tidak memanfaatkan karena ketiadaan biaya transpor. Situasi ini membawa akumulasi permasalahan dalam hidup lanjut usia seperti keterbatasan pemenuhan gizi dan akses sosial yang terbatas.

Pelaksanaan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT): Program ASLUT dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan, yaitu tahap sosialisasi ke instansi terkait dan masyarakat, pendataan lanjut usia dan penyaluran dana asistensi sosial. **Tahap Sosialisasi**, dimaksudkan untuk menjelaskan program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) kepada pelaksana program dan masyarakat agar dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sosialisasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Tingkat Nasional secara langsung dilakukan oleh Kementerian Sosial, sementara di tingkat provinsi dan kabupaten dilakukan bersama oleh tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Sosialisasi juga dimaksudkan untuk memperluas informasi tentang ASLUT baik kepada masyarakat setempat maupun kepada instansi terkait.

Sosialisasi secara langsung dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara dengan melibatkan sejumlah komponen sebagai peserta, seperti camat, kepala desa/kelurahan, tokoh masyarakat, PT Pos Kabupaten/Kota dan calon pendamping. Sosialisasi juga dilakukan melalui forum rapat, media cetak dan elektronik seperti radio (RRI Gorontalo), koran dan forum rapat yang dianggap dapat menyebarkan informasi ke seluruh lapisan masyarakat.

Tahap Pendataan: Sebelum bantuan disalurkan dilakukan pendataan untuk mendapatkan lanjut usia sesuai dengan kriteria. Pendataan dilakukan memakai formulir yang disediakan, sekaligus melakukan observasi terhadap kondisi lanjut usia dan keluarganya. Untuk melengkapi data, diperlukan foto seluruh tubuh dan foto lingkungan kediaman lanjut usia calon penerima asistensi sosial. Pendataan melibatkan beberapa unsur yang berkompeten, seperti Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara, petugas Kelurahan, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) yang kemudian bertugas sebagai pendamping.

Hasil pendataan dan seleksi yang dilakukan oleh petugas di lapangan menunjukkan bahwa lanjut usia penerima asistensi sosial sudah memenuhi kriteria.

Permasalahan yang muncul dalam pendataan adalah terbatasnya kuota yang diberikan untuk wilayah Gorontalo Utara, dibandingkan dengan jumlah lanjut usia yang seharusnya mendapat asistensi sosial. Kesulitan muncul ketika petugas pendata dan pihak dinas sosial harus menetapkan lanjut usia yang harus mendapatkan asistensi sosial terlebih dahulu. Banyak lanjut usia yang kondisinya hampir sama tinggal berdekatan dan tidak mendapatkan asistensi sosial. Kondisi ini menimbulkan kecemburuan sosial walaupun sudah diberi penjelasan dan bahkan sudah ditetapkan sebagai daftar tunggu. Dalam kondisi seperti ini peran tokoh masyarakat menjadi sangat penting, mereka harus mampu mengatasi permasalahan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

Tahap Penyaluran: Penyaluran dana ASLUT dilakukan oleh dua orang petugas PT Pos Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Kedua petugas pos ini menyalurkan dana asistensi sosial kepada seluruh lanjut usia penerima asistensi sosial di dua kecamatan, dengan mengantarkan langsung ke alamat penerima asistensi sosial. Sebagian kecil diambil oleh penerima asistensi sosial atau keluarganya ke kantor desa setempat. Hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan demi menghindari sindiran-sindiran dari keluarga lanjut usia yang belum mendapat asistensi sosial, yang dikhawatirkan akan berkembang menjadi masalah baru.

Penyaluran dana asistensi sosial dilakukan dua bulan sekali oleh petugas Pos Kwandang didampingi oleh pendamping ASLUT dan aparat desa. Tokoh masyarakat berperan aktif dalam mengontrol dan mendampingi petugas PT Pos dan memberikan penjelasan kepada penerima asistensi sosial tentang pemanfaatan dana, agar sesuai dengan kebutuhan lanjut usia. Sebagai bukti bahwa dana tersebut sudah diterima dengan jumlah yang ditentukan, petugas Pos menyediakan kuitansi yang ditandatangani atau cap jempol oleh lanjut usia, sebagai bukti nilai bantuan tidak berkurang dengan alasan apapun.

Beberapa hal yang dirasakan petugas penyalur dana ASLUT adalah jumlah lanjut usia penerima asistensi sosial cukup banyak, sementara petugas PT Pos yang ditunjuk sebagai penyalur tetap harus mengurus pekerjaan kantornya karena keterbatasan pegawai kantor Pos Kwandang yang hanya dua orang. Petugas PT Pos melaksanakan penyaluran dana ASLUT pada hari libur saat ia tidak melakukan pekerjaan kantor pos, sehingga membutuhkan dana tambahan untuk transportasi ke alamat lanjut usia.

Penghentian Penerima Bantuan: Walaupun sudah melewati pendataan dan seleksi yang ketat, masih ada beberapa lanjut usia penerima asistensi sosial yang harus diberhentikan sebagai penerima asistensi sosial, karena syarat yang ditentukan tidak terpenuhi, atau penerima ASLUT meninggal dunia. Sejak pelaksanaan program ASLUT di Kabupaten Gorontalo Utara, delapan orang lanjut usia penerima asistensi sosial diberhentikan karena tidak sesuai dengan kriteria persyaratan yang ditentukan, dan tujuh orang berhenti karena meninggal dunia. Lanjut usia peserta yang diberhentikan menerima asistensi sosial, diganti dengan lanjut usia lain yang memenuhi syarat. Proses pemberhentian dan penggantian dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara. Proses diawali dengan mengajukan pemberhentian dan penggantian lanjut usia ke Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, diteruskan ke Kementerian Sosial. Lanjut usia yang sudah mendapat rekomendasi sebagai pengganti, Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara menerbitkan surat penunjukan penerima dana asistensi sosial lanjut usia kepada yang bersangkutan untuk selanjutnya mendapatkan dana asistensi sosial.

Tahap Pendampingan: dilakukan sebagai penghubung antara pelaksana program dengan lanjut usia. Sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan Asistensi Sosial Lanjut Usia (2013) pendamping bertugas berkoordinasi dan berkonsultasi dengan dinas/instansi sosial provinsi/kabupaten/kota serta aparat desa/kelurahan setempat; melaksanakan kunjungan rumah (*home visit*) secara berkala minimal empat kali dalam satu bulan dan membuat laporan perkembangan kondisi fisik dan sosial penerima ASLUT;

melaksanakan bimbingan apabila terjadi kasus masalah lanjut usia; memantau dan membimbing pemanfaatan dana sesuai dengan tujuan program; memberikan kemudahan kepada lanjut usia penerima ASLUT menerima pelayanan lain yang dibutuhkan; memberikan kemudahan bagi lanjut usia penerima ASLUT untuk menerima pembayaran di tempat tinggal dari lembaga penyalur; mengikuti pertemuan pendamping untuk tukar menukar informasi dan berbagi pengalaman dalam melaksanakan pendampingan; Membuat laporan hasil pendampingan pelaksanaan program ASLUT secara periodik ke dinas/instansi sosial kabupaten /kota; Membuat laporan dan berita acara penggantian penerima ASLUT sesuai dengan daftar tunggu (yang telah dikirimkan ke Direktorat PSLU (sesuai kriteria) apabila terdapat penerima ASLUT yang meninggal, pindah alamat dan tidak sesuai dengan kriteria ke Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/ Kota.

Kegiatan yang dilakukan dalam pendampingan meliputi: memberikan kemudahan bagi lanjut usia dalam menerima dana bantuan; pendampingan pemanfaatan bantuan (memantau dan membimbing) pemakaian dana bantuan; bimbingan Psikososial kepada lanjut usia agar mampu melaksanakan keberfungsian sosialnya dalam lingkungan masyarakat. Pendampingan dilakukan oleh tenaga pendamping yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara. Pada tingkat kecamatan terdapat satu orang pendamping yang mengkoordinir pendamping yang ada pada tingkat desa. Setiap desa terdapat dua orang pendamping, terdiri dari aparat desa, PSM dan PSKS. Sesuai dengan tugasnya, pendamping melakukan kunjungan ke rumah lanjut usia yang menerima asistensi sosial minimal satu kali sebulan.

Data lapangan menunjukkan bahwa frekuensi kunjungan pendamping sangat variatif. 66,7 persen pihak keluarga lanjut usia mengaku kunjungan pendamping dilakukan dua kali dalam sebulan, tiga kali kunjungan (26,7 persen), dan satu kali kunjungan (3,3 persen). Frekuensi ini lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan jarak tempat tinggal lanjut usia. Untuk lanjut usia tertentu, ada yang dikunjungi hingga 10 kali dalam sebulan. Walau frekuensi kunjungan

tidak sesuai dengan ketentuan pedoman, tetapi kunjungan lebih disesuaikan dengan kebutuhan lanjut usia yang dikontrol dengan sarana komunikasi yang ada. Untuk menjangkau semua lanjut usia yang di bawah tanggung jawabnya, pendamping mendapat dana transpor Rp 250.000,- sebulan. Menurut pendamping, dana tersebut belum mencukupi apabila dibandingkan dengan kegiatan pendampingan yang harus dilakukan, mengingat jarak tempuh dan lokasi tempat tinggal lanjut usia cukup jauh.

Tahap Monitoring dan Evaluasi, dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara secara langsung turun ke lapangan. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan melalui mekanisme pelaporan yang diberikan oleh pendamping. Beberapa hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah proses pendampingan, penyaluran bantuan yang dilakukan oleh PT Pos, kondisi lanjut usia penerima asistensi sosial, dan pemanfaatan dana asistensi sosial.

Pelaporan: merupakan serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian hasil monitoring dan evaluasi. Pelaporan digunakan sebagai bahan dokumentasi pertanggungjawaban fungsional dan keuangan sebagai bahan kendali dalam upaya perbaikan dan optimalisasi program ASLUT, yang dilakukan secara berjenjang. Laporan tertulis disampaikan kepada insatansi terkait, terutama kepada instansi penyelenggara dan penanggung jawab. Laporan dilakukan, pertama disampaikan oleh pendamping ASLUT yang lebih tahu mengenai kondisi lanjut usia. Laporan disampaikan ke Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara dan tembusan ke Dinas Sosial Provinsi. Laporan yang dibuat oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara ditujukan kepada Dinas Sosial Provinsi dan Kementerian Sosial yang dilaksanakan setiap bulan.

Dampak Asistensi Sosial Terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia: Merujuk pada Pedoman Pelaksanaan Program ASLUT, tujuan pemberian ASLUT adalah untuk menjamin sebagian pemenuhan kebutuhan dasar hidup lanjut usia sehingga dapat mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya, dengan memanfaatkan dana asistensi sebagai biaya permakanan/pemenuhan gizi, transportasi, anjang sana, dana

kematian/pemakaman, dan kebutuhan lain yang bersifat melindungi kehidupan lanjut usia. Kesejahteraan sosial lanjut usia dapat dilihat dari kondisi kesehatan fisik, psikis, dan hubungan sosial lanjut usia.

Kondisi Kesehatan Fisik, kondisi fisik lanjut usia yang mendapat asistensi sosial pada umumnya sudah sangat lemah, sakit-sakitan dan bahkan ada yang sudah tidak bisa bangun dari tempat tidurnya, sehingga seluruh aktivitasnya harus dibantu oleh orang lain. Walaupun masih ada yang bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti ke masjid, main ke rumah tetangga, tetapi jumlahnya sedikit. Kondisi lanjut usia yang sangat tidak berdaya (sakit-sakitan) membutuhkan perhatian untuk penyembuhan setidaknya untuk memberi rasa gembira karena sudah tidak lagi memikirkan uang untuk berobat tetapi ada harapan untuk dapat berobat. Hal ini tercermin juga dari pernyataan sebagian besar informan keluarga (83 persen) mengemukakan, bahwa sebagian besar dana asistensi sosial yang diterima lanjut usia dimanfaatkan untuk biaya berobat dan membeli makanan (beras, lauk pauk, buah dan susu).

Ketika ditanya kepada keluarga, "Bu, 'kan berobat gratis, ndak bayar 'kan, kok, uangnya dipakai buat berobat juga?".....dijawab "Ya, Bu berobatnya gratis, tapi 'kan ke rumah sakit kan perlu ongkos, terus ada obat yang harus dibeli, tidak semua obat gratis, Bu". Ungkapan tersebut menyatakan bahwa, dana asistensi sosial yang dikatakan untuk berobat, artinya dipakai untuk transportasi menjangkau fasilitas berobat yang sudah disediakan oleh pihak pemerintah daerah setempat. Selain untuk kesehatan dan makan, dana asistensi sosial juga dimanfaatkan untuk menunjang terpenuhinya pemulihan kondisi kesehatan dan fisik, antara lain membeli pakaian (63 persen) dan ditambah juga membeli peralatan tidur seperti tikar dan selimut (16 persen), serta membeli peralatan makan seperti piring, gelas, sendok dan peralatan masak (10 persen). Sebagai ilustrasi ketika ditanya, "Nek, kok, bagus sekali bajunya, siapa yang beli?" kemudian dijawab, "Ini 'kan saya suruh dibelikan anak saya, saya kan punya uang dikasih sama pemerintah."

Sejalan dengan temuan di atas, hasil observasi juga menunjukkan bahwa kondisi lanjut usia yang mendapat asistensi sosial kelihatan lebih sehat dan dapat berkomunikasi aktif bahkan mampu beraktivitas (siraturrahi dengan tetangga dan melaksanakan ibadah ke masjid), bahkan dua orang lanjut usia yang tadinya tidak bisa melihat karena penyakit katarak, kemudian sudah bisa kembali melihat dengan memanfaatkan operasi katarak yang disediakan secara gratis oleh pemerintah daerah. Secara umum keluarga pengasuh lanjut usia mengaku bahwa perubahan fisik yang terjadi setelah mendapat asistensi sosial lebih sehat (53,3 persen), sehat dan bersih (23,3 persen) tetapi ada yang mengemukakan sama saja (23,3 persen). Keluarga yang mengemukakan sama saja adalah lanjut usia yang sejak awal sudah tidak mampu melakukan aktivitas, karena usia dan penyakit akut yang tidak bisa diobati lagi, sehingga dalam kesehariannya hanya di tempat tidur.

Kondisi Psikis (emosional, pelaksanaan ibadah): Keberadaan asistensi sosial membawa semangat baru bagi kehidupan lanjut usia yang menjadi peserta, walaupun penerimaannya kadang-kadang dirapel untuk beberapa bulan, tetapi lanjut usia menyadari sepenuhnya bahwa dana asistensi pasti datang. Dengan dana asistensi mereka memiliki harapan mendapatkan atau memiliki sesuatu yang diinginkan, seperti makanan kesukaannya, juga membantu keluarga dalam pengasuhan karena tingkat emosi lanjut usia berkurang dan stabil. Seperti yang dikatakan oleh informan keluarga (30 persen), bahwa hubungan antara lanjut usia dan anggota keluarga kelihatan lebih harmonis. Lanjut usia juga merasa sangat senang diperhatikan oleh pemerintah. Ketika ditanya, "Nek, uang yang nenek dapat dari pemerintah itu dibeliin apa saja?" ia menjawab, "banyak.... nenek beliin makanan, saya minta tolong sama cucu saya dibeliin susu, telur, roti, terus saya kalau makan maunya ada ikannya, saya minta dibeliin sama dia, sekarang saya sudah lama ndak minum susu lagi, duitnya belum dikasih". Ditanya lebih lanjut, "Uangnya nenek yang kasih sama cucunya," dijawab, "uang saya itu dia yang pegang, kalau nenek yang pegang nanti lupa naruhnya, biarin aja disimpan sama dia". Kemudian di-

tanya lagi, "Nenek ndak takut kalau uangnya dibeliin cucunya buat keperluan anaknya atau keperluannya sendiri". Jawabnya, "Ah, ndak cucu saya itu jujur, kok, lagi pula 'kan dia yang ngurus saya kalau dia ambil juga 'kan ndak apa-apa, saya juga harus bantu dia, 'kan kerjanya di sawah sama suaminya (maksudnya sebagai buruh tani)". Sang nenek bercerita gembira dengan wajah cerah. Ia bangga karena mampu melakukan hal yang sebelumnya tidak bisa diperbuat, seperti membantu anak dan memberi jajan cucunya.

Sejalan dengan membaiknya kondisi psikologis lanjut usia, kehidupan ibadahnya pun mengalami perbaikan. Informan keluarga mengemukakan, orangtuanya yang tadinya tidak mampu melaksanakan shalat di masjid karena sakit yang diderita, tetapi sekarang karena kondisi fisiknya sudah membaik, sehingga mampu shalat ke masjid, sementara yang lain mengemukakan mampu menghadiri kegiatan yang dilaksanakan di masjid, karena kebetulan letak masjid tidak terlalu jauh dari rumah lanjut usia. Kecuali lanjut usia yang karena usia dan penyakitnya sudah tidak bisa disembuhkan, sehingga tidak mampu lagi melakukan aktivitas sehari-hari, kesehariannya hanya terbaring di tempat tidur (*bedridden*). Pada saat kunjungan ke rumah lanjut usia yang letaknya tidak jauh dari masjid, ketika ditanya, "Kek, ndak ikut pengajian di masjid," dijawab, "Ya, kadang-kadang kalau ndak capek," kemudian ditanya lagi "kalau dulu ikut ndak, kek?" dijawab, "Ya, ndak bisa sakit terus, jalan keluar rumah saja saya ndak bisa, kalau ke masjid 'kan kasian sama cucu saya, harus diantar, saya juga ndak mau, badan saya pada sakit, bengkak semua." Kemudian ditanya lagi, "Kalau sekarang bisa jalan sendiri ke masjid, ya, kek?" dijawab, "Ya, sendiri saja nanti 'kan ada orang lain juga yang mau ke masjid, disamperin ke sini, jadi sama-sama ke masjid." Dari dialog singkat tersebut terlihat, bahwa selain kondisi fisik yang sudah membaik, sehingga mampu beribadah dengan lebih baik, hubungan sosial dengan tetangga juga meningkat, mampu bergabung dengan tetangga dan tetangga memperhatikan lanjut usia dengan menjemputnya (*nyamperin*) ketika akan pergi ke masjid. Menurut informan keluarga,

kakek (lanjut usia) ini tadinya menderita penyakit asam urat yang sebelumnya tidak pernah diperiksa secara intensif ke dokter, karena belum ada dana untuk transportasi untuk mengakses fasilitas kesehatan, selain pengetahuan informan yang kurang tentang kesehatan. Melalui pendampingan, pendamping membimbing pemakaian dana bantuan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Keluarga lanjut sebagai pengasuh memanfaatkan dana bantuan tersebut untuk mengakses fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Hubungan Sosial (interaksi sosial dengan keluarga dan masyarakat), pasca kehadiran asistansi sosial, 30 persen informan keluarga mengakui bahwa komunikasi antar anggota keluarga lebih harmonis. Sesama anggota keluarga dan anak lanjut usia tidak lagi merasa enggan berkunjung ke rumah orang tuanya, karena tidak lagi terbebani dengan kewajiban moril untuk memberi jaminan hidup kepada orangtuanya. Anak, cucu, dan anggota kerabat lanjut usia kemudian lebih sering berkunjung, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bahkan silaturahmi juga melibatkan pendamping ASLUT. Pendamping ASLUT sering mendapat pertanyaan dari keluarga tentang kondisi lanjut usia, terutama ketika dana asistansi terlambat datang. Interaksi dengan tetangga juga membaik, pernyataan ini diperkuat oleh pengakuan pendamping bahwa tetangga terdekat sering mengunjungi atau sekedar menanyakan kondisi lanjut usia dan mengingatkan waktu berobat karena dianggap sudah mempunyai persiapan biaya.

D. Penutup.

Kesimpulan: Pemberian Asistansi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) memberi dampak positif bagi kesejahteraan sosial lanjut usia. Selain mempertahankan kesejahteraan sosial, bagi kelompok lanjut usia tertentu bahkan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan sosialnya. Kondisi fisik lanjut usia penerima ASLUT lebih baik karena berobat secara rutin hingga menyembuhkan penyakitnya atau segera dapat berobat jika sakit karena sudah memiliki uang dana transpor untuk mengakses layanan kesehatan yang sudah disediakan secara gratis

oleh pemerintah daerah. Lanjut usia mampu memenuhi kebutuhan makanan sehat bergizi (nasi, sayur, lauk pauk, buah, dan susu), dan beberapa pakaian yang dapat dimanfaatkan untuk keseharian sehingga terlihat lebih cerah, rapi dan bersih. Kebutuhan papan belum terpenuhi dari asistensi sosial yang diterima karena ada kebutuhan lain yang lebih prioritas.

Kondisi psikologis lanjut usia lebih nyaman dan stabil karena ada harapan mendapatkan dana untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, tidak ada lagi kekhawatiran lanjut usia untuk tidak bisa berobat dan membeli makanan kesukaannya. Lanjut usia juga merasakan bahwa dengan kondisinya setelah mendapat ASLUT merasa dibutuhkan, karena mampu membantu keluarganya walaupun kecil, seperti memberi uang jajan cucunya, walaupun pada hakekatnya dana ASLUT bukan untuk kebutuhan keluarga besarnya. Lanjut usia merasa harga dirinya meningkat dan rasa percaya dirinya tumbuh karena merasa sudah memiliki uang. **Hubungan sosial dengan lingkungan keluarga lebih harmonis**, ditandai dengan meningkatnya frekuensi kunjungan keluarga, anak, dan kerabat serta tetangga seiring dengan teratasinya kebutuhan lanjut usia, karena berkurangnya beban psikologis keluarga, anak, tetangga, dan kerabat dekat.

Saran: Agar manfaat asistensi sosial yang diberikan kepada lanjut usia dapat memenuhi kebutuhan lanjut usia secara maksimal, perlu kerja sama antara Direktorat Pelayanan Lanjut Usia Kementerian Sosial, dengan pemerintah daerah untuk menyinergikan program pusat dengan daerah. Sebagai contoh yang sudah berlangsung adalah mengenai kesehatan, pada saat lanjut usia tidak mampu menjangkau fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah daerah, dengan dana ASLUT lanjut usia dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan tersebut. Hal yang sama juga dilakukan pada program lain, seperti menyediakan tempat tinggal layak bagi lanjut usia yang bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah, sehingga dana ASLUT sepenuhnya dimanfaatkan untuk lanjut usia.

Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara perlu memaksimalkan peran pendamping ASLUT dan tokoh masyarakat, untuk mem-

beri pemahaman kepada keluarga lanjut usia penerima asistensi sosial yang terkait dengan tujuan dan pemanfaatan asistensi sosial yang diberikan kepada lanjut usia, dan menangani permasalahan yang terjadi dalam keluarga tersebut. Pendamping merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan Program ASLUT. Kementerian Sosial, melalui Direktorat Pelayanan Lanjut Usia, diharapkan dapat bekerja sama dengan dinas sosial provinsi dan kabupaten untuk lebih memperhatikan kesejahteraan pendamping, salah satunya melalui peningkatan nilai nominal insentifnya. Honor pendamping selain bersumber dari Kementerian Sosial, seyogyanya dinas sosial provinsi/kabupaten perlu memberi honor tambahan atau dana transportasi pendamping sebagai usaha meningkatkan kesejahteraannya. Perlu pembekalan keterampilan pendamping dengan pelayanan kesejahteraan sosial berbasis ilmu kesejahteraan sosial.

Pustaka Acuan

- Anonim. (1999). *Annual Report on Health and Welfare*. Tokyo; Ministry of Health, Labour and Welfare of Yapan (MHLW).
- (2010). *Gorontalo Utara Dalam Angka*, Badan Pusat Statistik, Gorontalo Utara.
- Argyo Demartoto. (2006). *Pelayanan Sosial Non Panti Bagi Lanjut Usia*. Surakarta; Sebelas Maret University Press.
- Beni, Romanus. (2001). *Kesejahteraan Lanjut usia Masa Depan, Sehat, Produktif dan Mandiri*. Laporan Utama Warta Demografi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Bogi Subasti; *Pengertian Asistensi Sosial*; <http://shoong.com/social-sciencos/sociology/2168822> - pengertian-jaminan-sosial, Diakses 20 September 2012
- Departemen Sosial RI. (2002). *Pengkajian Peran Masyarakat dalam Pelayanan Lanjut Usia Melalui Pusaka di DKI Jakarta*. Jakarta; BPPS.
- Departemen Sosial Republik Indonesia (2005). *Pedoman Rencana Aksi Nasional Untuk Kesejahteraan Lanjut Usia*, Jakarta.
- (2006). *Pelayanan Lanjut Usia Berbasis Kekerabatan*. Jakarta; PPPKS.

- (2000). *Pedoman Pelaksanaan Ujicoba Program Asistensi Sosial Lanjut Usia*. Jakarta; DJPRS.
- Edi Suharto. (1997). *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS).
- Edi Suharto, Konswepsi dan Strategi Asistensi sosial; http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo, Diakses 20 September 2012
- Firmansyah. (2013). Pengertian Kesejahteraan Sosial; <http://kesejahteraansosial.blogspot.com/2013/02/pengertian-kesejahteraan-sosial.html>-
- Kementerian Sosial RI. (2011). *Data Penyandangan Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial*, Jakarta : Pusdatin Kesos
- (2013). *Pedoman Pelaksanaan Program Asistensi Sosial Lanjut Usia*. Jakkarta: Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia.
- Moleong, Lexy J. (2004). *Metodelogi Penelitian kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya Ofset.
- Pramuwito, dkk. (1999). *Penelitian Ujicoba Model Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Berbasis Masyarakat*. Jogjakarta; BBPPPKS.
- Rys, Vladimir. (2011). *Merumuskan Ulang Jaminan Sosial: Kembali ke Prinsip-Prinsip Dasar*. PT Pustaka Alvabet.
- Satria. (2008). *Konsep Pelayanan Sosial*, <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2185044-konsep-pelayanan-sosial/>, Diakses 2 Oktober 2012
- Soetarso. (1997). *Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Sosial dan Kebijaksanaan Sosial*. Bandung; STKS.

Dampak Keberadaan Minimarket terhadap Kesejahteraan Pedagang Kecil

The Impact of Minimarket Existence towards Small Vendors Welfare

Tyas Eko Raharjo F

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)
Jalan Kesejahteraan Sosial No 1 Yogyakarta. Telpn (0274) 377265. e-mail kukuhsetiawan_koeh@yahoo.co.id.
Diterima 27 Januari 2014, direvisi 30 Mei 2014, disetujui 2 Juli 2014

Abstract

This research is related to the impact of minimarket toward future existence of small vendors, is done to describe small vendors welfare living around minimarket. Respondents in this research are small vendors selling their commodities around minimarkets. Data are gathered through interview, observasion, and documentary analysis, and analysed through kualitatif-descriptive technique. The result shows that small vendors having various degree of welfare, depending on the commodities they sell. .. vendors experience a reduce in their clients since there is minimarket, even they are almost bankrupt for their low ability to compete with minimarket, but small vendors that sell food and drink nearby minimarket feel profitable. It can be concluded that some small vendors feel negative effect nad some feel positive effect with the existence of minimarket nearby them. It depends on the commodities they sell. .. vendors feel negative because the commodities they sell can be found in minimarket, while food and drink vendors having positive chance bcause the commodites can not be found in minimarket.

Keywords:

Small Vendors Welfare-BusinessChance-Minimarket

Abstrak

Penelitian ini berkait dengan keberlanjutan pedagang kecil dengan keberadaan toko swalayan atau minimarket. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan kesejahteraan pedagang kecil yang berada di sekitar minimarket. Responden dalam penelitian ini adalah pedagang kecil yang berjualan di sekitar minimarket, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan telaah dokumen, dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang kecil memiliki kesejahteraan yang beragam, tergantung jenis dagangan yang dijual. Pedagang kelontong mengalami kurangnya konsumen sejak keberadaan minimarket, bahkan mengalami kebangkrutan karena ketidakmampuan dalam bersaing dengan minimarket. Namun pedagang kecil makanan dan minuman justru merasa diuntungkan. Dapat disimpulkan, bahwa kesejahteraan pedagang kecil tergantung pada jenis dagangan masing-masing sebagai aktivitas usahanya. Kesejahteraan pedagang kecil sangat ditentukan pada jenis usaha yang ditekuni, dan memungkinkan mendapat pengaruh positif atau negatif dengan keberadaan minimarket. Pedagang kelontong akan mengalami kebangkrutan karena jenis usaha yang ditekuni tersedia di minimarket, pedagang kecil usaha minuman dan makanan mendapat peluang yang menjanjikan dengan keberadaan minimarket.

Kata Kunci:

Kesejahteraan Pedagang Kecil–Peluang Usaha–Minimarket

A Pendahuluan

Zaman yang serba modern sekarang ini banyak berdiri toko modern dengan fasilitas lengkap dan ruangan ber-AC, yang sering disebut dengan nama minimarket. Segala bahan kebutuhan sehari-hari tersedia di sini, bahkan ada beberapa minimarket yang menyediakan sayur mayur dan buah segar. Keberadaan minimarket tersebut tidak hanya di kota, namun telah meluas sampai ke pelosok desa. Minimarket tersebut tentunya akan menimbulkan dampak baik positif maupun negatif bagi masyarakat di

sekitarnya. Segi positifnya, masyarakat lebih mudah belanja di minimarket karena tempat lebih nyaman (ber-AC), bersih, mengambil barang sendiri (*self service*), harga barang juga lebih murah dari toko biasa, bahkan terkadang memberi diskon atau hadiah (bisa berupa barang atau membeli dua barang gratis satu). Pembeli juga dapat membayar dengan menggunakan kartu (debet atau kredit). Segi positif yang lain adalah dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat di sekitarnya. Namun segi negatifnya terlihat, dengan menjamurnya minimarket

akan berdampak pada toko-toko sejenis atau toko yang menjual bahan kebutuhan sehari-hari (kelontong) yang berada di sekitarnya. Toko-toko tersebut akan banyak kehilangan pembeli atau pelanggan, karena mereka akan lebih senang berbelanja ke minimarket, selain barang yang tersedia lebih lengkap, murah, tempatnya nyaman, juga tidak perlu membayar dengan uang tunai. Keberadaan minimarket dapat membuat gulung tikar toko kelontong di sekitarnya. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena mematikan usaha kecil masyarakat, yang berarti mengurangi kesejahteraan mereka.

Berdasar hasil pendataan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul tahun 2008, tercatat jumlah minimarket di Kabupaten Bantul sebanyak 95. Tingkat pertumbuhan minimarket terbanyak berada di wilayah perkotaan dan perbatasan wilayah Bantul dengan Kota Yogyakarta. Tercatat di Kecamatan Bantul 10, Banguntapan 18, Kasihan 14, dan Sewon 16 minimarket. Di luar perkotaan keberadaan minimarket masih terbatas, seperti di Kecamatan Pandak, Pajangan, Kretek, dan Jetis masing-masing 2 minimarket, serta masih terdapat 29 minimarket yang tersebar di kecamatan lain. Minimarket yang terlalu banyak dan letaknya berdekatan dengan pasar tradisional, dikawatirkan akan mengganggu perkembangan pedagang pasar tradisional dan toko kelontong di sekitarnya. Oleh sebab itu, berdasarkan surat edaran Bupati Bantul Nomor 503/5439 tanggal 27 September 2008, Pemerintah Kabupaten Bantul sementara waktu menunda pemberian izin pendirian minimarket, toko swalayan dan sejenisnya. Kebijakan itu ditempuh mengingat pertumbuhan minimarket, toko swalayan dan sejenisnya di Kabupaten Bantul sudah cukup banyak, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut dengan tujuan tidak merugikan pedagang tradisional.

Meskipun telah ada upaya pencegahan bertambahnya minimarket, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa minimarket yang ada tentu memberikan pengaruh kepada pedagang kecil di sekitarnya, pada kesejahteraannya. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana kesejahteraan pedagang kecil dengan keberadaan minimarket, dilakukan penelitian ini, tujuannya untuk menggambarkan kesejahteraan peda-

gang kecil yang berada di sekitar minimarket. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian Sosial dan instansi terkait dalam menyejahterakan pedagang kecil, dalam merumuskan kebijakan penanganan masalah kesejahteraan sosial khususnya pedagang kecil dan menambah perbendaharaan khasanah pustaka, terutama pengetahuan tentang pedagang kecil dan permasalahannya.

B Kajian Teori

Untuk mengetahui tentang pedagang kecil dan minimarket, secara jelas dan baku memang belum banyak dijumpai, mengingat penelitian pada sektor ini masih sedikit dilakukan. Namun demikian, beberapa pengertian berikut dapat dipergunakan sebagai acuan.

Pedagang Kecil: merupakan pedagang dengan modal yang relatif sedikit melaksanakan aktivitas produksi untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu dalam masyarakat. Usaha yang dilakukan biasanya di tempat/lokasi yang dianggap strategis dan dekat dengan keramaian. Keberadaan pedagang kecil dari waktu ke waktu cenderung mengalami perkembangan yang pesat, karena pedagang kecil ini mudah di jumpai. Pedagang kecil biasanya selalu memanfaatkan tempat-tempat yang senantiasa dipandang dapat mendatangkan profit, misalnya di pusat kota, alun-alun, di tempat keramaian dan di depan minimarket, hingga tempat-tempat yang dinilai berpotensi untuk menjadi objek wisata. Mereka hanya berpikir bahwa apa yang dilakukan yakni untuk mencari nafkah tanpa memperhatikan hal-hal lain. Kehadiran para pedagang kecil ini ternyata memberikan manfaat positif. Hal ini dirasakan oleh masyarakat kelas ekonomi rendah, karena mereka dapat memperoleh barang dengan harga yang terjangkau. Pedagang kecil memiliki peran besar meningkatkan perekonomian masyarakat kelas ekonomi rendah, dan sektor ini dapat menyerap tenaga kerja yang memiliki keahlian relatif minim.

Pedagang kecil adalah responden yang melakukan usaha dagang atau jasa di tempat umum, dengan menggunakan emperan toko atau di pinggir jalan yang tidak ada izin dari pemerintah bisa mengganggu ketertiban,

keamanan dan kebersihan kota (Ramli R, 2008). Memang sebenarnya belum ditemui definisi pedagang kecil secara jelas, namun setidaknya penjelasan di atas dapat memberikan pengertian mengenai pedagang kecil. Dalam penelitian ini penulis memberi batasan mengenai pedagang kecil yang berada di sekitar minimarket. Ada asumsi yang menyatakan bahwa istilah pedagang kecil diambil dari pengertian di tepi jalan yang lebarnya lima kaki, umumnya adalah di trotoar, depan toko, dan pinggir jalan. Istilah pedagang kaki lima berasal dari responden berdagang yang menggelarkan barang dagangannya, yang cukup menyediakan tempat darurat, seperti bangku yang biasanya berkaki empat, ditambah sepasang kaki pedagangannya sehingga berjumlah lima, dari asumsi tersebut timbullah julukan pedagang kaki lima atau PKL (Marisyah, 2011). Dapat disimpulkan bahwa pedagang kecil adalah setiap responden yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tidak tetap, dengan kemampuan terbatas, berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen, dan pada umumnya tidak memiliki izin usaha.

Karakteristik pedagang kecil dapat dibedakan menjadi dua, yakni berdasar cara melakukan kegiatan dan sarana jual yang dipergunakan. Namun demikian cara pedagang kecil untuk melakukan kegiatan dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yakni pedagang kecil menetap, berpindah, dan berkeliling. Pedagang kecil yang melakukan kegiatan dengan cara menetap, adalah mereka yang melakukan kegiatan dengan memanfaatkan tempat tertentu atau tetap, dan konsumen yang membutuhkan akan mendatanginya. Sifat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pedagang kecil dengan cara menetap memiliki kesamaan dengan perdagangan formal. Pedagang kecil yang melakukan kegiatannya dengan cara berpindah, yakni tata cara pelaksanaan kegiatannya hanya akan menetap pada waktu-waktu tertentu saja selama masih dianggap menguntungkan, dan akan berpindah jika lokasi tersebut mulai dirasa sepi dari pembeli. Pedagang kecil dengan berkeliling, yakni dalam melakukan kegiatannya selalu berusaha mendatangi konsumen untuk menawarkan barang atau jasa yang diperdagangkan (Agus Priono, 2009).

Karakteristik pedagang kecil berdasar sarana jual yang dipergunakan dapat dibagi menjadi lima tipe dasar, yakni pedagang kecil yang bertipe hamparan di lantai, pikulan, meja, kios, dan yang memanfaatkan sarana kereta dorong. Untuk karakteristik pedagang kecil dengan tipe hamparan di lantai merupakan pedagang kecil yang menggunakan alat jual seperti tikar, plastik, meja dalam bentuk sederhana, bakul atau yang sejenis sebagai alat untuk menjajakan barang dagangannya. Pedagang kecil yang bertipe pikulan yakni merupakan kegiatan pedagang kecil yang menggunakan keranjang dengan cara dipikul. Pedagang yang melakukan kegiatan dengan sarana jual pikulan merupakan suatu bentuk aktivitas perdagangan yang menunjukkan ciri-ciri tradisional. Pedagang yang menggunakan sarana jual dengan meja dan dilengkapi atap atau payung yang dipergunakan untuk melindungi barang dagangannya disebut dalam kelompok pedagang kecil yang bertipe meja. Pedagang kecil yang menggunakan kios sebagai sarana penjualannya termasuk dalam kelompok pedagang kecil bertipe kios. Bentuk kios dapat dikatakan memiliki tingkatan yang lebih maju dibandingkan dengan bentuk sarana jual yang lain. Pedagang kecil yang menjajakan dengan menggunakan kereta dorong sebagai sarana perdagangannya, kegunaan kereta dorong dimaksudkan untuk mempermudah dalam melakukan pemindahan barang dagangannya (Retno Widjayanti, 2009).

Minimarket: secara harafiah diambil dari bahasa Inggris, yang berarti pasar kecil. Minimarket adalah toko swalayan yang hanya memiliki satu atau dua mesin register (<http://www.sinarharapan.co.id>). Minimarket biasanya memiliki ruangan luas antara 50 m² sampai 200 m², serta berada di lokasi yang mudah dijangkau konsumen. Minimarket juga disebut sebagai pasar modern yakni pasar atau toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan perumahan di dalam kota/perkotaan (Perpres No 112 Tahun 2007).

Minimarket memang merupakan sarana yang memudahkan bagi para konsumen da-

lam memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena berbagai jenis barang tersedia lengkap, seperti makanan, minuman, dan barang kebutuhan sehari-hari. Harga yang ditawarkan juga relatif lebih murah dibandingkan harga pada toko kelontong di pinggir jalan atau warung-warung kecil lainnya. Minimarket menerapkan sistem swalayan, dimana pembeli mengambil sendiri barang yang dibutuhkan dari rak-rak yang tersedia dan membayar ke kasir, dengan mesin kasir *point of sale*. Sistem ini juga membantu pembeli tidak berhutang, karena telah mengetahui harga barang yang akan dibelinya. Oleh karena itu, minimarket menjadi toko pilihan dan menarik bagi masyarakat, karena biasanya berada di tempat/lokasi yang strategis, ruang yang nyaman dan dilengkapi dengan pendingin ruangan (AC), juga menyediakan hampir semua barang kebutuhan sehari-hari. Masyarakat merasa diperhatikan dan dilayani sebagai konsumen, karena meskipun tidak memiliki uang kontan tetap bisa melaksanakan transaksi, cukup dengan menggesek kartu (debit atau kredit).

Kondisi ini tentunya akan mempengaruhi keberlanjutan usaha para pedagang kecil terutama yang menjual barang kebutuhan sehari-hari (kelontong). Dengan demikian, semakin banyak minimarket maka semakin berkurang pula pendapatan para pedagang kecil tersebut. Menjamurnya minimarket juga memberi kemudahan bagi para konsumen sehingga hal ini membuat pola hidup masyarakat yang lebih memilih belanja ke minimarket dari pada warung-warung kecil.

Kesejahteraan Pedagang Kecil: dalam arti umum menunjuk pada kondisi untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik sesuai dengan yang diinginkan. Demikian juga dalam UU No 11 tahun 2009 yang menyatakan kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial bagi warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam ilmu ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Kesejahteraan merupakan salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Isbandi menyebutkan, bahwa ada empat sudut pandang

dalam kesejahteraan sosial, yakni kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan, suatu ilmu, suatu kegiatan, dan suatu gerakan (Isbandi R Adi 2001).

Berdasar pada beberapa pandangan di atas dapat dimaknai bahwa kesejahteraan pedagang kecil dapat berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan hidup baik material, spiritual, maupun sosial. Oleh karena itu pedagang kecil senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju hidup yang lebih baik demi tercapainya kesejahteraan. Untuk mewujudkan hal tersebut, tidak mudah membalikkan tangan, karena mengingat persaingan yang semakin berat terutama di bidang informal. Bekerja keras dan mengatur strategi dalam membaca pasar sangat penting baik menentukan jenis usaha maupun tempat untuk menjajakan dagangan. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap *omzet* dalam melakukan kegiatan usaha. Dengan demikian salah satu untuk mewujudkan kesejahteraan pedagang kecil dapat dilihat dari penghasilan dalam setiap hari atau per bulannya. Selanjutnya dari penghasilan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, sehingga pedagang kecil dapat dikatakan sejahtera apabila mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarga.

C Penggunaan Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengungkap makna subjektif secara mendalam tentang gejala sosial yang diamati dari sisi pelaku (subjek), termasuk mengungkap proses dan dinamika dari gejala sosial bersangkutan (Noeng Muhajir, 2002: 16). Menurut Suharsimi Arikunto (2001: 309), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tidak bermaksud menguji hipotesis tertentu, tetapi mengumpulkan informasi untuk menggambarkan "apa adanya" tentang suatu variabel, suatu gejala atau keadaan pada saat penelitian dilakukan. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan tentang kesejahteraan pedagang kecil dikaitkan dengan keberadaan minimarket. Penerapan pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai informasi, fakta, serta fenomena ber-

kait dengan kesejahteraan pedagang kecil di sekitar minimarket

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul dengan pertimbangan bahwa di daerah tersebut banyak dijumpai pedagang kecil (tradisional) dan beberapa pasar tradisional, sementara keberadaan minimarket juga telah merambah di sekitar pasar tradisional dan di lingkungan pedagang kecil yang menjajakan barang dagangan kebutuhan sehari-hari (kelontong). Responden dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive* dengan mengacu ketentuan, yakni pedagang kecil yang membuka usaha atau berjualan makanan-minuman dan kebutuhan sehari-hari (kelontong) di sekitar minimarket. Untuk memperoleh data primer dari responden, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara baku (*standardized interview*), yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan panduan (Deddy Mulyana, 2001:180) untuk dapat menggali informasi berkaitan dengan kondisi, kesejahteraan dan tanggapan pedagang kecil dengan keberadaan minimarket yang berdekatan dengan tempat usahanya

Peneliti juga menggunakan teknik observasi, digunakan untuk mengamati secara langsung mengenai pedagang kecil yang membuka usahanya di sekitar minimarket. Beberapa alasan peneliti menggunakan teknik observasi dalam penelitian ini, yakni pengamatan berdasar pada pengalaman secara langsung atas objek yang dikaji. Dengan teknik ini peneliti dapat melihat dan mencatat mengenai perilaku atau pun peristiwa yang terjadi, sehingga memungkinkan peneliti memahami berbagai situasi yang ada. Pengamatan merupakan cara terbaik untuk mengecek kebenaran suatu data, sehingga dalam kasus tertentu, apabila komunikasi yang lain tidak memungkinkan maka pengamatan menjadi alat yang dimanfaatkan peneliti. Tentu saja dalam kajian ini dibutuhkan juga data sekunder yang melengkapi, dari buku, laporan, jurnal, *website*. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif analisis data pada dasarnya adalah proses mengorganisasikan dan mereduksi data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat

dirumuskan suatu kesimpulan. Analisis dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah selesainya pengumpulan data.

D Hasil Penelitian: Keberadaan Minimarket dan Kesejahteraan Pedagang Kecil

Dalam penelitian ini menampilkan pembahasan terkait dengan dampak keberadaan minimarket terhadap kesejahteraan pedagang kecil yang berada di sekitarnya. Kesejahteraan pedagang kecil dalam pengkajian ini merupakan kesejahteraan yang berkaitan dengan keberlanjutan usaha para pedagang kecil sejak keberadaan minimarket. Peneliti lebih melihat pada kesejahteraan pedagang kecil yang menjajakan makanan-minuman dan pedagang kelontong yang menyediakan barang kebutuhan rumah tangga di dekat minimarket.

Kondisi Pedagang Kecil, untuk mengetahui kondisi kehidupan pedagang kecil terlebih dulu dilihat usia pedagang kecil yang menjadi responden dalam penelitian ini. Sebagian besar umur responden antara 30 tahun sampai dengan 45 tahun, antara 46 tahun sampai dengan 50 tahun, sebanyak 4 responden. Apabila dilihat dari segi umur responden masih dalam kondisi produktif untuk melakukan usaha, sehingga memungkinkan untuk memajukan usahanya. Dalam wawancara ditemukan hanya beberapa responden yang memiliki usia mendekati batas usia lanjut. Kondisi demikian menunjukkan bahwa, responden memiliki kemampuan untuk melakukan usaha mengimbangi keberadaan minimarket, melalui berbagai inovasi yang dapat mereka lakukan dalam memberi daya tarik konsumen memilih kebutuhan yang diperlukan.

Jika ditinjau dari jenis kelamin dari 15 responden, ternyata hanya 1 (satu) responden yang berjenis kelamin perempuan, 14 responden berjenis kelamin laki-laki. Hal ini dikarenakan bahwa khususnya pedagang makanan dan minuman melakukan kegiatan usaha pada sore sampai malam hari, dengan menggunakan gerobak, sehingga akan mengalami kesulitan apabila dilakukan oleh perempuan. Pekerjaan sebagai pedagang kecil bagi responden merupakan pekerjaan pokok untuk mendapatkan penghasilan bagi keluarga. Responden memiliki status sebagai kepala rumah tangga, sehingga

mereka berkewajiban mencari nafkah demi pemenuhan kebutuhan keluarga. Mereka dapat memberikan nafkah kepada anggota keluarganya, dengan cara menekuni pekerjaan sebagai pedagang kecil di dekat minimarket. Dari pekerjaan yang ditekuninya dapat memberikan gambaran, bahwa pekerjaan sebagai pedagang kecil pada umumnya dilakukan oleh kepala rumah tangga yang memiliki keterampilan masing-masing, seperti pedagang martabak, roti bakar, gorengan, dan pedagang jus buah. Berdasar pengamatan dan wawancara ternyata pekerjaan yang mereka lakukan merupakan hasil dari belajar pada pedagang lain yang lebih senior, ada pula yang mendapatkan keterampilan dengan cara ikut bekerja langsung, sambil menimba ilmu berdagang.

Kegiatan usaha pedagang kecil ini pada umumnya dilakukan sore sampai malam hari. Semua pedagang kecil selaku responden memanfaatkan hari kerja penuh tujuh hari dalam satu minggu, terkecuali mereka memiliki keperluan lebih penting. Sebagian mereka memiliki hari libur untuk kegiatan kemasyarakatan, misalnya setiap Hari Jumat tidak melakukan kegiatan usaha, karena untuk pengajian. Sebanyak 5 responden mengaku tidak melakukan usaha pada Hari Jumat, karena untuk pengajian di lingkungan tempat tinggalnya, 3 responden tidak melakukan usaha pada hari Kamis, sedangkan 7 responden menyatakan tidak pasti, hanya kalau ada keperluan baik untuk lingkungan maupun

pribadi. Dari pengakuan responden tersebut menunjukkan, bahwa pedagang kecil dapat mengatur waktu mereka dalam melakukan kegiatan usaha, sehingga dalam segi waktu dapat menyesuaikan keterlibatan dalam melakukan kegiatan bermasyarakat.

Ditinjau dari segi pendidikan, responden secara umum mereka tamat pendidikan SLTA. Sebanyak 12 responden lulus sekolah lanjutan tingkat atas, sementara 3 responden mengaku bahwa dirinya pernah sekolah di SLTP dan telah lulus. Dari pengakuan responden menunjukkan, bahwa responden memiliki pendidikan yang memenuhi standar pendidikan dasar sembilan tahun yang dicanangkan pemerintah. Namun dengan pendidikan tersebut, ternyata mereka masih belum cukup untuk mengembangkan usahanya mengingat persaingan dalam dunia usaha semakin berat. Untuk mengatasi hal tersebut, sebagian responden meningkatkan keterampilannya dengan mengikuti kursus singkat yang diadakan pihak swasta. Kursus yang mereka ikuti berkaitan dengan jenis usaha yang ditekuni, yakni keterampilan untuk membuat kue, martabak dan terang bulan, roti bakar yang lebih menarik. Keterampilan untuk berinovasi dalam menjajakan dagangan sangat dibutuhkan demi menarik pembeli.

Apabila dilihat dari jenis dagangan yang di-jajakan responden, dapat digolongkan menjadi dua golongan, yakni pedagang kecil dengan jenis barang dagangan kelontong dan barang

Tabel 1. Data Responden Penelitian

No	Nama	Umur	Pendidikan	Tempat Usaha
1	Giman donat	35	SLTA	Samping WS Tamanterto Kasihan Bantul
2	Marto B	35	SLTA	Halaman Alfamat Tamantirto .Kasihan Bantul
3	Jusman	30	SLTA	Samping Mediko Tamantirto Kasihan Bantul
4	Subur	46	SLTP	Depan WS Tamantirto Kasihan Bantul
5	Suryanto	41	SLTA	Halaman Indomart Sonosewu Kasihan Bantul
6	Bagiyo	34	SLTA	Halaman Indomart Sonosewu Kasihan Bantul
7	Siti Jayanti	50	SLTP	Samping WS Tamanterto Kasihan Bantul
8	Parman	45	SLTA	Samping Indomaret Sonosewu Kasihan Bantul
9	Subarjo	33	SLTP	Halaman Alfamart Sonopakis Kasihan Bantul
10	Deden Karim	40	SLTA	Halaman Indomart Sonopakis Kasihan Bantul
11	Usman Dawai	43	SLTA	Depan Indomart Sonopakis Kasihan Bantul
12	Badar	45	SLTA	Halaman Indomart Sonopakis Kasihan Bantul
13	Guritno	37	SLTA	Depan Indomart Sonopakis Kasihan Bantul
14	Jamin	48	SLTA	Depan Alfamart Bangunjiwo Kasihan Bantul
15	Maryanto	50	SLTA	Depan Alfamart Bangunjiwo Kasihan Bantul

Sumber : Jawaban responden (2013)

kebutuhan sehari-hari, dan pedagang kecil dengan barang dagangan makanan dan minuman (martabak, donat kentang, jus buah, dan gorengan). Berdasar jenis dagangan yang di jajakan, terdapat 10 pedagang kecil berjualan makanan dan minuman, 5 responden berjualan barang kebutuhan sehari-hari atau kelontong. Tempat untuk melakukan kegiatan usaha ternyata juga menjadi pilihan mereka masing-masing, pada umumnya mereka yang berjualan makanan dan minuman memilih tempat di dekat minimarket, karena menurut mereka tempat tersebut merupakan tempat yang strategis dan disesuaikan dengan barang dagangan yang di jajakan. Pedagang yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, pada umumnya sudah menempati toko sebelum minimarket berdiri.

Modal yang digunakan pedagang kecil sangat bervariasi sesuai dengan jenis usaha dagangan. Untuk usaha makanan dan minuman, modal yang dibutuhkan berkisar antara Rp. 1.500.000,- sampai dengan Rp 3.000.000,- (sudah termasuk membeli gerobak dan bahan dagangan). Pedagang kelontong membutuhkan modal sekitar Rp 5.000.000,- sampai dengan Rp 10.000.000,-, dari segi permodalan usaha dagang kelontong membutuhkan modal yang lebih besar daripada pedagang makanan dan minuman. Hal ini dikarenakan pedagang kelontong membutuhkan barang yang lebih bervariasi, dari barang-barang kebutuhan pokok hingga kebutuhan sekunder, dan kebutuhan modal ini akan lebih besar lagi jika tempat untuk berjualan masih menyewa.

Pengetahuan Pedagang Kecil Tentang Minimarket: Responden mengemukakan, pada umumnya pengetahuan yang dimiliki berdasar pada pengalaman yang dilihat dalam keseharian. Beberapa pernyataan yang mereka ungkapkan berkait dengan pemahamannya tentang minimarket, dapat dilihat pada Tabel 2.

Data dalam Tabel 2 menunjukkan, bahwa sebagian besar responden mengetahui mengenai mininmarket. Namun pengetahuan yang mereka miliki berdasar pada aktivitas keseharian yang sering dilihatnya. Minimarket merupakan bentuk sebuah toko yang menjajakan berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari yang ditata dengan menarik, sehingga pembeli dibuat lebih nyaman berbelanja. Pengetahuan responden yang cocok dengan pengertian minimarket yakni sebuah toko, berfasilitas modern (ber-AC), pelayanan yang baik, memiliki barang dagangan lengkap, tersedia semua kebutuhan rumah tangga. Secara umum pengetahuan responden mengenai pengertian minimarket cukup baik, tetapi ada tiga responden yang mengaku mengetahui tentang minimarket pada saat melihat siaran televisi. Hal ini dapat dimaknai bahwa sebagian responden mendapat pengetahuan bukan hanya dari pengertian mereka sendiri, tetapi media informasi juga ikut andil dalam memberikan pengetahuan.

Ternyata ada responden yang mengalami kesulitan dalam menyampaikan kata-kata dengan kalimat yang baik, yakni sebanyak dua responden, sehingga mereka harus dibantu anaknya pada saat peneliti melakukan wawancara. Mereka mengatakan "Minimarket adalah

Tabel 2. Pengetahuan Pedagang Kecil Tentang Minimarket

No	Pengetahuan Mengenai Minimarket	F	%
1	Minimarket merupakan toko yang amat bagus dan nyaman, ada AC, pelayan yang ramah, barang dagangan lengkap.	7	46,67
2	Minimarket adalah milik pengusaha kaya yang membuka usaha toko modern dengan modal usaha besar	3	20,00
3	Minimarket adalah usaha bersama antara penyandang dana dengan pengusaha pertokoan yang menyelenggarakan usaha di bidang penjualan barang rumah tangga.	3	20,00
4	Toko kecil yang terletak di tempat strategis, menyediakan kebutuhan rumah tangga dan ruangnya nyaman.	2	13,33
Jumlah		15	100

Sumber : Jawaban responden (2013)

toko kecil yang letaknya di tempat strategis Pak, yang menyediakan kebutuhan rumah tangga, nggih, pak?” Hal tersebut menggambarkan bahwa, responden telah mengetahui mengenai minimarket.

Penilaian Pedagang Kecil Tentang Minimarket: Salah satu responden yang sudah bertahun-tahun membuka toko kelontong di depan rumahnya mengeluh dengan adanya minimarket yang tidak jauh dari tempat usahanya. Tokonya menjadi sepi pembeli dan pendapatannya semakin menurun. Keberadaan minimarket memang ibarat pisau bermata dua, satu sisi memberikan dampak positif sekaligus juga negatif. Di lokasi penelitian terdapat minimarket yang membuat pedagang kecil menjadi menurun penghasilannya (terutama pedagang kecil yang menjual barang kebutuhan sehari-hari). Tabel 3 merupakan deskripsi penilaian pedagang kecil terhadap minimarket.

Tabel 3 menunjukkan, bahwa beberapa responden memberikan penilaian yang kurang mendukung terhadap keberadaan minimarket. Penilaian yang disampaikan tersebut merupakan penilaian yang negatif, karena responden mengaku dengan adanya minimarket pedagang kecil terutama pedagang kelontong menjadi bangkrut. Sewaktu dilakukan wawancara, sebanyak tiga responden menyatakan minimarket menjadi pesaing besar bagi pedagang kecil dan mendidik masyarakat untuk hidup konsumtif, sehingga mestinya minimarket dibangun di tempat yang lebih jauh dari lingkungan pedagang kecil. Berdasarkan hasil wawancara tentang keberadaan minimarket yang berdekatan de-

ngan tempat berjualan pedagang kecil, mereka menilai bahwa, “Di sini saya mengalami tekanan karena persaingan. Keberadaan minimarket yang semakin menjamur masuk lingkungan kampung, membuat pedagang kelontong menjadi bangkrut karena mendapat pesaing besar”.

Pola berdirinya minimarket di setiap daerah memiliki kesamaan yakni apabila di suatu tempat berdiri minimarket “A”, maka beberapa meter dari minimarket tersebut berdiri minimarket berlabel “I”. Keluhan pedagang kecil bahwa untuk mendirikan sebuah minimarket di suatu wilayah, harus ada izin dari pemerintah daerah setempat, sehingga apabila pemerintah daerah tersebut peduli dengan pedagang kecil maka izin mendirikan minimarket akan dibatasi. Sebagaimana penuturan beberapa pedagang kecil “Minimarket seharusnya tidak diizinkan buka di daerah yang telah ada toko kelontong, dan saya belum yakin apakah pemerintah daerah juga mampu menolak untuk mengeluarkan izin”. Berkait dengan penilaian para pedagang kecil terhadap minimarket, terdapat dua responden yang menyatakan bahwa, berdirinya minimarket lebih pada mengajak masyarakat untuk hidup konsumtif. Masyarakat dihadapkan pada berbagai barang yang menarik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bermacam cara minimarket membuat masyarakat menjadi tertarik yakni dengan menawarkan bonus dalam setiap kelipatan belanja. Sebagaimana yang diungkapkan seresponden pedagang kecil, “minimarket membuat masyarakat hidup konsumtif, karena masyarakat dimanjakan dengan berbagai bonus.”

Tabel 3. Penilaian Pedagang Kecil tentang Minimarket

No	Penilaian Tentang Minimarket	F	%
1	Minimarket membuat para pedagang kelontong menjadi bangkrut dan menjadi pesaing besar pedagang kecil.	3	20,00
2	Minimarket seharusnya tidak diizinkan buka di daerah lingkungan yang telah ada toko tradisional.	3	20,00
3	Minimarket membuat masyarakat hidup konsumtif, karena masyarakat dimanjakan dengan berbagai bonus	2	13.33
4	Minimarket bisa mendidik masyarakat untuk hidup yang praktis dengan belanja disesuaikan kebutuhan saja.	1	6.67
5	Minimarket membimbing para pedagang kecil dengan menyediakan tempat untuk usaha secara mandiri	6	40,00
Jumlah		15	100

Sumber : Jawaban responden (2013)

Berdasar hasil wawancara, ditemukan beberapa responden (6 responden) yang merasa mendapat kemudahan dari pihak minimarket, yakni dalam melakukan usaha mendapatkan fasilitas berupa tempat berjualan. Meskipun mereka mendapatkannya dengan cara menyewa, namun tetap memiliki tempat yang strategis untuk mengembangkan usahanya. Sebagaimana yang mereka ungkapkan, “Minimarket memberikan fasilitas kepada para pedagang kecil dengan menyediakan tempat untuk usaha secara mandiri”. Dua responden yang memberikan penilaian, bahwa minimarket bisa mendidik masyarakat untuk hidup yang praktis dengan belanja disesuaikan kebutuhan saja.

Berbagai penilaian tersebut di atas, baik penilaian yang bersifat mengkritik maupun yang memberi dukungan, menunjukkan bahwa responden memiliki penilaian yang berbeda-beda, tergantung pada kepekaan mereka dalam merasakan keberadaan minimarket. Delapan responden yang memberi penilaian bersifat mengkritik minimarket, karena beranggapan dengan adanya minimarket membuat pedagang kecil menjadi bangkrut. Setelah diadakan pengamatan ternyata responden merupakan pedagang kecil yang memiliki jenis usaha kelontong, sehingga jelas ada persaingan antara minimarket dengan pedagang kelontong, karena barang yang dijual di minimarket banyak yang sejenis dengan yang dijual pedagang kelontong.

Namun demikian berbeda dengan responden yang mengaku dirinya mendapat kemudah-

an dari pihak minimarket. Mereka memberikan penilaian, bahwa minimarket dapat menjadi mitra dalam melakukan usaha, karena responden ini memiliki usaha makanan dan minuman yang berlokasi di dekat minimarket, walaupun untuk menempati lokasi berjualan mereka harus menyewa, tetapi bagi mereka merupakan perhatian dari pihak minimarket terhadap pedagang kecil.

Tanggapan Pedagang Kecil Tentang Lokasi Minimarket: Meskipun jarak antara minimarket dengan toko tradisional telah diatur pemerintah, tetapi ternyata masih ada beberapa minimarket yang keberadaannya belum sesuai dengan aturan. Tabel 4 berikut beberapa tanggapan pedagang kecil berkait dengan lokasi keberadaan minimarket.

Jarak antara minimarket dengan pasar tradisional sebenarnya telah diatur sesuai dengan kewewenangan pemerintah daerah setempat. Data pada Tabel 4 memberikan gambaran, bahwa sebagian besar pedagang kecil menghendaki berjualan lebih dekat dengan keberadaan minimarket. Dengan berjualan di dekat minimarket mereka merasa lebih nyaman, banyak pembeli yang datang ke minimarket kemudian membeli makanan pada pedagang kecil. Sebanyak enam pedagang makanan menyatakan “Lokasi minimarket lebih cocok kalau berdekatan dengan tempat berjualan para pedagang kecil, sebagai pendamping dalam menjajakan dagangan.” Tiga pedagang kecil lainnya juga mengatakan bahwa, “Rezeki tidak akan ke mana bagi kami keberadaan minimarket

Tabel 4. Tanggapan Pedagang Kecil tentang Lokasi Minimarket

No	Tanggapan Tentang Lokasi Minimarket	F	%
1	Minimarket dengan sistem waralaba harus diatur mekanisme pasarnya. Karena akan mengancam keberadaan toko/pasar tradisional (pedagang kecil).	3	20,00
2	Tempat/lokasi keberadaan minimarket masih terlalu dekat dengan toko kelontong milik warga setempat, seharusnya berjarak sekitar 500 m dari pedagang kecil.	3	20,00
3	Lokasi minimarket lebih cocok kalau dekat dengan pedagang kecil, sebagai pendamping dalam menjajakan dagangan.	6	40,00
4	Rezeki tidak akan kemana bagi kami keberadaan minimarket akan lebih menarik pelanggan datang kios kami, karena dengan adanya minimarket tempat ini menjadi ramai pengunjung	3	20,00
Jumlah		15	100

Sumber : Jawaban responden (2013)

akan lebih menarik pembeli datang ke tempat kami, karena dengan adanya minimarket tempat kami menjadi ramai pengunjung.” Namun berbeda dengan pengakuan pedagang kecil yang berjualan kelontong, mereka merasa memiliki saingan yang begitu berat dengan keberadaan minimarket.

Pada umumnya pedagang kelontong yang dikelola oleh masyarakat setempat hanya memiliki modal kecil, sehingga dalam menyediakan barang dagangan tidak selengkap minimarket. Untuk menyikapi hal tersebut pedagang kecil memberi tanggapan berkait dengan lokasi keberadaan minimarket yang seharusnya diatur oleh pemerintah. Sebagaimana diungkapkan pedagang kelontong “Minimarket dengan sistem waralaba harus diatur mekanisme pasarnya. Karena akan mengancam keberadaan pasar tradisional (pedagang kecil).” Senada dengan tanggapan tersebut juga disampaikan pedagang kelontong lainnya yang menyebutkan dengan perincian yang lebih lengkap, bahwa jarak minimarket seyogyanya minimal 500 meter dari toko kelontong. Tanggapan tersebut menjadi wajar apabila dilihat dari segi keberlanjutan pedagang kecil (kelontong) dalam mengembangkan usaha berkait dengan UKM (Usaha Kecil Menengah) yang dicanangkan oleh pemangku kepentingan kabupaten setempat.

Dalam pernyataan responden pada Tabel 4 menunjukkan, bahwa mereka mengaku mengalami penurunan dari pembeli terutama responden yang memiliki jenis usaha dagang barang kebutuhan sehari-hari dan kelontong. Meskipun jarak antara minimarket dengan toko kelontong telah memenuhi persyaratan sekitar 500 meter, tetapi mereka masih merasakan dampak yang ditimbulkan dengan adanya minimarket. Oleh karena itu, diperlukan adanya inovasi dari pedagang kecil yang memiliki jenis usaha kelontong, yaitu dengan usaha yang lebih menarik pembeli, misalnya dengan penataan ruang yang menarik dan didukung juga dengan penataan barang dagangan yang lebih rapi.

Berbeda dengan tanggapan responden yang memiliki jenis usaha makanan dan minuman, mereka justru lebih senang jika mempunyai usaha yang berdekatan dengan lokasi minimarket, mereka merasa lebih cocok apabila lokasi

usahanya berdampingan dengan minimarket. Pedagang ini membaca pasar menyesuaikan kebutuhan pembeli, karena pada umumnya mereka yang datang ke minimarket adalah keluarga, sehingga pedagang kecil ini menyediakan kebutuhan makanan bagi keluarga yang siap untuk dinikmati, menjadi peluang bagi pedagang kecil yang menjajakan minuman (es jus buah), untuk melengkapi barang dagangan yang belum ada di minimarket. Demikian juga pedagang kecil martabak, mereka lebih pandai dalam membaca peluang pasar yang selalu dikunjungi pembeli. Pernyataan salah seorang responden pedagang martabak yang diamini oleh enam responden pedagang makanan lainnya, “Lokasi minimarket menurut saya lebih cocok kalau berdekatan dengan pedagang kecil, sebagai pendamping dalam menjajakan dagangan”. Demikian pula tiga responden pedagang kecil yang menjajakan minuman, mengaku “Rejeki tidak akan kemana-mana. Bagi kami keberadaan minimarket akan lebih menarik pembeli datang ke tempat kami, karena dengan adanya minimarket tempat ini menjadi ramai pengunjung.”

Kepedulian minimarket terhadap pedagang kecil: Pedagang kecil merasa semakin hari semakin susah, dikarenakan dagangannya mengalami sepi pembeli dan pendapatan menjadi berkurang, katanya “Sudah berkurang dan semakin sepi pembeli sembako atau barang-barang rumah tangga di toko kami ini, Pak, karena di sebelah sana sudah ada minimarket.” Pedagang lainnya mengatakan, “Kalau dulu sebelum ada minimarket dagangan kami selalu ramai, Pak.”

Keberadaan perusahaan minimarket yang dalam pandangan umum menyebar begitu bebas di setiap sudut kota, merupakan bentuk monopoli kaum kapitalis terhadap masyarakat kelas bawah, pertumbuhan minimarket yang begitu menjamur sesungguhnya berdampak pada kematian pedagang kecil, kios-kios kecil lainnya yang menjual barang sama dengan minimarket. Dengan alasan kepedulian sesungguhnya minimarket mencoba menarik simpati publik, tetapi pada sisi lain keberadaannya sangat memprihatinkan bagi pedagang kecil. Dalam wawancara dengan responden ditemukan keluhan pedagang kecil dagangannya mengalami

penurunan penjualan. Rencana menambah modal dengan cara kredit untuk memperbesar usaha rasanya ketakutan apabila konsumen dari hari ke hari mengalami penurunan, bukan tidak mungkin kondisi tersebut juga membayangi setiap pedagang kecil karena mereka sedang berada dalam kebangkrutan.

Dengan kondisi demikian diperlukan adanya kepedulian dari berbagai pihak baik masyarakat mampu, pemerintah maupun pihak minimarket. Kepedulian minimarket untuk ikut mengembangkan pedagang kecil dirasakan sebagian kecil oleh pedagang makanan dan minuman. Wujud kepedulian yang dapat dilihat yakni hanya penyediaan lokasi penjualan yang berada di depan minimarket bagi pedagang kecil dengan sistem sewa. Tabel 5 dapat disimak tanggapan pedagang kecil tentang kepedulian supermarket.

Tabel 5 memperlihatkan, bahwa pada umumnya para responden mengaku dirinya belum pernah dipedulikan oleh minimarket. Mereka melakukan kegiatan usaha dengan memanfaatkan trotoar untuk menjajakan dagangan. Sebanyak sembilan responden pedagang kecil menyatakan belum pernah menerima bantuan apapun dari minimarket "Saya belum pernah menerima bantuan apapun dari pihak minimarket dan saya menyewa tempat jualan pada yang punya rumah itu, bukan milik minimarket. Minimarket tidak pernah peduli pada kami pedagang kecil." Pengakuan tersebut menunjukkan, bahwa keberadaan minimarket belum mampu melibatkan pedagang kecil secara keseluruhan sebagai mitra dalam berdagang, dikarenakan pihak minimarket memang belum memiliki program yang berkaitan dengan pedagang kecil yang berada di lingkungannya.

Pihak minimarket sebenarnya juga telah melakukan kepedulian meskipun belum secara keseluruhan, terbukti dengan pengakuan enam pedagang kecil yang mengaku mendapat fasilitas tempat berjualan, mereka membuka usaha dengan menjajakan makanan dan minuman di depan minimarket. Fasilitas yang dimanfaatkan sebagian pedagang kecil tersebut diberikan dengan cara sewa, sehingga kepeduliannya belum sepenuhnya. Beberapa pedagang kecil memberi tanggapan yakni, "Saya berjualan di depan minimarket dengan cara sewa, menurut saya minimarket telah peduli pada saya, sehingga saya bisa berusaha di tempat ini." Pengakuan tersebut memperlihatkan, bahwa kepedulian minimarket belum secara total karena masih melakukan sistem sewa tempat. Semestinya pihak minimarket tidak memungut sewa, karena memberi keuntungan bagi minimarket dalam menarik pembeli.

Kesejahteraan Pedagang Kecil: Dalam mencapai suatu kesejahteraan diperlukan adanya rasa terpenuhinya kebutuhan pokok manusia, yakni kebutuhan fisik, psikis, rohaniyah, dan sosial (Suharto, 2004). Untuk mewujudkan hal tersebut pedagang kecil melakukan kegiatan dengan berjualan, baik di depan maupun di sekitar minimarket. Dalam penelitian ini istilah kesejahteraan pedagang kecil diartikan sebagai, suatu keadaan terpenuhinya segala kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan.

Untuk mengetahui kesejahteraan pedagang kecil yang berjualan di dekat minimarket dapat dibedakan menjadi dua kategori, yakni pedagang kecil kelontong dan makanan atau minum-

Tabel 5. Tanggapan Pedagang Kecil Mengenai Kepedulian Minimarket

No	Tanggapan Kepedulian Minimarket	F	%
1	Saya berjualan di depan minimarket dengan cara sewa, menurut saya minimarket telah peduli pada saya, sehingga saya bisa berusaha di tempat ini.	6	40,00
2	Saya belum pernah menerima bantuan apapun dari pihak minimarket dan saya menyewa tempat jualan pada yang punya rumah itu, bukan milik minimarket.	5	33.33
3	Minimarket tidak pernah peduli pada kami pedagang kecil.	4	26.67
Jumlah		15	100

Sumber: Jawaban Responden (2013)

an. Pedagang kecil kelontong, membuka warung di depan rumah yang kebetulan berdekatan dengan minimarket. Pedagang makanan dan minuman melakukan aktivitasnya di depan halaman minimarket atau di sampingnya. Hal ini dikarenakan pedagang makanan dan minuman melakukan usaha dengan memanfaatkan peluang keberadaan minimarket. Jadi keberadaan pedagang kecil disebabkan berdirinya minimarket yang ada di sekitar, sehingga terjalin saling membutuhkan di antara mereka.

Kesejahteraan Pedagang Kelontong: pedagang kecil yang menjadi responden dalam penelitian ini mengemukakan, berbagai tanggapan mengenai keberadaan minimarket dengan usaha yang ditekuninya, semakin menekan keberlanjutan pedagang kecil terutama pedagang kelontong. Keberadaan minimarket sangat berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kelontong di sekitarnya, sebagaimana keluh kesah salah satu responden pedagang kelontong yang berada di Tamantirto, "Sejak berdiri minimarket toko saya menjadi sepi dari pembeli. pelanggan saya juga tidak pernah beli di sini lagi." Keluhan tersebut menggambarkan adanya dampak yang dialami pedagang kelontong dengan keberadaan minimarket yang tidak jauh dari tempat usahanya. Lain lagi yang disampaikan pedagang kelontong berkait perolehan penghasilan dengan pemenuhan kebutuhan keluarga yakni, "Saya mengalami penurunan penghasilan. Sebelum ada minimarket, sehari bisa mendapat satu juta tiga ratus rupiah. Namun, setelah ada minimarket di depan itu, hanya lima ratus ribu rupiah saja berat." Pengakuan tersebut menunjukkan, bahwa pedagang kelontong mengalami dampak kurang baik dengan adanya minimarket. Mereka mengalami penurunan dalam memperoleh penghasilan, bahkan mencapai separuh lebih dari penghasilan sebelumnya.

Pengakuan yang hampir senada disampaikan oleh pak Jamin, pedagang kelontong yang berada di depan swalayan WS Tamantirto: "Kalau toko kelontong saya masih buka pasti akan mengalami kerugian yang berkepanjangan. Untuk itu bekas toko kelontong tersebut sekarang saya sewakan ke responden lain. Saya sekarang berjualan gorengan dan jamu tradisional."

Dari pengakuan yang disampaikan oleh ketiga pedagang kelontong tersebut terlihat, bahwa mereka mengalami penurunan penghasilan sejak keberadaan minimarket. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan keluarga mereka juga mengalami perubahan, seperti pemenuhan kebutuhan fisik keluarga, meskipun pemenuhan kebutuhan makan tetap tiga kali sehari, tetapi mengurangi menu lauk. Biasanya mereka menggunakan lauk daging ayam dua kali satu minggu, dikurangi menjadi satu kali seminggu. Sebagaimana pengakuan Pak Parman: "*Untuk pemenuhan kebutuhan makan saya melakukan pengurangan dalam mengadakan lauk pauk, yang biasanya lauk ayam dua kali seminggu menjadi satu kali, tetapi untuk makan tetap tiga kali dalam sehari.*" Mereka menyesuaikan penghasilan yang diperolehnya. Keberadaan minimarket menimbulkan penurunan penghasilan bagi pedagang kelontong yang berada di sekitarnya, sehingga kesejahteraan para pedagang kecil terutama pedagang kelontong mengalami penurunan.

Kesejahteraan Pedagang Makanan dan Minuman: Berbeda dengan pedagang kecil yang memiliki jenis usaha sebagai penjual makanan dan minuman, mereka merasakan memiliki peluang usaha di depan minimarket. Jenis usaha yang mereka lakukan, seperti pedagang martabak dan terang bulan, mengaku dengan adanya minimarket usaha dagangannya menjadi laris. Mereka melakukan kegiatan sebagai pedagang martabak cukup lama sebelum minimarket dibangun, tetapi mereka berjualan di pinggir jalan dekat lapangan. Mereka mengadakan pendekatan dengan pengelola minimarket untuk diizinkan ikut berjualan di depannya dengan cara sewa, seperti yang dikatakan Pak Maryanto pedagang martabak yang berasal dari Tegal: "Sebelum ada minimarket saya sudah jualan martabak di dekat lapangan, tapi saya sering kerepotan untuk menyimpan gerobak, apa lagi kalau musim hujan. Kemudian setelah minimarket ini dibuka saya beranikan untuk meminta izin ikut berjualan di sini."

Hal senada juga disampaikan oleh Pak Subarjo penjual minuman (jus): "*Saya mulai berjualan es jus semenjak minimarket ini dibuka. Berawal saya mencoba memberanikan*

diri untuk ikut berjualan di depan minimarket ini, meskipun harus dengan sewa tempat.” Pak Deden Karim, penjual donat kentang juga memberi gambaran senada dengan kedua pedagang tersebut. Menurutnya, “Berawal dari ikut responden membantu jualan donat kentang di Jakarta. Karena ingin mandiri dan berusaha di tempat lain, maka saya menghubungi teman yang sudah menjadi pedagang pisang molen di Yogyakarta. Kemudian saya memberanikan diri pergi ke Yogyakarta dengan tujuan untuk berjualan donat kentang, dan saya melihat ada peluang untuk berjualan donat kentang di depan minimarket. Saya kemudian minta izin pada pengelola minimarket untuk dapat menyewakan lahan di depan minimarket sebagai tempat berjualan.”

Pengakuan para pedagang kecil tersebut menggambarkan, bahwa mereka melakukan aktivitas berjualan dengan mempertimbangkan peluang kemungkinan akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemungkinan untung dan rugi menjadi pertimbangan utama mereka. Oleh karena itu mereka dituntut untuk bisa membaca peluang pasar lebih tepat. Mungkin pendapatan yang mereka peroleh tidak terlalu besar, namun ternyata memberi kepuasan dan kebahagiaan bagi keluarga. Pendapatan sebesar Rp. 600.000,- setiap hari, bagi pedagang donat dan es juice (yang dilakukan hanya setengah hari), dan Rp 1.500.000,- s.d. Rp 3.000.000,- bagi pedagang martabak dan terang bulan, dirasakan mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Pendapatan yang diperoleh tersebut menggambarkan bahwa penghasilan pedagang makanan dan minuman yang berjualan di depan minimarket mendapatkan penghasilan yang cukup memuaskan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga.

Perbedaan dalam pendapatan antara pedagang martabak dengan donat dan es jus tersebut ternyata disebabkan adanya perbedaan penetapan harga pada setiap produk yang dihasilkan. Namun demikian tempat untuk berjualan juga memberi andil dalam memperoleh pendapatan dan ternyata di depan minimarket merupakan tempat yang strategis untuk dijadikan peluang dalam usaha berjualan makanan dan minuman. Besarnya pendapatan yang diperoleh pedagang

kecil di depan minimarket menjadi motivasi bagi pedagang kecil selaku wirausahawan untuk bersungguh-sungguh dalam menekuni usaha, terutama demi kesejahteraan keluarga. Apabila dilihat dari penghasilan tersebut, pedagang kecil yang memiliki jenis usaha makanan dan minuman mampu menyejahterakan keluarganya. Sebagaimana dikatakan seresponden pedagang minuman, “Semenjak berjualan di depan minimarket ini, pendapatan saya mengalami kenaikan. Lumayan setiap hari bisa menyisihkan uang sebesar Rp 400.000,- dari pendapatan sekitar Rp 600.000,-. Untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah, saya merasa cukup.”

Pengakuan tersebut menunjukkan, bahwa pedagang kecil yang menjajakan makanan dan minuman di depan minimarket merasa diuntungkan. Oleh karena itu, minimarket menjadi mitra bagi mereka untuk mengembangkan dagangannya dengan mengharapkan pelanggan yang sering berkunjung di minimarket. Kondisi ini menjadi berbeda dengan kesejahteraan para pedagang kecil yang menjajakan barang kebutuhan sehari-hari (kelontong), mereka justru mengalami kemunduran dalam melakukan usahanya. Hal ini dikarenakan barang dagangan yang mereka jajakan sebagian besar telah tersedia di minimarket, sehingga keberadaan minimarket menjadi saingan dalam melakukan usaha.

Harapan Pedagang Kecil: Dari berbagai persoalan yang dihadapi pedagang kecil terhadap kehadiran minimarket, mereka tetap mengharapkan minimarket dapat memberi manfaat bagi pedagang kecil di sekitarnya. Saling membutuhkan, mungkin yang lebih tepat dengan realitas kehidupan antara pedagang kecil dan minimarket. Namun semua itu kembali kepada pedagang kecil yang merasakan dan menilai kehadiran minimarket di lingkungan masyarakat. Responden pedagang kelontong yang usahanya mengalami kemerosotan mengungkapkan, “*Saya berharap, semestinya pemerintah membuat peraturan yang mewajibkan minimarket memiliki program yang bertujuan untuk membina pedagang kecil yang ada di lingkungan usahanya.*”

Harapan pedagang kecil terhadap pemerintah setempat adalah untuk mengawasi dan mengatur berkait dengan kewajiban minimarket

dalam memberikan pembinaan terhadap pedagang kecil yang berada di lingkungan tempat usaha. Pengaturan jarak antara minimarket dengan pedagang kecil tidak terlalu dekat, penyelenggaraan perizinan masih perlu ditegakkan agar tidak terdapat lagi minimarket tanpa memiliki izin. Sebaiknya pihak minimarket memberikan pembinaan kepada pedagang kecil berkait dengan manajemen dalam pengelolaan usaha kecil, sehingga ada kemungkinan pedagang kecil bisa dijadikan mitra usaha. "Keberadaan minimarket sangat berpengaruh terhadap pendapatan kami sebagai pedagang kelontong yang sudah bertahun-tahun mengais rejeki di tempat ini. Sekarang kami telah bangkrut, karena tidak ada lagi yang mengunjungi dan membeli dagangan kami. Kami mohon kepada pemerintah agar segera membuat peraturan yang lebih ketat terkait masalah ini." Pengakuan dari pedagang kelontong tersebut juga dirasakan oleh para pedagang kelontong lainnya, bahwa peraturan yang dibuat pemerintah semestinya ditindaklanjuti dengan pelaksanaan di lapangan.

E Penutup

Simpulan: Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa usia pedagang kecil selaku responden tergolong usia produktif, yakni usia yang masih bersemangat dalam melakukan kegiatan usaha. Dari sisi karakteristik perkembangan pada usia tersebut memang baru bersemangat beraktivitas untuk mendapatkan penghasilan bagi keluarga, termasuk di dalamnya perkembangan dari sisi kemampuan *kognitif*. Berdasar wawancara di lapangan tampak, bahwa pedagang kecil sebagian besar memiliki semangat dalam menekuni usahanya meskipun mengalami persaingan yang berat. Kondisi ini menggambarkan, bahwa pedagang kecil yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki kualitas dan semangat berusaha yang kuat.

Sudah barang tentu terjadi persaingan bisnis yang tidak seimbang antara pedagang lokal bermodal terbatas melawan minimarket yang bermodal besar. Minimarket memang kecil, tetapi di belakangnya terdapat pemodal besar sebagai penyandang dana. Untuk itu diperlukan campur tangan pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Pemerintah daerah sebenarnya

telah membuat aturan dan membatasi pendirian minimarket, sebagaimana Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penataan Toko Modern di Kabupaten Bantul. Dalam hal pengetahuan mengenai minimarket pada umumnya pedagang kecil telah mengerti, meskipun mereka menjelaskan dengan menggunakan bahasanya sendiri, mereka lebih melihat pada kegiatan keseharian yang dilakukan minimarket.

Dalam penilaiannya terhadap minimarket pedagang kecil memberi tanggapan penilaian soal dampak, baik yang mendukung maupun yang merugikan. Penilaian yang diungkap sangat berkait pada jenis usaha yang mereka lakukan, seperti pedagang martabak atau penjual makanan lebih memberi penilaian yang baik, karena tempat mereka berjualan menggunakan halaman minimarket. Sebaliknya, pedagang kelontong memberi penilaian bahwa minimarket menimbulkan kebangkrutan. Berkait dengan tanggapan mengenai jarak lokasi, antara minimarket dan pedagang kecil, sebagian besar responden mengaku lebih menyukai tempat usahanya berdekatan dengan lokasi minimarket. Hal ini dikarenakan mereka memiliki jenis usaha makanan dan minuman segar, sehingga lebih memilih usaha dekat tempat minimarket. Sebaliknya pedagang kelontong mengaku jarak antara minimarket dengan lokasi pedagang kecil seharusnya diatur lebih jauh, sekitar 500 meter.

Kesejahteraan pedagang kecil dalam penelitian ini di bedakan menjadi dua, yakni pedagang kelontong dan makanan dan minuman. Pedagang kelontong yang berdekatan dengan minimarket mengaku sejak berdirinya minimarket toko kelontongnya menjadi sepi pembeli dan pelanggan berpindah memilih belanja di minimarket. Keberadaan minimarket ternyata berdampak menurunkan pendapatan pedagang kelontong. Berdasar pengakuan pedagang kelontong selaku responden ternyata mereka mengalami penurunan 50 persen setelah ada minimarket. Pendapatan sebelum ada minimarket sehari mendapatkan Rp 1.300.000,-, tetapi setelah ada minimarket mengalami penurunan menjadi Rp. 500.000,-. Dengan menurunnya pendapatan juga berpengaruh terhadap menu

makan pada keluarga, yakni yang biasa menggunakan lauk ayam dua kali menjadi satu kali dalam seminggu. Dampak lain yang terjadi yakni alih fungsi pedagang kelontong menjadi pedagang gorengan, dengan demikian penghasilan pedagang kelontong mengalami penurunan dan tentunya akan mempengaruhi kesejahteraannya.

Kesejahteraan pedagang kecil yang menjual makanan dan minuman ternyata cukup baik, karena merasa memiliki peluang yang baik dengan keberadaan minimarket. Mereka lebih senang dan nyaman berjualan berdekatan dengan lokasi minimarket, karena bisa memperoleh pendapatan sebesar Rp 600.000,- setiap hari, seperti pedagang donat dan es jus (yang dilakukan hanya setengah hari), sedangkan pedagang martabak Rp. 1.500.000,- s.d. 3.000.000,-. Dengan penghasilan tersebut pedagang makanan dan minuman yang berjualan di depan minimarket merasa cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Kesejahteraan pedagang kecil sangat ditentukan pada jenis dagangan mereka. Harapan yang diinginkan pedagang kecil yakni pihak minimarket seharusnya memiliki kepedulian pada pedagang kecil di sekitar. Wujud dari kepedulian yang diharapkan yakni adanya pembinaan dan penyediaan fasilitas untuk melakukan kegiatan usaha bagi pedagang kecil, juga terjalinnya kerjasama yang baik antara pedagang kecil dengan minimarket, saling membutuhkan antara pedagang modern dengan pedagang tradisional.

Rekomendasi: Pemerintah Kabupaten Bantul seharusnya lebih mengawasi dan mengatur peraturan daerah mengenai keberadaan minimarket. Penempatan lokasi antara minimarket dengan pedagang kecil dan perizinan yang diseleksi dengan ketat, sehingga tidak ada minimarket yang ilegal tanpa menyertakan perizinan yang syah dari pemerintah setempat. Pemerintah setempat hendaknya memberi tanggung jawab bagi pihak minimarket untuk mengadakan pembinaan terhadap pedagang kecil di lingkungannya, kewajiban untuk melakukan pembinaan pada pedagang kecil sehingga terwujud adanya saling membutuhkan.

Kepada para pengusaha minimarket untuk lebih bijaksana dalam mendirikan dan menem-

patkan minimarket sebagai usahanya. Jarak tempat usaha seharusnya juga memikirkan keberadaan pedagang kecil yang sedang melakukan usaha dagang. Untuk itu pihak minimarket tidak hanya berpikir tentang bisnis semata tetapi lebih pada memperhatikan lingkungan tempat usaha. Selanjutnya bagi masyarakat secara umum agar selalu bisa memanfaatkan keberadaan minimarket sebagai kebutuhan saja, dan tidak seharusnya mengubah perilaku masyarakat menjadi konsumtif. Diperlukan adanya pembatasan atau penertiban perkembangan minimarket sebagai bentuk *affirmative action* terhadap pedagang kecil, diperlukan adanya pelaksanaan regulasi yang lebih serius terhadap pembatasan izin pendirian usaha minimarket dalam suatu lokasi tertentu sehingga tidak terjadi monopoli penjualan barang kebutuhan.

Pustaka Acuan

- Agus Priono.(2009). *Persepsi dan Preferensi Pedagang Kaki Lima Taman Kota terhadap Rencana Pemindahan ke Taman di Tuk Buntung Kota Cepu*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- APPSI.(2012). *Data Omzet Pasar Tradisional DKI Jakarta*, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Jakarta.
- Bupati Bantul. (2008). *Surat Edaran Pemberian Izin Pendirian Minimarket*, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
- Deddy Mulyana. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin,
- Dinas Perizinan Kabupaten Bantul. (2008). *Hasil Pendataan Toko Minimarket di Kabupaten Bantul*, Dinas Perizinan, Bantul.
- Gusmulyadi.(2010). *Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima Kawasan Pusat Kota Yogyakarta*, Malang: Unisba.
- Jamasy, Owin, dalam Suharto.(2010). *Keadilan, Pemberdayaan & Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Belantika.
- Japina dan Henky.(2010). *Analisis Determinan Pendapatan Sektor Informal di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu*, Medan: Universitas Sumatera Utara.
- KPPU. (2010). *Data jumlah Pasar Tradisional di Indonesia*, Jakarta: Komisi Pengawasan Persaingan Usaha,

- Marisya, Lukhy Dwi.(2011). *Studi Perbedaan Adanya Pasar-Pasar Pesaing dan Besarnya Penurunan Omzet Pedagang di Pasar Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Noeng Muhajir.(2002) *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (2007). Peraturan Presiden (Perpres) No. 112/2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisi-onal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Jakarta.
- Ramli R. (2008). *Sektor Informal Perkotaan Pedagang Kaki Lima*, Jakarta: Ind-Hill Co.
- Suharsimi Arikunto.(2001). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: Bima Aksara.
- Retno Widjayanti.(2009). *Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota*, Jurnal Teknik- Vol 30 No.3. ISSN 0852-1697.
- Pengertian Tentang Minimarket, ([http//www.sinarharapan.co.id](http://www.sinarharapan.co.id))

Keterlibatan Orangtua dalam Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Parent Commitment in Children Early Education

Ikawati

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), Kementerian Sosial.
Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1, Sonosewu, Yogyakarta. e-mail: <ikawati.susatyo@yahoo.com> HP +6287839561959.
Diterima 20 Januari, direvisi 16 April, disetujui 28 April 2014.

Abstract

This research is meant to know the influence of parent role in children early education (CEE) for children development. The research is correlational study. The research subjects are 100 parents having child under five and participating in children early education (PAUD) in Yogyakarta Special Territory. Data are gathered through sended questionnaires, interview, and observation. Data are analyzed through quantitive-descriptive and intepretative mixed method. The result finds that there is an influence CEE activities on children development, tahat can be seen from the effectiveness contribution of the variable (Parents in CEE) on variable (Children Development), as big as 11,945 per cent, that means there are still other variables (88,055 per cent) enfluence children development. The influence can be seen from relative contribution of each variable, namely the parent commitment to give children early education (84,460 per cent), parents perception on children activities in CEE (10,035 per cent) and parents perception on CEE educators and guidance (5,506 per cent). Refer to the result above, it is recommended that the Ministry of Social Affairs through Children Welfare Directory, should hold some program that invite children underfive and parent as family (like parenting), so children are away from any handycap and develop optimally.

Keywords:

Parents Role-Children Early Education-Children Development

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peran orangtua dalam kegiatan PAUD terhadap perkembangan anak. Jenis penelitian adalah korelasional studi. Subjek penelitian adalah orangtua yang mempunyai anak balita dan ikut dalam kegiatan PAUD di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data secara *mix method* dengan menggunakan deskriptif kualitatif-kuantitatif dan interpretative. Hasil penelitian ditemukan bahwa ada pengaruh kegiatan PAUD terhadap perkembangan anak. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari besar sumbangan efektif variabel peran orangtua dalam kegiatan PAUD terhadap variabel perkembangan anak sebesar 11,945 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih ada 88,055 persen faktor lain yang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Pengaruh lain tersebut dapat dilihat dari besar sumbangan relatif untuk masing-masing variabel, yaitu variabel keterlibatan orangtua dalam memberikan PAUD (84,460 persen), variabel persepsi orangtua tentang keaktifan anak mengikuti PAUD (10,035 persen) dan variabel persepsi orangtua tentang peran petugas PAUD dalam mendampingi anak (5,506 persen). Berdasarkan temuan di atas, direkomendasikan kepada Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, agar dalam menentukan kebijakan, ada program-program kegiatan yang melibatkan anak balita beserta orangtuanya (keluarga) seperti parenting dengan tujuan anak dapat tercegah terjadinya hambatan dalam perkembangan dan pada akhirnya anak dapat berkembang secara optimal.

Kata kunci:

Peran Orangtua-PAUD-Perkembangan Anak

A. Pendahuluan

Mendidik dan mengasuh anak usia dini adalah salah satu tugas utama orangtua dan tenaga pendidik. Namun demikian, karena berbagai kendala orangtua tidak bisa mendidik dan mengasuh anaknya secara langsung. Pemberdayaan wanita di berbagai bidang semakin meningkat, sehingga banyak wanita yang bekerja di luar rumah dan pembagian kerja di

dalam rumah khususnya terkait dengan pengasuhan dan pendidikan anak mengalami perubahan. Pengasuhan dan pendidikan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orangtua tetapi sudah berbagi peran dengan pengasuh, penitipan dan lembaga lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan pengganti peran orangtua sebagai pengasuh/pembimbing/pendidik yang profesional dan mampu melaksanakan tugas

tersebut yaitu tenaga pendidik. Tenaga pendidik, program kegiatan, dan fasilitas yang tersedia di tempat penitipan dan pendidikan anak usia dini sebaik apapun tidak akan dapat menggantikan sepenuhnya peran orangtua sebagai pengasuh sekaligus pendidik bagi anak. Kebutuhan utama seorang anak adalah mendapatkan perhatian dari orang-orang yang paling dekat dengan-nya, karena inilah yang akan mempengaruhi kehidupan pribadi anak. Peran orangtua adalah kembali menjadi aktor utama untuk menjadi model yang dapat menjadi teladan bagi anak. Oleh karena itu, keluarga adalah yang paling bertanggung jawab dalam membentuk anak sesuai yang diharapkan.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan dalam tiga jalur, yaitu jalur formal, non formal, dan informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur formal antara lain diselenggarakan dalam bentuk taman kanak-kanak, *raudlatul athfal*, dan sejenisnya, sedangkan pada jalur non formal antara lain taman penitipan anak, kelompok bermain, taman pendidikan Al-Qur'an, sekolah minggu dan sebagainya. Pada jalur informal, pendidikan anak usia dini ditangani langsung oleh keluarga dan lingkungan. Lembaga pendidikan anak usia dini kini harus mulai menyelaraskan langkah dan memfokuskan perhatian pada anak-anak, bukan sekedar tuntutan masyarakat atau orangtua. Kurikulum dan proses pembelajaran harus diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan dunia anak. Para pendidiknya harus memiliki *mindset* tentang anak dan dunianya, yang bukan miniatur orang dewasa. Keistimewaan dan keunikan anak harus mulai dihargai.

PAUD merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar kearah pertumbuhan dan perkembangan fisik dan kecerdasan seperti daya pikir, daya cipta, emosi, spiritual, berbahasa/komunikasi dan sosial. Pemberian PAUD sebaiknya diberikan sejak anak lahir hingga enam tahun mengingat hal tersebut maka keluargalah yang paling bertanggung jawab pada PAUD. Menurut Ace (2008), PAUD dipercaya dapat memacu peningkatan mutu pendidikan jangka

panjang, artinya bahwa pemberian pendidikan pada usia dini pada anak akan membantu anak memiliki kesiapan dalam belajar.

Masa usia dini merupakan periode emas (*golden age*) bagi perkembangan anak untuk memperoleh proses pendidikan. Periode ini adalah tahun-tahun berharga bagi seorang anak untuk mengenali berbagai macam fakta di lingkungannya sebagai stimulasi terhadap perkembangan kepribadian, psikomotor, kognitif maupun sosialnya. Berdasarkan hasil penelitian, sekitar 50 persen kapabilitas kecerdasan orang dewasa telah terjadi ketika anak berumur 4 tahun, 80 persen telah terjadi ketika berumur 8 tahun dan mencapai titik kulminasi ketika anak berumur 18 tahun (Direktorat PAUD, 2004). Hal ini berarti bahwa perkembangan yang terjadi dalam kurun waktu 4 tahun pertama sama besarnya dengan perkembangan yang terjadi pada kurun waktu 14 tahun berikutnya. Periode emas ini merupakan periode kritis bagi anak, karena periode ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan periode berikutnya hingga masa dewasa.

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang sangat mendasar dan strategis dalam pembangunan sumberdaya manusia. Tidak mengherankan apabila banyak negara menaruh perhatian yang besar terhadap penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Di Indonesia sesuai pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan anak usia dini telah ditempatkan sejajar dengan pendidikan lainnya. Bahkan pada puncak acara peringatan Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 2003, Presiden RI telah mencanangkan pelaksanaan pendidikan anak usia dini di seluruh Indonesia demi kepentingan terbaik anak (Direktorat PAUD, 2004).

Pihak yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini adalah pemerintah (negara), masyarakat, dan keluarga. Keluarga adalah institusi pertama yang melakukan pendidikan dan pembinaan terhadap anak (generasi), dalam keluarga dasar kepribadian anak dibangun. Masyarakat yang menjadi lingkungan anak menjalani aktivitas sosialnya mempunyai peran yang besar dalam mempengaruhi baik dan buruk proses pendidikan anak. Interaksi dalam

lingkungan sangat diperlukan dan berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Berbagai macam program PAUD dikembangkan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Minat mengembangkan PAUD sebenarnya bersumber dari lima macam pemikiran:

1. Meningkatkan tuntutan terhadap pengasuhan anak dari para ibu yang bekerja, yang berasal dari berbagai tingkatan sosial ekonomi.
2. Adanya perhatian yang dikaitkan dengan produktivitas, persaingan yang bersifat internasional, permintaan tenaga kerja yang bersifat global, kesempatan kerja yang luas baik bagi wanita maupun bangsa manapun.
3. Pandangan bahwa pengasuhan anak sebagai sesuatu kekuatan utama guna membantu para ibu untuk meningkatkan kualitas baik sebagai ibu maupun sebagai sumber daya manusia pada umumnya, sehingga dapat bersaing dalam pasar tenaga kerja.
4. Adanya hasrat untuk meningkatkan kualitas anak sejak usia dini terutama bagi mereka yang orangtuanya kurang beruntung, antara lain yang kurang mampu memasukkan anak ke taman kanak-kanak. Program untuk anak usia dini mempunyai dampak positif panjang terhadap peningkatan kualitas perkembangan anak (Mitchell dalam Harun Alrasyid: 2008).

Kenyataan di masyarakat masih banyak orangtua yang belum memahami kebutuhan utama anak. Terkait keberadaan PAUD pendapat masyarakat menunjukkan bahwa PAUD ternyata hanya berperan menggantikan orangtua ketika mereka sibuk bekerja. Pemikiran di atas bila dikaitkan dengan pemahaman orangtua tentang PAUD, bagaimanapun peran orangtua terhadap anaknya tidak dapat digantikan oleh apa atau siapapun.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka peneliti ingin mengetahui Keterlibatan orangtua dalam kegiatan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi perkembangan anak. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Kesejahteraan Anak dalam menentukan kebijakan program-program yang melibatkan anak balita, orangtua dan keluarga sebagai aktor terpenting

terhadap masa depan perkembangan anak. Oleh karena itu perlu memberikan pendidikan pada anak sedini mungkin melalui tindakan-tindakan yang lebih edukatif, sehingga anak balita dapat memanfaatkan masa keemasannya dengan tepatguna, mewujudkan anak yang cerdas, berkualitas dan berkarakter.

A. Kajian Teori

1. Pentingnya Tugas-tugas Perkembangan bagi Perkembangan Anak

Mengingat pentingnya posisi anak dimasa mendatang, maka kebutuhan anak perlu dipenuhi, agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Pemenuhan kebutuhan anak perlu disesuaikan dengan masa perkembangannya. Fase ini menunjukkan anak berada pada situasi peka untuk menerima berbagai rangsangan dari luar. Jika pada masa peka anak memperoleh perawatan dan pendidikan yang sebaik-baiknya sesuai dengan tingkat perkembangannya, maka terciptalah suatu kondisi dimana bakat dan kemampuan anak akan berkembang secara optimal (Sri Kuntari, dkk: 2000). Menurut Havighurst (dalam Hurlock, EB: 1991) anak usia lahir sampai dengan 6 tahun mempunyai tugas perkembangan yang sesuai dengan usia dan tingkat perkembangannya, yaitu belajar berjalan, belajar makan-makanan padat, belajar berbicara, belajar mengendalikan pembuangan sampah tubuh, belajar membedakan jenis kelamin dan kesopanan seksual, mencapai stabilitas fisiologis, membentuk konsep sederhana mengenai kenyataan sosial dan fisik, belajar berhubungan secara emosional dengan orangtua, saudara kandung dan orang lain, dan belajar membedakan benar dan salah serta mengembangkan hati nurani.

Keberhasilan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan tersebut akan memberikan kemampuan dan kesiapan bagi individu untuk menerima dan melaksanakan tugas perkembangan selanjutnya. Sebaliknya kegagalan dalam menyelesaikan tugas tersebut, meskipun hanya dalam satu tugas, akan menghambat atau menyulitkan pelaksanaan tugas perkembangan dimasa-masa berikutnya. Pendapat ini juga diperkuat oleh Hurlock, EB (1991) bahwa kegagalan melaksanakan tugas-tugas perkembangan

an menimbulkan tiga akibat, yaitu: Membuat anak merasa rendah diri, sehingga menimbulkan perasaan tidak bahagia, mengakibatkan ketidaksetujuan sosial, yang sering disertai dengan penolakan sosial, sehingga anak dianggap belum matang, belum dewasa, kekanak-kanakan, dan menyulitkan penguasaan tugas perkembangan baru.

Dari uraian di muka, jelas bahwa terpenuhinya syarat bagi perkembangan anak secara wajar dapat menghasilkan kepribadian yang sehat. Berkembangnya kepribadian yang sehat, lebih lanjut akan menjadi modal pengembangan kemampuan dan kesiapan menghadapi tantangan hidup. Perkembangan yang wajar dan kepribadian yang sehat merupakan persyaratan esensial bagi proses belajar berbagai pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan, agar individu benar-benar siap menghadapi berbagai tantangan hidup yang dihadapi dalam bermasyarakat.

Bertitik tolak dari adanya berbagai tantangan hidup tersebut, pengembangan SDM tidak dapat lepas dari usaha pendidikan. Bila dikaitkan dengan eksistensi dan hakekat kehidupan manusia, maka kegiatan pendidikan ini pada dasarnya diarahkan pada empat aspek pembentukan pribadi. Menurut Sudjana (dalam Sri Kuntari, dkk: 2000) ke empat aspek tersebut adalah: (1) Pengembangan manusia sebagai mahluk individu, meliputi kawasan kognitif, afektif, dan psikomotor, (2) Pengembangan manusia sebagai mahluk sosial, agar terjadi keseimbangan antara aspek individual dan aspek sosial, (3) Pengembangan manusia sebagai mahluk susila agar norma, kaidah serta nilai-nilai susila dan sosial dapat menjadi milik yang dipersonifikasikan dalam tingkahlaku pribadi yang susila, dan (4) Pengembangan manusia sebagai mahluk religius, agar manusia dapat melaksanakan hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama manusia.

Dua hal yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, yaitu faktor genetik merupakan modal dasar dalam mencapai hasil akhir proses tumbuhkembang anak. Potensi genetik yang bermutu hendaknya dapat berinteraksi dengan lingkungan secara positif sehingga diperoleh hasil akhir yang optimal. Faktor lain-

nya adalah lingkungan, lingkungan yang baik akan memungkinkan tercapainya secara optimal potensi bawaan, sedangkan yang kurang baik akan menghambatnya. Secara garis besar, faktor lingkungan dibagi menjadi dua lingkungan sebelum anak lahir yaitu semenjak dalam kandungan apabila ibunya mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi otomatis bayi yang dikandungnya akan tumbuh dan berkembang dengan sehat. Lingkungan ini berupa kebiasaan asupan ibu selama kehamilan, termasuk di dalamnya obat-obatan dan vitamin. Masuk juga dalam lingkungan ini adalah kondisi ibu sewaktu hamil yang berkaitan dengan penyakit, kejiwaan stress, posisi janin, infeksi dan lain-lain. Lingkungan setelah anak lahir yaitu hal-hal yang dapat mempengaruhi tumbuhkembang anak setelah lahir antara lain gizi, penyakit, gangguan hormon, kebersihan, stress, kasih sayang, pendidikan, stabilitas rumah tangga dan adat istiadat termasuk di dalamnya norma-norma masyarakat. Stabilitas dan keharmonisan rumah tangga mempengaruhi tumbuh kembang anak. Pada keluarga yang harmonis tumbuhkembang anak bisa optimal. Kepribadian yang terbuka besar pengaruhnya terhadap tumbuhkembang anak, berbeda bila dibandingkan dengan mereka yang kepribadiannya tertutup (Herimi Sarminto: 2004).

Menurut Miiner (dalam Sunartini: 2002), faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tumbuhkembang anak, yaitu faktor dalam, adalah faktor yang sebagian besar merupakan faktor genetik yang diwariskan/diturunkan, antara lain 1) hal-hal atau keadaan yang diturunkan baik dari orangtua maupun dari generasi sebelumnya, 2) kemampuan berpikir dan intelektual, 3) keadaan hormonal, 4) emosi, kepribadian serta sifat-sifat tertentu, 5) konstruksi tubuh, status imunologik, dan status gen. Faktor lainnya adalah faktor dari luar, yaitu faktor yang berasal dari luar tubuh anak/lingkungan fisik *biopsikososial* untuk memenuhi kebutuhan anak, seperti lingkungan keluarga, masyarakat serta gabungan antara keluarga dan masyarakat.

2. Membangun Karakter melalui PAUD

Membangun karakter, merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, anak akan

tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter jika ia tumbuh pada lingkungan yang berkarakter pula. Ada tiga pihak yang mempunyai peran penting dalam membangun karakter anak yaitu keluarga, sekolah, dan komunitas. Pembentukan karakter anak ada tiga hal yang perlu diperhatikan secara terintegrasi yaitu pertama, anak mengerti baik dan buruk, mengerti tindakan apa yang harus diambil, mampu memberikan prioritas hal-hal yang baik. Kedua, mempunyai kecintaan terhadap kebajikan, dan membenci perbuatan buruk. Ketiga, anak mampu melakukan kebajikan, dan terbiasa melakukannya. Hal tersebut dimulai dari cinta Tuhan dan alam semesta beserta isinya; tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemandirian; kejujuran, hormat dan santun; kasih sayang, kepedulian, dan kerjasama; percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah; keadilan dan kepemimpinan; baik dan rendah hati; toleransi, cinta damai, dan persatuan (Megawangi dalam Edi Waluyo, 2011).

Tujuan mengembangkan karakter adalah mendorong lahirnya anak-anak yang baik. Begitu tumbuh dalam karakter yang baik, anak-anak akan tumbuh dengan kapasitas dan komitmennya untuk melakukan berbagai hal yang terbaik dan melakukannya dengan benar, serta cenderung memiliki tujuan hidup. Membangun karakter yang efektif, ditemukan dalam lingkungan sekolah yang memungkinkan semua anak menunjukkan potensi mereka untuk mencapai tujuan yang sangat penting (Baittstich dalam Edi Waluyo, 2011).

Upaya yang dilakukan oleh guru dan orangtua dalam membangun karakter anak usia dini dengan memperlakukan anak sesuai dengan karakteristik anak, memenuhi kebutuhan dasar anak antara lain kebutuhan kasih sayang, pemberian makanan yang bergizi, pola pendidikan guru dengan orangtua yang dilaksanakan baik di rumah dan di sekolah saling berkaitan, berikan dukungan dan penghargaan ketika anak menampilkan tingkahlaku yang terpuji, berikan fasilitas lingkungan yang sesuai dengan usia perkembangannya serta bersikap tegas, konsisten, dan bertanggung jawab (Edi Waluyo, 2011).

Pendapat Montessori didukung oleh Moore (Theo Riyanto FIC, dkk: 2004), seorang sosi-

olog dan pendidik, meyakini bahwa kehidupan tahun-tahun awal merupakan tahun-tahun yang paling kreatif dan produktif bagi anak. Oleh karena itu, sejauh memungkinkan, sesuai dengan kemampuan, tingkat perkembangan dan kepekaan belajar mereka, kita dapat juga mengajarkan menulis, membaca dan berhitung pada usia dini. Strategi pengalaman belajar dan ketepatan mengemas pembelajaran yang penting menarik, mempesona, penuh dengan permainan dan keceriaan mudah dilakukan tanpa membebani dan merampas dunia kanak-kanak mereka. Salah satu hal yang dibutuhkan untuk dapat meningkatkan perkembangan kecerdasan anak adalah suasana keluarga dan kelas yang akrab, hangat serta bersifat demokratis, sekaligus menawarkan kesempatan untuk menjalin hubungan sosial melalui interaksi yang bebas. Hal ini ditandai antara lain dengan adanya relasi dan komunikasi yang hangat dan akrab.

Menurut Hilmansyah (2007) orangtua perlu memperhatikan anak bawah tiga tahun (batita) agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik, diantaranya kebutuhan gizi, kebutuhan gizi yang baik diharapkan membuat taraf kemampuan perkembangan fisik anak menjadi optimal. Kebutuhan *basic trust*, kebutuhan *basic trust* bagi anak agar anak yakin bahwa lingkungannya bisa dipercaya, sehingga anak berani bereksplorasi di lingkungannya yang baru. Sesuaikan ritme, sebaiknya jam belajar anak disesuaikan dengan ritme sehari-hari agar waktu beraktivitas anak tepat membuat anak siap menerima semua stimulasi dan aktivitas yang diberikan. Jangan dipaksa, anak usia balita rentan terhadap perubahan. Bila dipaksakan, maka bisa mogok mengikuti proses pendidikan. Oleh karena itu perlu strategi tertentu agar anak dapat mengikuti proses pendidikan dengan senang seperti gurunya berkompeten, melakukan aktivitas menarik seperti mendongeng, menyanyi, bermain dan lain-lainnya. Fasilitas, fasilitas bermain merupakan hal penting, seperti teman bermain yang nyaman, ruang belajar yang kondusif, peralatan belajar yang lengkap serta berbagai fasilitas lain yang dapat mendukung perkembangan anak. Lokasi, lokasi sebaiknya jangan terlalu jauh dari rumah karena akan membuat anak capek ketika sampai di sekolah/tempat pendidikan.

Pilihlah lokasi yang aman, nyaman dan jauh dari kebisingan. Memilih sekolah/tempat pendidikan, banyaknya lembaga pendidikan yang menjamur, maka perlu menyeleksi sekolah yang baik untuk anak balita. Program atau materi, perlunya diperhatikan apakah program materi sesuai dengan perkembangan anak balita. Tim pengajar, perlu diperhatikan mutu/kualitas tenaga pengajar pada kelompok/lembaga tersebut sebaiknya pengajar benar-benar mempunyai pengetahuan/wawasan tentang tumbuh kembang anak balita seperti cerdas, interaktif, ramah.

Terpenuhinya hak-hak anak sejak dini membuat tumbuhkembang anak menjadi tidak terhambat. Ada empat hak dasar anak yang harus dipenuhi oleh orangtua, guru, masyarakat, dan pemerintah. Empat hak dasar tersebut adalah hak hidup layak, kebutuhan mendapatkan pangan dan pelayanan kesehatan, termasuk hak hidup layak yang harus diperoleh anak. Hak untuk tumbuh dan berkembang, kebutuhan anak untuk bermain, orangtua memberi kesempatan pada anak untuk bermain, menstimulasi, merangsang dan menggali semua potensi yang dimiliki anak agar dapat tumbuh dan berkembang optimal. Hak perlindungan, anak mempunyai hak untuk perlindungan, mengingat seringkali anak mengalami kekerasan baik secara fisik (dipukul, dicubit, *dijewer*), verbal (dibentak, dimarahi), emosi dan seksual baik itu di dalam keluarga maupun di luar keluarga. Hak berpartisipasi untuk didengar pendapatnya, pola pengasuhan orangtua yang otoriter mengharuskan anak untuk menurut, mendengar apa yang dikatakan orangtua. Padahal sudah seharusnya orangtua sekarang mendengarkan apa yang dikatakan anak (Dedeh Kurniasih, 2007).

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Hal yang harus dipahami dalam karakteristik anak usia dini adalah (1) mengetahui hal-hal

yang dibutuhkan oleh anak, yang bermanfaat bagi perkembangan hidupnya, (2) mengetahui tugas-tugas perkembangan anak, sehingga dapat memberikan stimulasi kepada anak agar dapat melaksanakan tugas perkembangan dengan baik, (3) mengetahui bagaimana membimbing proses belajar anak pada saat yang tepat sesuai dengan kebutuhannya, (4) menaruh harapan dan tuntutan terhadap anak secara realistis, dan (5) mampu mengembangkan potensi anak secara optimal sesuai dengan keadaan dan kemampuannya (Mohammad Obaidillah, 2011). Dalam pedoman PAUD (Direktorat PAUD, 2004) disebutkan, bahwa menu Pembelajaran PAUD berdasarkan usia balita mencakup:

- a. Masa bayi (0-1 tahun), pada masa ini tujuan pendidikannya adalah menstimulasi aspek agama, motorik kasar, motorik halus, bahasa, intelektual, intrapersonal, interpersonal dan moral. Adapun alat permainan edukatif (APE) adalah peralatan bermain peran, boneka tangan, boneka binatang, *puzzle* (5 potong), buku kain, bola dan alat olahraga, audio visual, berbagai jenis alat musik, balok-balok kecil dan kartu-kartu bergambar.
- b. Masa Todler (balita) 1,2,3 tahun, pada masa ini tujuan pendidikannya adalah menstimulasi aspek agama, bahasa, intelektual, intrapersonal, interpersonal, moral dan disiplin. Adapun alat permainan edukatif yang dianjurkan adalah cermin (yang aman), konsep diri, boneka tangan, boneka binatang, *puzzle*, peralatan bermain peran, peralatan bermain air dan pasir, audio visual, berbagai jenis alat musik, balok, peralatan olahraga, maupun yang dapat dikendarai, materi seni dan kerajinan tangan, buku cerita, permainan gambar, mainan transportasi dan permainan konstruksi.
- c. Masa Prasekolah (3-6 tahun), pada masa ini tujuan pendidikannya adalah menstimulasi aspek agama, moral, bahasa, kognitif, fisi, intrapersonal, interpersonal, konsep diri dan minat. Alat permainan edukatif yang dianjurkan adalah bahan audio visual, buku, materi seni dan kerajinan, mainan transportasi, mainan binatang, *puzzle*, perlengkapan berkendara, alat bermain peran, alat ber-

main pasir dan air, bermain pemandangan, alat-alat membuat pola, mainan tarik dan dorong, boneka, permainan konstruksi, tali dan alat menjahit, alat musik, alat-alat menggambar dan alat-alat menulis.

Menurut Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas (dalam Saeful Imam, 2004) ada beberapa indikator perkembangan dan kemampuan anak kelompok usia 1-3 tahun dari hasil belajar.

- a. Perkembangan fisik dan motorik: Anak dapat menggerakkan anggota tubuh untuk kelenturan otot dan latihan keseimbangan badan, dengan indikator antara lain: (1) Kemampuan motorik kasar, berdiri tanpa bantuan dan tahan agak lama, seperti: berjalan bila tangannya dipegangi, membungkuk tanpa berpegangan, dan mencoba mendaki ketinggian (meja, kursi, atau tangga). (2) Kemampuan motorik halus, seperti: mengambil benda dengan jarinya dengan sempurna, memindahkan benda dari tangan yang satu ke tangan yang lain, memasukkan dan mengeluarkan benda dari bawah, memukul gendang dengan alat pemukul, memegang cangkir dan mencoba makan sendiri, melakukan kegiatan dengan satu tangan, seperti mencoret-coret dengan alat tulis dan menggambar bentuk-bentuk sederhana (garis, lingkaran tak beraturan), memegang pensil atau krayon, mengaduk dengan sendok ke dalam cangkir, bermain dengan balok (membuat menara, rumah-rumahan, dan jembatan), membuka kancing baju tanpa bantuan orang lain, dan mulai belajar memakai dan membuka kaos kaki. Faktor-faktor penting yang harus diperhatikan dalam mempelajari keterampilan motorik (Hurlock, EB: 1991) dapat dijelaskan sebagai berikut : kesiapan belajar, kesempatan belajar, kesempatan berpraktek, model yang baik, bimbingan, motivasi, setiap keterampilan motorik harus dipelajari secara individu, dan keterampilan sebaiknya dipelajari satu demi satu.
- b. Perkembangan Bahasa: Anak menunjukkan kemampuan bereaksi terhadap suara atau bunyi yang didengarnya, mengerti syarat dan perkataan orang lain serta mengucapkan keinginannya dalam bentuk tingkahlaku

dan ucapan sederhana. Indikatornya anak mampu mengucapkan kalimat yang terdiri dari dua kata, menggunakan bahasa isyarat, mengerti perintah sederhana, berani mengeluarkan pendapat, menyebut tiga benda lengkap dengan kegunaannya, menggunakan kalimat lain dan kalimat singkat (ya atau tidak), menyebut nama diri dan jenis kelaminnya, menyatakan hak milik, mampu merangkai dua kata seperti "apa itu", menyebut dirinya dengan kata "aku", bertanya dan mengerti kata-kata yang ditujukan kepadanya, menceritakan suatu kejadian sederhana, mengerti larangan "jangan", "tidak" dan lain-lainnya.

- c. Perkembangan Kognitif: Anak menunjukkan kemampuan mengenal dan memahami berbagai konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya anak mulai mengenal milik sendiri, mulai mengenal konsep warna dan bentuk, memecahkan masalah melalui kegiatan eksplorasi (percobaan sederhana, sebab/akibat), meniru perbuatan orang lain, mengumpulkan atau memasang dua benda sejenis, mengenal posisi suatu benda (atas bawah), menunjukkan rasa ingin tahun yang besar dengan banyak bertanya, mengenal makhluk hidup dan tidak hidup, melakukan pengamatan, menandai, serta menanggapi perubahan yang ada.
- d. Perkembangan Sosial Emosional: Anak menunjukkan kemampuan menolong dan dapat berhubungan dengan orang lain. Mengenai peraturan, terbiasa menerapkan disiplin, menanamkan kebiasaan baik dan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya anak suka menolong sesama teman, tersenyum secara spontan, mengenal minat pada hal-hal yang dikerjakan oleh orang yang lebih besar, mampu mengenal emosi orang lain, mencari tempat bergantung untuk mencari rasa aman, berani, menunjukkan reaksi emosi yang wajar karena marah, senang, sakit, takut, mampu meniru kegiatan orang dewasa, menjadi ekstrim dan keras kepala (egosentris), interaksi sosial cenderung kepada anggota keluarganya, mulai mengenal dirinya sendiri, serta mulai berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah dikenal.

- e. Perkembangan Moral dan Nilai-nilai Agama: Anak dapat mengucapkan dan meniru tingkahlaku orang dewasa dalam beribadah. Indikatornya anak mampu mengucapkan doa-doa pendek, mulai menirukan gerakan-gerakan doa atau sholat, serta menyayangi dan memelihara semua makhluk ciptaan Tuhan.
- f. Perkembangan Seni: Anak dapat menggerakkan tubuhnya untuk melakukan gerakan otot besar dan otot kecil dalam rangka pengembangan seni dan musik atau gerak. Indikatornya anak mampu bertepuk tangan, bergerak bebas sesuai irama musik, dan bernyanyi dengan bimbingan orangtua atau guru.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Berikut ini dibahas tentang definisi operasional, lokasi penelitian, sasaran subjek maupun objek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Untuk memudahkan pengambilan data, maka perlunya variabel-variabel dioperasionalkan sebagai berikut. Variabel bebas (x): Keterlibatan orangtua dalam kegiatan PAUD yang akan dilihat dalam aspek x1 yaitu kesadaran orangtua mengikutsertakan anak dalam kegiatan PAUD, keaktifan anak mengikuti PAUD, cara orangtua memberi PAUD, waktu pemberian PAUD pada anak, pemberian hukuman dan hadiah sebagai proses pembelajaran PAUD dan pemilihan alat-alat permainan edukatif. Aspek x2 yaitu keaktifan orangtua dalam mengamati anak menerima/mengikuti kegiatan PAUD melalui sikap anak dalam menerima pendidikan dari orangtua/petugas PAUD, sikap anak terhadap perintah orangtua/petugas PAUD, respon anak dalam menerima pendidikan PAUD dari orangtua/ petugas PAUD. Aspek x3 yaitu keaktifan orangtua dalam mengamati peran petugas PAUD melalui kondisi sumber daya manusia petugas PAUD dan kepribadian petugas PAUD. Variabel tergantung (y), yaitu kondisi perkembangan anak dilihat melalui pembentukan perilaku kebiasaan, kemampuan berbahasa, kemampuan kognitif, kemampuan fisiomotorik, dan kemampuan seni anak.

Lokasi penelitian diseluruh wilayah Provinsi DIY, melalui teknik area sampling, ditentukan

Kabupaten Sleman, Gunungkidul, Kulon Progo, Bantul, dan Kota Yogyakarta. Sasaran subjek penelitian adalah orangtua yang mempunyai anak berumur balita yang mengikuti kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi DIY berjumlah 100 orang. Objek penelitian pada penelitian ini adalah pengaruh keterlibatan orang tua dalam kegiatan pendidikan anak usia dini (PAUD) bagi perkembangan anak. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, untuk mengetahui kondisi subjek tentang perannya dalam kegiatan PAUD. Pedoman wawancara, dipergunakan sebagai panduan untuk mendapatkan masukan yang lebih banyak sesuai tujuan penelitian. Observasi, dipergunakan untuk melengkapi, membuktikan data-data yang belum diungkap dan belum terungkap dalam wawancara.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dipergunakan *mix method*, secara kuantitatif untuk mengetahui pengaruh keterlibatan orang tua dalam PAUD bagi perkembangan anak, dengan analisis regresi menggunakan perhitungan statistik program komputerisasi SPS Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih (2004). Deskriptif kualitatif-kuantitatif dan interpretative digunakan untuk menggambarkan, melukiskan keadaan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada. Menurut Hadari Nawawi dan Mimi Martini (1996), fakta-fakta yang ada tersebut dapat dimaknai dan disimpulkan untuk dipakai sebagai penyusunan saran dan tindakan.

C. Hasil Penelitian: Pengaruh Kegiatan PAUD terhadap Perkembangan Anak

Keberadaan PAUD memiliki peran sangat strategi dalam membentuk karakter anak sejak dini. Di kegiatan PAUD anak mulai diajarkan tentang budipekerti, moral, serta perilaku baik dan buruk. Melalui fondasi PAUD anak diharapkan dapat tumbuh dengan pribadi yang jujur, santun, kreatif, dan cerdas. Pada hakekatnya, pendidikan anak di usia dini adalah kunci terwujudnya insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Kecerdasan manusia merupakan salah satu indikasi kesejahteraan hidup. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh keterlibatan orangtua dalam kegiatan PAUD bagi perkembangan anak. Untuk mengetahui

ada tidaknya pengaruh kegiatan PAUD bagi perkembangan anak, maka dilakukan uji statistik analisis regresi. Untuk mempermudah perhitungan dipergunakan komputerisasi dengan Program Statistik (SPS) Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih UGM (2004) Yogyakarta tersaji dalam Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan rangkuman analisis regresi, terlihat bahwa $F = 4,341$ dengan $p = 0,007$ yang mempunyai makna bahwa $p < 0,05$ artinya signifikan. Kesimpulannya ada hubungan secara regresi antara variabel (x) yaitu keterlibatan orangtua dalam memberikan kegiatan PAUD dan variabel terganggu (y) yaitu perkembangan anak. Analisis tersebut juga dapat diartikan bahwa ada pengaruh keterlibatan orangtua dalam memberikan kegiatan PAUD bagi perkembangan anak. Besarnya pengaruh sumbangan variabel X (peran orangtua dalam pemberian kegiatan PAUD) terhadap perkembangan anak (Y) dapat dilihat dari besar sumbangan relatif dan efektif,

sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.

Data pada Tabel 2 dapat dimaknai dan dijelaskan sebagai berikut

1. Sumbangan Efektif

Sumbangan efektif pada penelitian ini dapat diartikan bahwa penelitian Keterlibatan Orangtua dalam Kegiatan PAUD bagi perkembangan anak memberikan sumbangan sebesar 88,055 persen dan ada sebesar 11,945 persen disebabkan faktor-faktor lain, artinya bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh variabel-variabel lain selain keterlibatan orangtua dalam memberikan kegiatan pendidikan usia dini. Adapun variabel-variabel tersebut menurut Sunartini (2002) kondisi perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam antara lain kondisi yang diturunkan/diwariskan, kemampuan berfikir dan intelektual seperti kecepatan berfikir, kecerdasan, kecerdikan, keadaan hormonal, emosi, kepribadian, sifat-sifat tertentu, konstruksi tubuh, status imunologis dan status

Tabel 1. Rangkuman Analisis Regresi

Sumber variasi	JK	Db	RK	F	R ²	p
Regresi penuh	22.600.720	3	7.533.573	4.341	0.119	0.007
Variabel X1	19.088.490	1	19.088.490	10.999	0.101	0.002
Variabel X3	1.244.359	1	1.244.359	0.717	0.007	0.596
Variabel X2	2.267.875	1	2.267.875	1.307	0.012	0.255
Residu Penuh	166.598.300	96	1.735.399	-	-	-
Total	189.199.000	99	-	-	-	-

Tabel 2. Perbandingan Bobot Prediktor (x terhadap y) dalam Sumbangan Efektif dan Relatif

Variabel	Korelasi Lugas		Korelasi Parsial		Sumbangan Determinasi (SD)	
	r xy	P	rpar-xy	P	SD Relatif persen	SD Efektif persen
1	0.318	0.002	0.184	0.006	84.460	10.089
2	0.271	0.006	0.116	0.031	10.035	1.199
3	0.120	0.231	-0.136	0.043	5.506	0.658
Total	-	-	-	-	100.00	11.945

Keterangan:

Variabel X : Keterlibatan orangtua dalam pemberian kegiatan PAUD yang akan dilihat dalam variabel yaitu:

Variabel X1 : Kesadaran orangtua dalam memberikan PAUD

Variabel X2 : Persepsi orangtua tentang keaktifan anak mengikuti PAUD

Variabel X3 : Persepsi orangtua tentang peran petugas PAUD dalam mendampingi anak.

Variabel y : Kondisi perkembangan anak

gen. Faktor luar adalah faktor yang berasal dari luar tubuh anak/lingkungan fisik biopsikososial untuk mencukupi kebutuhan anak yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan gabungan dari kedua faktor tersebut.

Kondisi perkembangan anak menurut Herimi Sarminto (2004) dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan sebelum anak lahir dan lingkungan setelah anak lahir. Pada penelitian ini kondisi perkembangan anak akan diungkap melalui pembentukan perilaku kebiasaan seperti berdoa, menyanyikan lagu-lagu keagamaan secara sederhana, mengenal bermacam-macam agama, beribadah menurut keyakinannya, menyayangi ciptaan Tuhan. Dalam rangka pembentukan pribadi kearah makhluk yang religius, sejak kecil ditanamkan cara melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing secara sederhana (Sudjana dalam Sri Kuntari, dkk: 2000). Dengan pendidikan tersebut diharapkan anak dapat membedakan benar dan salah serta mengembangkan hatinurani (Havighurst dalam Hurlock, EB: 1991). Kondisi tersebut menurut Saeful Imam (2004) juga dapat diartikan bahwa anak telah melakukan tugas-tugas perkembangan dengan cukup baik terutama perkembangan dan nilai-nilai agama. Kondisi perkembangan anak juga diungkap melalui perkembangan bahasa, perkembangan kognitif, perkembangan fisik dan motorik serta perkembangan seni, dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Perkembangan Bahasa: Anak dapat mendengarkan dan membedakan bunyi, suara atau bahasa, memahami kata dan kalimat, dapat berkomunikasi/berbicara lisan, dapat mengenal simbol-simbol bahasa secara sederhana. Kondisi ini mempunyai makna bahwa kegiatan PAUD mempunyai peran yang penting dalam perkembangan bahasa. Menurut teori Montessori (Theo Riyanto FIC, dkk: 2004) bahwa pendidikan mempunyai tujuan salah satunya pengembangan bahasa lisan, tulisan, membaca dan lain-lainnya.
- b. Perkembangan Kognitif: Anak dapat mengenal benda sekitar, bilangan, bentuk geometri, ukuran, waktu, konsep-konsep matematika dan memecahkan masalah sederhana. Dalam kegiatan PAUD anak mampu melaksanakan tugas-tugas perkembangan

dengan baik dalam hal ini perkembangan kognitif. Kondisi tersebut terjadi karena menurut Sudjana (dalam Sri Kuntari, dkk: 2000) kegiatan pendidikan pada dasarnya diarahkan pada aspek pembentukan pribadi melalui pengembangan manusia sebagai makhluk individu yang meliputi kawasan kognitif, afektif, dan psikomotor.

- c. Perkembangan Fisik dan Motorik: Anak dapat menggerakkan jari tangan, lengan, badan dan kaki untuk keseimbangan dan koordinasi. Kegiatan PAUD memegang peranan penting dan menentukan perkembangan anak selanjutnya karena merupakan fondasi dasar bagi kepribadian anak (Mohammad Obaidillah, 2011). Oleh sebab itu, penguasaan fisik motorik anak melalui kegiatan PAUD juga memegang peranan penting bagi perkembangan motorik anak selanjutnya seperti pada kemampuan fisik maupun motorik yang bersifat motorik halus (Saeful Imam, 2004).
- d. Perkembangan Seni: Anak dapat menggambar, mewarnai, menciptakan sesuatu secara sederhana, mengekspresikan diri dalam bentuk, gerak, alat musik, dll. Bila dikaitkan dengan teori perkembangan seni yaitu anak dapat menggerakkan tubuhnya untuk melakukan gerakan otot besar dan otot kecil dalam rangka pengembangan seni (Saeful Imam, 2004). Anak dapat melakukan tugas-tugas perkembangan tersebut melalui kegiatan PAUD. Menurut Hurlock, EB (1991) tugas-tugas perkembangan tersebut dapat berjalan baik, apabila ada kesiapan belajar, kesempatan belajar dan kesempatan berpraktek.

2. Sumbangan Relatif

- a. Sumbangan variabel X1 (kesadaran orangtua dalam memberikan PAUD), Sumbangan relatif dalam penelitian ini adalah sumbangan variabel bebas (keterlibatan orangtua dalam kegiatan PAUD), yang terdiri dari variabel X1 (kesadaran orangtua dalam kegiatan PAUD terhadap variabel Y (perkembangan anak) sebesar 84,460. Hasil tersebut didukung data temuan lapangan berikut ini. Dari 100 responden yang mengatakan orangtua se-

lalu mengikutsertakan anak dalam kegiatan PAUD ada sebanyak 55 persen. Melihat data tersebut ternyata masih ada orangtua yang belum tahu arti kegiatan PAUD bagi anak. Menurut Ace (2008) PAUD dipercaya dapat memacu peningkatan mutu pendidikan jangka panjang. Semakin banyak anak dilibatkan dalam kegiatan PAUD, maka anak akan memiliki kesiapan belajar. Oleh karena itu, PAUD merupakan pendidikan yang sangat mendasar dan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia.

Kesadaran orangtua dalam kegiatan PAUD dapat dilihat dari frekuensi kehadiran anak di kegiatan PAUD. Dari 100 responden ada sebanyak 54 persen yang orangtuanya memperhatikan frekuensi kehadiran anak dalam kegiatan PAUD. Kondisi ini perlu ditingkatkan mengingat masa anak di bawah lima tahun merupakan masa emas yang hanya datang sekali dan apabila masa ini terlewatkan maka anak akan terhambat perkembangannya. Periode emas ini merupakan tahun-tahun berharga bagi seorang anak untuk mengenali berbagai macam fakta di lingkungannya sebagai stimulasi terhadap perkembangan kepribadian, psiko-motor, kognitif maupun sosial (Direktorat PAUD, 2004).

Kesadaran orang tua dalam kegiatan PAUD juga dapat dilihat dari waktu pemberian orang tua memberikan PAUD (usia anak). Waktu pemberian dari orangtua tentang PAUD pada usia anak <5 tahun terlihat dari 100 responden ada sebanyak 82 persen. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa orangtua telah memberikan pendidikan usia dini dengan baik, yaitu diberikan pada usia anak < 5 tahun ada sebanyak 82 persen, artinya sebagian besar orangtua tahu benar arti penting PAUD bagi perkembangan anak. Pentingnya pemberian PAUD sebelum usia lima tahun, menurut hasil penelitian ditemukan bahwa sekitar 50 persen kapabilitas kecerdasan orang dewasa telah terjadi ketika anak berumur 4 tahun, dan 80 persen telah terjadi ketika berumur 8 tahun dan mencapai titik kulminasi ketika anak berumur 18 tahun (Direktorat PAUD, 2004). Apabila dicermati

hasil temuan tersebut bahwa perkembangan yang terjadi dalam kurun waktu 4 tahun pertama sama besarnya dengan perkembangan yang terjadi pada kurun waktu 14 tahun berikutnya. Berdasarkan hal tersebut maka kegiatan PAUD sangat dianjurkan karena periode ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak.

Kesadaran orangtua dalam kegiatan PAUD dapat diungkap melalui cara orangtua memberi PAUD pada anak melalui langsung praktek (peniruan), dari 100 responden ada sebanyak 40 persen. Data yang ditemukan di lapangan tersebut dapat dimaknai menurut Fadmi Sustiwi (2006), bahwa keberhasilan PAUD harus diimbangi dengan perlunya penyesuaian dimulai dari pola asuh yang diterapkan orangtua. Dalam mewujudkan tersebut perlu diawali dengan belajar dalam mendidik anak-anak di usia *golden age*. Seperti tampak pada temuan di lapangan tersebut diatas dari ketiga cara orangtua dalam memberikan PAUD sudah cukup baik, hanya saja akan lebih efektif bila pemberiannya dengan langsung praktek dan memberikan contoh keteladanan untuk anak.

Kesadaran orangtua dalam kegiatan PAUD dapat diungkap dalam pemberian reward/hadiah/pujian dari orangtua bila anak melakukan perilaku yang baik. Dari 100 responden ada sebanyak 55 persen yang memberikan hadiah/pujian/reward kepada anaknya bila melakukan perbuatan yang baik dan ada 19 persen yang memberikan hukuman bila anak melakukan perbuatan tidak baik. Pujian/reward atau hukuman kepada anak bila melakukan suatu perilaku yang baik atau tidak baik akan mempercepat anak menguasai suatu perilaku yang dianjurkan atau tidak oleh lingkungannya. Seperti temuan penelitian yang dilakukan Edi Waluyo (2011) bahwa dalam membangun karakter anak usia dini salah satunya anak harus diberi dukungan dan penghargaan ketika anak menampilkan tingkahlaku terpuji demikian sebaliknya.

Kesadaran orangtua dalam kegiatan PAUD juga dapat dilihat dalam keaktifan orangtua

di rumah dalam memberikan PAUD, dari 100 responden, ada sebanyak 40 persen orangtua aktif memberikan PAUD dirumah. Menurut Fadmi Sustiwi (2009), PAUD memberi banyak dimensi selain mencerdaskan anak melalui wahana bermain, objek PAUD lainnya adalah orangtua. Keberhasilan PAUD harus didukung oleh peran orangtua terhadap PAUD sendiri. Oleh karena itu perlu meningkatkan peran orangtua untuk terlibat dalam kegiatan PAUD. Menurut Edi Waluyo (2011), agar anak dapat terbangun karakternya di usia dini, maka pola pendidikan guru dengan orangtua harus dilaksanakan baik di rumah maupun di sekolah sehingga kedua pola tersebut saling berkaitan dan saling mendukung.

Kesadaran orangtua dalam kegiatan PAUD dapat diungkap melalui pemberian alat permainan edukatif (APE), dari 100 responden ada sebanyak 40 persen telah memberikan APE. Alat permainan yang diberikan orangtua kepada anak belum menunjukkan pemilihan yang tepat seperti alat permainan edukatif (APE). Menurut Farida Kurniawati (2007) agar anak dapat mengembangkan kreatifitas-motorik dan kognitifnya maka perlu memperhatikan pemberian alat permainan edukatif bagi anak, karena dapat merangsang indera peraba, pendengaran, penglihatan, mengasah konsentrasi dan lainnya.

Kesadaran orangtua dalam kegiatan PAUD dapat diungkap melalui persepsi orangtua bahwa kegiatan PAUD sangat bermanfaat, oleh karena itu perlu diberikan sejak dalam kandungan (mengajak berbicara yang baik, memberikan usapan kasih sayang dll). Dari 100 responden ada sebanyak 55 persen yang setuju dengan pernyataan tersebut. Meskipun demikian masih ada sebagian orangtua yang belum tahu arti kegiatan PAUD bagi perkembangan anak, terlihat masih ada orangtua yang kurang setuju bahkan tidak setuju dengan kegiatan PAUD. Oleh karena itu perlu sosialisasi tentang pentingnya PAUD bagi keluarga yang mempunyai anak balita.

Kesadaran orangtua dalam kegiatan PAUD juga dapat diungkap melalui keaktifan orangtua mengajak keluarga lain mengikuti kegiatan PAUD. Dari 100 responden, ada sebanyak 55 persen yang telah melakukan hal tersebut. Dengan mengertinya orangtua tentang kemanfaatan kegiatan PAUD bagi perkembangan anak maka orangtua akan aktif melakukan/mengajak masyarakat atau keluarga lain untuk mengikuti kegiatan PAUD.

- b. Sumbangan variabel X2 (persepsi orangtua tentang keaktifan anak mengikuti PAUD), Sumbangan relatif variabel X2 (persepsi orangtua tentang keaktifan anak mengikuti PAUD) terhadap variabel Y (perkembangan anak) sebesar 10,035 persen. Sumbangan tersebut akan lebih jelas dapat dilihat dari data temuan di lapangan. Dari 100 responden yang mengatakan anak dapat menerima PAUD dari orangtua dengan baik ada sebanyak 52 persen. Proses belajar di kegiatan PAUD, keberhasilannya sangat ditentukan oleh beberapa faktor, menurut Hilmansyah (2007) antara lain kebutuhan gizi, kebutuhan *basic trust* (keyakinan pada anak), sesuai ritme, tidak ada paksaan, fasilitas, tempat kegiatan yang aman, materi yang diberikan dan kualitas pengajarnya. Dari indikator tersebut orangtua sebagai pemberi pendidikan juga sangat mempengaruhi mau tidaknya anak menerima pendidikan yang diberikan. Dari 100 responden ada sebanyak 52 persen menerima pendidikan dari orangtua.

Persepsi orangtua tentang keaktifan anak mengikuti PAUD diungkap melalui sejauhmana anak dapat menerima PAUD dari petugas, dari 100 responden ada sebanyak 54 persen anak dapat menerima PAUD dari petugas. Keberhasilan suatu proses pendidikan salah satunya ditentukan mutu/kualitas tenaga pengajar yang mempunyai pengetahuan (wawasan) tentang tumbuhkembang anak, kecerdasan, interaktif dan ramah pada anak didik (Hilmansyah, 2007). Apabila petugas tidak mempunyai kemampuan tersebut, maka anak akan bersikap kurang bahkan tidak dapat menerima pendidikan.

Persepsi orangtua tentang keaktifan anak mengikuti PAUD juga dapat dilihat dari perintah orangtua kepada anak untuk mengikuti PAUD dengan baik. Dari 100 responden ada sebanyak 43 persen anak mengikuti PAUD karena perintah orangtua. Agar PAUD pada anak dapat berhasil/bermanfaat, maka faktor pemaksaan kepada anak jangan sampai dilaksanakan, karena akan mengganggu proses pendidikan. Menurut Hilmansyah (2007), apabila terjadi pemaksaan, maka anak bisa mogok mengikuti proses pendidikan. Oleh karena itu, perlu strategi agar anak dapat mengikuti kegiatan dengan senang hati. Orangtua harus dapat memahami kemauan anak, ketepatan pemberian pendidikan dalam suasana yang menyenangkan akan lebih diterima sehingga anak mau melaksanakan perintah petugas PAUD.

Persepsi orangtua tentang keaktifan anak mengikuti PAUD diungkap dari pemberian perintah petugas PAUD. Dari 100 responden ada sebanyak 47 persen anak dapat melaksanakan perintah dari petugas. Peran orangtua maupun petugas dalam pemberian pendidikan dibutuhkan strategi agar anak mau melaksanakan perintah. Petugas harus berkompeten, ramah dan menarik terutama ketika mendongeng, menyanyi dan bermain (Hilmansyah, 2007). Dengan strategi-strategi tersebut diharapkan, anak mau melaksanakan perintah petugas.

Persepsi orangtua tentang keaktifan anak mengikuti PAUD juga dapat dilihat dari sejauhmana keterlibatan anak dalam kegiatan PAUD melalui diskusi yaitu anak menceritakan kembali tentang apa yang telah dilakukan, dari 100 responden ada sebanyak 41 persen anak telah menceritakan kepada orangtuanya tentang kegiatan di PAUD. Data tersebut dapat disimpulkan bahwa belum semua orangtua melakukan diskusi melalui anak disuruh menceritakan kembali tentang kegiatan PAUD. Melibatkan anak dalam suatu kegiatan sangat berpengaruh untuk menjadikan anak berperan aktif, menaruh minat, mencoba idea, bercerita tentang apa yang dilakukan. Menurut Kurniasih (2007), Hak berpartisipasi anak harus didengar

pendapatnya karena dengan mendengarkan apa yang dikatakan anak, artinya anak ikut melibatkan maka anak akan berperan aktif melalui berdiskusi dengan orangtua, merasa dihargai pendapatnya/pandangannya, sehingga anak akan lebih berkreaitif, inisiatif, responsif terhadap hal-hal di sekitarnya.

- c. Sumbangan Variabel X3 (persepsi orangtua tentang peran petugas PAUD dalam mendampingi anak), Sumbangan relatif variabel X3 (persepsi orangtua tentang peran petugas PAUD dalam mendampingi anak) terhadap variabel Y (perkembangan anak) memberikan sumbangan sebesar 5,506 persen. Sumbangan tersebut akan dijelaskan dalam data yang ditemukan di lapangan sebagai berikut. Persepsi orangtua tentang peran petugas PAUD dalam mendampingi anak dapat diungkap melalui sejauhmana wawasan/pengetahuan petugas tentang PAUD. Dari 100 responden yang menyatakan bahwa petugas mempunyai wawasan baik ada sebanyak 23 persen meskipun memiliki wawasan baik tetapi tingkat pendidikan mereka rendah. Meskipun demikian dengani tingkat pendidikan yang tidak tinggi, mereka mampu memberikan pelayanan di PAUD, melalui strategi seperti pelatihan yang mendukung sehingga petugas dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kompetensinya.

Persepsi orangtua tentang peran petugas PAUD dalam mendampingi anak diungkap dari sejauhmana pengalaman petugas. Dari 100 responden yang menyatakan memiliki pengalaman ada 20 persen. Dari data di lapangan yang ditemukan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut persepsi orangtua pengalaman petugas PAUD dalam memberikan pelayanan juga cukup baik. Setelah diklarifikasikan ternyata untuk menjadi pengurus PAUD, dibutuhkan persyaratan-persyaratan tertentu.

Persepsi orangtua tentang peran petugas PAUD dalam mendampingi anak juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan kepribadian petugas. Dari 100 responden yang mempunyai tingkat pendidikan sarjana ada sebanyak 20 persen, dan memiliki kepriba-

dian ramah 86 persen. Menurut Hilman-syah (2007) agar anak dapat mengikuti PAUD dengan baik, maka perlu petugas yang memiliki sikap ramah terhadap anak didik dan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Selain kepribadian yang ramah juga diperlukan petugas yang menyenangkan (78 persen). Kepemilikan kepribadian oleh petugas sangat penting agar anak didik mau menerima nasehat dan arahan dari petugas dengan sikap yang menyenangkan (Hilmansyah, 2007). Kepribadian yang dimiliki petugas antara lain harus bersikap adil (88 persen). Sikap adil yang ditunjukkan dalam kegiatan akan berpengaruh terhadap perkembangan perilaku anak didik, terutama ada modeling bagi anak untuk melakukan peniruan terhadap apa yang dilakukan petugas. Kondisi ini berakibat anak didik akan mengembangkan perilaku-perilaku seperti curang, iri, dengki, dan menghalalkan segala cara (Hilmansyah, 2007).

Melihat hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh keterlibatan orangtua dalam kegiatan PAUD bagi perkembangan anak. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan hendaknya diarahkan kepada aspek pembentukan kepribadian seperti pengembangan manusia sebagai makhluk individu (kognitif, afektif, psiko-motor), sosial, susila, dan religius.

D. Penutup

Hasil penelitian yang berjudul Keterlibatan Orangtua dalam Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi Perkembangan Anak, menunjukkan ada pengaruh keterlibatan orangtua dalam kegiatan PAUD bagi perkembangan anak. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan kepada pihak-pihak terkait antara lain: Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, agar dalam menentukan kebijakan, ada program-program kegiatan yang melibatkan anak balita beserta orangtuanya (keluarga), dengan tujuan agar anak dapat tercegah terjadinya hambatan dalam perkembangan sehingga anak dapat berkembang secara optimal. Keluarga merupakan aktor yang sangat penting bagi masa depan perkembangan anak, oleh karena itu peran keluarga

dalam perkembangan pendidikan anak sudah harus dimulai sejak anak dalam kandungan dengan mengajak bicara, membelai, memperhatikan kebutuhan asupan gizi dan kesehatan. Ketika anak sudah lahir, peran orangtua memberikan kebebasan pada anak sesuai dengan dunianya, agar anak kreatif, ekspresif, senang bereksplorasi dan menghargai pendapat/pendangan orang lain. Pendidikan tersebut dapat diterapkan dengan memenuhi kebutuhan dasar anak baik pangan/asupan gizi, papan (tempat yang nyaman, aman, dan sehat), sandang (pakaian), memberikan rangsangan pendidikan seperti latihan koordinasi dengan pancaindra, mengembangkan keterampilan anak melalui motorik halus dan kasar, memilih permainan yang edukatif (mendidik anak), memberikan pengalaman nyata melalui bereksplorasi dengan lingkungannya, kesempatan bermain dengan teman, mengembangkan minat, kreativitas berdasarkan potensi yang dimiliki anak, anak diberi kesempatan bertanggung jawab, disiplin, berlaku jujur, suka menolong dan berbuat baik pada sesama.

Pustaka Acuan

- Ace 2008. *Pendidikan Usia Dini*. <http://japarde.multiply.com/journal/item/45/artikel> Pendidikan Usia Dini, Diakses: 27 Mei 2011.
- Aswarni Sujud. 1998. *Problem dan Alternatif Solusi di Lembaga Pra Sekolah*. Yogyakarta: FIP IKIP
- _____. 2009. *Beberapa Aspek Perkembangan Anak dan PAUD*. Yogyakarta: PSW. UII
- Dedeh Kurniasih 2007. *Tubuhku Sehat, Jiwaku Kuat*. Jakarta: Nakita No. 434/Tahun IX/28 Juli 2007
- Direktorat PAUD. 2004. *Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini* <http://is-is.facebook.com/topic.php?uid=8879949187+topic=7740>
- Edi Waluyo 2011. *Membangun Karakter melalui PAUD* <http://www.vilila.com/2011/04/membangun-karakter-melalui-pendidikan.html>, Diakses: 27 Mei 2011.
- Endang Ekowarni. 2002. *Perlindungan Anak dan Lingkungan Beresiko Bagi Anak*: Buletin Perlindungan atas Hak Anak. Yogyakarta: LPA
- Fadmi Sustiwi. 2009. *Paud Masa Depan dan Budaya Kita*. Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat 29 Juni 2009

- Farida Kurniawati, 2007. "*Sayang Main, yuk*". Jakarta: Majalah Nakita No. 407/th VIII/20 Januari 2007
- Harun Al Rasyid. 2008. *Membangun Sinergisme dalam PAUD*. <http://www.jugaguru.com/columen/all/tahun/2008/bulan/12/tanggal/19/id/849/>, Diakses: 27 Mei 2011.
- Herimi, Sarminto. 2004. *Membangun Karakter Anak Sejak Usia Dini*: makalah seminar
- Hilman, Hilmansyah. 2007. "Aturan Menyekolahkan Si Batista". Jakarta: Majalah Nakita No. 431/thIX/ 7 Juni 2007
- Hurlock, EB. 1991. *Perkembangan Anak. Jilid 1*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Istiana Hermawati 2007. *Evaluasi Program PAUD: Bagi Anak dari Keluarga Miskin di TPA Beringharjo*. Yogyakarta: B2P3KS
- James. P. Pardede. 2008. *Pentingnya Mendidik Anak Sejak Usia Dini*. <http://www.ypk.or.id/in-berita-a-artikel/142-peran-keluarga.html>, Diakses: 27 Mei 2011.
- Mansur. 2009. *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mohammad Obaidillah. 2011. *Peran Keluarga terhadap Pendidikan Anak Usia Dini*. <http://pengaruh-jalanan.blogspot.com/2011/05/Peran-Keluarga-terhadap-Pendidikan-Anak.html>, Diakses: 27 Mei 2011.
- Najamuddin Muhammad 2008. *Peran Keluarga dalam Pendidikan Usia Dini*. http://sijorimandiri.net/fz/index.php?optim=com_confort_4_task=vlew&id=227&itmid=49, Diakses: 27 Mei 2011.
- Nakita 2007. *Menjadi Pemimpin Masa Depan*. Jakarta: Majalah Nakita No. 434/thIX/ 28 Juli 2007
- Nawawi dan Martini. 1996. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- PKK Yogyakarta. 2009. *Pedoman Pelaksanaan PAUD*. Yogyakarta
- Saeful Imam 2004. *Perkembangan dan Kemampuan Anak Kelompok Usia 1-3 tahun*. Majalah Nakita No. 257/V/6 Maret 2004. Yogyakarta
- Sunartini. 2002. *Optimalisasi Tumbuhkembang Anak Mewujudkan Generasi Penerus yang Berkualitas dan Berbudaya*. Yogyakarta: LPA.
- Sri Kuntari, dkk. 2000. *Penelitian Uji Coba Peman-tapan Model Pengembangan PSAA sebagai Piranti Pembangunan Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: B2P3KS.
- Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih. 2004. *Pro-gram Statistik SPS*. Yogyakarta: UGM.
- Theo Riyanto FIC, dkk. 2004. *Pendidikan pada Usia Anak Dini*. Jakarta: Grasindo.

Telaah Kebijakan:
Pemenuhan Kebutuhan Fisik Minimum Penerima Manfaat dalam Panti Sosial
Policy Review:
Phisical Need Minimum of Beneficiaries in Social Institution

B Mujiyadi dan Nunung Unayah

Puslitbang Kesejahteraan Sosial, Badiklit Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
 Jl. Dewi Sartika 200, Jakarta Timur. Telp. 021-8017146, Fax. 021-8017126
 E-mail: bmujiyadi@yahoo.co.id. Diterima 17 Maret 2014, direvisi 17 Mei 2014, disetujui 29 Juni 2014.

Abstract

On behalf of healthy life, every human being should fulfill their basic need. One among basic needs is food in order to gain energy to do daily activities, which based on sufficient nutrition standard. Every one needs at least 2.150 kilo calory per day. Beneficiaries in Social Home Services are also need energy, so the management of those Social Home Services should have compulsory to fulfill the beneficiaries need. Meanwhile, the govermnet have decided a certain policy in terms of oil price. The decision impacted on market rate of food price. Ministry of Social Affairs as top manager of social services should reponsible to secure the beneficiaries of social home services. Hence, the Ministry should decide a new policy in terms of securing social services. It will take in to account of main indicator of social services for the beneficiaries in social institutions.

Key Words:

Basic Needs-Social Rehabilitation Services-Price Index

Abstrak

Demi mempertahankan hidup sehat, setiap orang memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar. Salah satu penunjang kebutuhan dasar dimaksud adalah tercukupinya gizi dan vitamin untuk energi dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Setiap orang memerlukan minimum 2.150 kilokalori setiap hari. Gizi dan energi dihasilkan dari makan yang dikonsumsi dalam standar gizi berimbang sesuai 'empat sehat lima sempurna'. Penerima manfaat yang berada dalam panti sosial adalah salah satu pihak yang juga memerlukan gizi dan energi sebagai penunjang hidupnya. Penyelenggara panti sosial menjadi pihak yang harus bertanggung jawab mencukupi kebutuhan panerima manfaat. Pemerintah telah menetapkan kebijakan penyesuaian harga BBM dan pengurangan subsidi. Dampak langsung dari penyesuaian harga adalah naiknya harga kebutuhan pokok di pasar. Kementerian Sosial sebagai penanggung jawab penyelenggaraan panti sosial, menyediakan jaminan hidup bagi penerima manfaat yang berada pada panti sosial, terutama panti sosial yang berada dalam ranah kerjanya, sebagai unit pelaksana teknis dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial. Sebagai manifestasi dari tanggung jawab, Kementerian Sosial perlu memperhitungkan kebutuhan minimum bagi tercukupinya kebutuhan dasar penerima manfaat. Hal ini sangat penting dalam rangka tercapainya indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penerima manfaat di panti sosial.

Kata Kunci:

Kebutuhan Dasar-Pelayanan Rehabilitasi-Index Harga

A. Pendahuluan

Masalah strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah kemiskinan. Kemiskinan ini antara lain ditengarai dengan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang meliputi kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spiritual. Kebutuhan fisik meliputi pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Kebutuhan psikis meliputi pemenuhan rasa nyaman dalam kehidupan. Sedangkan kebutuhan sosial adalah kebutuhan setiap manusia dalam

keberadaannya di lingkungan yang heterogin. Adapun kebutuhan spiritual adalah kebutuhan untuk merasakan ketenangan hidup dalam hubungannya dengan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan.

Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia membawa dampak pada ketelantaran. Oleh karena kemiskinan, banyak rumah tangga sangat miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarganya, termasuk anak-anaknya. Apabila kebutuhan dasar yang

sangat minimum seperti pangan tidak tercukupi, hampir dipastikan kebutuhan sandang juga tidak terpenuhi. Lebih jauh lagi, kebutuhan pendidikan hampir pasti tidak dapat terpenuhi sebagai layaknya seorang anak yang dalam usia pendidikan dasar. Oleh karena suatu hal, maka anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya terpaksa dirawat di dalam panti. Panti dipandang sebagai salah satu alternatif dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak, mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar para penerima manfaat yang tinggal di dalamnya.

Selain ketelantaran anak, masalah strategis lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah penyandang kecacatan (fisik, mental, fisik dan mental), panyakahgunaan NAPZA, ketunaan sosial dan lanjut usia. Berbagai masalah strategis dimaksud, ditangani antara lain melalui sistem Panti. Kementerian Sosial sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan panti sosial, mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap penerima manfaat yang tinggal di dalam panti, atau setidaknya menetapkan kebijakan yang mengatur penyelenggaraan panti. Selama ini penyelenggaraan pelayanan sosial dalam panti diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Panti yang diselenggarakan oleh lembaga pelayanan yang berada dalam lingkup tugas Kementerian Sosial, secara otomatis menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar para penerima manfaat yang ada di dalam panti dimaksud. Menurut Pasal 9 Undang Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlindungan sosial diberikan kepada: Fakir miskin, yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik atau mental, dan eks penyandang penyakit kronis, yang mengalami masalah sosial-ekonomi agar kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Kelompok ini diberikan asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan, untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal (Pasal 14, ayat 1).

Perlindungan ini dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial dan/atau bantuan hukum (Pasal 14, ayat 2). Panti yang diselenggarakan provinsi, kabupaten/kota dan yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui LKS hendaknya mengikuti kebijakan dimaksud, dan Kementerian diharapkan memberikan subsidi bagi pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat yang diselenggarakan di dalam panti-panti sosial.

Tujuan Analisis, mendapatkan angka yang wajar sebagai pertimbangan penetapan index harga bantuan sosial (jaminan hidup) per orang per hari bagi penerima manfaat dalam Panti Sosial, dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan sesuai AKG, mendapatkan alternatif kebijakan demi tercapainya sasaran strategis program kesejahteraan sosial. Kebijakan yang dianalisis: (1) Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.02/2010 tentang Perubahan Atas Standar Biaya Khusus Tahun 2011, tertanggal 11 Agustus 2010 (2) Indikator Kinerja Utama Jumlah penerima manfaat yang memiliki kemampuan dasar melaksanakan aktivitas harian. Telaah kebijakan ini berkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan permaknaan bagi penerima manfaat yang sedang berada di Panti Sosial.

B. Kajian Teori

1. Masalah Kebijakan

Pada bulan Juni 2013, Pemerintah menetapkan kebijakan penyesuaian harga BBM dan pengurangan subsidi BBM. Melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Konsumen Pengguna Tertentu, harga dasar BBM menjadi Rp 6.500,- untuk premium, Rp 12.500,- untuk minyak tanah dan Rp 5.500,- untuk solar. Dengan kebijakan itu, harga bahan kebutuhan sehari-hari merangkak naik, berkaitan dengan naiknya ongkos angkut. Harga kebutuhan bahan pangan termasuk naik mengikuti kondisi pasar. Di lain pihak, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.02/2010 tentang Perubahan Atas Standar Biaya Khusus Tahun 2011, tertanggal 11 Agustus 2010, santunan sosial bagi penerima manfaat di Panti Sosial masih dengan nominal yang sama, seperti sebelum

naiknya harga BBM. Indeks per orang per hari ditetapkan sebesar Rp 21.000,- untuk Panti pelayanan anak dan Rp 24.000,- untuk Panti Sosial Tresna Werdha dan Panti Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan. Pada saat yang sama, kebutuhan dasar penerima manfaat di Panti Sosial masih harus terpenuhi sesuai dengan angka kecukupan gizi (AKG). Hal ini tentu akan mengakibatkan pengelola Panti Sosial harus "*pontang-panting*" mengatur sedemikian rupa, uang yang didapat dari jatah untuk para penerima manfaat dalam Panti Sosial. Apabila hal ini dibiarkan terus menerus, dalam jangka pendek, Panti akan mengalami kesulitan. Akibat lebih lanjut adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar minimum bagi penerima manfaat dalam Panti.

Salah satu "sasaran strategis" dari tujuh sasaran strategis program Kementerian Sosial adalah "Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial menuju kemandirian", dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) "Jumlah penerima manfaat yang memiliki kemampuan dasar melaksanakan aktivitas harian". Untuk mencapai IKU dimaksud, Kementerian Sosial menetapkan 5 kegiatan yang meliputi: (a) Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Anak; (b) Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; (c) Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan; (d) Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial; dan (e) Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA. Kegiatan-kegiatan dimaksud dilaksanakan melalui pelayanan dalam Panti. Konsekuensinya, Kementerian Sosial memberikan jaminan hidup terhadap penerima manfaat selama mereka berada di dalam Panti.

2. Gambaran Pelaksanaan Kebijakan

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan melalui tiga pendekatan utama, yakni basis keluarga (*family base*), basis komunitas (*community base*) dan basis institusi (*institutional base*). Panti Sosial sebagai salah satu pendekatan yang bersifat *institutional base* menjadi pilihan terakhir ketika dua pendekatan pertama tidak mungkin dilaksanakan. Dalam penanganan dalam Panti ini, penerima manfaat sepenuhnya menjadi tanggung jawab Panti

untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan lainnya sesuai tugas dan fungsi panti. Untuk pelayanan teknis, tentu saja amat tergantung pada kategori penerima manfaat dan jenis pelayanan dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh Panti dimaksud, yang secara garis besar meliputi *needs assessment* rencana intervensi dan intervensi yang diberikannya.

Untuk pelayanan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan, secara garis besar adalah pemenuhan tempat tinggal (pengasramaan), kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan dan pelatihan keterampilan, bimbingan sosial serta kebutuhan pembinaan fisik dan mental spiritual. Untuk pelayanan dimaksud, panti dipersyaratkan untuk menyiapkan hal-hal sebagai berikut. Penyediaan jasa tenaga pelayanan sosial; Penunjang pendidikan Warga Binaan Sosial; Bimbingan belajar; Belanja Pelayanan Santunan Sosial; Honor instruktur; Belanja penyediaan makan dan minuman warga binaan sosial; penyediaan obat-obatan; Penyediaan pakaian; Pembinaan fisik dan mental spiritual; Bimbingan sosial.

Di samping kesepuluh fasilitas dimaksud, panti perlu melaksanakan penyelenggaraan rumah tangga panti sebagai sebuah institusi pelayanan. Dalam skema penganggaran penyelenggaraan panti, 10 butir di atas mutlak menjadi kewajiban pokok. Untuk Panti di lingkungan Kementerian Sosial, butir-butir dimaksud menjadi tanggung jawab kementerian. Setiap panti mendapatkan alokasi anggaran yang berbeda. Dari data dan informasi yang didapat dari Direktorat Jenderal Pelayanan dan rehabilitasi Sosial masing-masing panti mendapatkan alokasi anggaran dengan indeks yang berbeda. Untuk pelayanan lanjut usia, dengan indeks Rp 24.000,- per orang per hari, untuk panti sosial anak Rp 21.000,-, untuk pelayanan dan rehabilitasi orang dengan kecacatan Rp 24.000,-. Indeks bantuan sosial santunan hidup ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan 141/PMK.02/2010 tentang Perubahan Atas Standar Biaya Khusus Tahun 2011, tertanggal 11 Agustus 2010, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Balai Besar dan Panti penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial. Nominal indeks per orang per hari meliputi kesepuluh butir pelayanan di atas.

Sistem kesejahteraan sosial terdiri dari upaya-upaya yang terorganisir dan tersusun lebih dahulu untuk menyediakan kesejahteraan masyarakat. Dalam bentuk yang sederhana, Segal dan Brzuzy (1998:22) menyatakan, bahwa sistem kesejahteraan sosial dapat dikonseptualisasikan sebagai empat bagian yang saling berhubungan: Isu-isu atau masalah sosial; Tujuan-tujuan kebijakan; Legislasi/regulasi, dan Program kesejahteraan sosial. Atas dasar itu maka tulisan ini akan berupaya untuk melakukan analisis perbandingan realita sosial dengan kondisi ideal (*comparison with an ideal*) (Hill, 1996:11)

C. Penggunaan Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, bertujuan mengumpulkan data dari sejumlah individu mengenai variabel tertentu melalui kuesioner. Pengambilan sampel secara *purposive* diperoleh di empat pasar sampel, masing-masing di Jakarta dan Bekasi. Data dianalisis secara kualitatif, meliputi kebijakan tentang pemberian jaminan hidup bagi penerima manfaat di panti sosial lingkungan Kementerian Sosial; data tingkat harga pasar; dan data status gizi pada penerima manfaat.

D. Hasil Penelitian: Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Fisik Minimum di Panti Sosial

1. Kondisi Panti Sosial

Salah satu tugas dan fungsi Kementerian Sosial adalah menyelenggarakan kesejahteraan sosial di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial. Untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimaksud, Kementerian Sosial memiliki Unit Pelaksana Teknis yang meliputi 3 unit tingkat eselon 2 (Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Dhaksa Cibinong, Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Dhaksa 'dr Soeharso' Solo, dan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita "Kartini" Temanggung). Selain itu terdapat sejumlah Panti Sosial tingkat eselon 3 yang meliputi Panti Sosial Asuhan Anak (Panti Sosial Asuhan Anak Alyatama Jambi, Panti Sosial Asuhan Anak Tunas Bangsa Pati); Panti Sosial Bina Dhaksa (Panti Rehabilitasi Bina Dhaksa Budi Perkasa Palembang, Panti Sosial Bina

Dhaksa Wirajaya Makasar); Panti Sosial Bina Grahita (Panti Sosial Bina Grahita Ciung Wanara Cibinong, Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu); Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur Bekasi; Panti Bina Laras Budi Luhur Banjar Baru, Panti Sosial Bina Laras Dharma Guna Bengkulu, Panti Sosial Bina Laras Phala Martha Sukabumi; Panti Sosial Bina Netra Mahatmiya Bali, Panti Sosial Bina Netra Tan Miyat Bekasi, Panti Sosial Bina Netra To Mou Tou Manado, Panti Sosial Bina Netra Wiyata Guna Bandung; Panti Sosial Bina Pasca Lara Kronis Wasana Bahagia Ternate; Panti Sosial Bina Remaja Bambu Apus Jakarta, Panti Sosial Anak Handayani Bambuapus Jakarta; Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Susila atau Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mulyajaya Pasar Rebo Jakarta; Panti Sosial Tresna Werdha Bekasi; Panti Sosial Marsudi Putra "Ontoseno" Magelang, Panti Sosial Marsudi Putra "Paramita" Mataram; Panti Sosial Bina Remaja "Naibonat" Kupang; Panti Sosial Toddopuli Makasar, Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Pekanbaru, Panti Sosial Bina Rungu Wicara Efata Naibonat Kupang, Panti Sosial Bina Rungu Wicara Melati Jakarta, Panti Sosial Tresna Wredha Goa Mabaji Makasar, Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu, Panti Sosial Petirahan Anak Satria Baturaden dan Panti Sosial Pamardi Putra Galih Pakuan Bogor serta Panti Sosial Pamardi Putra Insyaf Medan. Semua penerima manfaat pada Balai dan Panti dimaksud menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial untuk memberikan bantuan sosial jaminan hidup selama penerima manfaat berada dalam proses pelayanan dan rehabilitasi.

Pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara menyeluruh, sejak pelayanan fisik, psikis, sosial dan spiritual. Empat kategori pelayanan dimaksud dilaksanakan sesuai dengan karakteristik masalah yang disandang oleh penerima manfaat dalam panti. Pelayanan fisik diberikan sejak penyediaan tempat tinggal, pemenuhan kebutuhan permakanan, pemenuhan sandang hingga kebutuhan sehari-hari lainnya. Sedangkan pemenuhan kebutuhan psikis, diberikan dalam bentuk bimbingan dan pendidikan hingga

layanan psikis perorangan. Adapun layanan sosial, meliputi layanan bimbingan keterampilan kerja, usaha dan persiapan kemandirian sesuai menjalani masa pelayanan dan rehabilitasi. Untuk pelayanan spiritual, lebih disesuaikan dengan pribadi masing-masing penerima manfaat, yang tentunya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar spiritualnya.

Untuk empat kategori layanan dimaksud, setiap panti telah mempunyai kisi-kisi, modul hingga rencana pelayanan yang didasarkan pada pendekatan profesi pekerjaan sosial. Untuk terlaksananya setiap layanan dimaksud, diperlukan kondisi yang sehat dari para penerima manfaat. Salah satu langkah untuk mencapai derajat kesehatan yang baik, maka asupan gizi bagi penerima manfaat harus diberikan sesuai kebutuhan minimal yang memenuhi standar gizi. Asupan gizi ini dapat terpenuhi, apabila panti yang menyelenggarakan pelayanan mampu memenuhi kebutuhan minimal penerima manfaat. Kemampuan panti sebagai penyelenggara pelayanan, mengalami kesulitan manakala harga di pasar telah melampaui pagu yang tersedia.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.02/2010 tentang Perubahan Atas Standar Biaya Khusus Tahun 2011, tertanggal 11 Agustus 2010, setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan sosial jaminan hidup sebesar Rp 24.000,- untuk Panti Sosial Tresna Werdha dan Panti Rehabilitasi Sosial dengan Kecacatan dan Rp 21.000,- bagi Panti Sosial Pelayanan Anak, per orang per hari. Besaran bantuan sosial jaminan hidup dimaksud diserahkan pengelolaannya kepada Balai Besar dan Panti Sosial di masing-masing wilayah kerja, untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi para penerima manfaat di Balai Besar dan Panti dimaksud. Dengan pendekatan yang spesifik, maka Kementerian Sosial mempunyai peluang untuk menetapkan kebijakan baru, yang lebih mampu menjawab masalah dan tantangan yang ada, baik bersifat preventif maupun represif. Secara teoritis, seperti diungkapkan Edi Suharto (2005) bahwa pemberdayaan yang mungkin dilakukan meliputi pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan hingga pemeliharaan.

Dalam pemenuhan kebutuhan permakanan para penerima manfaat mutlak perlu mendapatkan masukan gizi dan protein untuk mendapatkan energi sesuai Angka Kecukupan Gizi. Untuk pemenuhan kebutuhan permakanan dimaksud, setiap Balai Besar dan Panti harus mengadakannya dengan cara beli. Sementara itu, dengan adanya penyesuaian harga dasar BBM dan pengurangan subsidi yang ditetapkan Pemerintah, harga kebutuhan dasar merangkak naik mengikuti harga pasaran setempat. Nominal bantuan sosial jaminan hidup per orang per hari menjadi tidak cukup sehubungan dengan kenaikan harga bahan pangan di pasaran yang ada.

Balai Besar dan Panti penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial mengalami kesulitan dalam mengelola besaran bantuan sosial jaminan hidup para penerima manfaat. Akibat lebih lanjut, apabila hal ini tetap dalam kondisi seperti sekarang, maka akan berpengaruh pada terselenggaranya pelayanan dan rehabilitasi sosial. apabila penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial tidak dapat berjalan dengan baik, maka akan berpengaruh pada keberhasilan Balai Besar dan Panti Sosial. Hal ini akan berpengaruh pada menurunnya capaian kinerja dari para UPT. Dengan demikian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan menjadi tidak tercapai.

2. Alternatif Kebijakan

Perlu peningkatan besaran bantuan sosial (jaminan hidup) per orang per hari bagi penerima manfaat di Panti Sosial, pemberian subsidi selama harga kebutuhan pokok permakanan di pasar masih tinggi, menyerahkan pengaturan menu makanan penerima manfaat kepada pengelola panti sosial, pengurangan jumlah penerima manfaat di setiap panti sosial

3. Kriteria Analisis

Kualitatif: Jumlah kalori yang harus dimakan setiap hari tergantung pada beberapa faktor, termasuk usia, ukuran, tinggi, jenis kelamin, gaya hidup, dan kesehatan umum secara keseluruhan. Seorang laki-laki aktif secara fisik, berusia 22 tahun, membutuhkan kalori lebih besar daripada wanita berusia 70 tahun. Reko-

mendasi asupan kalori harian juga bervariasi di seluruh dunia. Menurut National Health Service (NHS), Inggris, orang dewasa rata-rata pria membutuhkan sekitar 2.500 kalori per hari untuk menjaga berat badannya konstan, sedangkan wanita dewasa rata-rata membutuhkan 2.000. Pemerintah AS merekomendasikan 2.700 kalori per hari untuk pria dan 2.200 perempuan. Ketertarikan bagi warga di Inggris, di mana orang rata-rata lebih tinggi dari orang Amerika, asupan harian yang direkomendasikan kalori lebih rendah. Tingkat kelebihan berat badan dan obesitas di kalangan orang dewasa dan anak-anak di Amerika Serikat jauh lebih tinggi daripada di Inggris.

The NHS menekankan bahwa angka tepatnya menghitung daripada (kalori), orang harus lebih fokus pada makan makanan yang sehat dan seimbang, aktif secara fisik, dan kira-kira menyeimbangkan berapa kalori yang dikonsumsi dengan nomor dibakar setiap hari. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), minimal kalori rata-rata orang kebutuhan per hari secara global adalah sekitar 1.800 kilokalori.

Angka Kecukupan Gizi Nasional (<http://blog-kes.blogspot.com/2012/12/angka-kecukupan-gizi-nasional.html>), diunduh tanggal 7 Agustus 2013 jam 20.16).

a. Perkembangan Penyusunan Angka Kecukupan Gizi di Indonesia: Pertama kali Angka Kecukupan Gizi (AKG) di Indonesia disusun tahun 1958 oleh Lembaga Makanan Rakyat dengan pendekatan lintas sektor. Tujuan utama penyusunan AKG adalah untuk acuan perencanaan makanan dan menilai tingkat konsumsi makanan individu/masyarakat. Rujukan yang digunakan saat itu adalah *Recommended Dietary Allowances* (RDA) yang dikeluarkan FAO/WHO. AKG ini ditinjau kembali tahun 1968. Pada tahun 1973 penyusunan AKG dikoordinasikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dalam forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi dengan tetap mengacu pada AKG yang dikeluarkan FAO/WHO. Selanjutnya setiap 5 tahun sekali AKG dievaluasi sesuai dengan kemajuan Ilmu Gizi, perubahan kependudukan dan sosial ekonomi. Untuk pertama kali AKG hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi V pada tahun 1993 disyah-

kan oleh Menteri Kesehatan dengan SK No. 332/MENKES/ SK/IV/1994 tanggal 16 April 1994

b. Data untuk Penyusunan Angka Kecukupan Gizi. Data yang digunakan untuk penyusunan AKG di Indonesia adalah sebagai berikut: standar FAO/WHO, hasil survei tentang gizi, kemampuan penyediaan makanan, kependudukan, sosial ekonomi. Data tentang penduduk dikelompokkan sesuai dengan anjuran FAO/WHO, yakni: 0-6 bulan, 7-12 bulan, 3 tahun, 4-6 tahun, 7-9 tahun. Pengelompokan di atas tidak membedakan jenis kelamin. Untuk pengelompokan umur selanjutnya, adalah sebagai berikut: 10-12 tahun; 13-15 tahun; 16-19 tahun; 20-59 tahun

Penggolongan di atas dibedakan antara laki-laki dan perempuan, kondisi hamil dan menyusui. Untuk masing-masing kelompok umur ditetapkan berat badan dan tinggi badan standar. Sedangkan untuk kelompok laki-laki dan perempuan umur 20-59 tahun, ditetapkan pula pengelompokan berdasarkan jenis pekerjaan, yaitu: ringan, sedang dan berat. Pengelompokan ini dilakukan karena kebutuhan gizi dari masing-masing kelompok itu berbeda. Dengan mengetahui komposisi penduduk, maka dapat pula ditetapkan AKG rata-rata untuk penduduk Indonesia. Pada Repelita VI, AKG rata-rata pada tingkat konsumsi untuk penduduk Indonesia adalah 2.150 kilokalori dan 46,2 gram protein.

c. Zat Gizi dalam Angka Kecukupan Gizi. Untuk Indonesia tidak semua zat gizi ditetapkan di dalam AKG. Namun dibatasi pada penyusunan zat-zat gizi yang paling penting untuk Indonesia. Angka 1993-1998 meliputi zat gizi meliputi: energi, protein, vit. a, thiamin riboflavin, niacin, vit. b 12, asam folat, vitamin c, kalsium, zat besi, fosfor, seng (zn), yodium. Kegunaan Angka Kecukupan Gizi. Angka kecukupan gizi diharapkan berguna bagi penentu kebijakan di bidang pangan dan gizi, antara lain ahli gizi, ahli kesehatan masyarakat, guru, para perencana, para pengambil kebijakan dan mereka yang bekerja di bidang industri pangan dan gizi. Data AKG ini selanjutnya dapat dipergunakan un-

tuk: menentukan kecukupan makanan; merencanakan bantuan makanan dalam rangka program kesejahteraan rakyat; mengevaluasi tingkat kecukupan penyediaan pangan untuk kelompok tertentu; menilai tingkat konsumsi individu maupun masyarakat; menilai status gizi masyarakat; merencanakan fortifikasi makanan; merencanakan KIE di bidang gizi termasuk penyusunan PUGS; merencanakan kecukupan gizi institusi; membuat label gizi pada kemasan produk makanan industri. Angka Kecukupan Gizi Kelompok Khusus. Angka kecukupan gizi untuk kelompok khusus meliputi umur, pekerjaan, kondisi hamil dan menyusui. Adapun prinsip dasar AKG untuk masing-masing kelompok adalah sebagai berikut. Umur, pada usia balita terjadi pertumbuhan dan perkembangan sangat pesat. Karena itu kebutuhan zat gizi tiap satuan berat badan relatif lebih tinggi dari kelompok umur lain. Contoh: Kebutuhan energi bayi/balita 100-120 kilokalori per kilogram berat badan, sedangkan pada orang dewasa 40-50 kilokalori per kilogram berat badan.

- d. Kebutuhan protein bayi/balita: 2-2,5 gram/kilogram berat badan, sedangkan untuk orang dewasa 1 gram per kilogram berat badan. Dari contoh ini terlihat, bahwa makin bertambah umur, kebutuhan zat gizi seseorang relatif lebih rendah untuk tiap kilogram berat badannya. Aktivitas, Kebutuhan zat gizi seseorang ditentukan oleh aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Makin berat aktivitas yang dilakukan, kebutuhan zat gizi makin tinggi pula, terutama energi. Contoh: Seorang pria dewasa dengan pekerjaan ringan, membutuhkan energi 2.800 kilokalori. Sedangkan bila bekerja berat, ia membutuhkan energi 3.600 kilokalori. Jenis Kelamin, kebutuhan zat gizi juga berbeda antara laki-laki dan perempuan, terutama pada usia dewasa. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh komposisi tubuh dan jenis aktivitasnya. Contoh: Laki-laki dewasa dengan aktivitas ringan membutuhkan energi dan protein masing-masing 2.800 kilokalori dan 55 gram protein, sedangkan pada wanita dewasa dengan aktivitas ringan membutuhkan 2.050 kilokalori dan 48 gram protein. Kebutuhan

zat besi pada wanita dua kali kebutuhan zat besi laki-laki. Perbedaan kebutuhan zat besi ini karena fungsi kodrati yaitu haid.

- e. Kondisi khusus (hamil dan menyusui). Pada masa hamil dan menyusui, kebutuhan zat gizi pada wanita meningkat, karena metabolisme meningkat, konsumsi makanan juga meningkat untuk kebutuhan diri sendiri, bayi yang dikandung dan persiapan produksi ASI
- f. Kelompok lain. Angka kecukupan gizi yang disusun belum mempertimbangkan faktor geografi dan ekologi, sehingga perlu ada penyesuaian untuk keadaan demikian. Terutama yang menyangkut kebutuhan zat gizi mikro. Contoh, Penduduk di daerah perkotaan dengan tingkat polusi tinggi perlu mengkonsumsi lebih banyak makanan sumber vitamin dan mineral. Seseorang yang sehari-hari bekerja di lingkungan radiasi, kebutuhan semua zat gizi tentu lebih tinggi daripada seseorang yang bekerja di lingkungan tanpa radiasi. Penduduk di daerah pegunungan yang dingin, kecukupan energi, vitamin dan mineral tentu lebih tinggi daripada penduduk di daerah pesisir yang panas.

Penjabaran Angka Kecukupan Gizi ke dalam Makanan, angka kecukupan gizi rata-rata per orang per hari dapat digunakan untuk merencanakan penyediaan makanan bagi keluarga, kelompok maupun nasional. Untuk keperluan tersebut. AKG perlu dijabarkan ke pada tingkat bentuk komoditi makanan. Dalam Repelita VI penjabaran AKG ke bentuk komoditi pangan didasarkan pada kebutuhan energi dan protein rata-rata per orang per hari, yaitu sebagai berikut.

Indikator	Tingkat konsumsi	Tingkat persediaan
Energi	2.150 kilokalori	2.500 kilokalori
Protein	46,2 gram	55 gram
(9 gram protein ikan: 6 gram protein hewani lainnya 40 gram nabati)		

Penjabaran di atas berdasarkan asumsi bahwa bila kebutuhan energi dan protein terpenuhi maka kebutuhan zat gizi lain juga terpenuhi. Berikut ini adalah jabaran AKG pada kelompok komoditi makanan.

Komoditi Makanan	Jumlah Kebutuhan
Beras/Serealea	360 gram
Umbi-umbian	150 gram
Pangan Hewani (ikan, susu, telur dan daging)	60 gram
Minyak nabati	50 gram
Kacang-kacangan	30 gram
Sayuran	100 gram
Buah	150 gram
Gula	35 gram

Selanjutnya, jabaran AKG menurut takaran konsumsi makanan sehari, berdasarkan kelompok umur, adalah sebagai berikut:

1. Balita 1-3 tahun Nasi/pengganti : 1-1½ piring Lauk Hewani : 2-3 potong : 1 gls susu Lauk nabati : 1-2 potong Sayuran : ½ mangkuk Buah : 2-3 potong	2. Anak 2-4 tahun Nasi/pengganti : 1-3 piring Lauk Hewani : 2-3 potong : 1-2 gls susu Lauk nabati : 1-3 potong Sayuran : 1-1½ mangkuk Buah-buahan : 2-3 potong
3. Anak 7-9 tahun Nasi/pengganti : 2-3 piring Lauk Hewani : 2-4 potong Lauk nabati : 2-3 potong Sayuran : 1-1½ mangkuk Buah-buahan : 2-3 potong	4. Anak 10-12 tahun Nasi/pengganti : 2-4 piring Lauk Hewani : 2-4 potong Lauk nabati : 2-3 potong Sayuran : 1-1½ mangkuk Buah-buahan : 2-3 potong
5. Anak 13-15 tahun Nasi/pengganti : 3-4 piring Lauk Hewani : 3-4 potong Lauk nabati : 2-4 potong Sayuran : 1½-2 mangkuk Buah-buahan : 2-3 potong	6. Remaja 16-19 tahun Nasi/pengganti : 3-5 piring Lauk Hewani : 3-4 potong Lauk nabati : 2-4 potong Sayuran : 1½-2 mangkuk Buah-buahan : 2-3 potong
7. Dewasa 20-59 tahun Nasi/pengganti : 4-5 piring Lauk Hewani : 3-4 potong Lauk nabati : 2-4 potong Sayuran : 1½-2 mangkuk Buah-buahan : 2-3 potong	8. Ibu Hamil Nasi/pengganti : 4-5½ piring Lauk Hewani : 4-5 potong Lauk nabati : 2-4 potong Sayuran : 2-3 mgk Buah-buahan : 3 potong
9. Ibu Menyusui Nasi/pengganti : 5-6 piring Lauk Hewani : 4-5 potong : 1 gls susu Lauk nabati : 3-4 potong Sayuran : 2-3 mangkuk Buah-buahan : 3 potong	10. Usia Lanjut > 60 tahun Nasi/pengganti : 1½-2 piring Lauk Hewani : 2 potong Lauk nabati : 3 potong Sayuran : 1-2 mgk Buah-buahan : 3 potong

Kuantitatif: Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.02/2010 tentang Perubahan Atas Standar Biaya Khusus Tahun 2011, tertanggal 11 Agustus 2010, santunan sosial bagi penerima manfaat di Panti Sosial masih dengan nominal yang sama, seperti sebelum naiknya harga BBM. Indeks per orang per hari ditetapkan sebesar Rp 21.000,- untuk Panti pelayanan anak dan Rp 24.000,- untuk Panti Sosial Tresna Werdha dan Panti Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan. Dari besaran tersebut, di setiap Panti Sosial mengolahnya dengan daftar menu setiap hari berbeda dengan hari lainnya. Pada umumnya di setiap Panti Sosial dibuat daftar menu yang bergulir setiap 2 minggu. Setelah hari ke 16, penerima manfaat akan mendapatkan menu seperti hari pertama. Berikut adalah salah satu contoh daftar menu yang diterapkan di Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa di Cibinong:

Daftar Menu Makan
Penerima Manfaat BBRVBD Cibinong, Bogor

Pagi	Siang	Malam
Nasi putih Sambal goreng ati ampela Cesin tahu kuah	Nasi putih Sayur asem Ikan goreng Kerupuk	Nasi putih Telur balado Tumis labu siam Kerupuk
Nasi uduk Kering teri tempe Ketimun	Nasi putih Sop bakso Ayam bumbu bali Kerupuk Buah	Nasi putih Tahu bakso kuah Perkedel kentang
Nasi putih Telur arepa Mie goreng	Nasi putih Rolade daging Sayur nagka kacang panjang Kerupuk Buah	Nasi putih Balado tahu kentang Tumis toge kacang panjang
Nasi kuning Telur balado Ketimun	Nasi putih Gulai daun singkong Ikan bawal goreng Kerupuk Buah	Nasi putih Bakwan udang Gulai tempe
Nasi goreng Bihun goreng Telur	Nasi putih Soto Bogor Tempe goreng Buah	Nasi putih Perkedel kentang kornet Sop bening oyong
Nasi goreng Telur mata sapi Ketimun	Nasi putih Rendang daging Acar kuning Buah	Nasi putih Peyek rebon Gulai tahu kentang Kerupuk
Nasi putih Mie goreng Tempe bumbu sate	Nasi putih Sayur lodeh Tongkol balado Kerupuk Buah	Nasi putih Tempe tepung Sop bakso
Nasi putih Tahu balado Tumis kacang panjang	Nasi putih Ayam bumbu rujak Bobor bayam Buah	Nasi putih Sop makaroni Perkedel tempe Kerupuk
Nasi kuning Kering teri tempe Ketimun	Nasi putih Sayur godok Ikan goreng Buah	Nasi putih Peyek udang Asam-asam Kerupuk
Nasi putih Sambal goreng ati kentang Buncis bakso cabe ijo	Nasi putih Sop kacang merah Telur balado Kerupuk Buah	Nasi putih Tongkol balado Tumis labu siam Kerupuk
Nasi putih Balado tempe Capcay	Nasi putih Rendang ati ampela Tumis kangkung Buah	Nasi putih Rolad ayam Sop bakso Kerupuk
Nasi putih Tahu telur bumbu bali Sambal goreng kentang	Nasi putih Sop oyong Ikan pesmol Kerupuk Buah	Nasi putih Telur balado Terong bumbu bali
Nasi putih Balado tahu kentang Tumis toge kacang panjang	Nasi putih Sayur lodeh Ikan goreng tepung Buah	Nasi putih Soto ayam Tahu goreng
Nasi putih Mie goreng Tempe bumbu sate	Nasi putih Ikan goreng Sayur asem Buah	Nasi putih Bakwan udang Tumis sawi putih Kerupuk
Nasi putih Tahu balado Cah sayuran	Nasi putih Soto Betawi Emping Buah	Nasi putih Tahu fantasy Gulai nangka Kerupuk
Nasi kuning Telur dadar Ketimun	Nasi putih Ayam kecap Tumis kangkung Kerupuk Buah	Nasi putih Peyek teri Sayur kare

Sumber: BBRVBD Cibinong, 2013

Usulan Prioritas Kebijakan: **Peningkatan besaran jaminan hidup per orang per hari bagi penerima manfaat di Panti Sosial**. Argumen: (1) Jumlah kalori per hari. Jumlah kalori yang dibutuhkan per orang per hari sebesar 2.500 kilokalori untuk pria dan 2.000 kilokalori untuk wanita (NHS Inggris), atau 2.700 kilokalori untuk pria dan 2.200 kilokalori untuk wanita (rekomen-dasi Pemerintah AS) dan menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), minimal kalori rata-rata orang kebutuhan per hari secara global adalah sekitar 1.800 kilokalori (Tri Koeswoyo, 2013). Kemudian BPS menetapkan bahwa untuk kebutuhan orang Indonesia sebesar 2.150 Kilokalori.

Untuk menghitung energi Kilo kalori dimaksud dihasilkan oleh jenis makanan: 1 gram Karbohidrat = 4 K kal; 1 gram Protein = 5 K

kal; 1 gram Lemak = 9 K kal. Selain itu untuk menunjang kebutuhan setiap orang diperlukan kecukupan vitamin, yang dihasilkan dari konsumsi sayur dan buah. Berdasarkan hitungan dimaksud, maka demi mencukupi kebutuhan energi setiap orang dapat dihitung berapa banyak makanan yang harus dikonsumsi dan bagaimana variasinya. Ini semua dimaksudkan sebagai upaya terpenuhinya kebutuhan dasar setiap orang. Demikian juga untuk penerima manfaat yang berada dalam Panti Sosial, yang tentu saja mutlak harus dipenuhi.

Harga sembako di pasaran. Harga kebutuhan permakanan beberapa hari setelah penyesuaian harga BBM. Daftar Harga Sembako di Pasar Mutiara Gading (Bekasi) dan Pasar Jambul (Jakarta Timur).

No	Banyaknya	Jenis Sembako	Bekasi (Mutiara Gading)	Jakarta Timur (Pasar Jambul)
			Harga (Rp)	Harga (Rp)
1	1 liter	Beras putih	7.000,-	7.000,-
2	1 kg	Terigu segitiga	7.000,-	7.000,-
3	1 kg	Minyak goreng curah	10.000,-	12.000,-
4	1 kg	Telur ayam negeri	22.000,-	21.000,-
5	1 kg	Daging sapi	90.000,-	90.000,-
6	1 ekor	Ayam potong	30.000,-	30.000,-
7	1 kg	Gula pasir	13.000,-	13.000,-
8	1 kg	Gula merah	13.000,-	13.000,-
9	1 kg	Ikan kembung Banjar	24.000,-	23.000,-
10	1 kg	Ikan bandeng	23.000,-	24.000,-
11	1 kg	Ikan tongkol	24.000,-	30.000,-
12	1 kg	Kentang	7.000,-	7.000,-
13	1 kg	Wortel	12.000,-	10.000,-
14	1 kg	Tomat	7.000,-	7.500,-
15	1 kg	Cabe rawit merah	40.000,-	42.000,-
16	1 kg	Cabe keriting	40.000,-	42.000,-
17	1 kg	Bawang putih kating	16.000,-	15.000,-
18	1 kg	Bawang merah	28.000,-	26.000,-
19	1 kg	Sawi putih/hijau	6.000,-	5.000,-
20	1 kg	Kol	10.000,-	8.000,-
21	1 potong	Tempe (ukuran sedang)	2.000,-	2.000,-
22	1 buah	Sabun lifebuoy	2.500,-	2.500,-
23	1 sachet	Rinso/sabun colek	1.000,-	1.000,-

Harga kebutuhan permakanan pada bulan Ramadhan. Daftar Harga Sembako di Pasar

Mutiara Gading (Bekasi) dan Pasar Jambul (Jakarta Timur)

No	Banyaknya	Jenis Sembako	Bekasi (Mutiara Gading)	Jakarta Timur (Pasar Jambul)
			Harga (Rp)	Harga (Rp)
1	1 liter	Beras putih	8.000,-	8.000,-
2	1 kg	Terigu segitiga	8.000,-	8.000,-
3	1 kg	Minyak goreng curah	12.000,-	10.000,-
4	1 kg	Telur ayam negeri	22.000,-	21.000,-
5	1 kg	Daging sapi	100.000,-	100.000,-
6	1 ekor	Ayam potong	40.000,-	36.000,-
7	1 kg	Gula pasir	13.000,-	12.000,-
8	1 kg	Gula merah	14.000,-	13.000,-
9	1 kg	Ikan kembung Banjar	35.000,-	35.000,-
10	1 kg	Ikan bandeng	30.000,-	35.000,-
11	1 kg	Ikan tongkol	20.000,-	25.000,-
12	1 kg	Kentang	10.000,-	10.000,-
13	1 kg	Wortel	8.000,-	5.000,-
14	1 kg	Tomat	10.000,-	8.000,-
15	1 kg	Cabe rawit merah	80.000,-	70.000,-
16	1 kg	Cabe keriting	30.000,-	25.000,-
17	1 kg	Bawang putih kating	20.000,-	18.000,-
18	1 kg	Bawang merah	50.000,-	45.000,-
19	1 kg	Sawi putih/hijau	7.000,-	8.000,-
20	1 kg	Kol	9.000,-	8.000,-
21	1 potong	Tempe (ukuran sedang)	2.000,-	2.000,-
22	1 buah	Sabun lifebuoy	2.500,-	2.500,-
23	1 sachet	Rinso/sabun colek	1.000,-	1.000,-

Harga kebutuhan permakanan setelah Idul Fitri. Daftar Harga Sembako di Pasar Mutiara

Gading (Bekasi) dan Pasar Jambul (Jakarta Timur)

No	Banyaknya	Jenis Sembako	Bekasi (Mutiara Gading)	Jakarta Timur (Pasar Jambul)
			Harga (Rp)	Harga (Rp)
1	1 liter	Beras putih	7.000,-	7.000,-
2	1 kg	Terigu segitiga	7.500,-	7.500,-
3	1 kg	Minyak goreng curah	10.000,-	10.000,-
4	1 kg	Telur ayam negeri	20.000,-	22.000,-
5	1 kg	Daging sapi	90.000,-	90.000,-
6	1 ekor	Ayam potong	37.000,-	35.000,-
7	1 kg	Gula pasir	12.500,-	12.000,-
8	1 kg	Gula merah	13.000,-	13.000,-
9	1 kg	Ikan kembung Banjar	35.000,-	32.000,-
10	1 kg	Ikan bandeng	32.000,-	30.000,-
11	1 kg	Ikan tongkol	30.000,-	30.000,-
12	1 kg	Kentang	12.000,-	12.000,-
13	1 kg	Wortel	7.000,-	6.000,-
14	1 kg	Tomat	10.000,-	10.000,-
15	1 kg	Cabe rawit merah	43.000,-	40.000,-
16	1 kg	Cabe keriting	35.000,-	30.000,-
17	1 kg	Bawang putih kating	20.000,-	15.000,-
18	1 kg	Bawang merah	50.000,-	40.000,-
19	1 kg	Sawi putih/hijau	7.000,-	5.000,-
20	1 kg	Kol	69.000,-	5.000,-
21	1 potong	Tempe (ukuran sedang)	3.000,-	3.000,-
22	1 buah	Sabun lifebuoy	2.500,-	2.500,-
23	1 sachet	Rinso/sabun colek	1.000,-	1.000,-

Penghitungan kebutuhan: Dengan memperhitungkan kebutuhan satu orang satu hari dibanding harga yang berlaku di pasar saat ini, maka besaran jumlah jaminan hidup yang diberikan saat ini menjadi tidak mencukupi. Jumlah asupan karbohidrat per orang per hari yang dimanifestasikan dalam 3 kali makan nasi, artinya kebutuhannya menjadi 100 gram pagi, 150 gram siang dan 150 gram makan malam, maka jumlahnya diperlukan 400 gram. Harga beras di pasaran adalah Rp 7.800,- per kg. Jumlah beras yang dibutuhkan tiap orang dan dibandingkan harga beras yang berlaku, tiap orang butuh Rp 3.120,-. Jumlah asupan protein yang dimanifestasikan dalam telur, ayam dan teri. Harga 1 kg telur Rp 20.000,- maka per butirnya sekitar Rp 1.100,-. Harga daging ayam, Rp 25.000,-, maka apabila tiap orang diberikan 100 gram, maka diperlukan Rp 2.500,-. Harga ikan teri per kg adalah Rp, 40.000,-. Setiap orang diberikan 50 gram, maka diperlukan Rp 2.000,-. Harga 1 kg kol adalah Rp 5.000,-, kemudian buncis Rp 7.000,-. Apabila tiap orang rata-rata diberikan 50 gram, maka diperlukan Rp 350,-.

Kemudian harga kerupuk per kg sebesar Rp 5.000,-. Apabila rata-rata per orang mendapatkan 50 gram, maka diperlukan Rp 250,-. Apabila diberikan satu buah jeruk per orang, maka diperlukan sekitar Rp 1.000,-. Dari asupan gizi minimum yang diberikan, maka tiap orang mendapatkan: Nasi: Rp 3.120,-, Lauk pauk: Rp 5.600,-, Sayuran: Rp 350,-, Kerupuk: Rp 250,-, dan Buah: Rp 1.000,-; total sebesar Rp. 10.120,-. Untuk masak makanan dimaksud diperlukan bumbu-bumbu dan gas untuk memasaknya. Apabila rata-rata diperlukan Rp 2.000,-, jumlah yang diperlukan per orang sebesar Rp 12.320,-. Dari hitungan kasar seperti tersebut di atas, belum dihitung ongkos transportasi ke pasar dan jasa juru masak. Jumlah jaminan hidup per orang per hari sebesar Rp 21.000,- dan Rp 24.000,-, perlu ditambah agar asupan gizi bagi penerima manfaat di Panti Sosial terpenuhi sesuai standar yang diperlukan seperti hitungan AKG.

Perlunya penyesuaian index SOSH dalam Panti. Layanan pemenuhan gizi dan energi bagi penerima manfaat dalam panti, menjadi basis dari setiap pelayanan yang diberikan. Dengan

asumsi bahwa apabila kebutuhan kebutuhan gizi dan energi terpenuhi, maka aktivitas sehari-hari dan kegiatan pelayanan serta pelatihan bimbingan ketrampilan sosial dan ekonomis produktif akan berjalan lancar. Seluruh kegiatan pelayanan dan rehabilitasi dalam panti mengarah pada visi dan misi pelayanan setiap panti, yakni terlayannya setiap penerima manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan sosialnya yang dapat tercapai melalui dimilikinya kesiapan mental dan ketrampilan untuk hidup wajar pasca pelayanan dalam panti. Pelayanan dimaksud, tentunya mengacu pada terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang meliputi fisik, psikis, sosial dan spiritual. Untuk dapat terlaksananya kegiatan pelayanan secara optimal, setiap penerima manfaat perlu terpenuhi kebutuhan gizi dan energinya. Dengan perubahan harga kebutuhan pokok di pasar yang peningkatannya cukup mencolok setelah penyesuaian harga BBM, maka dipandang urgent untuk menyesuaikan index subsidi dari Pemerintah atas index SOSH sebelumnya. Oleh karena itu dipandang perlu adanya kebijakan yang didukung peraturan perundangan untuk penetapan index SOSH sesuai dengan patokan harga.

Pustaka Acuan

- Lucia Destri Natalia, Dina Rahayuning P, STP, M.Gizi, dr. Siti Fatimah, M.Kes; (2013); Hubungan Ketahanan Pangan Tingkat Keluarga dan Tingkat Kecukupan Zat Gizi dengan Status Batita di Desa Gondang Winangun Tahun 2012, dalam Jurnal Kese-hatan Masyarakat 2013, Volume 2, Nomor 2, April 2013 Online di <http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jkmdiunduh> tanggal 7 Agustus 2013 jam 20.17
- Koeswoyo, Tri; (2013), *Mengukur kebutuhan kalori yang sesuai dalam Indigo*, 23 Januari 2013
- Hill, Michael (1996), *Social Policy: Comparative Analysis*, London: Prentice-Hall Wheat Sheaft.
- Segal, Elizabeth E, and Brzuzy Stephanie (1998), *Social Welfare Policy, Programs, and Practice*, Itaca, Illinois : F.E Peacock Publishers, Inc.
- Suharto, Edi (2005), *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang *Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Kemensos.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang *Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta, Kemensos.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.02/2010 tentang *Perubahan Atas Standar Biaya Khusus* Tahun 2011. Jakarta: Kemenkue.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial*. Jakarta, Kemensos.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Konsumen Pengguna Tertentu*. Jakarta: Kementerian ESDM.

Model Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendekatan Kredit Berskala Mikro Studi Kasus Keberdayaan Kube di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten

Community Empowerment Model through Micro Scale Credit An Empowerment Case Study in Pandeglang Regency Banten Province

Tri Gutomo¹ dan Suyanto²

¹⁾ Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS).

Jl Kesejahteraan Sosial No 1 Nitipuran, Yogyakarta. Telp 0274 377265 . E-mail <trigutomo@yahoo.com.>

²⁾ Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbangkesos) Jalan Dewi Sartika No 200 Cawang 3 Jakarta Timur. E-mail suyantoslut@yahoo.com.

Diterima 10 Juni 2013, direvisi 11 April 2014, disetujui 22 Mei 2014.

Abstract

This research is done to know community empowerment process, supporting and handicap factors, a micro scale credit on enhancing community welfare, done by Micro Finance Institution (LKM) Baitul Mal Wa'tamil. The research location is determined purposively, in Sukajaya Village, Cadasari Underdistrict, Pandeglang Regency. The research type is qualitative-descriptive with participative approach. Research subjects are LKM care takers and beneficiaries, an escort, four advisors from related institution, and group coordinator. Data are gathered through interview, observation, focus group discussion, and documentary analysis techniques, and analyzed through qualitative-descriptive technique. The research finding shows that community empowerment is implemented on the right target, through preparation and implementation as agreed. Community empowerment of the beneficiaries seen in the increment of income through business group (Kube) and productive-economy activities (UEP). The supporting factor are the spirit, discipline, and motivation of the beneficiaries to enhance family economy. The handicap factor is there has not been yet a venture with finance institution, sort of banking in capitalization. It is recommended that the Ministry of Social Affairs, through General Directory of Social Assistance, implement empowerment program for micro scale business and revitalize local non-government organization (LSM) as an escort and a spear tip of poverty solution.

Keywords:

Community Empowerment-Micro Scale Credit

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat, faktor pendukung dan penghambat kredit berskala mikro dalam menyejahterakan masyarakat yang dilakukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Baitul Mal Wa'tamil (BMT). Tipe Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan partisipatif. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif, di Desa Sukajaya, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Subjek yang diteliti adalah pengurus LKM dan penerima manfaat, pendamping satu orang, pembina dari instansi terkait empat orang dan koordinator kelompok. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, Focus Group Discussion (FGD) dan telaah dokumen, sedangkan teknik analisis data digunakan deskriptif-kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat berlangsung tepat sasaran, melalui tahap persiapan dan pelaksanaan pemberdayaan yang telah disepakati. Keberdayaan masyarakat penerima manfaat program terlihat dari adanya peningkatan penghasilan melalui kegiatan usaha bersama [Kube] dan kegiatan usaha ekonomi produktif [UEP]. Faktor pendukung adanya semangat disiplin dan motivasi penerima manfaat untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Faktor penghambat belum ada kerja sama dengan lembaga keuangan, seperti perbankan tentang sosialisasi masalah permodalan. Direkomendasikan kepada Kementerian Sosial RI melalui Direktur Jenderal Bantuan sosial agar mengimplementasi program pemberdayaan pada kelompok usaha berskala mikro dan memanfaatkan LSM yang ada di daerah sebagai pendamping sekaligus menjadi ujung tombak pengentasan kemiskinan.

Kata Kunci:

Pemberdayaan Masyarakat-Kredit Skala Mikro

A. Pendahuluan

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sasaran utamanya pengentasan kemiskinan. Kenyataan orang-orang miskin apabila ingin ke-

luar dari lingkaran kemiskinan pasti memerlukan permodalan, tetapi untuk memperoleh permodalan mereka justru lari ke rentenir (meminjam uang ke perorangan dengan bunga tinggi). Kondisi tersebut menyebabkan golongan ekonomi lemah berada pada posisi yang semakin terpuruk di lembah kemiskinan. Golongan ekonomi lemah adalah orang yang tidak memiliki modal dalam bentuk materi, tetapi mereka mempunyai modal motivasi, tenaga, dan semangat untuk berusaha dan bekerja serta mereka mempunyai harapan hidup lebih baik. Masalah yang serba kekurangan sebenarnya dapat diatasi melalui pendekatan program pengembangan diri, yaitu mengembangkan potensi, keyakinan dan kemampuan mereka untuk mengorganisasikan dan mengembangkan diri sesuai dengan tujuan yang hendak mereka capai.

Jumlah penduduk miskin menurut BPS periode 2005 sampai dengan 2011 mengalami penurunan dari 35,10 juta (15,97 persen) pada tahun 2005 menjadi 30,02 juta (12,49 persen). Penduduk miskin masih relatif banyak, walaupun dilihat dari data statistik dari tahun 2006 hingga tahun 2011 mengalami penurunan. Berdasarkan UU No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Perpres No 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan UU No 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dalam rangka penanggulangan kemiskinan, Kementerian Sosial sebagai instansi pemerintah menjalankan sebagian tugas pemerintah dan pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, kemudian mencanangkan Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui pendekatan Kube dalam rangka Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan (MPMK).

Pendekatan Kube merupakan pendekatan yang terintegrasi dari keseluruhan program penanganan fakir miskin yang meliputi 15 program. Sejak Kube dicanangkan sebagai pendekatan dalam penanganan kemiskinan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, program Kube perlu dievaluasi sehingga efektifitas dan tingkat keberhasilan pelaksanaan program Kube dapat diketahui, termasuk peran Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dalam Program Pemberdayaan Keluarga Ekonomi Lemah melalui pendekatan Kredit Berskala Mikro. Pertanyaan

penelitian adalah bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dalam mensejahterakan keluarga, sejauhmana keberdayaan masyarakat, dan apa faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan kredit berskala mikro dalam mensejahterakan keluarga yang dilakukan Lkilometer Baitul Mal Wa'tamil (BMT)? Tujuan penelitian adalah mengetahui proses perberdayaan masyarakat, tingkat keberdayaan masyarakat, faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan kredit berskala mikro dalam mensejahterakan keluarga yang dilakukan Lkilometer Baitul Mal Wa'tamil (BMT). Hasil kajian diharapkan dapat memberi sumbang saran bagi unit terkait di lingkungan Kementerian Sosial dalam upaya pengembangan model pemberdayaan keluarga melalui pembentukan Kube.

B. Kajian Teori

Kementerian Sosial dalam memasuki milenium ketiga mulai mengurangi pendekatan residual dan lebih menekankan pada pendekatan universal. Dengan visi ini, program pemberdayaan melalui pendekatan kelompok lebih mendapat perhatian. Konsep pendekatan *people centered development* (PCD) adalah pemberdayaan masyarakat terutama yang menjadi sasaran pelayanan kesejahteraan sosial. Keputusan Menteri Sosial Nomor: 25/HUK/2003, mulai mengarahkan program-programnya pada strategi pemberdayaan masyarakat.

Mengacu pada pemikiran Nurani S (2010), metode adalah cara yang dianjurkan untuk melaksanakan prosedur, sedangkan teknik diartikan sebagai perangkat tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut pandangan Koentjaraningrat (2010), di dalam metode selalu melekat teknik yang berupa alat atau seni dan penggunaan alat-alat itu. Teknik sifatnya lebih operasional daripada metode. FX Soerjadi (1982) menyebutkan, bahwa metode adalah suatu cara pelaksanaan kerja seefisien mungkin atau suatu tugas dengan mengingat segi tujuan, tenaga kerja, biaya, fasilitas peralatan, waktu, ruang.

Pemberdayaan memiliki pandangan bahwa demokrasi ekonomi secara harfiah berarti

kedaulatan rakyat di bidang kehidupan ekonomi. Demokrasi ekonomi adalah kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh rakyat dan untuk rakyat. Rumusan UUD 1945: "Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat, kemakmuran yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang" kemajuan yang ingin diupayakan melalui pembangunan nasional, khususnya pembangunan ekonomi, harus meningkatkan kemakmuran atas dasar keadilan sosial, atau kemakmuran bagi semua orang. Pemberdayaan menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomis, sosial, dan budaya.

Menurut Ginanjar Kartasasmita (1996), pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai jembatan bagi konsep pembangunan makro dan mikro. Dalam kerangka pemikiran itu berbagai input seperti biaya, prasarana dan sarana yang dialokasikan pada masyarakat melalui berbagai program pembangunan harus ditempatkan sebagai rangsangan untuk memacu percepatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Proses ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pemupukan modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan dan pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan yang dinikmati rakyat, proses transformasi harus digerakkan oleh masyarakat sendiri. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang bertumpu pada pemihakan dan pemberdayaan dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat. Perubahan struktural yang diharapkan adalah proses yang berlangsung secara ilmiah, yang menghasilkan harus menikmati, dan sebaliknya yang menikmati harus yang menghasilkan.

Pengertian pemupukan modal menurut Ginanjar Kartasasmita (1996), bahwa bantuan dana, prasarana dan sarana harus dikelola secara tertib dan transparan dengan berpegang pada lima prinsip, yakni mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai pelaksana dan pengelola; dapat dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan; memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk me-

ngelola kegiatan secara ekonomis; hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri sehingga menciptakan pemupukan modal dalam wadah lembaga sosial ekonomi setempat; pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunan sendiri. Menurut Sumodiningrat (2007), setiap pemberdayaan yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan pihak yang peduli pada masyarakat, pemberdayaan harus dipandang sebagai sebuah pemacu untuk menggerakkan kegiatan ekonomi rakyat. Berbagai pemberdayaan harus memuat lima hal pokok yakni: Bantuan dana sebagai modal usaha; Pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan sosial ekonomi rakyat; Penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi barang dan jasa masyarakat; Pelatihan bagi aparat dan masyarakat; dan Penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat. Kerangka pikir pemberdayaan dapat dilihat dari pengembangan ekonomi rakyat yang berarti upaya untuk melindungi serta mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang tertinggal. Pengembangan program pemberdayaan masyarakat didasarkan pada kenyataan bahwa setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat digerakkan untuk mengatasi masalah kebutuhan mereka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat; agar masyarakat mau dan mampu untuk mengembangkan dan mendayagunakan berbagai potensi secara optimal, kepada mereka perlu diberikan bimbingan, dan bantuan stimulant.

C. Penggunaan Metode Penelitian

Sifat penelitian ini adalah diskriptif-kualitatif, dengan pokok bahasan proses pemberdayaan masyarakat, keberdayaan masyarakat dan faktor pendukung dan penghambat melalui pendekatan kredit berskala mikro dalam mensejahterakan keluarga yang dilakukan Lembaga Keuangan Mikro(Lkilometer) Baitul Mal Wa'tamil

(BMT). Penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatif. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif, berdasarkan adanya program yang masih melaksanakan kegiatan pemberdayaan melalui kelompok swadaya masyarakat dan telah mendapatkan pembinaan melalui pemberian kredit pedesaan berskala mikro. Lokasi penelitian di Desa Sukajaya, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang. *Key informant* ditentukan secara purposif dengan pertimbangan seseorang yang terlibat langsung, mengetahui, peduli dan penerima manfaat program pemberdayaan melalui kredit berskala mikro. Informan dalam penelitian ini adalah Koordinator Kelompok (tiga orang); Masyarakat penerima manfaat sasaran program, 30 orang; Pendamping, satu orang; Pembina dari instansi terkait, empat orang. Pengumpulan data menggunakan empat teknik, wawancara, observasi, *focus group discussion* (FGD) dan telaah dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik deskriptif-kualitatif.

D. Hasil Penelitian: Model Pemberdayaan melalui Kredit Berskala Mikro

1. Monografi Desa Sukajaya

Sukajaya merupakan salah satu desa yang berada di Wilayah Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Sukajaya merupakan desa pertanian yang terdiri dari lahan pertanian untuk sawah dan kebun. Ketinggian lahan kurang lebih 1200 meter di atas permukaan laut. Tanaman yang dominan adalah tanaman keras dan buah-buahan. Produktivitas lahan relatif baik, karena tanah yang subur dan didukung sistem pengairan yang memadai. Desa ini jika ditempuh dengan kendaraan dari ibukota kecamatan berjarak kurang lebih lima kilometer, dari Ibukota Kabupaten Pandeglang kurang lebih 20 kilometer, dan dari Ibu kota Provinsi Banten kurang lebih 60 kilometer. Batas-batas desa: sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serang, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Awi Lega dan Desa Padasula, sebelah barat dengan Desa Cikentung dan sebelah Selatan dengan Desa Awi Lega.

Desa Sukajaya memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.447 jiwa, jumlah kepala keluarga 387. Desa Sukajaya memiliki penduduk miskin 244 orang. Berdasarkan data sekunder yang

ada di Desa Sukajaya, tingkat pendidikan masyarakat rendah, karena dari empat persen masih buta aksara, 62 persen tamatan sekolah dasar, 22 persen tamatan sekolah lanjutan tingkat pertama, 11 persen tamatan sekolah lanjutan tingkat atas, dan satu persen perguruan tinggi.

Desa Sukajaya dipimpin Kepala Desa (Jaro), dengan perangkat desa lengkap terdiri dari: sekretaris desa dengan lima kepala urusan (Pemerintahan, Keuangan, Pembangunan, Umum dan Kesra). Desa Sukajaya terbagi dalam dua Rukun Dusun (rukun warga/RW) dan delapan rukun tetangga (RT). Institusi yang berperan dalam melakukan pengawasan adalah badan perwakilan desa (BPD) memiliki anggota berjumlah delapan orang. Keberadaan BPD ini merupakan representasi masyarakat, anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat yang berasal dari berbagai komponen, seperti tokoh agama, pemuda, wanita yang dipilih langsung oleh masyarakat. Organisasi kemasyarakatan yang ada antara lain PKK, dipimpin oleh istri kepala desa. Ketua PKK merupakan tim penggerak tingkat desa yang dibantu oleh istri-istri perangkat desa serta kader wanita desa. Kegiatan rutin dilakukan adalah memberi penyuluhan dan bimbingan keluarga, kesehatan lingkungan, posyandu, yang diadakan setiap minggu di Balai Desa; Majelis Ta'lim, merupakan organisasi keagamaan yang paling aktif dalam kegiatan keagamaan di desa Sukajaya; Karang Taruna, yang dalam perjalanannya mengalami pasang surut, secara kelembagaan ada hanya aktifitasnya yang belum berjalan.

Hasil pengamatan di lokasi permukiman Desa Sukajaya terdapat masyarakat miskin 300 kepala keluarga, pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai buruh tani dan pekerjaan yang tidak tetap, seperti pedagang gorengan dan kuli bangunan.

Pekerjaan Penduduk Desa Sukajaya adalah Pedagang, petani, pengusaha home industri dan peternakan. pedagang, sekitar 1,5 persen bermata pencaharian sebagai pedagang warung sembako, tukang gorengan, jualan onderdil sepeda motor, pedagang sayuran dan hasil bumi. Penghasilan mereka kecil rata-rata hanya sekitar Rp 10.000,- sampai dengan Rp 20.000,- per hari. Matapencaharian penduduk

terbesar di Desa Sukajaya adalah petani padi sawah dan berladang, jumlah petani mencapai 80 persen dari jumlah penduduk; *Home Industri* yang ada di Desa Sukajaya antara lain industri kerajinan tas, pupuk kompos, serta kerajinan anyam-anyaman bambu; Peternakan, yang ada di Desa Sukajaya, kerbau, sapi, domba, kambing, peternakan ayam potong mulai dikembangkan, hasilnya dipasok ke Pandeglang dan Rangkasbitung. Di Desa Sukajaya pernah terdapat koperasi unit desa dengan nama Koperasi

Serba Usaha (KSU), tetapi tidak berjalan, aset yang tersisa adalah sebuah gedung yang cukup representatif tetapi tidak terpelihara. Lembaga keuangan seperti bank belum pernah ada.

2. Pemberdayaan masyarakat melalui Kredit Berskala Mikro

Proses pemberdayaan masyarakat melalui kredit berskala mikro yang dilakukan Lkilometer BMT dengan pola pemberdayaan seperti bagan sebagai berikut.

Bagan Pola Pemberdayaan Masyarakat

No	Tahap Persiapan	Tahap Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan
1	Seleksi	- Bimbingan sosial	- Peningkatan pengetahuan dan wawasan kelompok
2	Pembentukan Kelompok Kube FM	- Bimbingan keterampilan	- Peningkatan keterampilan melalui Kube
3	Pembentukan Pengurus Kube FM	- Bimbingan manajemen	- Mampu memecahkan masalah yang timbul di kelompok
4	Materi Pemberdayaan	- Pemberian stimulan	- Peningkatan pendapatan keluarga
5	Fasilitator	- Pembinaan dan pendampingan	- Adanya kerjasama dengan PINBUK dan BANK

Tahap Persiapan Pemberdayaan: Proses pembentukan kelompok berdasarkan informasi yang diperoleh dari 20 pengurus kelompok di Desa Sukajaya, Kecamatan Cadasari, dimulai pada tahun 2004. Proses terbentuknya kelompok dilakukan melalui tahapan, yakni pendataan; seleksi calon anggota; dan bimbingan sosial dan latihan keterampilan manajemen. Pada tahap bimbingan sosial peserta memilih kelompok yang diminati dan menentukan pengurus kelompok. Mereka mengadakan pertemuan kelompok untuk menentukan jenis usaha yang dikelola dan menentukan kebutuhan dalam kaitan dengan usaha yang mereka pilih. Hasil pertemuan mereka digunakan sebagai dasar usulan untuk memohon bantuan berkaitan dengan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan melalui kelompok usaha. Pelaksanaan latihan yang diberikan adalah keterampilan pengelola lembaga keuangan mikro Baitul Mal Wa'tamwil (BMT), khusus untuk pengelola lembaga keuangan mikro yang terdiri dari pengurus lembaga (manajer, sekretaris dan aparat Desa Sukajaya). Untuk anggota adalah keterampilan berusaha, diberikan sesuai dengan kelompok usaha yang

mereka tentukan. Tenaga pelatih keterampilan diambil dari pengusaha industri kecil yang ada di wilayah Desa Sukajaya dengan cara praktek di tempat usaha sesuai dengan jenis keterampilan usaha yang diinginkan keluarga binaan sosial (KBS). Waktu latihan empat hari untuk kelompok usaha, sesuai dengan informasi yang diberikan pengurus kelompok usaha, bahwa bimbingan keterampilan yang diberikan sudah mengarah kepada jenis usaha yang akan dikelola oleh masing-masing kelompok.

Sasaran pengkajian sebanyak 20 pengurus kelompok, dengan rincian 10 pengurus kelompok dari Rukun Warga 01 dan 10 pengurus kelompok dari Rukun Warga 02, berdiri akhir tahun 2004 dan mulai beroperasi awal tahun 2005. Pemberdayaan melalui pendekatan Kube sudah berjalan selama tujuh-delapan tahun dan berjalan.

Pembuatan kelompok sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, dalam arti ada struktur organisasi (ada ketua, sekretaris, bendahara dan anggota). Dalam awal perkembangan kelompok tidak mengalami perubahan struktur organisasi, hanya terjadi penambahan

anggota baru. Dalam perkembangan selanjutnya dibentuk struktur dan organisasi baru, penggabungan kelompok dari beberapa kelompok yang dipegang oleh seorang koordinator kelompok, tugasnya mengkoordinasikan kelompok usaha yang tergabung menjadi satu. Koordinator kelompok didampingi seorang pendamping lapangan berasal dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM BMT) dan sekaligus sebagai pembina usaha. Gambaran perkembangan kelompok diamati dari ada tidaknya perubahan kondisi pengelolaan pada tahap awal dan kondisi kelompok tahap akhir.

Pengelolaan usaha tahap awal dilakukan secara kelompok sesuai dengan kesepakatan anggota kelompok, sedangkan pola pengelolaan usaha dapat diuraikan sebagai berikut. Dalam pengelolaan usaha semuanya terjadi perubahan yang tadinya dikelola secara kelompok dengan jumlah anggota 10 orang, kemudian bergabung menjadi satu kelompok besar dalam upaya untuk membentuk embrio koperasi yang memiliki anggota 150 orang lebih dan membentuk ikatan kelompok. Kelompok yang memiliki anggota 150 orang juga memiliki organisasi kepengurusan seperti kelompok sebelumnya yang terdiri dari ketua disebut koordinator, sekretaris dan bendahara. Pembinaan bekerja sama dengan instansi terkait seperti dinas perindustrian, perdagangan, pemerintah kecamatan dan pengusaha. Bimbingan sosial keluarga pelaksanaannya oleh pendamping LKM-BMT di bawah naungan Bank Mu'amalat dengan mayoritas sasaran pengusaha kecil anggota Kube yang berhasil, tokoh wanita dan aparat instansi terkait.

Manfaat menjadi anggota dalam program pemberdayaan masyarakat adalah meningkatnya penghasilan, walaupun penghasilan tersebut bervariasi, dikarenakan jenis usaha yang dikelola dan kelancaran pemasaran produksi yang dihasilkan. Selain manfaat ekonomis, juga ada manfaat sosial, yakni meningkatnya kemampuan berorganisasi, bertambah teman, meningkatkan pengetahuan anggota kelompok, dan terpecahkannya masalah yang timbul baik masalah kelompok, keluarga, produksi, dan pemasaran.

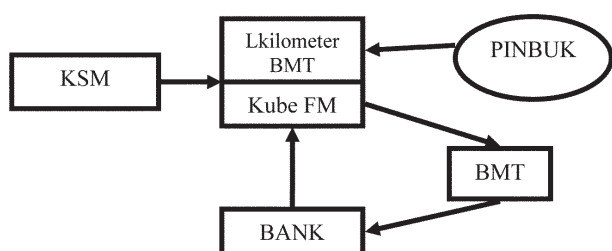
Pelaksanaan Pemberdayaan: Secara kuantitas jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat

(KSM) di Desa Sukajaya ada 10 dan 1 Kelompok Lembaga Keuangan Mikro Baitul Mal Wa'tamwil (LKM-BMT). LKM-BMT adalah mitra kerja lembaga pendamping dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). LKM-BMT merupakan kumpulan dari pengurus KSM yang ada di Desa Sukajaya yang tersebar di delapan rukun tetangga ditambah dari anggota Asosiasi KSM, Jaringan pengusaha kecil, dan lembaga pendamping PINBUK. Kegiatan LKM-BMT memberi pelatihan manajemen pengusaha kecil di Desa Sukajaya melalui bimbingan dari PINBUK. Pelatihan pada awalnya hanya diberikan kepada pengurus LKM-BMT Fakir Miskin yang berada di desa Sukajaya, dipromotori oleh BMT yang dimulai tahun 2004.

Peserta pelatihan pada awalnya 16 orang dari dua Kabupaten Pandeglang dan Tangerang, dibagi dalam empat kelompok LKM-BMT (Baitulmal Wa'tamwil) sesuai dengan jumlah Lokasi desa yang ditunjuk. Koordinator empat kelompok tingkat desa di pegang Tim PINBUK BMT yang berkantor di Provinsi Banten. Tugas BMT memberikan pendampingan dengan cara memberi pelatihan dengan materi: mengenal diri dan orang lain, kerja sama dalam suatu kelompok, komunikasi, kepemimpinan, prinsip Kube, AD/ART, penahapan LKM, arti dan manfaat serta jenis-jenis pinjaman, cara mengajukan permohonan dan penilaian kredit, pengawasan dan pengendalian kredit, mekanisme program kredit pedesaan dan hubungan bank dengan Kube (PHBK), kunjungan lapangan, tanya jawab dan penyusunan rencana kerja dari tindak lanjut pelatihan.

Metoda yang dipakai dalam pelatihan adalah pendekatan antara partisipator dengan audiens bukan seperti antara seorang guru dengan murid. Metoda ini disebut pendidikan orang dewasa dan partisipatori, dilakukan agar terjalin hubungan dua arah, peserta bisa aktif menyampaikan pendapat di forum pertemuan atau bermusyawarah untuk mufakat demi tercapainya cita-cita bersama. Proses pendampingan dilakukan selama kurang lebih enam tahun dengan cara terus dibimbing dan diberi bantuan pinjaman modal usaha. Apabila sudah empat tahun dan dinilai sudah mampu, akan dijalinakan dengan bank sesuai dengan PHBK.

Dalam proses PHBK pada awalnya diberikan lewat pendamping dari PINBUK, kemudian dana diteruskan ke rekening salah satu ketua Kube yang membutuhkan, atau pengurus Kube bisa langsung berhubungan dengan bank tetapi melalui referensi dari pengurus LKM-BMT sebagai lembaga pendamping. Ketika Kube sudah mampu menjalin hubungan dengan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung (masih melalui LKM-BMT), secara finansial LKM-BMT sudah dapat melepaskan, tetapi pembinaan dan pendampingan masih terus berjalan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan, yakni selama enam tahun masa pendampingan. Mekanisme sistem pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui kredit berskala mikro seperti bagan berikut.



KSM merupakan forum pengusaha kecil bekerja sama dengan LKM-BMT, membentuk Kube-FM. LKM-BMT bekerja sama dengan PINBUK memberi pelatihan pada pengurus Kube FM. Tugas BMT memberikan pendampingan dan bimbingan, apabila dinilai sudah mampu akan dijalinan dengan bank. Kube yang sudah mampu dan menjalin hubungan baik dengan bank, bisa mengajukan pinjaman langsung untuk menambah modal, tetapi harus mendapat persetujuan dari LKM-BMT sebagai pendamping. Desa Sukajaya yang merupakan embrio dari pengembangan program kredit perdesaan di Kabupaten Pandeglang pada mulanya memiliki Kube sebanyak 10 Kube FM. Semua Kube terbentuk akhir tahun 2004, mulai beroperasi awal tahun 2005, bermula dari kelompok yang mendapatkan pinjaman modal usaha dari LKM-BMT. Jumlah Kube yang masih aktif kepengurusannya 10, semua Kube berada di bawah koordinasi pembinaan PINBUK Baitul Mal Wa'tamwil. Semua Kube yang berada di wilayah Desa Sukajaya anggotanya memiliki

usaha beraneka ragam, yakni usaha warungan (sayur mayur, kelontong, makanan kecil dan pembuatan pupuk kompos), usaha *candak kulak*, peternakan (ayam dan itik), pertanian, kerajinan membatik, menjahit dan pembuatan tas.

Ditinjau dari perkembangan Kube, pada awalnya sebanyak 10 Kube, semua Kube menyebar di delapan wilayah RT Desa Sukajaya. Menurut pengurus koordinator LKM-BMT Desa Sukajaya yang berlokasi di kantor LKM-BMT Baitul Mal Wa'tamwil, jumlah Kube pada saat diadakan pendataan masih tetap berjumlah 10 Kube dan ada penambahan anggota 50 yang dinyatakan sebagai anggota baru. Pada awal pembentukan Kube, juga melalui prosedur yang ditentukan tim dari LKM-BMT (PINBUK), yakni melalui seleksi calon anggota Kube FM, dilanjutkan dengan pembentukan pengurus organisasi (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) di tingkat RW. Setelah terbentuk kepengurusan, mereka mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Balai Latihan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Provinsi Banten yang tempatnya di Rangkas Bitung, untuk pengelolaan BMT dan Kube FM. Pelatihan dilaksanakan selama 10 hari dengan peserta pengurus Kube FM dan pengelola LKM-BMT. Setelah diadakan pelatihan khusus bagi pengurus LKM-BMT di Balai Latihan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Serang, yang diikuti oleh tiga pengurus dan satu orang unsur aparat desa yang dijadikan sasaran program Kube FM. Peserta latihan berjumlah 16 orang dari seluruh wilayah Provinsi Banten. Setelah itu baru pelaksanaan pemberian bantuan modal kredit usaha kecil, yang pengelolaannya dilakukan dengan pembentukan koperasi serba usaha (KSU) yang diberi nama Lembaga Keuangan Mikro Baitul Mal Wa'tamwil (LKM-BMT).

Dilihat dari segi dinamika kelompok dalam pelaksanaan kegiatan usaha berskala kecil, kegiatan usaha dilaksanakan secara perorangan dalam arti anggota Kube FM mendapat pinjaman modal usaha dari koperasi secara pribadi, dikelola secara pribadi melalui seleksi kemampuan anggota dalam berusaha. Pengelolaan Kube FM di Desa Sukajaya dibentuk struktur kepengurusan di tingkat desa yang anggotanya

terdiri dari gabungan Kube FM yang berada di wilayah RW. Kepengurusan ini mengurus semua Kube FM yang ada di desa Sukajaya, bedanya ketua gabungan Kube FM di tingkat desa adalah koordinator Kube FM di tingkat desa atau semua Kube di wilayah RT. Struktur organisasinya sama dengan Kube FM yang ada di seluruh wilayah desa Sukajaya. Gabungan dari beberapa Kube FM tersebut di pegang oleh Pembina Usaha Kelompok (PUK) yang disebut pendamping PINBU.

Indikator Keberhasilan Pemberdayaan:

Tujuan program pengentasan kemiskinan secara garis besar ada dua, yakni bersifat ekonomis dan sosial. Tujuan yang bersifat sosial mempunyai pengertian usaha ekonomi produktif bisa dikembangkan bersama-sama oleh setiap anggota dan masih dalam ikatan satu kelompok. Esensi dari pembentukan Kube, bantuan yang bersifat ekonomis dapat merupakan faktor penunjang dalam meningkatkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan sosial di antara anggota kelompok. Perubahan pola pengelolaan Kube FM, dapat diuraikan sebagai berikut. Pengelolaan Kube FM semua mengalami perubahan, yang tadinya dikelola secara kelompok artinya semua pinjaman anggota kelompok harus melalui pengurus kelompok dan tidak bisa diajukan secara perorangan. Akan tetapi dengan adanya perkembangan atau kemajuan usaha anggota Kube FM, mereka dapat mengajukan pinjaman secara perorangan walaupun masih diharuskan persetujuan dari ketua koordinator pembina kelompok. Pinjaman perorangan diberikan kepada anggota Kube FM yang dianggap sudah maju dan bisa mengajukan pinjaman perorangan ke bank atau pihak Baitul Mal Wa'tamwil (BMT). Pinjaman perorangan tersebut bisa lebih besar dari pinjaman anggota kelompok.

Langkah-langkah pembinaan untuk memberikan motivasi, melatih tenaga kerja pengusaha yang terampil dalam pengelolaan usaha dan pemasaran hasil produksi. Berdasarkan hasil pengkajian ternyata pembinaan Kube FM yang dilakukan oleh BMT berbentuk pengarahan dan kegiatan pelatihan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan anggota Kube FM dan dilaksanakan di Desa Sukajaya, dengan peserta dari perwakilan pengurus Kube

FM yang ditunjuk anggota. Manfaat mengikuti program Kube FM bagi anggota, menurut semua informan, merasakan bertambah penghasilannya. Penghasilan yang mereka peroleh dalam satu bulan sangat bervariasi, karena jenis usaha, modal usaha dan keterampilan anggota untuk mengembangkan usaha berbeda, selain tergantung pada kerajinan kerja dan usaha anggota. Jika dibandingkan dengan penghasilan mereka sebelum menjadi anggota Kube FM, mereka hanya mendapat uang dari hasil usaha pokok, tetapi setelah mereka dibina BMT minimal dapat membantu meningkatkan penghasilan rumah tangga berkat pinjaman modal. Selain manfaat ekonomi, dilihat dari segi sosial tampak meningkatnya kemampuan berorganisasi dan bertambah teman. Pengetahuan anggota Kube-FM juga meningkat seiring dengan seringnya mengikuti pertemuan untuk membahas persoalan dan hambatan yang timbul dalam kegiatan usaha ekonomi produktif, baik yang dikelola secara kelompok (koperasi) maupun secara perorangan.

Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kredit Berskala Mikro:

Faktor yang mempengaruhi dalam program pemberdayaan adalah adanya semangat, kedisiplinan, keinginan untuk memperbaiki ekonomi keluarga, yang ditunjukkan dengan mengikuti secara rutin pelatihan yang dilakukan oleh pembina usaha dari LKM-BMT; juga dukungan dari aparat desa dan tokoh masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai pedagang hasil bumi dan kerajinan rumah tanggaarganya ke Ibukota Jakarta. Keempat faktor tersebut merupakan pendukung yang mempengaruhi peranan Kube-FM dalam pelaksanaan kegiatan usaha peningkatan ekonomi keluarga yang produktif. Faktor yang mendukung program kredit pedesaan berskala mikro adalah adanya semangat, disiplin dan motivasi dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga dan komitmen pemerintah dalam penanganan kemiskinan. Faktor penghambat dalam pemberdayaan adalah kurangnya program sosialisasi dari lembaga penjamin modal seperti perbankan dan perkreditan.

Kelompok usaha merupakan intervensi melalui proses pemberdayaan masyarakat pe-

nyandang masalah, terutama yang memiliki keterbatasan ekonomi, sosial, kemampuan berusaha dan keterampilan kerja. Sebelum pembentukan kelompok, diawali dengan pendataan dan seleksi calon keluarga binaan, untuk memenuhi kriteria sebagai keluarga binaan. Mengacu pada pengertian kelompok usaha, proses pembentukan kelompok dan pengelolaannya, apabila dilihat unsur pokok yang terkandung dalam proses pemberdayaan, seperti input (masukan), proses pemberdayaan, penyiapan keluarga binaan, pelaksanaan pemberdayaan, pembentukan kelompok usaha serta cara pemberian bantuan stimulan dan cara pembinaannya, apat dideskripsikan sebagai berikut.

Input (Masukan), pelaksanaan pemberdayaan masih menggunakan pendekatan kelompok, didasarkan pada pertimbangan praktis operasional, untuk memudahkan pelaksanaan pemberdayaan keluarga daripada apabila pembinaan dilakukan secara individu. Kegiatan sosial di dalam suatu kelompok lebih memiliki kekuatan dan jaringan yang lebih luas apabila dibandingkan dengan usaha yang dilakukan oleh keluarga binaan sosial secara perorangan, terutama dalam hal pemasaran hasil produksi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut Iver (dalam Soerjono Soekanto, 1986) menyatakan bahwa anggota-anggota dalam suatu kelompok mengalami hubungan timbal balik, saling mempengaruhi serta membuat tumbuh kembangnya kesadaran untuk saling menolong. Cooley (dalam Soerjono Soekanto, 1986) juga menambahkan, bahwa dengan terbentuknya kelompok maka tujuan anggota secara individu juga menjadi tujuan kelompok, apalagi dalam kelompok usaha anggotanya memiliki kesamaan kondisi dan tujuan yang ingin mereka capai. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan melalui kelompok, bantuan stimulan berfungsi sebagai pendorong, perangsang, dan penggiat untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan sosial anggotanya.

Penyiapan keluarga binaan sosial: Dalam proses penyiapan keluarga binaan sosial yang pertama-tama diperhatikan tiga aspek, yakni kepribadian karena aspek kepribadian erat kaitannya dengan pengembangan sikap mental

dan prilaku, termasuk juga harkat dan martabat dan rasa percaya diri. Rendahnya rasa percaya diri cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap orang lain. Hal ini dapat diketahui dari hasil kajian yang menyatakan kelompok mereka kurang atau tidak bisa berkembang dengan baik karena anggota kelompok mereka memiliki rasa percaya diri yang rendah, akibatnya anggota kelompok kurang berinisiatif dan sangat tergantung kepada orang lain, cepat putus asa dan memiliki sikap pasrah pada nasib karena memiliki kepribadian yang labil; Aspek keterampilan kerja, salah satu kriteria kemiskinan adalah keterbatasan keterampilan kerja produktif, sehingga keterampilan kerja merupakan salah satu sasaran utama dalam pemberdayaan keluarga.

Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pelaksanaan pemberian keterampilan kerja sebelum memperoleh bantuan stimulan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif. Kegiatan pemberian latihan kerja diberikan oleh aparat daerah setingkat kabupaten dan provinsi yang memiliki dan menjalankan program pemberdayaan di wilayahnya; Aspek pengetahuan, sangat erat kaitannya dengan aspek keterampilan kerja dan kepribadian. Terbatasnya pengetahuan keluarga binaan sosial akibat dari rendahnya pendidikan sehingga dalam kehidupan sehari-hari hanya berorientasi pada masa kini.

Pelaksanaan pemberdayaan, dimulai dari sosialisasi program yang dilaksanakan di masyarakat, diikuti seleksi melalui identifikasi calon KBS, kemudian pelaksanaan bimbingan sosial dan pemberian latihan keterampilan, diberikan melalui bimbingan sosial secara kelompok atau melalui pelatihan dan pengarahan di ruangan. Pada tahap bimbingan sosial, peserta diharapkan dapat memilih kelompok yang diminati dan dapat menentukan pengurus kelompok yang dapat membimbing anggotanya dan mengarahkan usaha, menentukan jenis usaha yang dapat dikelola secara kelompok dan perorangan, dan menentukan keperluan yang dapat menunjang kegiatan dalam upaya mencapai tujuan yang mereka tetapkan bersama. Latihan keterampilan yang diberikan adalah usaha, seperti keterampilan manajemen

dan kerajinan rumah tangga. Tenaga pelatih keterampilan dari pihak swasta pengusaha industri kecil yang ada di wilayah masing-masing dengan cara memberikan kesempatan kepada calon keluarga binaan sosial diikutsertakan dalam praktek di tempat usaha sesuai dengan jenis keterampilan usaha yang diinginkan. Lama praktek 15 hari, tetapi tidak semua pembina memberikan waktu selama 15 hari karena pembina hanya memberikan latihan berupa pengarahan yang dilaksanakan oleh petugas dari dinas provinsi dan kabupaten. Pemberian pengarahan menurut informasi dari keluarga binan sosial dilaksanakan tiga hari.

Pembentukan kelompok usaha, tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan praktis dan keterbatasan, tetapi memiliki nilai yang lebih mendasar, yakni aktivitas, interaksi dan emosi. Semakin banyak aktivitas yang dapat dilakukan oleh kelompok binaan sosial semakin beraneka interaksinya yang dapat dilakukan untuk memperoleh kemajuan. Menurut Lewin (dalam Soerjono Soekanto, 1986), yang mendasari pendekatan kelompok adalah bahwa seseorang akan memperoleh manfaat apabila diberi kesempatan berpartisipasi dalam kelompok, pendekatan kelompok akan lebih mudah mengubah pola perilaku individu dalam keluarga daripada secara individual. Sebab, manusia cenderung menaati kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya. Pendekatan kelompok dalam program pemberdayaan masyarakat miskin lebih tepat apabila lokasi KBS berdekatan, anggota kelompok tidak harus melaksanakan kegiatan secara bersama-sama di satu tempat tertentu atau terpusat; tetapi yang lebih penting adalah untuk menjadi anggota kelompok seseorang harus berada dalam mekanisme kelompok. Karakteristik utama kelompok pada mekanisme kegiatannya, bukan semata-mata pada fisik suatu kelompok

Bantuan yang diberikan bersifat stimulan, berfungsi sebagai perangsang, pendorong dan penggiat bagi kelompok yang menerima bantuan, agar dikelola dan dapat dikembangkan dengan baik dan benar. Bantuan berupa unsur-unsur alat produksi, peralatan dan keperluan usaha kelompok. Jenis bantuan ditentukan berdasarkan pada beberapa aspek, yakni se-

suai dengan keterampilan anggota kelompok, potensi serta kemudahan pemasaran hasil, anggota kelompok diikutsertakan dalam pemilihan bantuan yang dikelola

Pengelolaan bantuan stimulan dilakukan bersama oleh KBS sebagai anggota kelompok usaha yang memiliki pengertian pada mekanisme kerja, bukan pada pengertian fisik. Tempat pengelolaan bantuan bisa berada di beberapa tempat, tetapi mekanisme kerjanya tetap berada dalam suatu kelompok. Pengertian kelompok lebih mengarah pada mekanisme kerja daripada secara fisik, karena pada mekanisme kerja kelompok tetap terbina dan terpelihara nilai-nilai kebersamaan, kesetiakawanan dan senasib sepenanggungan di antara KBS, meskipun tempat kerja dan usaha mereka terpecah di masing-masing rumah KBS. Terpeliharanya nilai-nilai tersebut dilakukan melalui pertemuan secara berkala bagi anggota kelompok usaha; Untuk mendapatkan areal lokasi yang diharapkan dapat menampung kegiatan secara terpusat akan kesulitan, mengingat kondisi kepemilikan aset produksi KBS sangat kecil. Penempatan lokasi kerja di rumah masing-masing diharapkan dapat mengikutsertakan secara aktif anggota keluarganya dalam membantu pelaksanaan kegiatan usaha dan sekaligus akan memudahkan dalam bimbingan sosial keluarga, sehingga anggota keluarga ikut bertanggung jawab terhadap program pemberdayaan.

Modal usaha bagi kelompok diperoleh dari bantuan stimulan dan pinjaman modal usaha yang diberikan oleh BMT melalui LKM-BMT yang telah dimiliki kelompok. Secara prinsip bantuan bersifat stimulan, sebab bantuan hanya sebagai perangsang untuk mendorong dan menggiatkan bagi yang menerimanya agar dapat dikelola dan dikembangkan sehingga KBS dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi. Penentuan jenis bantuan petugas daerah telah menetapkan beberapa kriteria yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemberian stimulan bagi KBS. Kriteria tersebut adalah bantuan disesuaikan dengan kebutuhan dan keterampilan; bantuan berorientasi pada pasar; dan bantuan disesuaikan dengan potensi dan sumber daya yang ada. Semua kriteria tersebut dimaksudkan supaya bantuan sesuai dengan

kehendak dan kebutuhan KBS, sekaligus dapat meningkatkan kemampuan anggota kelompok dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri secara sosial dan ekonomi.

Pembinaan: Tenaga pembina struktural statusnya sebagai PNS dari dinas provinsi, kabupaten, kota, dan di tingkat kecamatan. Dari hasil kajian diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan yang dilakukan pemerintah terbatas pada tingkat kecamatan, sedangkan dari dinas provinsi, dan kabupaten/kota terbatas dalam proses pemberdayaan sampai penyerahan bantuan stimulant. Pelaksanaan pembinaan lanjut dilaksanakan oleh pemerintah yang ada di tingkat kecamatan bersama instansi terkait lainnya. Tenaga fungsional adalah yang ikut terlibat dalam kegiatan pemberdayaan, berasal dari instansi swasta yang peduli terhadap kemajuanarganya. Dari hasil kajian diperoleh gambaran bahwa tenaga fungsional yang terlibat dalam proses pemberdayaan kebanyakan berasal dari LKM-BMT. Mereka berperan sebagai pendamping lapangan atau sebagai pembina usaha bagi kelompok usaha yang telah terbentuk.

Model Pemberdayaan yang Dikembangkan: Hasil kajian, pemberdayaan melalui pendekatan kelompok usaha yang tumbuhnya dari masyarakat, sesuai dengan keinginan warga, pembinaannya pun tidaklah terlalu sulit karena warga masyarakat tahu benar yang harus mereka laksanakan dan memberi bimbingan sosial agar dapat memahami dan memecahkan masalah sesuai dengan kemampuan dan sumber yang ada. Program pemberdayaan melalui pendekatan kelompok usaha yang dilaksanakan di kabupaten Pandeglang, Banten, dari hasil kajian dapat diketahui bahwa kedua pendekatan yang dilaksanakan pemerintah dan LSM memiliki hasil yang positif, yakni peningkatan ekonomi KBS karena kegiatan yang dilaksanakan dalam program pemberdayaan adalah usaha ekonomi produktif. Dengan meningkatnya kondisi ekonomi KBS, seperti memiliki tabungan, meningkat pula dampak sosialnya, berupa bertambahnya wawasan dan pergaulan KBS.

E. Penutup

LKM-BMT maupun Kube-FM pada dasarnya merupakan bentukan intervensi dari luar bertujuan memecahkan masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi masyarakat golongan ekonomi lemah. Dengan program pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan LKM-BMT dapat menumbuhkan nilai tambah ekonomis, sosial dan budaya. Namun program pemberdayaan sebagai bentukan dari luar apabila tidak dilaksanakan secara hati-hati dapat menimbulkan masalah ketergantungan. Perlu diperhatikan bagaimana dapat dikonsolidasikan agar setiap anggota dapat berjalan di dalam proses pengambilan keputusan, ikut bertanggung jawab dalam upaya untuk mengembangkan usaha kelompoknya. Dengan bimbingan LKM-BMT terbukti kondisi ekonomi dan penghasilan masyarakat meningkat, dan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan sosial baik bagi masyarakat maupun bagi anggota keluarga, karena anggota kelompok merasa bertambah wawasan dan pergaulannya. Keluarga Binaan memiliki kegiatan usaha ekonomi produktif yang dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, partisipasi serta keterlibatan semua lapisan masyarakat sangat diharapkan. Peran LSM sudah diakui oleh pemerintah daerah, mengingat kegiatan-kegiatan nyata yang dilakukan LKM-BMT sangat membantu terlaksananya program pembangunan di daerah, contohnya Kabupaten Pandeglang. Peluang dan kesempatan LSM untuk berpartisipasi dalam pembangunan masih sangat luas mengingat kompleksnya permasalahan dan luas wilayah golongan ekonomi lemah. Tinggal bagaimana pemerintah menyikapi hal itu agar program-program yang dilakukan LSM yang ada di daerah mendapatkan dukungan secara penuh dan dapat dimanfaatkan sebagai pendamping program pengetasan kemiskinan. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan kepada Kementerian Sosial melalui Direktur Jenderal Bantuan Sosial, untuk mengimplementasikan program pemberdayaan pada kelompok usaha berskala mikro, dan memanfaatkan serta memberdayakan LSM yang ada di daerah sebagai

pendamping sekaligus ujung tombak pengentasan kemiskinan.

Pustaka Acuan

- Departemen Sosial, (1997). *Peranan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kelompok Usaha Bersama*, Jakarta.
- _____ (2004). *Panduan Umum Pengembangan Usaha Ekonomis Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama dan LKM*, Jakarta.
- _____ (2011). *Standar Operasional Prosedur: Lkilometer Kube Sejahtera, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta
- Conyers, D. (1991). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ginanjari Kartasasmita, (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Koentjaraningrat, (2010). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Nurani Soyomukti, (2010), *Pengantar Sosiologi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Soerjadi, FX. (1982), *Organisasi and Methods*, Jakarta: LAN RI.
- Seoryono Soekanto, (1986), *Merperkenalkan Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumodiningrat Gunawan, (2007). *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Bina Rena Pariwisata.
- Undang Undang No11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*, Jakarta.
- Undang Undang No 13 Tahun 2011 tentang *Percepatan Penanggulan Kemiskinan*, Jakarta

**Kebutuhan Pelayanan Sosial
Derita Ganda Korban Pascaerupsi Gunung Merapi
Social Service Needs
for Double-Misery Victims of Merapi Mountain Post-eruption**

Siti Wahyu Iryani

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS).
Jalan Kesejahteraan Sosial Nomor 1 Nitipuran Yogyakarta Yogyakarta. Telpn (0274) 377265.
Diterima 28 Mei 2014, direvisi 12 Juni, disetujui 27 Juni 2014.

Abstract

As natural process which its intensity is more than normal, Merapi eruption disaster in Magelang Regency brings human victims, injuries, loss properties, social infrastructure, societal economic hinges, and refugees eruption impact. This research is done to describe double miseries and its social service needs of Merapi post eruption victims. This research uses survey method and implemented through qualitative-descriptive technique. The result shows that total human victims caused by Merapi post-eruption are 5006 people (1.891 family unit). They flee to five under districts and stay at emergency shelters. The disaster ruins 442 houses and 20.712 hectares of land. The victims suffer double miseries, form the eruption and post eruption impacts. The need for victims social services are medicines, health service, rehabilitation devices for buildings, irrigation, forestry, communication, transportation, and land ownership management. It is recommended that local government, including lower level governmental management (desa, RW, RT) enable to mediate the distribution of aid and assistance because those institutions are the ones who know the local problem, condition, and needs of its environment.

Keywords:

Double Miseries-Merapi Pos-eruption Victims-Social Services

Abstrak

Sebagai proses alam yang intensitasnya melebihi normal, bencana alam erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Magelang menimbulkan dampak korban jiwa, korban luka, kehilangan harta benda, kerusakan infrastruktur sosial, dan sendi-sendi perekonomian masyarakat, serta pengungsian terdampak erupsi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan derita ganda dan kebutuhan pelayanan sosial korban erupsi dan pascaerupsi Gunung Merapi. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa jumlah korban keseluruhan akibat bencana alam pasca erupsi yang mengungsi di sejumlah tempat penampungan sementara (Huntara) sebanyak 5006 orang (1.891KK) yang tersebar di lima kecamatan. Kerusakan rumah dan lahan pertanian mencapai 442 buah dan 20.712 hektar. Sebagai pengungsi, korban pasca erupsi Gunung Merapi mengalami derita ganda, selain terpukul akibat erupsi, masih harus terpukul lagi akibat post-erupsi. Kebutuhan pelayanan sosial pelayanan sosial korban erupsi merapi yang dilakukan oleh pemerintah antara lain obat-obatan dan pelayanan medis; bahan-peralatan rehabilitasi bangunan, perkebunan, irigasi dan perhubungan; perlindungan dan pengembalian kepemilikan. Rekomendasi yang diajukan adalah perlunya pemerintah setempat melibatkan pemerintah desa/dusun/RW/RT. Sebagai ujung tombak dalam melakukan mediasi pelayanan sosial, fungsi kepala dusun, rukun warga, dan rukun tangga perlu dimaksimalkan, karena aparat pemerintah yang paling bawah tersebut yang paling mengetahui kondisi dan kebutuhan warga di lingkungannya.

Kata Kunci:

Kebutuhan Pelayanan Sosial-Derita Ganda-Korban Erupsi

A. Pendahuluan

Di Indonesia, 60 gunung berapi yang masih aktif, paling banyak tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi dan Pulau Maluku. Gunung Krakatau, Tambora, dan Merapi adalah gunung yang terkenal karena letusan dan keaktifannya yang dahsyat. Khusus Gunung

Merapi, sejak abad X sudah meletus 80 kali (<http://almadlegowo.blogspot.com/2013/07/ring-of-cincin-api.html>. akses 28 april 2014). Bencana Gunung Merapi juga masih belum menghilang dari ingatan masyarakat Magelang Selatan, Jawa Tengah, karena letusan pada tanggal 26 oktober 2010 yang memuntahkan ribuan ton lahar dan awan panas. Peristiwa tersebut

mengakibatkan puluhan kampung di sekitarnya luluh lantah dan semua aktivitas sosial ekonomi lumpuh total. Kerusakan paling parah tampak pada rumah penduduk dan sumber kehidupan masyarakat, khususnya di bidang pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber kehidupan utama penduduk. Derita demi derita terus dialami masyarakat sekitar Gunung Merapi. Belum sempat derita akibat letusan gunung Merapi berlalu, bencana kembali berulang. Masyarakat yang menjadi korban masih harus menghadapi hantaman bencana banjir lahar dingin pasca-erupsi. Bencana pascaerupsi terjadi setengah bulan setelah erupsi merapi, yang secara mendadak masyarakat dikejutkan kembali oleh datangnya banjir lahar dingin yang membawa material berupa air lumpur, pasir, dan bebatuan. Bencana yang memporakporandakan daerah Magelang Selatan datang melalui empat tahap. *Pertama*, pada tanggal 5 Desember 2010 pukul 11.30, membawa dampak pada tertutupnya jalan utama yang menghubungkan Kota Yogyakarta, Magelang, dan Semarang, sehingga aktivitas ekonomi ketiga kota tersebut menjadi terganggu. Kedua, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2010, pukul 16.00, berdampak pada tenggelamnya sarana ekonomi Pasar Jumoyo yang tertimbun ribuan ton pasir lahar dingin. Ketiga, hari Senin, tanggal 3 Januari 2011 pada pukul 18.30, berdampak pada tertimbunnya sebagian besar pemukiman penduduk Dusun Gempol, Desa Jumoyo, Kecamatan Salam. Keempat, pada hari Minggu, tanggal 9 Januari 2011 pada pukul 20.00. Bencana yang terakhir ini membawa dampak lebih parah pada tertimbunnya pemukiman penduduk di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Muntilan, Salam, Mungkit, Ngluwar, dan Kecamatan Srumbung. Ditemukan 14 Desa di lima kecamatan yang terdampak bencana banjir lahar dingin. Desa tersebut antara lain Desa Muntilan, Adikarto, Gondosuli, Tamanagung, Jumoyo, Sirahan, Seloboro, Sucen, Gulon, Ngrajek, Progowati, Srubung, Blongkeng, Banyubiru, dan Desa Banyudono.

Erupsi dan pasca erupsi gunung merapi menyebabkan penderitaan yang harus dihadapi sebagian masyarakat Kabupaten Magelang yang berada di sisi barat dan barat laut gunung paling

aktif di dunia. Masyarakat Kabupaten Magelang yang tinggal di sisi selatan, berjumlah 257.261 warga dan 23,80 persen dari jumlah 1.080.500 orang, harus menanggung kerugian karena rusaknya rumah tempat tinggal, sarana usaha (tempat jualan, ruang usaha, sawah, ladang, kebun), sarana dan prasarana listrik dan komunikasi, infrastruktur umum (jalan, jembatan, saluran irigasi, pasar) akibat banjir lahar dingin. Keunikan korban pasca erupsi di Kabupaten Magelang dibanding dengan korban bencana alam lain (banjir, tanah longsor dan gempa bumi) adalah kerugian jiwa raga secara kuantitas sangat kecil, tetapi kerugian yang besar justru terjadi pada sumber ekonomi masyarakat, dalam bentuk sawah, ladang, kebun, tempat usaha dan kerja, sehingga pemulihan pada kerusakan sumber ekonomi tersebut memakan waktu lama dan sulit dilakukan oleh masyarakat sendiri tanpa bantuan dari pihak lain.

Kemampuan bangkit kembali secara mandiri mengalami kesulitan disebabkan korban mendadak dalam waktu singkat kehilangan modal kerja dan usaha akibat tertimbun lahar dingin. Korban tidak dapat menyelamatkan modal usaha karena dalam bentuk tanaman pertanian dan kebun, barang dagangan di toko dan kios pasar, yang secara cepat tertimbun lahar dingin, bahkan hanyut terbawa arus deras lahar dingin. Korban sulit segera beralih kerja dan belum tentu berhasil. Korban sulit memulai kerja dan usaha karena sarana dan prasarana untuk memulai tidak ada sama sekali. Bantuan untuk menopang kebutuhan hidup dari pihak luar (pemerintah atau swasta) semakin lama semakin menipis.

Setiap bencana apapun jenisnya dapat dipastikan selalu menyisakan kesedihan, duka, derita dan nestapa yang mendalam serta bertumpuknya berbagai masalah bagi korban. Demikian juga bencana erupsi dan pasca erupsi gunung merapi yang terjadi secara berulang di Magelang Selatan. Kesedihan masyarakat belum sepenuhnya pulih akibat terpaan awan panas dan tertimbun abu gunung merapi yang menimpa rumah, pekarangan, sawah, kebun, dan ladang. Kondisi derita ganda korban pascaerupsi Gunung Merapi tersebut mendorong untuk dilakukan pengkajian ini, dengan perta-

nyaan sebagai berikut: Bagaimana derita ganda korban erupsi dan pasca erupsi Gunung Merapi?. Bagaimana kebutuhan pelayanan korban erupsi Gunung Merapi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan derita ganda dan kebutuhan pelayanan sosial korban erupsi dan pasca erupsi Gunung Merapi?.

B. Kajian Teori

Bencana Alam: merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Suatu fenomena atau kejadian alam atau bencana sosial dikategorikan sebagai bencana apabila mengakibatkan korban dan penderitaan, kerusakan alam lingkungan, kerugian harta benda dan nyawa, sarana prasarana, dan fasilitas social ekonomi serta menimbulkan gangguan tata kehidupan masyarakat (Jason Morrow, 2011). Apabila fenomena tersebut tidak sampai mengakibatkan korban, kerugian dan penderitaan bagi manusia, maka fenomena alam tersebut disebut fenomena biasa. Di Negara-negara maju, dampak ekonomi pasca-bencana sudah disiapkan secara matang dengan program yang dikenal dengan istilah disaster reducing risk management (Margareta Wahlstrom, 2013: 7), yang dirancang atas dasar pengalaman bahwa dampak ikutan bencana alam ternyata membawa resiko kerusakan ekonomi yang membutuhkan biaya yang tidak kalah besarnya dengan biaya yang dibutuhkan bagi rehabilitasi korban bencana. Di Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sebagai daerah rawan bencana (*disaster prone*), program tersebut belum dilakukan secara jelas kecuali usaha spontanitas dan sporadis dari kalangan pengusaha yang memang sejak dini sudah sadar usahanya yang berkedudukan di wilayah rawan bencana (Quarentelli, EL, 1998: 268), perlu kerja sama lintas sektoral antara pemerintah dan swasta, untuk mempertahankan dan menumbuhkan usaha yang berkaitan dengan pengurangan resiko bencana akibat dampak ikutan bencana alam. Resiko ekonomi akibat bencana membutuhkan biaya besar dibandingkan kebutuhan pemulihan (*re-*

habilitation) korban dan harta bedanya (Gunanto Surjono, 2013: 295).

Faktor Penyebab Bencana Alam: Dua penyebab utama bencana, pertama adalah alam, secara alami bencana alam akan selalu terjadi di muka bumi, misal tsunami, gempa bumi, gunung meletus, jatuhnya benda-benda dari langit ke bumi (misal meteor), tidak adanya hujan disuatu lokasi dalam waktu yang relatif lama sehingga menimbulkan kekeringan atau sebaliknya curah hujan yang tinggi disuatu lokasi menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor. Kedua, manusia bencana oleh aktifitas manusia oleh aktifitas manusia terutama akibat eksplorasi alam yang berlebihan. Eksplorasi ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Pertumbuhan ini mengakibatkan kebutuhan pokok dan non pokok meningkat, kebutuhan infrastruktur meningkat, alih tataguna lahan meningkat (Buletin Malimpa Edisi 13/II/2007:4).

Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyebutkan bencana sebagai peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam (*natural disasters*), atau faktor non alam atau faktor ulah manusia (*man made disasters*), sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi (Hadi Purnomo 2010: 56-58) Bencana alam datangnya tiba-tiba atau progresif, yang menimbulkan dampak yang dahsyat dan hebat, sehingga komunitas yang terkena atau terpengaruh harus merespons dengan tindakan darurat cepat dan segera. Kementerian Sosial mendefinisikan bencana alam sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh gejala alam, seperti gunung meletus, tanah longsor, banjir, tsunami (gelombang pasang), angin ribut, kebakaran hutan, kekeringan, gas beracun, dan bancir lahar yang dapat menyebabkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan (Departemen Sosial 1999:13).

Bunsen (1994: 15) mengungkapkan, bahwa penyebab bencana alam karena faktor alam dan ulah manusia. Faktor alam meliputi gunung me-

letus dan gempa bumi, kondisi ini pada umumnya diawali dengan tanda-tanda suhu di sekitar naik, banyak sumber mata air kering, sering timbul gempa bumi, banyak binatang yang berpindah dan sering terdengar suara gemuruh. Danudasi (tanah longsor), yaitu peristiwa pengelupasan atau penelanjangan batuan induk yang telah mengalami proses pelapukan sehingga tanah menjadi longsor. Pelapukan, yaitu peristiwa hancurnya batuan yang awalnya karena pengaruh dari luar kulit bumi. Erosi atau pengikisan, yaitu peristiwa terbawanya material batuan atau tanah oleh pengerjaan air, angin dan gletser. *Soil creep* (tanah menjalar), bencana ini disebabkan oleh batuan yang sudah lapuk jenuh air pada tanah miring. Gejala tanah menjalar tidak dapat dilihat dengan mata, tetapi dapat diamati dengan melihat pepohonan atau tiang listrik yang condong.

Bencana oleh faktor Manusia, disebabkan gencarnya pembangunan fisik, terutama di kota yang tidak atau kurang memperhatikan kelestarian dan keseimbangan alam; Banyaknya pengerukan areal rawa-rawa; Pembangunan perumahan yang dilakukan dengan cara memampras daerah perbukitan dan memabati pepohonan (*cut and filled*); Kebakaran hutan; Pembangunan rumah dan gedung-gedung kaya yang dapat menimbulkan pemanasan global. Tabel 1 ditampilkan secara ringkas sejumlah penyebab bencana dari faktor alam, manusia, dan kombinasi keduanya.

Tabel 1. Faktor Penyebab Bencana Alam

Ancaman Bencana Alam	Ancaman Bencana Ulah Manusia	Ancaman Bencana Campuran Alam dan Ulah Manusia
1. Gempa Bumi	1. Konflik	1. Banjir
2. Tsunami	2. Perang	2. Longsor
3. Gunung Api	3. Serangan teroris	3. Kebakaran Hutan
4. Angin Topan dan Badai	4. Kegagalan teknologi	4. Kekurangan pangan
5. Longsor	5. Hama Penyakit	
6. Kekeringan	6. Pembalakan Hutan	

Jenis-jenis bencana menurut UU SDA Tahun 2004 dan Carter (1991) dengan kolaborasi di antaranya angin topan, banjir lahar dingin, erosi dan sedimentasi, gempa bumi, introksi, kebakaran, kecelakaan besar, kerusakan masa,

letusan gunung berapi, perembesan, perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air, tanah ambles, teramcam punahnya jenis tumbuhan dan atau satwa, wabah penyakit atau epidemi, kekeringan, longsor, dan tsunami, dan banjir.

C. Penggunaan Metode Penelitian

Metode Pendekatan dalam penelitian dampak korban pascaerupsi Merapi menggunakan survai, diimplementasikan dengan teknik sebagai berikut. Pemilihan responden menggunakan teknik purposif, dalam arti responden dipilih berdasar pertimbangan orang yang mengetahui secara langsung peristiwa pascaerupsi Merapi, meliputi Petugas badan daerah penanggulangan bencana, tokoh formal masyarakat (kepala dusun setempat); Tokoh informal masyarakat khususnya yang menangani korban; korban pascaerupsi berdasar kategori korban sebagai kepala rumah tangga atau salah satu tulang punggung keluarga karena dipandang mengetahui jumlah kerugian harta benda dan kebutuhan pelayanan dibanding anggota keluarga yang lain. Dari penggunaan teknik pemilihan dan menentukan jumlah responden tersebut, ditemukan 23 orang yang dapat memberi data dan informasi secara komprehensif yang merepresentasikan kondisi korban pasca erupsi Merapi.

Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Magelang karena didasari pertimbangan, bahwa daerah ini merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang masyarakatnya mengalami kerugian paling parah dan bervariasi dibanding kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah. **Pengumpulan data**, menggunakan teknik wawancara dengan panduan wawancara (*interview guides*). Teknik ini dipilih berdasar pertimbangan, bahwa responden sebagai masyarakat desa, tinggal bekerja dan berusaha di perdesaan, sehingga dipandang lebih fleksibel apabila digunakan teknik wawancara. Observasi bebas yang meliputi aspek: Kondisi korban secara umum dan kondisi geografis. Telaah dokumen, yang menyangkut inventarisasi korban serta kerugian harta benda dan sumber penghidupan yang tercatat dalam administrasi pemerintah daerah setempat. **Analisis data**, menggunakan teknik deskriptif kualitatif pada

aspek, jumlah korban pasca erupsi yang dibagi dalam kategori ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Kerugian berupa rusaknya tempat tinggal yang dibagi dalam kategori ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Analisis juga dilakukan secara makro yang berkaitan dengan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal korban, meliputi fasilitas umum dan infrastruktur yang sangat berpengaruh terhadap pemulihan hidup korban.

D. Hasil Penelitian: Derita Ganda Korban Pascaerupsi Gunung Merapi

Tekstur Geografi Rawan Bencana di Magelang Selatan: Hamparan lereng gunung berapi terletak di sebelah selatan Kabupaten Magelang yang hanya dilindungi tebing tipis gunung merapi dibanding dengan sisi-sisi lainnya di utara, timur, selatan sehingga tebing Gunung Merapi yang terletak di kabupaten Magelang bagian selatan rawan gugur dan menjadi arah turunnya lahar dingin pasca erupsi. Magelang selatan yang terletak di sebelah barat dan barat daya Gunung Merapi juga menjadi kecenderungan tujuan arah angin yang selalu datang dari selatan, sehingga ketika Gunung Merapi mengeluarkan semburan awan panas mengarah ke barat dan barat daya, karena angin dari selatan membentur puncak merapi di sebelah selatan yang tinggi, sehingga arah angin berbelok menuju ke arah barat dan barat daya yang menjadi wilayah sebelah selatan Kabupaten Magelang.

Tekstur Geografi wilayah bagian selatan Kabupaten Magelang juga dilewati empat sungai (Kaliputih, Pabelan, Blongkeng, Lamat) yang berhulu di puncak gunung merapi, sehingga keempat sungai tersebut berpotensi membawa material lahar dan bebatuan yang berasal dari puncak Gunung Merapi, terutama apabila hujan deras di puncak merapi. Namun ketika Gunung Merapi tidak erupsi, hamparan geografis Kabupaten Magelang selatan merupakan tanah pertanian yang sangat subur, karena wilayah Magelang selatan berada di antara empat sungai berhulu di puncak Merapi. Apabila tidak banjir, sedikit demi sedikit air dari keempat sungai tersebut membawa abu vulkanik yang

dapat menyuburkan tanaman pertanian dan perkebunan. Akan tetapi apabila erapi erupsi, permukiman penduduk yang kebetulan berada di lembah antara keempat sungai tersebut menjadi sangat rawan tertimbun lahar panas dan dingin dari Gunung Merapi. Menurut prediksi BMK, deposit lahar yang menumpuk di sekitar Gunung Merapi baru akan habis dibawa air hujan dalam kurun waktu lima musim penghujan, dengan asumsi bahwa selama lima musim penghujan (terhitung sejak bulan Desember 2010) Gunung Merapi tidak mengalami erupsi lagi. Ancaman banjir lahar dingin akan lebih tenggang musimnya apabila Gunung Merapi erupsi lagi sebelum tenggang waktu musim penghujan habis.

Bencana alam pascaerupsi Gunung Merapi dalam bentuk banjir lahar dingin yang terjadi di Kabupaten Magelang selatan di satu sisi dapat dikategorikan sebagai bencana alam murni (*pure natural disaster*), karena semata-mata merupakan akibat dari erupsi merapi yang berasal dari gerak magma dari dalam bumi yang tersalur melalui puncak Gunung Merapi. Akan tetapi di sisi lain juga dapat dikategorikan sebagai bencana karena ulah manusia (*menmade disaster*), karena adanya penebangan pohon dan eksploitasi pasir di lereng sebelah barat merapi. Sehingga ketika terjadi hujan deras deposit lahar yang berada di puncak gunung dengan mudah terbawa air hujan ke bawah tanpa penghambat, sehingga menimbulkan banjir lahar dingin yang menimbun pekarangan, perkebunan, dan tanah pertanian masyarakat di kaki Gunung Merapi, namun *pure natural disaster* atau *menmade disaster*, fakta menunjukkan bahwa korban telah terjadi, sehingga dengan adanya fakta korban, dari aspek sosial kemudian mendesak untuk dilakukannya pelayanan sosial agar dapat memulihkan kondisi kondisi kehidupan korban seperti saat sebelum terjadi bencana pasca erupsi.

Kerusakan dan Jumlah Korban: Jumlah korban keseluruhan akibat bencana alam pasca erupsi mencapai sebanyak 5006 orang, yang bernaung dalam 1.891 satuan keluarga. Rincian korban per kecamatan, dapat dideskripsikan dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Jumlah Korban Perkecamatan

No	Kecamatan	Lokasi	Jumlah Orang
1	Muntilan	5	1.802
2	Salam	4	1.825
3	Mungkit	1	565
4	Ngluar	1	479
5	Srumbung	3	335
Jumlah Total		14	5.006

Sumber:BDPB Kabupaten Magelang (2013)

Dari hasil wawancara secara random yang mempresentasikan pengungsian di 14 lokasi pengungsian, mereka sudah mendapat pelayanan sosial dalam bentuk pemberian bantuan uang sebesar Rp 4.500 dan 4 ons beras per hari/orang selama masa tanggap darurat kurang lebih tiga bulan. Namun pelayanan sosial untuk rehabilitasi rumah dan sumber penghidupan (kebun, sawah, ladang) mereka belum menerima sama sekali, padahal korban sudah tinggal di pengungsian selama lebih dari satu bulan. Beruntung korban masih dapat bantuan kebutuhan pokok sehari-hari dari posko bantuan yang berasal dari bantuan spontanitas masyarakat umum, sehingga dapat meringankan kekurangan kebutuhan hidup sehari-hari selama mereka melakukan rekonstruksi, rehabilitasi rumah dan sumber penghidupan mereka. Jumlah kerusakan rumah warga secara global dapat dideskripsikan dalam Tabel 3 berikut :

Tabel 3. Kerusakan Rumah Warga

No	Kecamatan	Jumlah Rumah	Kadar Kerusakan				
			Ringan	Sedang	Berat	Berat Sekali	Total
1	Muntilan	74	1	4	39	9	21
2	Salam	280	41	38	92	60	67
3	Mungkid	75	7	45	16	-	8
4	Ngluar	11	-	3	-	-	8
5	Srumbung	2	-	-	2	-	-
Jumlah		442	49	98	149	69	105

Sumber: BDPB Kabupaten Magelang (2013)

Di samping sejumlah rumah penduduk yang rusak dalam berbagai gradasi kerusakan, ada rumah penduduk yang rawan terancam rusak karena berdekatan dengan jalur sungai yang airnya berpotensi membawa material lahar dingin dari puncak Merapi. Rumah penduduk yang terancam bencana berada di wilayah Kecamatan Dukun, sebanyak 21 rumah di Desa Banyubiru satu (1) rumah, dan di Desa Banyudono 21

rumah. Infrastruktur yang mengalami kerusakan terdiri dari sembilan jembatan di Desa Talun, Gowoksabrang, Gondosuli, Gunung lemah, Bojong, Mendut, Mantingan, Tlatar. Jalan aspal yang rusak karena berubah menjadi sungai pasir ada di desa Mangunsuko, dan Sirahan. Jaringan yang listrik mengalami kerusakan di beberapa titik memutus telekomunikasi 281 sambungan telepon rumah. Peristiwa Bencana erupsi yang terjadi pada tahun 2011 tersebut berdampak pada berbagai kerusakan sosial ekonomi, yang belum direkonstruksi secara keseluruhan.

Bencana alam banjir lahar dingin di Kabupaten Magelang Selatan pada dasarnya tidak menimbulkan korban jiwa dan raga penduduk, tetapi merusak sumber ekonomi penduduk terutama dalam bentuk kerusakan lahan pertanian dan perkebunan, dan sumber usaha ekonomi di antaranya pertokoan, pasar, dan warung makan. Gambaran luasnya kerusakan lahan dan jenis tanaman pertanian penduduk tersaji dalam Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Luas Kerusakan Lahan dan Jenis Tanamam Pertanian

No	Jenis Tanaman	Dalam Hektar	No	Jenis Tanaman	Dalam Hektar
1	Padi	10.164	9	Brokoli	191
2	Jagung	5.781	10	Kobis	987
3	Ubi Kayu	2620	11	Buncis	240
4	Ubi Jalar	527	12	Kentang	118
5	Kacang Tanah	135	13	Tomat	209
6	Kacang Panjang	238	14	Wortel	323
7	Cabe Merah	1.000	15	Bawang	294
8	Cabe Rawit	247	16	Sawi	239
			17	Terong	68
Jumlah		20.712	Jumlah		2.669
Total Kerusakan Tanaman Pertanian 23.381 hektar					

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Magelang (2013)

Masing-masing jenis tanaman pertanian yang mengalami kerusakan kadang-kadang dapat menempati lahan yang sama dengan tanaman pertanian lain, sehingga lahan rusak yang ternominasi lebih luas dari luas lahan riil yang ada di Kabupaten Magelang Selatan karena adanya duplikasi perhitungan lahan pertanian setiap jenis tanaman. Kerusakan lahan pertanian yang tercatat merupakan tingkat kerusakan yang signifikan, dalam arti tanaman

pertanian dan perkebunan yang sejak dari tahap awal tanam, dan siap panen benar-benar mengalami kerusakan dan hampir tidak ada yang diharapkan hasilnya, sehingga setelah banjir lahar dingin, pemilik lahan benar-benar kehilangan sumber penghidupan dan hanya menggantungkan dari bantuan dan uang tabungan yang dimiliki. Penyebaran pengungsi dampak lahar dingin yang terkumpul di 14 lokasi penelitian dapat dideskripsikan dalam Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Penyebaran Pengungsi Korban Lahar Dingin

No	Tempat Pengungsi	Jumlah	Desa Asal
1	Balai desa dan Lapangan Jumoyo	716	Gempol, Kadirogo, Kemburan, Dowakan
2	Balai Desa Seloboro	95	Klumpukan, Krapyak, SMK Negeri 1
3	Gulon	483	Prebutan
4	Balai desa Tersangede	531	Candi, Gebayan, Krapyak
5	Tempat Pendidikan Al Quran Tanjung	1.119	Salakan, Gemampang, Sirahan, Jetis, Glagah, Grojogan
6	Balai Desa dan Sekolah Dasar Sriwedari	500	Trayem, Ngemplak Lor, Purwosari
7	Sudisari II adikarto	106	Sudisari
8	Tempat Pendidikan Al Qur'an	55	Sidoarjo Prumpung
9	Balai Desa Gongosuli	22	Ngipik
10	Rumah Kepala Desa Kamongan	147	Nganggrong
11	Rumah Kepala Desa Srumbung	68	Srumbung Krajan
12	Lapangan jomblangan Srumbung	120	Ngeloharjo
13	Balai Desa Ngrajek	566	Ngemplak
14	Gedung Olah Raga SD II Jamus	479	Gedolon
Jumlah		5.006	

Sumber: PPB Kabupaten Magelang (2013)

Pengungsi yang tinggal di tempat pengungsian adalah mereka yang menghadapi masalah tempat tinggal karena kerusakan rumah mereka sejak bencana erupsi dan pasca erupsi Merapi. Dalam menopang kebutuhan hidup mereka sehari-hari, pada siang bekerja dan berusaha seperti biasa kecuali bagi mereka yang tempat usaha dan kerjanya mengalami kerusakan. Pada saat malam hari mereka kembali ke pengungsian. Korban lahar dingin enggan tinggal di hunian sementara (huntara), penyediaan huntara

sejak erupsi merapi hanya sebagian kecil yang diminati korban, korban lebih memilih tinggal di tempat saudara yang rumahnya selamat dari lahar dingin, atau di tempat pengungsian yang lebih menjamin kebersamaan dengan warga terdampak. Dari penelusuran terhadap korban, keengganan tinggal di huntara ternyata di latar belakang oleh faktor sebagai berikut.

Huntara terletak jauh dari tempat korban biasa melakukan aktivitas kerja dan usaha sehari; Huntara bahan bangunannya tidak menjamin privasi, karena hanya terbuat dari anyaman bambu dan terpal kecil sehingga keberadaan dan aktivitas penghuni di dalamnya mudah dilihat oleh penghuni lain di sampingnya. Huntara tidak bisa melindungi sepenuhnya dari guyuran hujan deras, terpaan angin kencang, tembusan sinar matahari dari luar, dan gigitan udara dingin yang menjadi karakteristik cuaca di wilayah kaki gunung Merapi.

Korban yang terbiasa tinggal di rumah dengan batas tembok dan pekarangan yang luas merasa tidak nyaman tinggal di huntara. Kurang dari 15 persen dari korban pascaerupsi merapi yang bersedia tinggal di huntara. Mereka yang bersedia tinggal di huntara karena didorong oleh keterpaksaan tidak memiliki saudara untuk menumpang tinggal dan rumahnya rusak total oleh timbunan lahar dingin. Korban menghadapi dilema dalam bentuk, apabila ingin merehabilitasi rumahnya takut apabila banjir lahar dingin terjadi lagi, tetapi apabila tinggal di pengungsian terus menerus belum ada jaminan pelayanan dari pemerintah atau lembaga swasta (LSM) peduli korban merapi yang merencanakan untuk memberi pelayanan selama merekonstruksi dan merhabilitasi rumah tempat tinggal dan sumber penghidupan mereka.

Akses Sosial di Tengah Penderitaan Korban: Menyikapi bencana alam pasca erupsi, ternyata tidak sebatas memberikan pelayanan sosial kepada semua korban agar dapat kembali ke kondisi semula, tetapi ada akses sosial yang apabila tidak di perhatikan dan disikapi dapat membawa dampak kontra produktif terhadap keberhasilan pelayanan sosial yang di berikan bagi korban. Akses sosial tersebut secara konkret termanifestasi dari beberapa gelintir orang yang mencari keuntungan di tengah kesusahan

orang lain korban pasca erupsi, padahal beberapa gelintir orang tersebut meskipun hidup di daerah terdampak pasca erupsi, tetapi tidak menjadi korban.

Tinggal di Tenda Pengungsian: Ketika banyak orang menyelamatkan diri pergi ke tenda-tenda pengungsian yang jauh dari ancaman lahar dingin pasca erupsi, tidak semua orang yang tinggal di tenda merupakan korban dalam arti sebenarnya. Sebagian orang ke tenda dengan motivasi agar mereka mendapatkan pelayanan sosial, padahal tidak ada sebagian raga, jiwa, harta benda, dan sumber penghidupan mereka yang rusak sehingga berhak atas bantuan pelayanan sosial. Sejumlah orang tersebut sekedar ikut dalam euforia banjirnya berbagai bantuan, tanpa menjadi korban yang sebenarnya. Beberapa tetangga di sekitar yang mengetahui pun segan untuk melarangnya. Kehidupan masyarakat desa yang memiliki toleransi tinggi, termasuk terhadap sejumlah orang yang hanya ingin mendapatkan pelayanan sosial, menyebabkan akses sosial akibat bencana alam yang merongrong pemulihan kehidupan korban sesungguhnya sangat tinggi.

Kebutuhan Sosial Korban dan Kategori korban pasca erupsi: Dari hasil observasi kondisi korban pasca erupsi Merapi pada level mikro (perorangan), kategori korban dapat dipilah secara umum menjadi lima jenis kerugian. Kelima jenis kerugian akibat banjir lahar dingin pasca erupsi merapi tersebut dapat menimpa seorang korban. Kerugian raga, menyangkut luka ringan, luka berat tersembuhkan, dan cacat tetap. Kerugian jiwa, berkaitan dengan kondisi panik, trauma, dan perubahan mental psikologis secara temporal, dan perubahan mental-psikologis menetap. Kerugian harta benda diantaranya rumah dan perabotan rumah tangga. Kerugian sumber kehidupan diantaranya tempat usaha, kebun, dan sawah.

Kerugian Korban dan Kompensasi sebagai Pelayanan Sosial, pelayanan sosial bagi korban pasca erupsi pada level mikro (perorangan), kompensasi yang diberikan terhadap korban berupa materi yang sesuai dengan kebutuhan dan logis dengan jenis kerugiannya. Pelayanan sosial merupakan tindakan dan pemberian bantuan materi yang dapat berfungsi

mengembalikan kerugian korban yang sesuai dengan kebutuhan riil korban, dan yang lebih utama adalah bermanfaat bagi kehidupan korban. Dalam lingkungan wilayah yang secara riil menjadi tempat kejadian bencana alam, pelayanan sosial akan lebih efektif apabila secara administrasi ditangani oleh *stakeholder* yang ada di daerah, yang bekerja secara bersama-sama, sinergi, dan koordinatif. Banyak sedikitnya *stakeholder* yang terlibat dalam pelayanan sosial bagi korban bencana tergantung dari variasi kerugian korban. Jenis kerugian korban dan bentuk kompensasi pelayanan sosial yang dibutuhkan korban beserta *stakeholder* (lembaga) yang kompeten menangani dapat disistematiskan dalam Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Jenis Kerugian Korban dan Kompensasi-Stakeholder

No	Jenis kerugian	Jenis Kompensasi	Stakeholder
1	Raga	Obat-obatan dan pelayanan medis darurat/rujuk rumah sakit	Dinas Kesehatan
2	Jiwa	Pendamping psikologi/pekerjaan sosial	Dinas Sosial dan Kesehatan
3	Harta Benda	Bahan dan peralatan rehabilitasi bangunan	Dinas kimpraswil
4	Sumber Penghidupan	Peralatan rehabilitasi kebun, ladang, sawah, sarana irigasi dan perhubungan	Dinas Kimpraswil
5	Batas lahan pekarangan, dan sumberpenghidupan	Patok batu pembatas resmi	Badan Pertanahan Nasional Daerah
6	Gangguan keamanan harta benda	Perlindungan dan pengembalian kepemilikan	Kepolisian

Pelayanan sosial pada level makro merupakan bantuan kompensasi untuk pemulihan infrastruktur yang memiliki pengaruh besar bagi mobilitas dan pemulihan kehidupan masyarakat korban pasca erupsi merapi. Kerugian pada level makro berupa kerusakan jalan, irigasi, jembatan, jaringan listrik, jaringan telepon, dan sarana ekonomi (pasar). Pelayanan sosial juga mencakup pengendalian keamanan lingkungan dalam mengantisipasi kemungkinan adanya

beberapa orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengambil kesempatan di tengah kekacauan suasana akibat bencana alam banjir lahar dingin merapi, yang salah satunya termanifestasi dalam bentuk pencurian harta benda dan sejumlah barang bantuan korban. Jenis kerugian korban dan bentuk kompensasi pelayanan sosial secara makro yang dibutuhkan korban beserta *stakeholder* (lembaga) yang kompeten menangani dapat disistematiskan dalam Tabel 7:

Tabel 7. Jenis Kerusakan Infrastruktur–
Kompensasi–Stakeholder

No	Jenis kerusakan Infrastruktur	Jenis Kompensasi	Stakeholder
1	Jalan, sarana umum, jembatan, saluran irigasi	Batu, pasir, batu, besi	Dinas Kimpraswil
2	Jaringan telepon	Kabel dan tiang telepon	Telkom
3	Jaringan listrik	Kabel dan tiang listrik	PLN

Dalam pelayanan sosial secara riil ketika bencana alam pasca erupsi terjadi, disamping eksistensi *stakeholder* lembaga pemerintah juga hadir beberapa lembaga bukan pemerintah, yang terdiri dari organisasi sosial swasta (LSM) dan kelompok masyarakat yang secara spontan memiliki kepedulian terhadap korban pasca erupsi. Dari kasus korban bencana alam pasca erupsi merapi di lima Kecamatan Kabupaten Magelang (Muntilan, Salam, Mungkid, Ngluar, dan Srumbung) dan satu Kecamatan rawan terdampak bencana pasca erupsi (Dukun), lembaga pemerintah antar daerah dan lembaga bukan pemerintah (LSM) antar daerah dan antar negara hadir dalam memberi pelayanan sosial kepada korban. Mereka melakukan pelayanan sosial berkoordinasi dengan Badan Daerah Penanggulangan Bencana (BDPB) apabila memang memungkinkan dan melakukan secara langsung bagi masyarakat yang secara mendesak membutuhkan asistensi sosial. Manifestasi pelayanan sosial yang dilakukan secara umum dapat dibagi menjadi dua: Pertama, rekonstruksi dan rehabilitasi lingkungan termasuk rumah tempat tinggal, jalan umum, sungai, sarana irigasi, jembatan, pasar, pene-

rangan, dan telekomunikasi umum. Kedua, pemberian bantuan logistik berupa bahan makanan, pakaian, tenda tempat tinggal darurat, selimut, termasuk uang jaminan hidup selama proses adaptasi kembali ke kehidupan semula sebelum terjadi bencana.

Dari kajian empirik pelayanan sosial korban pasca erupsi merapi, distribusi bantuan logistik lebih efektif apabila di tekankan pada level Kabupaten, tidak pada level provinsi. Selain lokasi provinsi secara geografis sangat jauh dengan daerah terdampak sehingga pemantauan perkembangan situasi sulit dilakukan secara langsung dan responsif. Prosedur hirarkis realisasi pelayanan sosial dari level provinsi ke dusun tempat eksistensi korban berada secara riil juga panjang, padahal pelayanan sosial bagi korban membutuhkan proses yang cepat dan responsif. Ketidadaan lembaga pengendali pelayanan sosial yang kuat, berwibawa, dan paham secara mendalam tentang masalah penanganan sosial pada tingkat kabupaten, menyebabkan berbagai bantuan yang termanifestasi dalam berbagai jenis makanan ringan dan kemanfaatan tidak terbagi secara merata dan tidak sampai kepada korban menurut kebutuhan dan kerugian yang dihadapi.

Namun bagaimanapun pelayanan sosial yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintahan dan swasta, secara umum sangat bermanfaat bagi peringanan beban yang di derita korban pasca erupsi Merapi. Beberapa kekurangan dalam gerak pelayanan sosial setiap adanya bencana alam, termasuk bencana alam pasca erupsi merapi adalah kurangnya koordinasi antar lembaga dalam bentuk pelayanan sosial sinergi yang dapat saling mengisi dan menopang dalam membantu korban memulihkan kondisi kehidupannya. Sikap egoisme masing-masing lembaga membawa konsekuensi rentan terjadinya duplikasi bantuan dalam berbagai bentuk. Dari hasil pengamatan terhadap berlangsungnya distribusi bantuan, ada empat hal yang menjadi penyebab kacau-nya mekanisme distribusi bantuan: Pertama, egoisme masing-masing lembaga (pemerintah dan swasta) dalam mendekati korban. Kedua, antusiasme spontan masyarakat peduli korban yang asal memberi bantuan tanpa pertimbangan

kemerataan. Ketiga, lemahnya eksistensi BDPB dalam memetakan korban dan mengendalikan segala aliran bantuan. Keempat, korban bergerak sendiri-sendiri, baik secara perorangan maupun bersama mencari upaya bantuan. Beberapa lembaga pemerintah, swasta, dan kelompok spontanitas masyarakat yang aktif melakukan pelayanan sosial tersebut.

E. Penutup

Kesimpulan: Dari hasil penelitian korban pasca erupsi Gunung Merapi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebutuhan pelayanan sosial merupakan berbagai sikap dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang meliputi aspek: kejelasan tentang definisi, ruang lingkup, tindakan dan tahapan, kesimpulan yang dapat diajukan sebagai berikut. Pelayanan sosial korban pasca erupsi Gunung Merapi merupakan kompensasi dalam bentuk pemberian bantuan (materi), dan tindakan (non-materi) kepada korban sesuai dengan jenis permasalahan dan kebutuhan korban, bahkan bila mungkin menjadikan korban secara sosial lebih tahan terhadap ancaman bencana alam pada kemudian hari. Pelayanan sosial secara kongkret termanifestasi dalam bentuk pemulihan kondisi raga, kejiwaan (psikis), harta benda, sumber penghidupan, dan infrastruktur yang bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pemulihan kondisi kehidupan korban. Pelayanan sosial terbagi dalam dua lingkup, mikro yang menyangkut kondisi korban secara perorangan (individu) dan makro yang menyangkut infrastruktur (irigasi, jembatan, jalan, penerangan dan telekomunikasi umum, pasar) dalam kaitan dengan pemulihan kehidupan masyarakat. Pelayanan sosial termanifestasi dalam bentuk pemberian bantuan kepada korban dalam bentuk materi (bahan makanan, pakaian, perangkat tidur, uang saku peralatan rehabilitasi fisik sumber kehidupan, obat-obatan, tenda, rumah hunian sementara) dan dalam bentuk tindakan (terapi kesehatan psikologi, hiburan, pembenahan sarana penerangan dan telekomunikasi). Pemangku tanggung jawab (*stakeholder*) demi terlaksananya pelayanan sosial secara terencana, terpadu, dan terarah membutuhkan keterlibatan berbagai lembaga

pemerintah dan berbagai lembaga swadaya masyarakat peduli korban bencana alam pasca erupsi gunung merapi. Ujung tombak implementasi pelayanan sosial pada prakteknya sangat bertumpu pada peranan kepala dusun, rukun warga dan rukun tangga, karena ketiga aparat tersebut merupakan pejabat administrasi pada tingkat pemerintahan paling bawah yang mengetahui secara langsung kondisi lingkungan masing-masing warganya akibat dampak bencana alam pasca erupsi merapi.

Rekomendasi: Mengacu pada kesimpulan tentang kebutuhan pelayanan sosial yang meliputi definisi, ruang lingkup, tindakan, dan tahapan. Aparat atau individu yang melakukan pelayanan sosial bagi korban pasca erupsi Gunung Merapi sebaiknya memahami secara mendalam tentang orang yang termasuk kategori korban pasca erupsi, termasuk kategori (raga, jiwa, harta benda, sumber penghidupan) dan gradasi kerugian (ringan, sedang, berat, sangat berat) yang dialami korban pada level mikro (perorangan) dan makro (umum), agar pelayanan sosial dapat diberikan secara cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan masing-masing korban. Lembaga baik pemerintah maupun swasta, yang menjadi pemangku tanggung jawab (*stakeholder*) dalam pelayanan sosial pasca erupsi merapi, seharusnya bertidak dalam satu koordinasi pada level kabupaten/kota tempat bencana alam erupsi terjadi. Koordinasi dalam satu lembaga diperlukan agar bantuan dapat menyentuh korban secara merata, terstandar satuan pelayanan sosial, sampai secara langsung pada korban, menjawab permasalahan, kebutuhan korban, dan serentak distribusinya. Sebagai ujung tombak dalam melakukan mediasi pelayanan sosial, fungsi kepala dusun, rukun warga, dan rukun tangga perlu dimaksimalkan, karena aparat pemerintah yang paling bawah (kepala dusun, RT, RW) tersebut yang paling mengetahui kondisi masing-masing warga di lingkungannya.

Pustaka Acuan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), (2013). *Merapi Pemulihan Penghidupan Warga Pasca Letusan 2010*. Yogyakarta: UNDP Indonesia.

- Carter, William Nick (1991). *Bencana Alam*. www.google.co.id diakses tgl 21 April 2012.
- Dian Widyaningrum (2007), *Bencana Alam*. Bulentin Malimpa. Edisi 1/II/2007.
- Morrow, Jason (2011), *Faktor Penyebab Bencana*, www.http://blueskywinter.blogspotcom.
- Gunanto Surjono (2013), *Merancang Kebijakan Sosial Menejemen Pengurangan Resiko Bencana*, Yogyakarta: Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial.
- Hadi Purnomo dan Ronny Sugiantoro, (2010), *Managemen Bencana dan Tindakan Ter-hadap Bencana*, Yogyakarta: Metpress
- Kementerian Sosial.go.id. (21008). *Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial*, www.google.go.id. Diakses 21 Maret 2013.
- Quarentelli. (1998). *Mayor Criteria for Judging Disaster Planning and Their Applicability in Developing Societies*. Delaware: University of Delaware.
- Sunit Agus Tricahyano, (2011), *Kajian Faktor Penyebab dan Dampak Sosial Bencana Banjir Bandang di Wasior*, Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Wahlstrom, Margareta (2013), *Counting Economic Losses from Disaster*. Jakarta: Gramedia.

